

Milik Departemen P dan K
Tidak diperdagangkan

SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH JAWA TENGAH



PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dr-09/398

Perpustakaan
Direktorat Perlindungan dan
Pembinaan Peninggalan
Sejarah dan Purbakala

SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH JAWA TENGAH

959.82
Mar
S

PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN KEBUDAYAAN DAERAH
PUSAT PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1977 / 1978

P E R P U S T A K A A N		
Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala		
NO. INDUK	2068	Asal
T G L.	7 Mei	1984

PENGANTAR

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam tahun anggaran 1977/1978 kegiatannya telah dapat menjangkau seluruh Indonesia.

Proyek ini bertujuan:

"Mengadakan penggalan, penelitian, dan pencatatan warisan budaya guna pembinaan, pengembangan dan ketahanan kebudayaan nasional".

Adapun sasaran proyek ini ialah:

Untuk menghasilkan 5 (lima) buah naskah dari masing-masing daerah yakni:

- Sejarah Daerah, dengan tema SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL
- Adat-istiadat Daerah, dengan tema ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN
- Geografi Budaya Daerah, dengan tema PENGARUH MIGRASI PENDUDUK TERHADAP PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH
- Ceritera Rakyat Daerah, dengan tema TOKOH MITOLOGIS DAN LEGENDARIS
- Ensiklopedi Musik/Tari Daerah.

Kegiatan proyek ini dibagi atas dua, yaitu:

Kegiatan di Pusat, meliputi:

Koordinasi, pengarahan/penataran, konsultasi, evaluasi serta penyempurnaan naskah.

Kegiatan di Daerah meliputi:

Survei lapangan sampai dengan penyusunan naskah lima aspek seperti tersebut di atas.

Pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dapat disesuaikan tepat pada waktunya, sehingga pada akhir tahun anggaran 1977/1978, proyek dapat menghasilkan naskah ini.

Meskipun demikian kami menyadari bahwa naskah-naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tingkat atau tahap pencatatan, sehingga di sana-sini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Kerjasama antara proyek dengan semua pihak, baik dari Perguruan Tinggi, Kanwil Dep. P. dan K. di daerah, Pemerintah

Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, LEKNAS, LIPI, dan Tenaga Ahli Perorangan, telah dapat dibuktikan dan diwujudkan dalam naskah-naskah ini.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH ini, kami perlu menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah, Bidang Kesenian, Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan, Departemen P. dan K. Propinsi Jawa Tengah
2. Pimpinan Perguruan Tinggi di Semarang Propinsi Jawa Tengah
3. Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah
4. Pimpinan serta segenap staf Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Propinsi Jawa Tengah
5. Tim Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Propinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari:
 1. Hartono Kasmadi
 2. Wiyono
 3. Hugiono
6. Tim penyempurna naskah di Pusat, terdiri dari:
 - Konsultan/Anggota : 1. Prof. Dr. I.B. Mantra
 - : 2. Dr. Astrid S. Susanto
 - 3. Abdurrachman Surjomihardjo
 - 4. A.B. Lopian
 - Ketua : Sutrisno Kutoyo
 - Sekretaris : M. Soenjata Kartadarmadja
 - Anggota : 1. Anhar Gonggong
 - 2. Mardanas Safwan
 - 3. Masjkuri
 - 4. Surachman
 - 5. Muchtaruddin Ibrahim
 - 6. Sri Sutjiatiningsih
7. Editor : 1. Mardanas Safwan
2. Sutrisno Kutoyo
8. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan naskah ini.

Akhirnya perlu kami kemukakan bahwa dengan terbitnya naskah ini mudah—mudahan ada manfaatnya terhadap bangsa dan negara kita.

**Pemimpin Proyek Penelitian dan
Pencatatan Kebudayaan Daerah,**

**Bambang Suwondo
NIP 130117589**

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR	i
PENDAHULUAN	1
A. TUJUAN PENELITIAN	1
B. M A S A L A H	1
C. RUANG LINGKUP	2
D. PERTANGGUNG—JAWABAN ILMIAH PROSEDUR PENELITIAN	2
E. HASIL AKHIR	2
BAB I. KEADAAN DAERAH JAWA TENGAH PADA AKHIR ABAD XIX	4
A. PEMERINTAHAN	4
B. SOSIAL BUDAYA	8
C. KEHIDUPAN EKONOMI	10
D. PERKEMBANGAN ALAM PIKIRAN DAN KEPERCAYAAN	14
BAB II. KEADAAN DAERAH JAWA TENGAH DARI TAHUN 1900 – 1928	16
A. PENGARUH POLITIK ETIS DI DAERAH	16
1. Undang—undang disentralisasi 1903	17
2. <i>Ontvoogding Ordonnantie</i> tahun 1918	20
3. <i>Pembentukan daerah Otonomi Propinsi</i> <i>dan Kabupaten tahun 1922</i>	21
4. <i>Daerah Otonomi kota besar Semarang</i>	22
B. KEGIATAN MASYARAKAT DAN PERMULAAN KEBANGKITAN NASIONAL DI DAERAH JAWA TENGAH	23
1. <i>Keadaan Pendidikan pada tahun 1900</i>	23
2. Permulaan Pergerakan Nasional di daerah Jawa Tengah	28
C. INTERAKSI DI DAERAH JAWA TENGAH DENGAN BERDIRINYA PARTAI DAN ORGANISASI	33
1. <i>Budi Utomo</i>	33
2. <i>Indische Partij</i>	38
3. <i>Sarekat Islam (SI)</i>	39
4. <i>Gerakan Perburuhan</i>	54

5.	<i>Partai Komunis Indonesia</i>	62
6.	<i>Pergerakan Muhammadiyah</i>	64
7.	<i>Pergerakan Taman Siswa</i>	75
8.	<i>Organisasi Kependudukan</i>	85
9.	<i>Pergerakan Wanita</i>	100
 BAB III. KEADAAN DI DAERAH JAWA TENGAH		
SEKITAR PERANG DUNIA I (1914-1918)		
DAN PENDIRIAN VOLKSRAAD		107
A.	SIKAP PEMERINTAH BELANDA DAN PEN- DIRIAN VOLKSRAAD TAHUN 1918	107
B.	SIKAP PERGERAKAN NASIONAL TERHADAP VOLKSRAAD DAN POLITIK PEMERINTAH BELANDA SETELAH TAHUN 1920	114
C.	PERJUANGAN DI DAERAH TAHUN 1925-1928	115
1.	<i>Nahdlatul Ulama (NU)</i>	115
2.	<i>Pemberontakan Tahun 1926/1927</i>	119
3.	<i>Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Per- himpunan Partai-partai Politik Kebang- saan Indonesia (PPPKI)</i>	122
D.	POLITIK PEMERINTAH KOLONIAL TERHADAP PERGERAKAN NASIONAL	134
 BAB IV. KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN		
1928-1942		136
A.	PENGARUH POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELANDA ± 1930	136
1.	<i>Politik keras terhadap gerakan non- kooperasi</i>	136
2.	<i>Undang-undang sekolah Swasta</i>	138
B.	DEPRESI EKONOMI DI DAERAH	141
C.	INTERAKSI TERHADAP KEPARTAIAN / ORGANISASI	145
1.	<i>PNI - Baru</i>	145
2.	<i>Partai Indonesia (Partindo)</i>	147
3.	<i>Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)</i>	147
4.	<i>Parindra atau Partai Indonesia Raya</i>	149
5.	<i>Petisi Sutarjo</i>	150
6.	<i>Aksi Indonesia Berparlemen</i>	152

BAB V. KEADAAN DI DAERAH JAWA TENGAH MENJELANG KERUNTUHAN PEMERIN- TAHAN HINDIA BELANDA DAN KEDA- TANGAN TENTARA JEPANG.....	154
A. SIKAP PEMERINTAH HINDIA BELANDA	154
B. SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PE- MERINTAH HINDIA BELANDA	156
C. KEDATANGAN PASUKAN PENDUDUKAN JEPANG	157
1. <i>Propaganda Jepang terasa di daerah</i>	157
2. <i>Waktu kedatangan Pasukan Jepang</i>	158
3. <i>Sikap Jepang terhadap aparatur Peme- rintah Hindia Belanda</i>	158
4. <i>Sikap Jepang terhadap Bangsa Indonesia</i>	160
5. <i>Sikap Bangsa Indonesia terhadap Jepang</i>	161
BAB VI. P E N U T U P	164
CATATAN BAB II DAN BAB III	171
DAFTAR BIBLIOGRAFI	184

PENDAHULUAN

A. TUJUAN PENELITIAN

Sejarah bangsa-bangsa di Asia pada abad XVIII dan XIX memperlihatkan kelemahan dan kemiskinan akibat dijajah oleh bangsa kulit putih/Eropa. Kelebihan bangsa Eropa lebih ditonjolkan seperti yang ditulis dalam buku "45 tahun Sumpah Pemuda":

"Sedangkan bangsa Eropa, bangsa kulit putih, bangsa penjajah merupakan bangsa yang sombong yang memiliki perasaan super solah-olah dialah yang terpandai di dunia dan tidak dapat dikalahkan oleh bangsa berwarna" (halaman 21)

Akan tetapi rasa superior ini tidaklah tetap, sebab pada awal abad ke - 19 kebangkitan bangsa-bangsa terjajah mulai timbul.

Dalam penelitian sejarah tematis, Zaman Kebangkitan Nasional di daerah, kami akan berusaha mengumpulkan dan menyusun sejarah daerah pada zaman kebangkitan nasional, untuk melengkapi dan mencari konsep-konsep yang relevan, walaupun pekerjaan itu tidak lebih mudah dari menyusun sejarah nasional.

B. MASALAH

Sejarah Kebangkitan Nasional yang merupakan sebagian dari episode sejarah perjuangan bangsa Indonesia, mempunyai nilai yang paling menentukan dalam perjalanan kehidupan bangsa selanjutnya. Oleh karena dari titik perjuangan periode inilah mulai disadari kebutuhan akan adanya bangsa yang satu, berdaulat, merdeka, dan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa mana pun di dunia, termasuk bangsa yang menjajah di bumi Indonesia. Diakui bahwa kebangkitan nasional timbul di seluruh wilayah Nusantara, akan tetapi sebagian besar ia lahir dan tumbuh di pulau Jawa. Hal ini tidaklah sulit untuk dimengerti oleh karena pemuda-pelajar penggerakanya berpusat di tempat pendidikan di kota-kota Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Surakarta dan Semarang), sehingga sebenarnya sulit untuk menyusun periode tematis ini, sebab terjadi hal yang saling mempengaruhi antara peristiwa sejarah daerah dan *impactnya* terhadap sejarah nasional, atau juga sejarah

nasional mengambil separuhnya peristiwa penting di daerah. Demikian pula tokoh pelaku sejarah tidak berpikir kemerdekaan untuk hanya Jawa Tengah.

C. RUANG LINGKUP

Sesuai dengan masalah yang diungkapkan di atas, maka ruang lingkup penelitian dan penulisan akan terbatas pada wilayah pengaruh Jawa Tengah dengan batasan waktu periode kebangkitan nasional antara tahun 1900 – 1942. Yang akan diungkap terutama latar belakang perjuangan daerah pada akhir abad ke - 19 dan interaksi peristiwa kebangkitan nasional di daerah Jawa Tengah dan pengaruh politik Belanda pada tahun 1930.

D. PERTANGGUNG JAWABAN ILMIAH PROSEDUR PENELITIAN

1. Penelitian dan penulisan ini akan ditekankan pada pengumpulan dan pengolahan data sekunder dari literatur dan keterangan-keterangan responden yang relevan dengan peristiwa kesejarahan 1900 - 1942.
2. Dari data yang diperoleh ternyata tidak dapat dilepaskan sama sekali impact nasional dalam penyusunannya.
3. Di samping data tersebut jika dipandang perlu juga masih ditumbuhkan analisa data dari tanggapan atau keterangan para ahli yang walaupun bukan pelaku sejarah periode itu sendiri, akan tetapi dianggap memiliki visi tajam terhadap ruang lingkup dan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini.
4. Mengingat waktu yang tersedia, tidaklah mungkin untuk meneliti seluruh wilayah, akan tetapi cukup dengan memilih daerah yang dianggap akan mewakili dan memegang peranan penting dalam peristiwa sejarah periode 1900 - 1942.

E. HASIL AKHIR

Buku ini merupakan hasil akhir dari suatu rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan sejak semula, seperti yang dapat dilihat pada pola penelitian dan kerangka laporan Proyek

Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah 1971/1978. Mula-mula naskah buku ini disusun oleh tim peneliti di daerah Jawa Tengah, dan pada tahap berikutnya mengalami proses penilaian yang ditangani oleh tim pusat, tenaga ahli, maupun tim peneliti daerah sendiri. Selanjutnya diikuti oleh proses penyempurnaan secara menyeluruh. Pada kegiatan penyempurnaan itu, juga diperhatikan segi bahasa, dengan mengusahakan supaya kalimat-kalimatnya dapat menjadi lebih lugas dan lancar. Sementara itu berbagai istilah diberi pengertian yang lebih umum, demikian pula diusahakan agar sejauh mungkin mengikuti peraturan bahasa dan cara menulis seperti yang terdapat pada ejaan yang disempurnakan.

Satu segi yang menduduki tempat penting dalam rangka penelitian dan penyempurnaan naskah ini ialah segi pendekatan yang merupakan kriteria utama. Penulisan sejarah daerah dengan menggunakan pendekatan regiosentris, merupakan syarat yang sungguh wajar.

Berpegang pada kaidah tersebut, maka dalam buku ini kelihatan bahwa usaha mengadakan pendekatan secara regiosentris itu sudah dilakukan, sehingga dapat memberi pengertian yang jelas tentang berbagai aspek kehidupan di masa lampau seperti yang pernah terjadi di Jawa Tengah, khususnya mengenai sejarah kebangkitan nasional.

Selanjutnya cara menyajikan bahan dengan menggunakan metode berkisah, merupakan cara yang baik, supaya terjadi komunikasi antara penyusun dengan pembaca. Cara demikian dapat dirasakan kehadirannya pada naskah ini, sehingga data dan fakta yang diungkapkan tidak terasa lepas-lepas dan berdiri sendiri, tetapi telah diramu dalam suatu kisah yang kait-mengait dengan dasar logis, lancar, dan terbaca.

Kemudian perlu dikemukakan bahwa buku ini pada hakekatnya mempunyai kecenderungan untuk berkualitas sebagai identifikasi data dasar, meskipun di dalamnya termuat cukup banyak data dan fakta sejarah daerah Jawa Tengah, mengenai sejarah kebangkitan nasional, dan yang tersusun dalam suatu kerangka seperti dikehendaki oleh *term of reference* itu sendiri.

Secara keseluruhan buku ini sebagai hasil Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah 1977/1978 dapat diharapkan akan memberi dorongan positif untuk usaha penggalan sejarah di masa depan.

B A B I

KEADAAN DAERAH JAWA TENGAH PADA AKHIR ABAD XIX

A. PEMERINTAHAN

Menjelang akhir tahun 1900 pemerintah Belanda beranggapan bahwa sistem liberal pada masa awal penjajahannya tidak sesuai lagi, dengan timbul suara-suara untuk memberikan corak, yang berlainan dalam sistem pemerintahan di negara jajahan Hindia Belanda. Dua dasar pokok yang banyak dikemukakan, adalah :

1. Banyak pedagang pengusaha yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat, dimana mereka lebih menitik-beratkan pada kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri, dan mempertahankannya dengan berbagai cara.
2. Telah seharusnya, bahwa Pemerintah Belanda mulai memikirkan kehidupan dan tanggung-jawab terhadap penduduk tanah jajahan Hindia Belanda.

Tanggapan ini umpamanya tertera dalam risalah "*Ons Program*" dari Dr. Abraham Kuyper yang terbit dalam tahun 1880. Kemudian dituang dalam keputusan mahkota pada tahun itu juga. Politik baru dalam sistem pemerintahan negara jajahan Hindia Belanda terkenal dengan *Ethical Policy* (Dasar Keadilan). Timbul pula gerakan yang disponsori oleh anggota-anggota Sosialis Belanda untuk memulai dibentuknya sistem pemerintahan Kerajaan Hindia Belanda yang berdiri sendiri. Kesan yang lebih mendalam adalah buah pikiran C. Th. van Deventer dari Partai Liberal, yang bukan saja menghendaki banyaknya orang-orang bumiputera (Indonesia) bekerja pada badan-badan pemerintahan; lebih jauh, ia mengatakan bahwa hasil keuntungan dari sistem tanam paksa (*batig saldo*), harus dibayarkan kembali ke tanah jajahan untuk memperbaiki kehidupan penduduk dan rakyat jajahan. Dengan demikian maka sejak 1903 mulailah sistem pemisahan kekuasaan dan dalam tahun 1904 - 1905 telah dimulai masuknya persoalan bangsa Indonesia dalam majelis / parlemen, yang berlainan dengan sistem yang direncanakan oleh Gubernur Jenderal Miyer pada usulan kepada Mahkota Belanda dalam tahun 1867; Perang Dunia I telah memisahkan hubungan Batavia (Indonesia) dengan Belanda (Hague). (DGE HALL, Sejarah Asia Tenggara, hal. 894).

Konsekuensi dari tata pemerintahan yang baru ini maka di Jawa Tengah telah lahir pemerintahan setempat yang diatur oleh Undang-Undang Desentralisasi.

Menurut Furnivall, maka sistem desentralisasi dan tuntutan otonomi ini mengandung 3 arti penting, yakni:

1. Penyerahan kekuasaan dari Pemerintah Belanda kepada departemen dan pejabat setempat, dari pegawai Belanda kepada pegawai bumi-putera.
2. Pembentukan badan pemerintahan yang mempunyai kekuasaan otonom yang bekerjasama dengan Pemerintah Belanda, sehingga dapat mengurus urusannya sendiri.
3. Pemisahan anggaran keuangan umum dan anggaran keuangan daerah di dalam negara swapraja.

Arti dari pemisahan ini, maka hal pertama di atas memberikan pemerintah desentralisasi administratif dan bertujuan mencapai efisiensi yang lebih besar, sedangkan yang kedua adalah sifat politik yang menuju tercapainya sebagian otonomi. Secara umum, maka sistem pemerintahan yang terjadi adalah sebagai berikut

1. Gubernur Jenderal bertanggung-jawab kepada Raja Belanda dan mewakili raja di Batavia. Sedangkan Menteri Urusan Negara Jajahan di Negeri Belanda bertanggung jawab kepada Parlemen Belanda tentang tindakan Pemerintah Hindia Belanda di Batavia.
2. Gubernur Jenderal dibantu oleh *Raad van Indie* (Dewan Hindia), yang anggota-anggotanya diangkat oleh anggota-anggotanya diangkat oleh raja dan mempunyai kekuasaan untuk memberikan nasehat/pertimbangan yang tidak mengikat kepada Gubernur Jenderal
3. Di bawah Gubernur Jenderal terdapat departemen yang berupa:
 - a. Pemerintahan Umum, terdiri dari Keuangan dan Pemerintahan.
 - b. Dalam Negeri : terdiri dari Pekerjaan Umum, Pendidikan, Agama, Industri, Kehakiman, Urusan Militer, dan Urusan Angkatan laut.
4. Gubernur Jenderal akan membawahkan beberapa karesidenan.
5. Setiap karesidenan diperintah oleh seorang Residen

yang mempunyai staf : Asisten Residen yang membawahkan daerah *Afdeeling*; dan *controleur* yang mengawasi pemerintahan di tingkat distrik (kawedanan) dan onder-distrik.

6. Di bawahnya terdapat pejabat golongan bumiputera/priyayi, yakni Bupati, Wedana, Asisten Wedana yang sudah barang tentu dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni para priyayi yang paling tidak telah menjalani pendidikan OSVIA (Sekolah Pamongpraja) dan harus mulai pengabdianya dari pangkat paling rendah, yakni Juru Tulis.

Khusus untuk jabatan Bupati pada waktu itu masih bersifat turun-temurun.

Undang-Undang Desentralisasi tahun 1903 dimaksudkan untuk memberikan hak otonomi dan pembentukan dewan daerah pada setiap *gewest* (Karesidenan) dan *Gemeente* (Kota Besar). Pelaksanaan di Indonesia diatur dengan *Desentralisatie Besluit* yang termuat dalam *Staats blad* 1905 No. 137)*.

Penunjukkan daerah otonom terbagi dalam dua macam, yakni :

1. Daerah Karesidenan Otonom yakni :
 - a. Stbl. 1907 / no. 136 untuk Karesidenan Banyumas
 - b. Stbl. 1908 / no. 174 untuk Karesidenan Pekalongan
 - c. Stbl. 1908 / no. 177 untuk Karesidenan Kedu
 - d. Stbl. 1908 / no. 175 untuk Karesidenan Semarang
 - e. Stbl. 1907 / no. 134 untuk Karesidenan Rembang
2. Daerah Kota Otonomi.
 - a. Stbl. 1906 / no. 120 untuk kota Semarang
 - b. Stbl. 1906 / no. 123 untuk kota Tegal
 - c. Stbl. 1906 / no. 125 untuk kota Pekalongan
 - d. Stbl. 1906 / no. 125 untuk kota Magelang

Daerah kota otonom ditunjuk dengan syarat ia adalah kota besar dan mempunyai penduduk Eropa yang cukup banyak dan di samping itu berdekatan dengan wilayah perkebunan / onderne-ming gula, kopi, dan sebagainya. Dalam perkembangannya menunjukkan bahwa kota otonomi lebih baik keadaannya jika dibandingkan dengan keadaan perkembangan daerah karesidenan otonomi. Hal ini mungkin disebabkan beberapa faktor, umpamanya bahwa ketua *Gemeenteraad* bukanlah pegawai pemerintah, ia adalah seorang *burgermeester* dan mempunyai wilayah yang

tidak begitu luas.

Kotapraja (*Gemeenteraad*) selalu dilihat oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai "kantor orang-orang Barat dan mempunyai sifat kebarat-baratan. Mereka pun telah membagi kursi dalam keanggotaan Dewan Kota sehingga mayoritas Barat / orang Eropa selalu terjamin. Dalam *Staatsblad* no. 674, tahun 1918 mulai terlihat suatu perkembangan kehidupan pemerintahan kotapraja, yakni pengeralahan kekuasaan otonom dan desentralisasi lebih luas dengan pimpinan tetap orang Eropa, sedangkan pegawai sudah menggunakan tenaga bumiputera. Pemikiran ini sebenarnya sudah ada sejak usul dari de Graaf, wakil Direktorat Kepegawaian pada tahun 1905).

Dengan *Ontvoogding Ordonnantie* 1918, untuk beberapa daerah kabupaten pimpinan telah diserahkan kepada orang-orang Indonesia, yakni bupati dengan suatu ketentuan ia adalah orang yang telah mendapat pendidikan yang cukup Bidang-bidang yang diserahkan untuk diurus secara luas adalah Agraria. Izin mengadakan keramaian, pengangkatan pegawai rendah (juru tulis, lurah, agen polisi), dan penetapan pajak, sedang urusan yang lebih penting ada di tangan orang Belanda.

Di Jawa Tengah, kabupaten yang mendapat perlakuan menurut *Staatsblad* 1918 adalah :

Staatsblad 1919 No. 668 – Kabupaten Banyumas.
Staatsblad 1919 No. 804 – Kabupaten Blora.
Staatsblad 1920 No. 45 – Kabupaten Batang.
Staatsblad 1920 No. 480 – Kabupaten Jepara.
Staatsblad 1920 No. 608 – Kabupaten Kebumen.

Setelah Perang Dunia I maka perundang-undangan desentralisasi 1903 dirasakan sudah tidak memadai lagi. Maka pada tahun 1922 dikeluarkan peraturan reorganisasi pemerintahan dengan nama *Bestuurs hervormingswet* (*Staatsblad* No. 216) pasal 119, 120, 121, 122. Dengan ini dimungkinkan pembentukan daerah otonomi yang lebih besar dari "gewest menurut Undang-undang 1903" yang dalam bentuk propinsi, di mana berdasarkan Undang-undang telah dibentuk tiga propinsi untuk daerah Jawa-Madura, yakni Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kabupaten dan kotapraja masih tetap ada, akan tetapi bentuk karresidenan dihapuskan (Stbl. 2974 - 78 perubahan terakhir tahun 1940 No. 226, 251, Stbl. 1926 No. 365 dengan Perubahan

terakhir tahun? — Stbl. No. 140 — 226; dan Stbl. 1926 No. 365 perobahan terakhir tahun 1940 No. 226 dan tahun 1948 No. 195). Contoh Struktur Kotapraja:

Semarang: dengan *Staatsblad* tahun 1906 No. 120 Pemerintahan Kotapraja Semarang diperintah oleh Walikota (*Burgermeester*), Badan Pengurus Harian (*College van Burgermeester en Wethouders*); Dewan Kota (*Gemeenteraad*) yang berjumlah 15 orang Belanda; 8 orang Indonesia dan 4 orang asing keturunan Timur. Walikota mempunyai kedudukan yang kuat, karena ia bertanggung jawab atas semua pegawai dan badan yang ada, dan diangkat dari pejabat Asisten Residen. Walikota diangkat oleh pemerintah pusat dengan syarat-syarat: Laki-laki paling sedikit berusia 30 tahun; sedangkan untuk keanggotaan balaikota, paling sedikit berusia 21 tahun, dapat membaca dan menulis dalam bahasa Belanda, Melayu dan bahasa daerah setempat; serta bertempat tinggal di daerah yang bersangkutan.

Asisten Residen yang merangkap sebagai Walikota sampai dengan 1915 adalah : Antara tahun 1906-1910 - LR Priestor. Antara tahun 1910 - 1913 - PKW Kern.

Antara tahun 1913 - 1914 - Van der Ent.

Antara tahun 1914 - 1915 J.W. Meyer Banneft.

Pada tahun 1916 Dewan Kotapraja mengajukan 3 calon pemerintah pusat (Gubernur Jenderal), yakni Ir. D. de Zongh, Mr. Meijroos dan Hilde ring. Dan yang terpilih sebagai walikota pertama adalah Ir. S de Zongh yang memegang jabatan tersebut selama 11 tahun yakni sampai dengan tahun 1927. Sampai dengan tahun 1942 terdapat dua orang pejabat Walikota lagi yakni : 1927 - 1936 - A. Bagehus 1936 - 1942 - H.R. Boissevain.

B. SOSIAL BUDAYA

Pada abad ke - 19 belum ada pendidikan untuk rakyat yang bersifat modern dan pendidikan yang ada masih bersifat tradisional. Pendidikan pada waktu itu banyak diselenggarakan di surau (pesantren) atau lebih dikenal pendidikan pondok. Dalam pendidikan itu yang diutamakan ialah pendidikan suci watak atau budi pekerti yang didasarkan atas ajaran agama dan membaca kitab suci Al Quran. Kecakapan berhitung dan membaca serta menulis dalam huruf latin belum mendapat perhatian. Cara berpikir masih dipengaruhi oleh pandangan hidupnya yang masih

bersifat kepercayaan tradisi, dan oleh karena itu pendidikan nya masih sedikit pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian pendidikan suarau ini banyak juga gunanya karena dapat menghasilkan orang yang kuat imannya, giat bekerja, dan keras kemauannya. Mereka yang berpendidikan mendapat kehormatan di kalangan masyarakat, menjadi pemimpin di dalam kemasyarakatan dan keagamaan. Di dalam pergolakan sosial sering mereka menjadi pemimpin masyarakat, lebih-lebih dalam perlawanan menghadapi Belanda, seperti dalam Perang Diponegoro. Pendidikan surau ini tidak merata, hanya di daerah-daerah yang ada suraunya atau mesjid, begitu pun tidak banyak muridnya, karena belum ada kewajiban, dan oleh karena itu sering dilaksanakan secara sambilan saja. Di dalam keraton, pendidikan diselenggarakan untuk kepentingan kerabat keraton, yaitu untuk para bangsawan. Sistem pendidikan itu bersifat perorangan (individual), pendidikan tidak diadakan di dalam kelas tetapi dalam pondok-pondok. Peranan guru besar sekali, murid-murid mencari guru untuk belajar dan oleh karena itu dikenal sebagai *meguru* yang berarti mencari pengetahuan dari guru. Bila diperhatikan dari jumlah penduduk pada waktu itu maka jumlah tempat pendidikan belum memadai, rakyat masih banyak yang buta ilmu, anak-anak hanya mengikuti jejak orang tuanya, hidup sebagai petani, kuli atau buruh, dan hampir-hampir tidak ada perubahan dalam hidupnya. Kebodohan merupakan salah satu penyebab kemiskinan.

Pada abad ke-19 Pemerintah Belanda belum menaruh perhatian terhadap pendidikan rakyat, begitu pula pemerintah tradisional yang dibawah bupati serta punggawa kurang sekali, bahkan tidak memperhatikan lagi kemajuan rakyatnya. Para bupati tanpa disadari telah dijadikan alat oleh Pemerintah Belanda, terlalu sibuk mengumpulkan pajak yang diwajibkan atau dibebaskan kepada rakyat yang hidup dalam kemelaratan, sedangkan para bupati dan punggawa-punggawa hidup mewah. Begitu pula ada unsur kesengajaan dari Pemerintah Belanda agar rakyat tetap bodoh, karena apabila rakyat menjadi pandai akibat pendidikan akan dianggap membahayakan kedudukan Pemerintah Belanda sendiri. Karena kebodohannya, kehidupan rakyat sangat dipengaruhi sifat-sifat serba penurut, serba takut dan terlalu mempercayakan diri terhadap nasib, dan kehidupan seni budaya hanya berkembang di kalangan keraton saja. Pujangga-pujangga keraton yang

terkenal pada abad ke - 19 ialah kiai Yasadipura I dan II yang merupakan ayah dan anak, serta R. Ng. Ranggawarsita cucu Yasadipura II. Di kalangan raja-raja yang terkenal sebagai pujangga ialah Paku Buwana III, Paku Buwana V, dan Mangkunegara IV.

C. KEHIDUPAN EKONOMI

Pada abad ke 19 rakyat dihadapkan pada tiga masalah yang berpengaruh sekali terhadap beban hidupnya. Ketiga masalah tersebut adalah masalah pajak, masalah tanah, dan masalah tenaga. Ketiga masalah ini dipergunakan oleh Belanda dalam usahanya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari tanah jajahan. Sejak Zaman VOC yang berkuasa hampir dua abad lamanya itu telah menggunakan cara yang meliputi ketiga masalah tersebut, sekali pun wilayah yang baru diduduki hanya meliputi kota pelabuhan seperti Jakarta (Batavia). Semarang, Surabaya, Makasar dan Ambon, namun pengaruh kekuasaannya meluas sampai ke desa-desa. Kekuasaan bupati dipergunakan sebagai alat untuk memerintahkan rakyatnya menyerahkan pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah kolonial. Sudah dengan sendirinya para bupati memerintahkan lagi kepada para pembesar bawahannya seperti wedana, kepu, demang sampai kepada bekel-bekel.

Saat itu kekuasaan VOC di Jawa Tengah berpusat di Semarang dan ibukota Kerajaan Surakarta serta Yogyakarta juga telah ada kantor perwakilannya. Raja-raja dan para bupati melalui perjanjian yang dipaksakan, diwajibkan membayar pajak hasil bumi atau *contingenten*.. Begitu pula bagi daerah yang dikuasai VOC secara tidak langsung diharuskan membayar sumbangan wajib atau *verplichte leverantien*. Kedua jenis pajak ini dibebankan kepada rakyat, dengan demikian VOC mudah mengumpulkan hasil bumi yang perlu bagi perdagangan. Setelah VOC dibubarkan, pemerintah tanah jajahan diambil alih oleh Pemerintah Belanda. Sistem monopoli dan politik dagang tetap dipertahankan, *Contingenten* dan *verplichte leverantien* tetap dilanjutkan karena memang dengan cara itu mudah untuk mendapatkan keuntungan. Di samping kedua sistem ini pemerintah kolonial menentukan sistem pajak borongan, di mana pemerintah menjual tanah kepada tuan-tuan tanah. Kemudian tuan tanah itu diwajibkan membayar pajak secara borongan, sedangkan tuan tanah memungut pajak langsung kepada penduduknya. Sistem ini sangat memberatkan

penduduk, karena tidak ada ketentuan besarnya jumlah pajak. Sejak itu banyak orang asing menguasai tanah, keadaan ini sangat merugikan penduduk, dan bagi penduduk sendiri sesuai dengan adat tanah itu milik raja. Tanah tidak dimiliki secara perorangan, melainkan dimiliki secara bersama dan dipakai untuk kepentingan bersama pula. Penduduk mengerjakan tanah secukupnya, untuk memberi makan keluarganya. Namun dengan makin bertambahnya penduduk akhirnya hasil dari tanahnya tidak mencukupi lagi, sedang tanah banyak yang dikuasai tuan tanah. Atas dasar adat ini Raffles menentukan pajak tanah (land-rent); yang berasal dari pajak Inggris yang dilaksanakan di Bengala.

Dasar hukum dari sistem pajak ini ialah sebagai berikut. Dahulu tanah milik raja, raja kemudian takluk kepada Inggris, maka dengan sendirinya rakyat harus membayar sewa kepada Pemerintah Inggris (Raffles) berupa pajak tanah. Sekali pun Pemerintah Inggris sudah berakhir, Pemerintah Belanda menjalankan terus sistem ini. Berulang kali diusahakan suatu sistem perekonomian di tanah jajahan. Sebagian ada yang berpaham kolot, yaitu paham yang menghendaki agar perekonomian diatur seperti dahulu, di mana perekonomian diselenggarakan oleh pemerintah. Ini berarti pemerintah masih menjalankan monopoli dalam perekonomian dengan alasan penduduk belum mampu mengatur perekonomian sendiri (pendapat Nederburg). Sebagian lagi menghendaki agar soal-soal ekonomi dipisahkan dari pemerintahan. Ini berarti sistem monopoli seperti sistem penyerahan dan sistem kerja rodi harus dihapuskan. Pemerintahan harus disusun lebih baik (pendapat van Hogendorps), dan kenyataannya pemerintah memilih sistem yang kolot. Sistem itu dijalankan dalam pengaturan Tanam Paksa yang dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal van den Bosch, sebagai pencetus gagasan ini.

Pada hakekatnya pelaksanaan tanam paksa tidak jauh berbeda dengan sistem VOC, yaitu politik dagang dengan maksud keuntungan sebesar-besarnya. Rakyat diwajibkan menanam tanaman yang ditentukan seperti tebu, nila, teh, tembakau, kayumanis, kapas, dan sebagainya, yang hasilnya sangat laku di pasaran Eropa. Di dalam pelaksanaannya rakyat sangat dirugikan, karena waktu dan tenaganya dicurahkan untuk melaksanakan tanam paksa, sehingga waktu dan tenaga yang sebenarnya untuk mengurus

pertaniannya terbuang, begitu pula tanah yang dipergunakan untuk tanam paksa dicarinya tanah yang subur. Untuk mengumpulkan hasil tanam paksa sebanyak-banyaknya, pemerintah memberikan hadiah (*cultuur procenten*) sebagai premi kepada para petugas. Adanya sistem premi inilah yang mengakibatkan para petugas yang terdiri dari mandor sampai kepada bupati dan para punggawa berlomba mencari premi tanpa memperhatikan penderitaan rakyat. Sistem premi benar-benar merusak moral para petugas. Keuntungan yang didapat Pemerintah Belanda melalui tanam paksa ini sungguh berlimpah sehingga Belanda dapat membangun perekonomian negerinya, industrinya berkembang dengan pesat dan mampu bersaing dengan negara industri lainnya di Eropa. Namun sebaliknya bagi rakyat Indonesia, penderitaan, kemiskinan, dan kelaparan terjadi di mana-mana. Bahaya kelaparan yang berat dan mengerikan pernah terjadi di Demak (1848) dan Grobogan (1849). Penderitaan dan kemiskinan rakyat ini menarik perhatian kaum humanis Belanda. Dr. Wolter van Hoevell, seorang pendeta pernah mengadakan perjalanan keliling Jawa - Madura dan Bali untuk mengetahui lebih dekat penderitaan rakyat akibat tanam paksa. Ia menuntut perbaikan bagi kehidupan rakyat. Mr. Conrad Theodor van Deventer, seorang ahli hukum dan pernah menjadi pengacara di Semarang, terkenal karena tulisannya yang berjudul "*Een Eereschuld*" artinya "kewajiban suci" mengemukakan pandangannya terhadap politik penghisapan yang dilakukan oleh pemerintah jajahan di Indonesia. Begitu pun Brooshooft pemimpin redaksi harian *De Locomotief* di Semarang menentang peraturan tanam paksa.

Golongan modal Belanda yang sudah menjadi kaya juga ikut menentang tanam paksa. Berbeda dengan gerakan kaum humanis, gerakan kaum modal ini didasari usaha mencari keuntungan dan memperluas lapangan usaha bagi modalnya. Yang menuntut dihapuskannya monopoli pemerintah. Golongan borjuis-kapitalis Belanda berjuang agar tanam paksa dihapus dan menuntut ketentuan yang pasti tentang status tanah, sehingga dasar hukum penanaman modal menjadi jelas dan dilindungi hukum. Dengan dasar filsafat liberal, mereka menyerang sistem tanam paksa itu. Masa itu memang merupakan saat perkembangannya paham liberalisme di Negeri Belanda yang menjadi kekuatan pokok pada zamannya. Perjuangan mereka di forum parlemen Belanda menghasilkan Undang-undang untuk menghapus pera-

turan tanam paksa. Status tanah diatur melalui Undang-undang Agraria (*Agrarische wet* 1870) yang menentukan status tanah menjadi dua macam, yaitu tanah domein bebas (*vrijland domein*) dan tanah domein tidak bebas (*onvrijland domein*). Tanah domein bebas adalah tanah pemerintah, yaitu tanah yang belum pernah digarap oleh rakyat, dikuasai oleh pemerintah. Tanah domein bebas dapat disewa oleh pengusaha-pengusaha asing untuk usaha-usaha perkebunan, bangunan atau pabrik. Sedangkan tanah domein yang tidak bebas adalah tanah rakyat, yaitu tanah yang sudah digarap oleh rakyat untuk pertanian. Pengusaha asing dilarang menguasai atau pun membeli tanah domein yang tidak bebas. Peraturan ini sungguh menguntungkan kaum pengusaha Belanda, saat itu banyak pengusaha membuka tanah-tanah perkebunan. Tetapi sebaliknya rakyat tetap dirugikan; tanah mereka tetap dibatasi sehingga produksi pertanian tidak berkembang, padahal pertambahan penduduk maju pesat. Hasil pertanian lama-kelamaan tidak mencukupi lagi bagi kebutuhan penduduk yang bertambah itu. Lagi pula rakyat yang buta huruf itu tidak dapat membuktikan hak milik atas tanahnya secara sah, sehingga banyak pula tanah rakyat yang diserobot oleh pengusaha perkebunan. Perkembangan penduduk memerlukan perluasan tanah sawah dan tegalan, namun terbentur pada tanah perkebunan. Pangreh praja, baik dari raja, bupati sampai kepada bekel di desa tidak memberikan perlindungan terhadap kehidupan rakyat. Mereka menjadi alat pemerintah dan para pengusaha untuk memperoleh tanah dan buruh sebagai tenaga yang murah. Tanah jajahan dijadikan daerah pasaran bagi barang Industri Negeri Belanda. Dengan sendirinya usaha ini akan mematikan kerajinan tangan penduduk yang menjadi sumber kehidupan. Industri rakyat belum sempat tumbuh sudah mati akibat saingan barang industri Belanda.

Di lapangan perdagangan usaha rakyat mendapat saingan pedagang-pedagang Cina dan Arab. Begitu giatnya orang memperdagangkan barang kelontong sampai ke desa-desa. Daya beli rakyat berkurang, maka ditempuhnya dengan cara kredit, yang harus dikembalikan dengan bunga yang tinggi. Di dalam kehidupan rakyat yang serba miskin itu lintah darat bertambah mencari korbannya. Sistem ijon berkembang, rumah gadai bertambah ramai, rakyat yang semula menjadi petani bebas banyak yang kehilangan sawah-ladanginya jatuh ke tangan lintah darat atau

tengkulak-tengkulak. Rakyat dari petani bebas berubah menjadi buruh tani, buruh perkebunan dan buruh di kota-kota.

Demikian gambaran kehidupan rakyat di Jawa Tengah pada abad ke- 19. Rakyat menderita, kehidupan mereka diliputi kemiskinan dan kebodohan akibat politik kolonial.

D. PERKEMBANGAN ALAM PIKIRAN DAN KEPERCAYAAN

Alam pikiran dan kepercayaan rakyat di Jawa Tengah pada abad ke-19 masih sederhana sekali. Kepercayaan lama masih berkembang terus sekali pun rakyat telah menganut agama Islam, sehingga dapat dikatakan adanya perpaduan antara kepercayaan lama dan agama Islam. Hanya di bagian kecil khususnya di daerah-daerah pesantren, surau atau pun mesjid, penduduknya telah meninggalkan tradisi lama. Kedudukan para pendeta digantikan oleh para kiai tugas para kiai ialah menjadi guru agama dan memimpin upacara-upacara agama. Ia adalah pemimpin yang sangat disegani dan dihormati. Seringkali ajaran Agama Islam diberi tafsir dan disesuaikan dengan kepercayaan lama serta ditunjukkan untuk kehidupan yang sejahtera lahir batin. Kepada setiap manusia diwajibkan mencari ilmu lahir-batin, agar hidupnya di dunia tidak mengalami penderitaan. Kebahagiaan hidup dapat dicapai dengan perbuatan amal yang didasari dengan kesucian batin, dengan jalan mengekang hawa nafsu, menjauhkan diri dari watak angkara-murka (tamak, loba). Tatakrama, sopan-santun, dan tidak menyombongkan diri adalah sikap yang terpuji. Berkata baik dan berbuat baik serta hormat menghormati merupakan petunjuk dalam kehidupan.

Penduduk percaya sekali terhadap kehendak Allah, takdir atau nasib Tuhanlah yang menentukan, oleh karena itu manusia menyerahkan diri kepadaNya, atau sering dikatakan "*pasrah kersaning Allah*". Mereka beranggapan bahwa kehidupan yang diciptakan itu ada dua golongan yang berbeda sifatnya dan berlangsung silih berganti, misalnya siang-malam, pagi-sore, teran-ggelap, suka-duka, dan sebagainya. Kehidupan sekarang akan menentukan kehidupan akhir. Begitu juga apabila sekarang hidup baik dalam arti baik amalnya yang dilandasi kesucian batin, menjauhkan diri dari jiwa angkara-murka serta soopan-santun, maka kelak

akan mendapat perlakuan baik dan hidup bahagia. Cepat-tidaknya kebahagiaan itu akan ditentukan amal baiknya. Oleh karena itu orang percaya bahwa penderitaan serta kemiskinan yang dialami pada waktu itu harus diterima dengan hati tawakal dan dianggapnya sebagai nasib.

Kepercayaan seperti ini berpengaruh terhadap cara berpikir rakyat pada waktu itu. Begitu percayanya terhadap nasib mereka sampai melupakan atau pun melemahkan usaha mereka untuk mengatasi penderitaan dan kemiskinan. Penderitaan dan kemiskinan ini diterimanya dengan tabah dan sabar, karena dianggapnya sebagai nasib dan suatu ketika nasib menderita itu akan berakhir apabila Tuhan telah menghendakinya. Mereka menyadari bahwa penderitaan dan kemiskinan akibat perbuatan Belanda yang dianggapnya tamak, namun mereka tidak melawan orang-orang Belanda. Mereka percaya Belanda akan mendapat pembalasan yang setimpal sesuai dengan perbuatannya yang tamak itu, bahkan kadang-kadang orang Belanda itu diterimanya dengan sopan-santun. Mencari harta-benda-atau harta-kekayaan dianggapnya sebagai perbuatan tercela, oleh karena itu penduduk lebih mengutamakan hidup sederhana. Sesuai dengan gambaran Raffles dalam bukunya "*History of Java*" yang melukiskan kehidupan penduduk Jawa yang sopan dan ramah.

BAB II

KEADAAN DAERAH JAWA TENGAH DARI TAHUN 1900 – 1928

A. PENGARUH POLITIK ETIS DI DAERAH

Pada akhir abad ke-19 terjadi perubahan dalam politik pemerintahan Belanda di Indonesia, dari politik kolonial-liberal yang telah dijalankan sejak tahun 1870 dengan suatu politik baru yang lebih menekankan kesejahteraan orang pribumi sebagai suatu tanggungjawab moral dari pemerintah terhadap orang Indonesia. Perubahan ke arah politik baru ini dikenal dengan nama "Politik Etis", terutama disebabkan oleh perubahan politik di Negeri Belanda. Paham liberal yang diatur sejak tahun 1870 tidak sesuai lagi dengan perkembangan baru. Kaum liberal mulai menerima paham baru yang memberi peranan lebih besar kepada pemerintah atau negara untuk bertindak guna memajukan kesejahteraan pribumi. Desakan ke arah politik baru tersebut juga datang dari golongan sosialis yang sejak tahun 1887 mempunyai wakilnya yang pertama di dalam Parlemen Belanda. Juga golongan konservatif yang bersatu dengan golongan agama (Partai Roma Katolik, Partai Anti Revolusioner, dan Partai Kristen Histos) menghendaki campur tangan negara dalam mengusahakan suatu "kemajuan yang teratur". Dr. Abraham Kuyper telah mengemukakan program politik baru tersebut dalam brosurnya "*Ons Program*" yang terbit pada tahun 1880 setelah ia menjadi Perdana Menteri Belanda pada tahun 1901, segera memasukkan ide politik baru yang menyatakan bahwa pemerintah memegang tanggungjawab moral bagi kesejahteraan orang pribumi, ke dalam pidato Mahkota Ratu, dan mulailah dilancarkan politik kolonial baru yang disebut "Politik Etis."¹⁾

Di antara golongan Etis, dapat disebut nama seperti C. Th. Van Deventer dari Partai Liberal yang menulis karangan "*Een Eerereschuld*" ("Hutang Budi") pada tahun 1899, yang menuntut dijalankan politik kesejahteraan, desentralisasi, dan pemberian pekerjaan yang banyak bagi orang pribumi dalam korps kepegawaian di Hindia Belanda. Memang otonomi dan desentralisasi telah menjadi semboyan dari politik baru tersebut, di samping kesejahteraan, efisiensi, dan ekspansi.

Van Deventer dapat disebut "bapak dari Politik Etis", dengan

mengecam kemelaratan orang-orang Jawa yang menurut dia disebabkan oleh praktek Tanam Paksa dari pengusaha perkebunan tebu. P. Broschooft, yang menjadi Redaktur harian "*De Locomotif*" di Semarang, memberi nama kepada politik baru tersebut dan menekankan sikap keadilan yang harus dipunyai oleh orang Eropa terhadap orang Jawa yang lebih lemah.

Dr. C. Snouck Horgronye seorang ahli agama Islam yang menjadi profesor di Universitas Leiden pada tahun 1906 menganjurkan pendidikan Barat bagi golongan atas (elite) bangsa Indonesia. Dengan demikian mereka diharapkan menjadi orang yang berpendidikan dan berkebudayaan Barat (asosiasi atau asimilasi). Banyak orang Indonesia yang berhasil mendapat pendidikan tinggi karena jasa yang perlindungannya, seperti. Ahmad Djajadiningrat, yang kemudian menjadi Bupati Serang, dan saudaranya, Hoesoin Djajadiningrat, yang berhasil mendapat gelar Doktor dalam Kesusasteraan Timur di Universitas Leiden.

Asisten Residen Purwokerto, W.P.D. de Wolf van Westerrode yang meninggal tahun 1904 menjadi pelopor dari Bank Penyimpanan, Sewa, dan Kredit Pertanian yang kemudian menjadi dasar dari sistem Kredit Rakyat (*Volkscreditwezen*). Sistem ini diadakan oleh pemerintah pada tahun 1904 untuk memberi kredit atau pinjaman kepada orang-orang di desa, yang terdiri dari tiga lembaga kredit, ialah lumbung desa, bank distrik, dan bank kabupaten (*volksbank*) untuk para pengusaha bangsa Indonesia.

J.H. Abendanon, yang pada tahun 1900 menjadi Direktur Bagian (Departemen) Pendidikan dari pemerintah di Hindia Belanda, bersama dengan isterinya Nyonya Abendanon, telah banyak berjasa dalam menimbulkan kesadaran diri di kalangan bangsa Indonesia. Di antara orang terpelajar bangsa Indonesia yang mendapat bantuan dan perlindungan tuan dan Nyonya Abendanon adalah R.A. Kartini, puteri Bupati Jepara, yang menganjurkan perluasan pendidikan dan pengajaran bagi kaum wanita. Kemudian juga Abdul Muis, yang akhirnya menjadi salah seorang pemimpin Sarekat Islam yang terkenal.²⁾

1. Undang-undang Desentralisasi 1903

Tuntutan otonomi dan desentralisasi telah menjadi suatu bagian yang penting dari program Politik Etis yang menurut Furnivall, mengandung tiga arti. Pertama, penyerahan kekuasaan dari pemerintah di Nederland kepada departemen dan pegawai

serta pejabat setempat dan dari pegawai Eropa kepada pegawai Bumiputera. Kedua, pembentukan badan pemerintah yang mempunyai kekuasaan otonomi yang bekerjasama dengan pemerintah, sehingga dapat mengurus urusannya sendiri. Dan ketiga, pemisahan anggota keuangan pribadi di dalam negara swapraja. Hal yang pertama berarti pemberian pemerintahan desentralisasi administratif dan bertujuan mencapai efisiensi politik, yang menuju sebagian kepada tercapainya efisiensi dan sebagian otonomi. 3)

Undang-undang Desentralisasi tahun 1903 (*Decentralisatie Wet 1903*) dimaksudkan untuk memberikan hak otonomi dan pembentukan dewan-dewan daerah pada setiap karesidenan (*Gewest*) dan kota besar (*Gemeente*). Untuk pelaksanaannya di Indonesia, pada tahun 1905 diterima *Desentralisatie Besluit* (*Staatsblad* 1905 No. 137). Adapun pembentukan daerah otonoom karesidenan di Jawa Tengah, baru dapat dilaksanakan pada tahun 1907, dengan urutan pembentukan sebagai berikut:

- a. Karesidenan Banyumas, termuat dalam Stbl. 1907 No. 136
- b. Karesidenan Pekalongan, termuat dalam Stbl. 1908 No. 174
- c. Karesidenan Kedu, termuat dalam Stbl. 1908 No. 177
- d. Karesidenan Semarang, termuat dalam Stbl. 1908 No. 175
- e. Karesidenan Rembang, termuat dalam Stbl. 1907 No. 134

Di samping menunjukkan daerah karesidenan Otonoom, Undang-undang tersebut juga menetapkan kota tertentu di dalam *Gewest* (Karesidenan) sebagai kota Otonoom, yang di dalam pembentukannya ternyata terjadi lebih dahulu dari penunjukkan karesidenan sebagai daerah otonoom. Pada tahun 1905, tiga kota besar di Jawa, yaitu Batavia (Betawi), Meester Cornelis (Jatinegara), dan (Buitenzorg) (Bogor) telah ditunjuk sebagai Daerah Kota Otonoom (*Gemeente*) dengan surat keputusan:

- a. Batavia dalam Stbl. 1905 No. 204
- b. Meester Cornelis, dalam Stbl. 1905 No. 206
- c. Buitenzorg, dalam Stbl. 1905 No. 208.

Setelah tiga kota tersebut di atas, maka dalam tahun 1906 beberapa kota di Jawa Tengah ditunjuk pula sebagai daerah kota otonoom, yaitu:

- a. Semarang dalam Stbl. 1906 No. 120
- b. Tegal dalam Stbl. 1906 No. 123
- c. Pekalongan dalam Stbl. 1906 No. 124

d. Magelang dalam Stbl. 1906 No. 1254)

Yang dapat ditunjuk sebagai daerah kota otonoom ialah kota besar yang mempunyai sifat kebaratan, mempunyai penduduk bangsa Eropa yang agak banyak, dan di sekitarnya kota tersebut terdapat onderneming gula, kopi, atau lainnya. Otonomi yang diberikan hanya dapat dinikmati oleh golongan masyarakat Eropa, jadi bukan otonomi yang sebenarnya, melainkan hanya berupa "perbaikan jalan dan taman atau parit". Susunan keanggotaan Dewan Daerah Karesidenan dan Dewan Daerah Kota hanya terdiri dari para Asisten Residen dan Administratur Onderneming atau Perusahaan; dari bangsa Indonesia terdiri dari Bupati dan Patih. Anggota Dewan Karesidenan ditunjuk karena kedudukannya atau diangkat oleh Gubernur Jenderal atas usul dari Ketua Dewan (Residen) dari dua orang calon. Berlainan dengan Dewan Kota yang mempunyai Ketua (*Burgemeester* atau Walikota) yang bukan seorang pegawai pamong praja seperti Residen, maka Dewan Karesidenan diketahui oleh Residen sendiri, sehingga mengurangi kebebasan dari pegawai negeri.

Adapun kekuasaan yang diberikan kepada Dewan Karesidenan ialah dapat membicarakan: Anggaran penerimaan dan belanja; Pinjaman; Mengadakan undang-undang (peraturan) untuk pemungutan pajak atau bea; Pemborongan; dan soal-soal lain yang penting.

Yang dapat mengesahkan (menerima atau menolak) Anggaran Penerimaan dan Belanja Karesidenan ialah Gubernur Jenderal.

Di dalam perkembangannya, ternyata *Gemeente* (daerah otonomi kota) menunjukkan kehidupan yang lebih baik dan maju daripada daerah otonomi karesidenan (*Gewest*). Hal ini disebabkan karena ketua *Gemeenteraad* (Dewan Daerah Kota) bukan seorang pegawai negeri, tetapi adalah seorang *Burgemeester* yang bukan pegawai pemerintah, serta mempunyai wilayah yang terbatas daripada karesidenan, dan lagi anggota Dewan Kota kebanyakan terdiri dari bangsa Eropa (Belanda). Keadaan ini menyebabkan tahun 1922 daerah otonom kota diperbolehkan membentuk badan pengurus harian yang disebut "*College van Burgemeester en Wethouders*" (Dewan Pengurus Harian) yang terdiri dari Walikota dan para penyelenggara Undang-undang untuk mendampingi Walikota dalam pekerjaannya sehari-hari. Keanggotaan dewan daerah kota yang dipilih hanya dari golongan atas, telah menye-

babkan daerah otonom kota mempunyai perkembangan yang lebih berhasil sebagai suatu daerah otonom⁵⁾

Mengenai daerah otonom kota ini, dikatakan di dalam buku "*Indonesia Town: Studies in Urban Sociology*", sebagai berikut:

"Kota praja itu selalu dilihat oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai semacam "daerah kantong orang-orang Barat" dan sifat kebaratan dari kota itu telah dipergunakan sebagai alasan untuk membagi-bagi kursi keanggotaan di dalam dewan kota dalam cara yang sedemikian rupa sehingga dapat menjamin mayoritas dari orang-orang Eropa. Barulah pada tahun 1908 dan 1940 di dalam dua buah kota praja yang lebih kecil, orang-orang Indonesia telah diangkat sebagai Wali-kota".⁶⁾

2. *Ontvoogding Ordonnantie* tahun 1918

Di dalam perkembangan selanjutnya, usaha memberikan otonomi dan desentralisasi dijalankan dalam bentuk penyerahan kekuasaan yang lebih besar dari pegawai pamongpraja bangsa Belanda kepada pegawai pamongpraja bangsa Indonesia. Kehendak politik ini dalam bahasa Belanda dikenal sebagai "*Ontvoogding*", dan dilaksanakan pada tahun 1918 dengan *Ontvoogding Ordonantie* (*Staatsblad* No. 674).

Gagasan ini sebetulnya berasal dari Graaff, wakil Direktorat Kepegawain, yang pada tahun 1905 mengusulkan penyatuan kedua cabang pegawai pamongpraja Belanda dan bumiputera, dan penggantian pegawai bangsa Belanda dengan pegawai bangsa Indonesia. Dalam hubungan dengan usulnya maka diadakan pembagian Pulau Jawa menjadi daerah-daerah teritorial dengan kekuasaan yang lebih besar dari pegawai setempat. Pada tahun 1918 Idenburg dan van Limburg Stirum sebagai Menteri Jajahan dan Gubernur Jenderal melaksanakan sebagai usul de Graff tersebut dalam bentuk Peraturan *Ontvoogding* (Pembebasan atau Pendewasaan) dengan maksud untuk dapat mengurangi jumlah Asisten Residen dan menghapuskan jabatan *controleur*. Penyerahan kekuasaan (*ontvoogding*) ini dapat diartikan sebagai pendidikan kepada pegawai bumiputera tanpa "didampingi" atau "dipimpin" oleh pegawai bangsa Belanda untuk keperluan ini maka diambil kabupaten yang bupatinya mempunyai pendidikan yang agak luas dan tinggi. Urusan yang diserahkan hanya meliputi urusan agraria, keramaian (pemberian izin mengadakan keramaian), personalia

(pengangkatan pegawai-pegawai rendah seperti juru tulis, agen polisi, dan lurah), dan penetapan pajak (menyelenggarakan daftar *Hoofdgeld*). Sedang urusan pemerintahan yang penting, seperti urusan keamanan, tetap dipegang oleh pegawai bangsa Belanda. Maka tidaklah mengherankan bahwa seorang Bupati bangsa Indonesia yang telah "dibebaskan", ialah Raden Jayadiningrat, mengatakan bahwa hal tersebut tak menyebabkan perbedaan di dalam kedudukannya, dan selama 10 tahun berikutnya, "administrasi pemerintahan Eropa tetap seperti sebelumnya".

Adapun Kabupaten di Jawa Tengah yang telah dikuatkan "*ontvoogding*" ialah:

- a. Kabupaten Banyumas Stbl. 1919 No. 668
- b. Kabupaten Blora Stbl. 1919 No. 804
- c. Kabupaten Batang Stbl. 1920 No. 45
- d. Kabupaten Jepara Stbl. 1920 No. 480
- e. Kabupaten Kebumen Stbl. 1920 No. 608

3. Pembentukan daerah otonomi propinsi dan kabupaten tahun 1922

Didorong oleh pergolakan politik yang terjadi di Hindia Belanda dan di Negeri Belanda, maka setelah Perang Dunia I, perundang-undangan desentralisasi tahun 1903 dirasa, tidak memuaskan lagi. Maka Pemerintah Belanda kemudian mengeluarkan undang-undang tentang reorganisasi pemerintahan pada tahun 1922 dengan nama "*Bestuurs hervormingswet 1922 (Staatsblad 1922 No. 216)* pasal-pasal 119, 120, 121, 122 *Indische Staatsregeling* 925.

Dengan adanya undang-undang tahun 1922 tersebut memungkinkan pembentukan daerah otonom yang lebih besar dari "*gewest*" undang-undang tahun 1903 dengan nama "*provincie*". Sedangkan bagian dari propinsi dapat pula dibentuk sebagai daerah-daerah otonom berdasarkan undang-undang tahun 1922. Berdasarkan *Bestuurs hervormingswet* tahun 1922 tersebut, maka kemudian dibentuk:

- a. *Provincie Ordonnantie*, yang memuat ketentuan lanjut tentang daerah otonom Propinsi (Stbl. 1924 - 78; perubahan terakhir 1940 - 266. 251).
- b. *Regentschapsordonnantie*, yang memuat ketentuan-ketentuan tentang daerah otonom *Regentschap* (Kabupaten Stbl. 1924 - 79); perubahan terakhir Stbl.

1940 – 226 dan Stbl. 1948 – 195)

Berdasarkan Undang-undang tersebut di atas, maka di Jawa dan Madura kemudian dibentuk tiga daerah propinsi otonom yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kabupaten otonom dan beberapa kota otonom juga dibentuk (*Gemeente*), sedangkan daerah otonom karesidenan ((*Gewestelijke ressorten*) berdasarkan *Decentralisatie Wet* tahun 1903 diharuskan⁸⁾

4. Daerah otonoom kota besar Semarang.

Daerah otonom kota besar Semarang dibentuk dengan *Staatsblad* tahun 1906 No. 120, dan pemerintah kota besar Semarang sejak waktu itu dijalankan oleh *Burgemeester* (Walikota), *College van Burgemees Wethouders* (Badan Pengurus Harian), dan *Gemeenteraad* (Dewan Kota). Jumlah anggota *Gemeenteraad* Semarang ialah 27 orang (15 orang Belanda, 8 orang Indonesia, dan 4 orang Timur Asing); sedangkan anggota Badan Pengurus/Pemerintahan Harian, ialah 4 orang (2 orang Belanda, 1 orang Indonesia, dan 1 orang Cina).

Burgemeester (Walikota) kuat kedudukannya, karena ia menjadi Kepala semua pegawai, (*Chef*), *Ketua College van Burgemeester en Wethouders* (Badan Pengurus Harian). Syarat untuk menjadi Walikota ialah: laki-laki dan berumur paling sedikit 30 tahun. Sedang syarat-syarat keanggotaan *Gemeenteraad* ialah: laki-laki, "kawula" Negara Belanda, paling sedikit berumur 21 tahun, dapat membaca dan menulis dalam bahasa Belanda, Melayu atau bahasa pribumi yang lain di tempat itu, benar-benar bertempat tinggal di wilayah kotapraja setempat dan mempunyai ketetapan pajak dari Kantor Pajak Negeri paling rendah F. 300.

Mengenai *Gemeente* Semarang, sampai bulan Agustus 1916 belum mempunyai seorang *Burgemeester* (Walikota) yang berdiri sendiri. Jabatan itu dipegang oleh kepala pemerintahan setempat (*Hoofd van Plaatselijk Bestuur*) atau asisten Residen Belanda di Semarang, yaitu:

Tahun 1906 – 1910: L.R. Priester

Tahun 1910 – 1913: P.K.W. Kern

Tahun 1913 – 1914: Van Der Ent

Tahun 1914 – 1915: J.W. Mejer Banneft

Pada tahun 1916 terdapat keinginan untuk mengadakan suatu jabatan *Ketua Gemeenteraad* yang berdiri sendiri. Maka pada tahun itu, *Gemeenteraad* (Dewan Kota Praja) Semarang mengaju-

kan tiga orang calon kepada Gubernur Jendral untuk memangku jabatan tersebut dan kemudian ditetapkan Ir. D. de Iongh sebagai walikota Semarang yang pertama.

Yang menjabat walikota Semarang dari tahun 1916 – 1942 ialah:

Agustus 1916 – Mei 1927 :	Ir. D. de Iongh
Mei 1927 – 1936 :	A. Bagohus
1936 – 1942 :	H.E. Boissevaen ⁹⁾

Pembentukan pemerintahan Otonoom kota, karesidenan dan kemudian kabupaten dan propinsi menyebabkan terdapatnya dua macam bentuk pemerintahan (dualistis), yaitu pemerintahan yang dijalankan orang Eropa dan pemerintahan tradisional yang dijalankan oleh pamongpraja bangsa Indonesia yaitu dari bupati sampai asisten wedana. Pemerintahan bangsa Eropa (Belanda) juga menguasai pemerintahan dan pamongpraja bangsa Indonesia.

B. KEGIATAN MASYARAKAT DAN PERMULAAN KEBANGKITAN NASIONAL DI DAERAH JAWA TENGAH

1. Keadaan Pendidikan Pada Tahun 1900

Pengaruh Barat yang mulai meresap ke dalam pergaulan hidup di Jawa sejak pertengahan abad ke-19, mula-mula memasuki golongan feodal (priyayi atau para bupati, wedana, dan asisten wedana). Kemudian semakin lama semakin meresap juga ke dalam lingkungan masyarakat desa. Kontak orang Eropa dengan masyarakat Jawa berangsur-angsur beralih dari raja, kepada bupati dan kepada kepala desa, sehingga akhirnya sampai kepada orang desa, terutama dalam lapangan pendidikan dan perekonomian. Pendidikan Barat yang dimulai oleh pemerintahan abad ke-19 telah menyebabkan semakin intensif dan luas pengaruh Barat pada kehidupan masyarakat Jawa. Sedangkan dalam bidang perekonomian, terutama dalam bentuk penetrasi, ekonomi uang, pengaruh Barat menjangkau orang-orang desa, terutama sejak dimulainya politik kolonial-liberal dan sistem kerja kontrak pada tahun 1870.

Pada permulaan tahun 1850 Pemerintah Hindia Belanda mulai mendirikan "Sekolah Rendah Bumiputera Kelas Satu" yang lama pendidikannya 5 tahun dan diperuntukkan bagi anak pegawai pamong praja (golongan priyayi) bangsa Indonesia. "Sekolah Kelas Satu" ditempatkan di kota karesidenan. Mata pelajaran- mata pelajaran yang diberikan ialah membaca, menulis, berhitung, menggam-

bar, menyanyi (*tembang*), ilmu bimi, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu hewan, ilmu alam, bahasa Jawa dan Melayu. Selain itu juga diberikan pelajaran mengukur tanah, yang penting bagi calon pegawai pada masa tanam paksa, seperti pada waktu pembagian sawah. Selain itu juga diberikan pelajaran menggambar peta tanah, pelajaran berhitung tentang pajak tanah dan administrasi kopi, dan pelajaran pertanian. Pada akhir abad ke-19, didirikan "Sekolah Rendah Bumiputera Kelas Dua", dengan lama pelajaran 4 tahun, di kota kabupaten atau kota kecil. Pelajarannya lebih sederhana atau rendah dari "Sekolah Kelas Satu", seperti membaca, menulis, berhitung, dan sedikit bahasa Melayu, dan bahasa pengantar adalah Bahasa Jawa. "Sekolah Kelas Dua" ini diperuntukkan bagi golongan rakyat biasa.

Pada tahun 1851 pemerintah mendirikan Sekolah Guru Negeri yang kemudian dikenal sebagai *Kweekschool* di Surakarta. Sebelum itu pemerintah juga telah menyelenggarakan kursus guru yang diberi nama "*Normaal Gursus*" kemudian menjadi "*Normaal School*" yang dipersiapkan untuk guru sekolah desa. Pada permulaan abad ke-20, telah terdapat tiga macam Sekolah Desa, dan tiga macam Sekolah Guru ialah: *Normaal School* dengan masa pendidikan 4 tahun, bahasa pengantar Bahasa Jawa dan menerima lulusan "Sekolah Rendah Kelas Satu; *Kweekschool* dengan masa pendidikan 4 tahun, dan menerima lulusan Sekolah Dasar berbahasa pengantar Bahasa Belanda (ELS), dan *Hollandsch Inlandsche Kweekschool* dengan bahasa pengantar Bahasa Belanda yang bertujuan menghasilkan guru-guru HIS atau HCS yang didirikan pada tahun 1914. *Kweekschool* pertama didirikan di Surakarta pada tahun 1852, dan pada tahun 1975 dipindah ke Magelang, kemudian menyusul 1866 di Bandung, 1856 di Bukittinggi, 1873 di Tondano, 1874 di Ambon, 1875 di Probolinggo dan Banjarmasin, dan 1876 di Makasar, dan 1879 di Padangsidempuan.

Pendidikan calon pegawai pamong praja bumiputera oleh pemerintah didirikan pada tahun 1879 dengan mendirikan "Sekolah Kepala" atau "*Hoofdenschool*" (atau *Chefschool*") bagi anak bupati yang akan menjadi pegawai pamongpraja. Pada tahun 1900 sekolah ini diubah kurikulumnya untuk disesuaikan dengan sekolah lanjutan lainnya, dan diberi nama OSVIA (*Opleiding School Van Inlandsche Ambtenaren* = Sekolah Latihan untuk Pegawai Bumiputera). Pada tahun 1910 terdapat tiga buah sekolah OSVIA di Jawa dan 3 buah di luar Jawa yaitu Bandung, Magelang, Purbo-

linggo, Bukittinggi, Tondano, dan Makasar.

Lama pendidikan di OSVIA adalah 5 tahun untuk jabatan sampai pangkat tinggi Bupati. Ujian masuk memasuki OSVIA disebut *Klein-Ambtenaar*, sedangkan yang diterima di sekolah tersebut adalah murid lulusan ELS. Pada tahun 1906 oleh Gubernur Jenderal van Heutz didirikan Sekolah Desa (*Volkschool*) yang pembiayaannya lebih rendah dan harus dipikul oleh desa dengan bantuan pemerintah. Lama pelajaran di Sekolah Desa adalah 3 tahun dengan mata pelajaran membaca, menulis, berhitung, bahasa daerah dan menggambar. Pada tahun 1914 didirikan Sekolah Lanjutan (*Vervolgschool*) yang lama pelajarannya 2 tahun, dan diperuntukkan sebagai kelanjutan dari Sekolah Desa.

Kemudian terdapat juga Sekolah Rendah untuk orang Eropa yang disebut ELS (*Europeesche Lagere School*), yang didirikan pada tahun 1818. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak Eropa (Belanda), Timur Asing dan orang terkemuka bangsa Indonesia dengan syarat mengerti Bahasa Belanda. Pada mulanya sedikit orang Indonesia yang memasuki ELS, tetapi sejak tahun 1900 jumlah murid Indonesia semakin bertambah.

JUMLAH MURID-MURID ELS PADA TAHUN 1900					
Tahun	Murid Eropa	Murid Timur Asing	Murid Indonesia	Beragama Kristen dalam murid Indonesia	Jumlah Sekolah
1890	11.421	148	808	338	144
1895	12.690	185	1.135	391	159
1900	13.592	325	1.545	557	169 ¹⁰⁾
1905	15.105	525	3.725	1.046	184

Melihat kenyataan ini pemerintah menjadi khawatir dengan makin besarnya jumlah orang Indonesia yang memasuki ELS, sehingga pada tahun 1906 pemerintah memasukkan Bahasa Belanda di dalam kurikulum "Sekolah Rendah Bumiputera Kelas Satu" dan memperpanjang masa belajarnya dari 5 tahun menjadi 7 tahun, serta disamakan ijzahnya dengan Sekolah Rendah Eropa.

Pada tahun 1914 didirikan HIS (*Hollandsch Inlandsche School*) yang memberi kesempatan kepada orang Indonesia untuk

menerima pendidikan yang lebih tinggi tanpa melalui sekolah Eropa. Kemudian pada tahun 1914 itu juga, didirikan MULO (*Meer Uitge breid Lager Onderwijs*) Yaitu sekolah lanjutan pertama sesudah HIS dan ELS, yang dapat memberi jalan bagi kemajuan. Oleh karena belum ada sekolah lanjutan sesudah MULO maka mereka hanya dapat melanjutkan pelajaran ke berbagai sekolah menengah kejuruan. Pada tahun 1919 didirikan sekolah AMS (*Algemeene Middelbare School*) sekolah pendidikan umum tingkat menengah atas, yang dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian Ilmu Pasti dan bagian Sastra (Sastra Barat dan Sastra Timur). Murid tamatan AMS berhak melanjutkan pelajarannya ke Sekolah-sekolah Tinggi Kedokteran, Sekolah Tinggi Kehakiman, dan Sekolah Tinggi Teknik yang ada di Indonesia, atau ke perguruan Tinggi di Negeri Belanda. Ijazah AMS disamakan dengan sekolah HBS (*Hoogere Burger School*), yaitu sekolah menengah umum untuk anak Belanda.

Orang Indonesia yang telah tamat dari ELS dapat melanjutkan ke HBS di Batavia, Semarang, dan Surabaya dengan masa belajar 5 tahun yang menuju ke jenjang memasuki universitas. HBS yang pertama didirikan pada tahun 1867 sedangkan di Semarang HBS didirikan pada 1 Oktober 1977 dengan 32 orang murid dan 7 orang guru. Pada mulanya lama belajar 3 tahun, tetapi pada tahun 1879 dijadikan HBS 5 tahun (dari tahun 1877 - 1937 HBS Semarang menempati gedung SMA Negeri III - IV di jalan Pemuda; sejak tahun 1937 pindah ke Gedung SMA Negeri I - II di Jalan. Menteri Supeno).

Sampai tahun 1900 sedikit orang Indonesia yang memasuki HBS, tetapi jumlahnya semakin banyak pada tahun berikutnya,

MURID-MURID HBS +TAHUN 1900

Tahun	Murid Eropa	Murid Timur Asing	Murid Bangsa Indonesia
1885	353	6	2
1890	354	—	5
1895	558	3	4
1900	549	4	13
1905	677	16	36 ¹¹⁾

Orang Indonesia yang telah tamat HBS tidak selalu dapat melanjutkan pelajarannya atau mencari pekerjaan seperti orang Eropa.

Mereka tidak dapat memasuki jabatan pegawai pamong praja Eropa seperti *Controleur*, Asisten Residen sampai tahun 1920 tidak terdapat universitas di Hindia Belanda. Hanya anak orang kaya dan anak para bupati yang dapat melanjutkan pelajarannya ke Eropa.

Pada tahun 1900 orang Indonesia yang telah tamat dari ELS dapat melanjutkan pelajarannya di tiga jurusan sekolah yaitu Sekolah Dokter Jawa atau Stovia (*School tot Opleiding Van Inlandsche Artsen* = sekolah untuk mendidik dokter bumiputera) yang merupakan perubahan beberapa kali dari Sekolah Mantri Epidemi (Mantri Cacar) yang didirikan pada tahun 1851. Pendidikan di Stovia berlangsung selama 3 tahun sebagai masa persiapan dan diikuti 6 tahun pelajaran kedokteran penuh, dan diperuntukkan bagi orang Indonesia. Orang Indonesia, Eropa atau Belanda yang ingin menjadi dokter dapat memasuki NIAS (*Nederlandsche Indische Artsen School*) yang didirikan di Surabaya pada tahun 1913. Kemudian orang Indonesia juga dapat melanjutkan pelajaran ke Sekolah Pamongpraja Bumiputera atau OSVIA. Selama itu orang Indonesia juga dapat melanjutkan pelajarannya ke Sekolah Guru (*Kweek School*) yang lama pelajarannya 6 tahun.

Selain itu pendirian Sekolah HIS pada tahun 1914 juga membutuhkan guru yang terdidik, yang sebagian dipenuhi dengan mendatangkan guru Belanda dari Eropa, dan sebagaian lagi dengan mendirikan sekolah guru lanjutan di Purwo rejo pada tahun 1914.

Gambaran tersebut di atas dapat memberikan kesan tentang adanya golongan elit terpelajar bangsa Indonesia yang masih terbatas jumlahnya pada tahun 1900 jika dibandingkan dengan penduduk seluruh Jawa - Madura pada waktu itu yang berjumlah 28.386.000 jiwa. Akan tetapi sekolah lanjutan yang terdapat pada waktu itu, seperti STOVIA, OSVIA, dan Sekolah-sekolah Guru (*Kweek school*), ternyata telah menjadi persembaian dari calon pemimpin pergerakan nasional bangsa Indonesia. Robert Van Niel membedakan dua jenis golongan elit, ialah golongan elit politik yang terdiri dari kaum terpelajar bangsa Indonesia yang menjadi pemimpin pergerakan kebang-

saan, dan golongan elit fungsional yang terdiri dari golongan priyayi bangsa Indonesia (bupati ke bawah dan asisten wedana). Di dalam kenyataannya, rakyat biasa menganggap kedua golongan elit tersebut sebagai golongan "priyayi".¹²⁾

2. Permulaan Pergerakan Nasional di daerah Jawa Tengah

Pengaruh Barat yang mulai memasuki masyarakat Jawa pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, mula-mula mempengaruhi para bupati yang merupakan golongan masyarakat yang pertama menerima pendidikan Barat dan melaksanakan kontak yang intensif dengan orang Eropa.

Para bupati atau bangsawan yang jumlahnya masih sedikit di daerah Jawa Tengah yang sudah berpendidikan dan berpikiran maju, antara lain adalah: Bupati Demak (akhir abad ke-19) RMAA Hadiningrat; Bupati Jepara R.M. Adipati Sosroningrat, (ayah R.A. Kartini); Bupati Pati P.A. Condronegoro yang terkenal dengan tulisannya tentang kisah perjalanan di Jawa serta beberapa karangan yang dimuat dalam majalah Lembaga Kebudayaan; Bupati Demak R.A. Condronegoro yang pada tahun 1864 mendatangkan guru dari Negeri Belanda untuk memberi pelajaran kepada putra-putranya; Bupati Kudus yang juga mendatangkan guru Belanda untuk mendidik putra-putranya. Para bupati yang pada tahun 1902 pandai menulis dan bercakap-cakap dalam Bahasa Belanda, ialah P.A. Akhmad Jayadiningrat Bupati Serang; R. Tumenggung Kusumo Utoyo, Bupati Ngawi; P.A. Hadiningrat, Bupati Demak; dan R.M. Adipati Sosroningrat, Bupati Jepara.

Bupati Magetan pada tahun 1863 mengajukan permohonan agar dua orang putranya diizinkan memasuki Sekolah Dasar Eropa, dan Sri Paku Alam V yang pertama kali menyekolahkan putranya di Sekolah Dasar Eropa. Di samping itu terdapat juga orang yang telah mencapai kemajuan yang setaraf dengan orang Eropa, seperti R. Saleh Syarif Bustaman; R.M. Ismangun Danuwinoto, Kolonel Mayangkara, Mas Atmodirono, dan Raden Kamil. Dari mereka ini, timbul gagasan baru yang merupakan reaksi dari golongan priyayi terpelajar terhadap pemerintah kolonial dan diskriminasi pendidikan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Maka dapat dikatakan bahwa gejala lahirnya pergerakan nasional, khususnya di Jawa Tengah, telah mulai nampak.

Dalam hubungan ini akan diuraikan tentang peranan R.M.

A.A. Hadiningrat, Bupati Demak, dan R.A. Kartini putri Bupati Jepara sebagai perintis kebangunan kaum terpelajar bangsa Indonesia.

R.M.A.A. Hadiningrat, Bupati Demak pada akhir abad ke-19, adalah paman dari R.A. Kartini, dan seorang bupati yang telah berpikir maju dan besar pengaruhnya di antara bupati bangsa Indonesia pada akhir abad ke-19. Ia sering dimintai pendapatnya oleh pemerintah kolonial. Pada tahun 1893 pemerintah menunjuk dia untuk mengadakan penyelidikan terhadap sebab kemunduran martabat para bupati di mata rakyat, serta memberikan saran guna memperbaikinya. Dalam laporan hasil penyelidikannya yang diterbitkan pada tahun 1899, Hadiningrat mengatakan bahwa kesalahan terletak pada kurangnya kesempatan pendidikan bagi orang Jawa. Ia mengatakan bahwa para bupati yang tidak berpendidikan Barat tidak pernah diperhatikan oleh penguasa Belanda, sehingga menyebabkan mereka kehilangan wibawa dan menumbuhkan sikap rendah diri. Ia menganjurkan agar di masa depan diberi kesempatan pendidikan sekolah yang lebih tinggi, kepada calon bupati. Dengan demikian ia telah menekankan unsur yang baru di dalam pengangkatan pegawai pamongpraja, ialah hak dan pendidikan, bukan semata-mata keturunan dan darah. Ia juga mengatakan bahwa "hak untuk memimpin bangsa, tidak harus dibatasi pada para bangsawan (bupati) saja, meskipun sebagai seorang bupati ia menganjurkan pembaharuan dari atas.

Bernhard Dahm lebih lanjut mengutip sebagian dari laporan penyelidikannya :

"Bagaimana seseorang dapat menolong dirinya jika ia dilahirkan di dalam sebuah rumah gubug di desa, dan bukan di rumah kabupaten. Karena itu saya dengan sangat menyetujui untuk menunjukkan kepada orang bumiputra, bahkan adalah suatu hak untuk memberikan kepada orang bumiputra yang bukan bangsawan, kesempatan untuk mencapai pangkat yang tertinggi di dalam administrasi kepegawaian, dengan jalan pendidikan dan usaha yang besar, serta pengabdian kepada pekerjaannya. Tetapi saya tidak berpendapat bahwa hal itu dapat dijalankan pada masa sekarang, ketika rakyat belum mempunyai kesempatan yang jelas, untuk memajukan golongan yang bukan bangsawan, karena kemajuan semacam ini masih bertentangan dengan pendapat orang bumiputra tentang apa yang dianggap benar."¹³⁾

R.A. Kartini (21 April 1879 – 17 September 1904).

R.A. Kartini dilahirkan pada tanggal 21 April 1879 sebagai putra kelima dari Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat, Bupati Jepara yang memerintah dari 1880 – 1905, salah seorang bupati yang mula-mula menerima pendidikan Barat. Ia dilahirkan di Mayong, Kabupaten Jepara, ketika ayahnya masih menjabat Wedana di tempat tersebut. Ibunya bernama Mas Ajeng Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kyai Madirono, seorang guru dan ahli agama di Desa Teluk Awur Jepara. Kartini mengalami pendidikan sampai tamat ELS di Jepara tetapi tidak berhasil melanjutkan pelajarannya ke HBS Semarang, karena tidak diizinkan oleh ayahnya. Pada waktu itu Kartini sudah berumur 12 tahun yang dianggap sudah "remaja putri", suatu usia yang menurut adat harus mulai "dipingit". Selama bersekolah Kartini mendapatkan teman anak orang Belanda dan berkenalan dengan alam pikiran serta pengetahuan Barat. Kesan yang diperolehnya dengan bertambahnya usia dan buku yang dibaca, menimbulkan keyakinan pada dirinya betapa rendahnya kedudukan kaumnya. Putri bangsawan wajib membimbing dan memimpin kaum wanita mencapai kemajuan. Kartini sebenarnya ingin mengikuti jejak temannya Lessy untuk meneruskan pelajaran ke sekolah guru di Negeri Belanda, akan tetapi tidak terlaksana. Ia bercita-cita ingin menjadi guru bagi anak para bupati, tetapi usul Abendanon untuk mendirikan sekolah tersebut ditolak oleh Pemerintah Belanda atas desakan para bupati yang merasa keberatan. Di dalam Kabupaten Jepara, ia mendapat kamar kerja sendiri, tempat ia membaca buku dan menulis surat kepada kenalannya yang kebanyakan mempunyai kedudukan di dalam masyarakat. Di samping itu Kartini sebelum melakukan perkawinan, telah mulai melaksanakan cita-citanya dengan mendirikan sekolah kecil-kecilan di dalam kabupaten untuk anak pegawai negeri. Di antara teman Kartini yang telah ia kirim surat, adalah orang Belanda terpelajar yang tergolong kelompok etis di dalam pemerintahan seperti J.H. Abendanon, Direktur Departemen Pendidikan dari tahun 1900 – 1905; pemimpin partai Sosial-Demokrat Van Kol, penginjil daerah Toraja, N. Adriani dan lain-lain. Surat-surat Kartini menunjukkan persahabatannya yang dalam dan cita-cita untuk membebaskan kaum wanita dari keterbelakangan di bidang pendidikan, serta penentangan terhadap adat kuno yang menghambat kemajuan wanita.

Dalam surat-suratnya antara lain dibentangkan tentang pergaulan dalam lingkungan, keadaan rakyat yang terbelakang dan sengsara adat-istiadat kuno seperti pemberian hormat dan pingitan terhadap anak gadis, perkawinan yang merendahkan derajat wanita. Ia juga mengecam pejabat Belanda yang tidak menaruh perhatian kepada rakyat banyak, hanya menaruh hormat kepada para bupati serta menunda-nunda perluasan pendidikan bagi orang bumiputra karena dianggap membahayakan kedudukan pemerintahan Hindia Belanda.

Masa pingitan Kartini berakhir ketika ia akan dikawinkan dengan Raden Adipati Ario Joyodiningrat, Bupati Rembang, pada tanggal 2 Nopember 1903. Sebagai Raden Ayu Bupati Rembang, ia tetap bertekad untuk melaksanakan cita-citanya yang juga ternyata dibantu oleh suaminya. Lebih-kurang setahun setelah menikah, Kartini meninggal setelah lima hari melahirkan puteranya yang pertama pada tanggal 17 September 1904. Ia dimakamkan di *pasarean* keluarga di Desa Bulu, kurang-lebih 22 km sebelah selatan Rembang.

Surat-surat Kartini kemudian diterbitkan untuk pertama kali pada tahun 1911 oleh Tuan dan Nyonya Abendanon dengan judul "*Door Duisternis tot Licht*" (Habis Gelap Terbitlah Terang). Pada tahun 1923 buku tersebut telah dicetak untuk keempat kalinya dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Inggris, Arab, dan Perancis. Maksud penerbitan tersebut ialah untuk mendapatkan dana mendirikan sekolah gadis dan sekolah guru perempuan di Indonesia. Pada tahun 1921 didirikan Fonds Kartini di Den Haag untuk membiayai "Sekolah Kartini dengan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar yang telah didirikan di Semarang, Jakarta, Malang, Bogor, dan dengan bahasa daerah di Cirebon, Rembang, Pekalongan, Indramayu, dan Surabaya.

Pada tahun 1912 telah dibuka Sekolah Kartini yang pertama di Semarang atas dorongan Mr. Deventer. Kemudian berdiri pula "*Van Deventer Fonds*" yang bertujuan sama dengan Fonds Kartini untuk tingkat sekolah lanjutan, dan sekolah guru Van Deventer di Semarang adalah salah satu hasil kegiatannya. Surat-surat Kartini dan pendirian Sekolah Kartini di berbagai tempat tersebut menunjukkan bahwa ia adalah seorang perintis dari kebangunan kaum terpelajar bangsa Indonesia. (14)

Akibat pengaruh Barat terhadap susunan kemasyarakatan

di desa, golongan penguasa bangsa Indonesia (bupati sampai asisten wedana), mundur kekuasaan dan wibawa mereka di mata rakyat biasa maupun di mata pegawai bangsa Belanda. Kemunduran kedudukan penguasa pribumi telah mulai sejak abad ke-19. Pada tahun 1870 politik kolonial-liberal bertujuan antara lain membebaskan masyarakat Jawa dari pengaruh feodal yang diperlukan bagi hubungan kerja-kontrak, sehingga kaum bangsawan dikurangi kekuasaan mereka. Pada tahun 1900 para bupati telah kehilangan sebagian besar dari kekuasaannya dalam lapangan kebudayaan, kehakiman, pemerintahan, militer, dan perekonomian, serta tanda-tanda kebesarannya telah dibatasi oleh pemerintah kolonial. Keadaan tersebut menjadi semakin buruk lagi pada abad ke-20, karena pemerintah mengambil tindakan juga terhadap cara penghormatan terhadap mereka. Menurut *Hormat Circulaire* dari tahun 1904, berbagai cara penghormatan harus ditiadakan berhubung dengan perkembangan lalu-lintas. Menurut pemerintah, pemberian hormat menurut kelaziman lama dinilai hina sekali bagi mereka yang telah timbul rasa harga dirinya. Kepada pegawai pemerintah bangsa Eropa ditetapkan bahwa mereka boleh membiarkan adat ini berlangsung, tetapi tidak boleh melindungi atau memperkuatnya. Pembebasan dari ikatan feodal yang dipelopori oleh bangsa Eropa dengan kemauan sendiri, telah dilanjutkan oleh bangsa Indonesia. Di kalangan bangsa Indonesia sendiri yang telah terpelajar, mulai timbul kebencian terhadap cara feodal. Tantangan ini terutama dimulai di kota oleh pegawai yang telah mendapat pendidikan Barat. Penghormatan cara feodal kini dirasakan sebagai sesuatu yang merendahkan. Hampir semua gerakan nasional bangsa Indonesia dalam abad ke-20, merupakan pula gerakan anti feodal. Pangeran Jayadiningrat pada tahun 1924 di dalam *Volksraad* mengemukakan tentang kemerosotan wibawa dari para pegawai pangreh praja bangsa Indonesia. Pada permulaan abad ke-20, berbagai macam paham modern telah memasuki kehidupan masyarakat Indonesia, seperti paham tentang kepentingan bersama, demokrasi, paham kemajuan dan kedudukan serta hak manusia yang sama.

C. INTERAKSI DI DAERAH JAWA TENGAH DENGAN BERDIRINYA PARTAI DAN ORGANISASI

1. *Budi Utomo*

Budi Utomo didirikan oleh murid-murid sekolah Stovia di Jakarta seperti Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Tjipto Mangunkusumo, Suradji, Suwardi Suryaningrat, Muhammad Saleh, Suwarna, Gumbreg pada tanggal 20 Mei 1908 (hari Rabu jam 9.00 pagi di ruangan Anatomi dari Sekolah Stovia), setelah mereka mengadakan diskusi dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mengadakan perjalanan propaganda di kota-kota di Jawa pada tahun 1906 untuk mendirikan *Studie Fonds* bagi orang-orang Jawa yang membutuhkan biaya guna meneruskan pelajarannya.¹⁶⁾

Sebelum mendirikan Budi Utomo, Sutomo juga mengadakan perjalanan propaganda untuk membangkitkan kesadaran akan suatu perkumpulan serta mempersiapkan cabang-cabang perkumpulan yang akan didirikan tersebut kepada murid-murid sekolah menengah bumiputera di Jawa. Sutomo dengan dua orang kawannya mengunjungi Sekolah Osvia (Sekolah Pegawai Bumiputera) di Magelang pada tahun 1908 untuk mencari dukungan bagi pembentukan perkumpulan itu. Mereka hanya mengunjungi sekolah-sekolah menengah bumiputera, seperti Osvia dan sekolah guru (*Kweekschool*), dan tidak mengunjungi HBS dan sekolah menengah lainnya yang sebagian besar muridnya adalah orang Eropa dan Indo-Eropa. Pembentukan Budi Utomo di Jakarta kemudian diikuti oleh para murid Osvia dan sekolah guru di Bandung, Magelang, Yogyakarta, dan Probolinggo. Cabang-cabang didirikan di sekolah tersebut dan juga di Sekolah Pertanian dan Kedokteran Hewan di Bogor. Di Yogyakarta didirikan cabang Budi Utomo yang terdiri dari pegawai negeri bumiputera dan bangsawan terutama dari keluarga Pakualam.¹⁷⁾

Untuk membentuk persatuan umum bangsa Jawa ("*Algemeene Javasche Bond*"), diputuskan untuk mengadakan Kongres Budi Utomo yang pertama di Yogyakarta pada bulan Oktober 1908. Di dalam kongres ini ternyata golongan priyayi dari Budi Utomo Cabang Yogyakarta berhasil mendapat pengaruh yang besar dan menyisihkan golongan muda yang kebanyakan masih belajar di Stovia. Dari golongan muda ini, golongan Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat berhaluan lebih ra-

dikal. 18) Dalam hubungan ini, Bernhard Dahm dalam bukunya mengutip pendapat dari Akira Nakazumi (*"The Origin and the Earlier Years of Budi Utomo 1908 - 1918"*), yang mengatakan bahwa "pertanyaan" yang mula-mula dibuat oleh para murid Stovia adalah sama dengan pendapat dari Cipto Mangunkusumo yang mengatakan bahwa Budi Utomo adalah suatu pergerakan protes sosial menentang kedudukan golongan priyayi yang lebih tinggi kedudukannya di dalam masyarakat Jawa. Tujuannya adalah untuk mengulurkan tangan kepada orang biasa dan membebaskan mereka dari kegelapan yang berasal dari ketidaktahuan sehingga mereka dapat lebih dipersenjatai di dalam perjuangan hidupnya dan berdiri tegak dalam menentang campur-tangan orang luar.

Pengalaman menunjukkan, bahwa bantuan tidak begitu dapat diharapkan dari golongan priyayi tinggi yang selalu tunduk kepada tekanan dari atas, dan mereka menunjukkan harapannya kepada murid-murid sekolah dan mahasiswa sebagai penasihat dari orang-orang biasa. "Pernyataan" yang kedua dari murid Stovia menunjukkan sifat yang lebih nasional dari Budi Utomo yang menyebutkan bahwa persatuan umum orang Jawa yang akan dibentuk akan bekerja untuk perkembangan yang harmonis dari tanah dan rakyat Hindia Belanda dan harapan untuk membentuk suatu persaudaraan nasional tanpa memandang jenis bangsa, kelamin atau agama serta bersedia untuk meleburkan dirinya ke dalam persekutuan yang lebih besar untuk dapat mencapai perkembangan. Perkembangan itu tidak hanya bagi dirinya saja, tetapi juga bagi banyak golongan penduduk dari Hindia Belanda. Dengan demikian di dalam kedua "pernyataan" tersebut golongan muda menunjukkan sifat Budi Utomo yang lebih luas, ialah hendak menolong rakyat kecil dan terbuka bagi segala golongan penduduk Hindia Belanda. Meskipun terdapat dua "pernyataan" dalam dua bulan setelah pembentukannya, perkumpulan Budi Utomo mendapat sambutan baik dari para bupati, sehingga golongan muda dalam kongres di Yogyakarta bersedia menyerahkan kepemimpinan kongres dan pengurus pusat kepada golongan tua. 19)

Kongres Budi Utomo yang pertama pada tanggal 5 Oktober 1908 kemudian memilih Raden Adipati Tirtokusumo, Bupati Karanganyar (Kedu Selatan), seorang bupati yang berpijakan maju, sebagai ketua pertama pengurus pusat Budi Utomo.

Di antara anggota pengurus, terdapat Dr. Wahidin Sudirohusodo (wakil ketua), M. Ng. Dwijosewoyo dan Raden Sasrasuganda (kedua-duanya guru *Kweekschool* di Yogyakarta, sebagai sekretaris), Gondoatmojo (Opsir Legium Pakualam, bendahara), sedangkan sebagai komisariss ialah Joyosubroto (Wedana Bandung), Gandasubrata (Jaksa kepala Surakarta) dan Cipto Mangunkusumo (dokter di Demak). Dalam anggaran dasar antara lain disebutkan tujuan organisasi adalah kemajuan nusa dan orang Jawa dan Madura yang selaras (harmonis), dengan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, tehnik dan industri, dan kebudayaan, serta mempertinggi cita-cita kemanusiaan, dan segala sesuatu yang perlu untuk mencapai "kehidupan bangsa yang terhormat". Sifat politik tidak disebutkan di dalam anggaran dasar, karena pasal 111 R.R. melarang pekumpulan dan rapat politik.²⁰⁾

Sikap pemerintah terhadap kongres dan pengangkatan seorang bupati sebagai ketua pengurus pusat Budi Utomo dapat dilihat dari pendapat De Graeff, sekretaris pemerintah pusat Hindia Belanda, yang disampaikan kepada Residen Kedu. Pemerintah menyambut baik dan tidak berkeberatan terhadap pengangkatan Bupati Karanganyar, Raden *Adipati Tirtokusumo*, seorang, yang cakap dan maju dan juga sungguh bijaksana" sebagai Ketua Budi Utomo dan memberitahukan kepada Residen Kedu supaya mengizinkan pengangkatan tersebut jika nanti Bupati Karanganyar meminta nasehat padanya. Dari pergerakan itu kata de Graeff hanya dapat diharapkan hasil-hasil yang bernilai apabila pimpinannya sejak semula diletakkan di tangan yang baik,²¹⁾ Lebih lanjut, Kepala Kantor Urusan Bumiputera, G. A.J. Hazeu, di dalam suratnya kepada Gubernur Jendral tertanggal 30 Desember 1908, antara lain mengatakan tentang pembentukan Budi Utomo sebagai berikut :

"Bukan saja segolongan kecil priyayi yang terbesar di sana-sini, tetapi juga siswa-siswa tertinggi dari perguruan tinggi bumiputera (teristimewa Sekolah Dokter Jawa di mana Sudiro Husodo banyak mempunyai hubungan) dan mempunyai cita-cita untuk berhimpun dengan tujuan, memajukan orang Jawa. Sebagai hasil dari propaganda itu didirikan Budi Utomo dan pada bulan Juli yang lalu mendapatkan 600 anggota termasuk murid sekolah tersebut di atas, juga

di kalangan priyayi (dokter Jawa, mantri guru, dan beberapa bupati hampir semuanya dari Jawa Tengah). Segera terasa keinginan untuk mengadakan sesuatu pertemuan di mana sebanyak-banyaknya para anggota perkumpulan hadir membicarakan bersama peraturan administratif yang diperlukan dan pemantapan program umum atau rencana kerja dan hal ini menuju kepada kongres di Yogyakarta Oktober yang lalu" 22)

Para bupati yang tidak menyetujui tujuan Budi Utomo untuk memajukan pendidikan kepada orang Jawa dari kalangan biasa, memang telah merasakan sesuatu serangan terhadap kedudukan mereka. Mereka mempertahankan pendapat bahwa pendidikan harus lebih dahulu diberikan kepada golongan priyayi sebagai pemimpin masyarakat bumi putera. Pada tanggal 27 Maret 1905, Bupati Temanggung, Cokroadikusumo, telah membentuk perkumpulan para bupati yang diberi nama "*Sasangka Purnama*", dengan tujuan memperluas dan memajukan pendidikan di kalangan para bupati. Rumah Bupati Temanggung yang mempunyai perpustakaan, sering menjadi tempat pertemuan dan ceramah yang dihadiri oleh golongan priyayi di daerahnya. Dr. Wahidin Sudirohusodo pernah meminta dukungan dari Sasangka Purnama mengenai gagasan pembentukan *studie fonds* dan beliau pernah pula memberikan ceramah tentang teosofi di Temanggung. Perkumpulan "*Sasangka Purnama*" tidak merasa puas terhadap pengurus Budi Utomo. Meskipun Pengurus pusat Budi Utomo dipimpin oleh Bupati Karanganyar Tirtokusumo, tetapi ia adalah seorang bupati yang maju di dalam karirnya, bukan keturunan melainkan berkata kemampuannya sendiri. Di samping itu anggota lainnya dari pengurus pusat terdiri dari golongan priyayi rendah. Keanggotaan Budi Utomo pada waktu itu, Oktober 1908 sudah berjumlah 1200 orang. Ketidakpuasan dan penentangan mereka terhadap golongan radikal dari Cipto dan Suwardi telah menyebabkan mereka pada tahun 1909 membentuk perkumpulan para bupati dan pada tahun 1911 dengan memakai nama "*Sedio Mulyo*".

Di dalam perkembangan Budi Utomo selanjutnya, golongan muda (Sutomo, Gunawan, Cipto, dan Suwardi), mengundurkan diri dari kepengurusan Budi Utomo yang sejak itu dikuasi oleh golongan moderat, seperti Dr. Rajiman Wedyodiningrat

Wedyodipuro) dan Dwijosewoyo. Sebelum kongres yang kedua, Cipto Mangunkusumo dan Suryodiputro, berhenti sebagai anggota pengurus pusat. Golongan moderat yang menguasai kepemimpinan Budi Utomo menginginkan agar organisasi itu tetap meneruskan tugas dan sifat kebudayaan Jawanya. Sokongan juga diperoleh dari golongan bangsawan Jawa terutama dari keluarga Pakualaman, pegawai rendah, dan priyayi rendah.

Pada tahun 1911 Pangeran Notodirejo dari keluarga Pakualaman telah dipilih sebagai Ketua Budi Utomo yang dijabatnya sampai tahun 1914, dan kemudian digantikan oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat yang menjadi dokter Kasunanan Surakarta. Pada tahun 1915, Dr. Rajiman digantikan oleh R.M. Ario Suryo Suptarto yang kemudian menjadi Mangkunegara VII.

Dalam masa ini Budi Utomo mengalami gerak yang lambat sehingga hasil yang dicapai hanyalah perbaikan pengajaran dan pendidikan di daerah kesultanan dan kesunanan dengan mendirikan tiga sekolah netral, satu di Sala dan dua di Yogyakarta. Sekolah ini mendapat bantuan dari sultan berupa tanah dan uang sebanyak f.45.000, mendirikan dana belajar "*Derma Wara*" yang mendapat sokongan dari pemerintah sebesar f.50.000, menerbitkan majalah "*Guru Desa*", mengusahakan perubahan pelajaran Bahasa Belanda di sekolah rendah yang semula mulai diajarkan di kelas tiga, sekarang mulai dari kelas satu kemudian mengajukan beberapa petisi yang ditujukan kepada pemerintah yang berhubungan dengan usaha meninggikan mutu sekolah menengah pertama.

Di samping itu dengan berdirinya perkumpulan kebangsaan yang lain, seperti *Indische Partij* dan Sarekat Islam, dengan sifat kebangsaan yang lebih luas dan lebih radikal, telah mengurangi pengaruh Budi Utomo.²⁴⁾ Kedua partai tersebut telah menarik unsur yang tidak puas untuk keluar dari Budi Utomo. Meskipun prinsip utama tentang sikap netral terhadap agama dan aktivitas non-politik masih tetap membedakan perkumpulan Budi Utomo dari organisasi lainnya, tetapi Budi Utomo harus menghadapi kenyataan pahit bahwa selama prinsip itu dipertahankan dengan sifat yang pasif, tidaklah akan dapat diharapkan bahwa pengaruh Budi Utomo akan meluas.²⁵⁾

2. *Indische Partij*

Di antara golongan radikal di dalam Budi Utomo kemudian

membentuk organisasi dari semua golongan bangsa yang mendiami dan menghuni Hindia Belanda, yang dipelopori oleh Cipto dan Suwardi. Bersama dengan E.F.E. Douwes Dekker, mereka mendirikan *Indische Partij* pada tahun 1912.²⁶⁾ Sebelum bergabung dengan *Indische Partij*, Suwardi telah keluar dari Budi Utomo dan masuk ke dalam Sarekat Islam dengan mendirikan S.I. cabang Bandung bersama-sama dengan Abdul Muis, St. Muhammad Zain dan A. Wignyadisastira, di mana Suwardi diangkat sebagai ketua.²⁷⁾

Dr. Cipto adalah putera yang tertua dari 9 orang putera Mangunkusumo, yang lahir di Ambarawa pada tahun 1886. Ayahnya seorang guru "Sekolah Bumi Putera Klas Dua" di kota Ambarawa, yang kemudian menjadi Guru Kepala pada HIS di Semarang dan kemudian menjadi anggota *Gemeenteraad* di kota itu. Cipto Mangunkusumo memasuki pendidikan di Stovia pada umur 13 tahun pada yaitu tahun 1899 dan tamat pada umur 19 tahun. Ia terkenal sebagai seorang murid yang cakap dan berjiwa kemerdekaan yang kuat, seorang demokrat yang selalu membela kepentingan orang biasa terhadap golongan priyayi, terutama dalam lapangan pendidikan. Setelah tamat dari Stovia ia bekerja sebagai dokter pemerintah dan ditempatkan mula-mula di Banjarmasin kemudian pindah ke Demak. Ketika tinggal di Demak, Dr. Cipto mulai mengeluarkan kritiknya yang tajam terhadap masyarakat kolonial. Dalam sebuah karangan di harian "*De Locomatief*", ia mengecam pemerintah yang pada tahun 1907 mengeluarkan keputusan menjadikan jabatan bupati sebagai jabatan yang turun menurun. Menurut Dr. Cipto keputusan ini bertentangan dengan keinginan politik etis yang menghendaki bahwa rakyat harus memerintah sendiri. Yang lebih penting adalah pengetahuan dan kemampuan, bukan kelahiran yang menjadi faktor menentukan.²⁸⁾

Sebelum *Indische Partij* didirikan, Douwes Dekker mengadakan perjalanan propaganda mengunjungi kota-kota di Jawa dari tanggal 15 September sampai tanggal 3 Oktober 1912. Dalam perjalanan ini ia bertemu dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan mengadakan pertukaran pendapat bertalian dengan *Indische Partij* yang akan didirikan itu. Di Bandung, ia mendapat dukungan dari Suwardi dan Abdul Muis yang pada waktu itu menjadi pimpinan SI cabang Bandung. Di Yogyakarta ia mendapat sambutan baik dari pengurus pusat. Bupati Utomo, Redaktur surat kabar

Jawa Tengah di Semarang dan "Tjahaja Timur" di Malang juga menyokong rencananya tersebut. Sebagai hasil dari perjalanannya itu, dapat didirikan 30 cabang dengan 7300 orang anggota, kebanyakan orang Indo-Belanda, sedangkan anggota bangsa Indonesia berjumlah 1500 orang. Banyak anggota Budi Utomo menggabungkan diri ke dalam perkumpulan S.I. dan kemudian *Indische Partij*. 29)

Tujuan *Indische Partij* seperti dinyatakan dalam harian "*Het Tijdschrift*" tanggal 15 Mei 1912, adalah: Hindia bagi semua bangsa yang berdiam di Hindia, upah yang sama untuk pekerjaan yang sama dan pemisahan dari Negeri Belanda." 30) Dalam kongresnya yang dihadiri oleh wakil daerah di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912, telah dipilih Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai ketua dan wakil ketua. Tujuan *Indische Partij* seperti dicantumkan dalam anggarannya ialah "untuk membangunkan patriotisme semua "*Indiers*" terhadap kepada tanah air Hindia yang telah memberi lapangan hidup kepada mereka, agar mereka mendapat dorongan untuk bekerja sama atas dasar persamaan ketatanegaraan untuk memajukan tanah air "*Hindia*" dan untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka". Dengan demikian nyatalah bahwa *Indische Partij* berdiri di atas dasar nasionalisme Hindia yang menuju kepada kemerdekaan Indonesia, sebagai perumahan nasional semua orang yang mengakui "*Hindia*" sebagai negara dan kebangsaannya. Paham ini pada waktu itu disebut "*Indische Nationalisme*". 31)

3. *Sarekat Islam (SI)*

a. Pembentukan SI di Sala

Latar belakang pembentukan S.I. yang pada mulanya bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) adalah kebangunan pedagang Arab dan Sumatra yang merasa kedudukan mereka terancam karena kegiatan pedagang Cina. Kejadian di daratan Cina telah mempengaruhi golongan orang Cina di Hindia Belanda untuk menuntut perbaikan dalam status sosial mereka. Pada permulaan abad ke-20 orang Cina telah berhasil memperoleh konsesi penting dari pemerintah kolonial seperti penghapusan "Surat Pas" (surat larangan) bagi orang Cina yang akan bepergian di luar daerah tempat tinggalnya biasanya mereka berdiam di suatu bagian kota. Konsesi ini diberikan karena perdagangan Belanda membutuh-

kan orang Cina sebagai pedagang perantara di desa-desa. Konsesi lainnya ialah pendirian Sekolah Cina-Belanda (HCS) oleh pemerintah pada tahun 1908, pembentukan perkumpulan pedagang Cina yang disebut "*Siang Hwee*" pada tahun 1901, dan pengakuan yang sama bagi orang Cina dalam kedudukan hukum dengan golongan orang Eropa dalam hukum perdata dan hukum dagang. Akan tetapi pada waktu yang bersamaan, pemerintah juga mengambil alih beberapa perusahaan yang sebelumnya dipegang oleh orang Cina, seperti rumah gadai, peminjaman kepada orang di desa dan perdagangan candu. Hal ini menyebabkan banyak orang Cina yang memindahkan modal dan usahanya ke bidang perusahaan lainnya, seperti perusahaan batik. Kegiatan orang Cina tersebut telah menimbulkan keinginan pada para pedagang Arab dan Sumatra untuk membentuk perkumpulan dan bersatu seperti orang Cina tersebut agar dapat membela hak mereka serta mengajukan tuntutan perbaikan kepada pemerintah.³²⁾

Pembentukan S.D.I. (Sarekat Dagang Islam) di Solo di dahului dengan didirikannya perkumpulan oleh para pedagang Arab dan Sumatra Barat oleh karena mereka merasakan ancaman terhadap kedudukannya dari pedagang Cina. Pedagang Arab dan Sumatra pada tahun 1904 mendirikan perkumpulan dengan nama "*Jamiat Khair*", yang selain bersifat ekonomi juga mempunyai sifat Agama Islam yang kuat. Sekolah bagi orang Arab didirikan, dan guru dari Arab didatangkan. Pada tahun 1908 perkumpulan ini mendirikan perkumpulan pendidikan dari orang Indonesia yang beragama Islam dengan nama "*Sumatra – Batavia – Alchevia*". Perkumpulan ini berhasil menarik minat dan mendapat pengikut dari orang Indonesia yang menjadi pengusaha atau pedagang.

Oleh karena terpengaruh oleh kegiatan perkumpulan *Jamiat Khair* atau "*Al-Jam'iyat al-Khairiyah*" tersebut dan pembentukan perkumpulan Budi Utomo di Yogyakarta kebangunan kembali minat kepada agama Islam, serta ancaman persaingan yang semakin besar dari pedagang Cina, maka Haji Samanhudi, seorang pedagang batik di kota Solo di Kampung Lawean, telah merencanakan mendirikan perkumpulan semacam itu bagi pedagang bangsa Indonesia di kota Solo. Akan tetapi karena ia tidak mempunyai bakat serta waktu untuk melaksanakan maksud tersebut, maka ia membutuhkan seorang yang dapat mengorganisasi dan memimpin perkumpulan tersebut. Pilihannya jatuh pada seorang

yang telah berpengalaman dalam pembentukan perkumpulan pedagang, ialah Raden Mas Tirtoadisuryo, yang telah ikutserta mendirikan perkumpulan "Jamiat Khair" di Batavia. Tirtoadisuryo adalah seorang putera dari seorang pegawai pemerintah di Solo, dan mendapat pendidikan di Sekolah Pamong Praja (Osvia) di Magelang. Setelah selesai pendidikan ia menjadi pegawai rendah bumiputera, tetapi karena tidak puas terhadap pekerjaannya, ia keluar dari pegawai negeri dan mencari pekerjaan di lapangan surat kabar. Dengan mendapat sokongan moril, keuangan dari golongan pedagang Arab dan Sumatra di Batavia, ia mendirikan surat kabar perdagangan bangsa Indonesia di Bandung yang diberi nama "*Medan Priyayi*". Tirtoadisuryo telah menulis karangan dalam Bahasa Melayu dan Jawa. Karena surat kabar ini dia dianggap sebagai "Bapak Pers bangsa Indonesia". Karena surat kabarnya menunjukkan yang baik, maka ia mendapat dukungan dari pedagang Sumatra dan Arab untuk mendirikan perkumpulan yang diberi nama "Sarekat Dagang Islamiyah" di Batavia pada tahun 1909, dan kemudian pada tahun 1911 mendirikan cabang perkumpulan itu di Bogor dengan nama "Sarekat Dagang Islam". Meskipun nama "Islamiyah" sudah diganti dengan "Islam", tetapi pengaruh dari pedagang Arab rupanya tetap besar di dalam perkumpulan tersebut. Kegiatannya ini telah menarik perhatian Haji Samanhudi, sehingga kemudian Tirtoadisuryo diundang ke Solo untuk membentuk perkumpulan yang serupa di antara pedagang di kota Solo.³³⁾

Dengan demikian cabang Sarekat Dagang Islam (SDI) telah didirikan oleh Haji Samanhudi dan Tirtoadisuryo di kota Solo pada tanggal 11 Nopember 1911. Perkumpulan ini mempunyai dasar koperasi dengan tujuan untuk memajukan perdagangan bangsa Indonesia di atas dasar panji Islam yang merupakan agama terbesar dalam masyarakat Indonesia. Dalam Anggaran Dasar SDI yang dirumuskan oleh Tirtoadisuryo antara lain dinyatakan: "Tiap-tiap orang mengetahui, bahwa masa yang sekarang ini dianggap dalam (sebagai zaman) kemajuan. Harusnya sekarang kita berhaluan janganlah hendaknya mencari kemajuan itu cuma dengan suara (kata-kata) saja. Bagi kita kaum muslimin adalah dipikulkan wajib akan turut mencapai kemajuan, oleh karenanya maka telah mendirikan perhimpunan Sarekat Islam".³⁴⁾

Akan tetapi terjadi perselisihan antara H. Samanhudi dengan Tirtoadisuryo di dalam perkumpulan SDI, yang mungkin di-

sebabkan karena hubungan Tirto yang terlalu erat dengan orang Arab, atau karena tidak beresnya keuangan perkumpulan, sehingga surat kabar "*Sarwotomo*" yang diterbitkan oleh SDI cabang Solo hampir mengalami keruntuhan. Keadaan ini menyebabkan retaknya hubungan antara Tirtoadisuryo dengan H. Samanhudi, meskipun pada waktu itu Tirto berhasil meluaskan perkumpulan SDI di Batavia, Bogor, dan Bandung.

Sementara itu di kota Solo gerakan SDI di bawah pimpinan H. Samanhudi telah mempunyai anggota di kalangan rakyat jelata, sehingga perkumpulan itu tidak lagi semata-mata bersifat perdagangan seperti keadaan sebelumnya. Dengan bertambahnya anggota pengurus mengalami kesukaran mengadakan pengawasan terhadap anggotanya. Di kota Solo pada waktu itu sangat merasakan kegiatan misi agama Kristen dan kegiatan dari pedagang Cina yang telah mencampuri bidang kegiatan perekonomian seperti industri batik, yang selama ini masih dapat dikuasai oleh orang Indonesia. Keadaan ini menyebabkan timbulnya sikap bermusuhan di antara orang Indonesia dan orang Cina, sehingga mengakibatkan terjadinya perkelahian. Untuk menghajar orang Cina, mereka diserang dan tokonya dirusak, dan keributan ini juga terjadi di Surabaya. Pemerintah khawatir keadaan tersebut lambat-laun akan berubah menjadi gerakan melawan pemerintah, sehingga Residen Surakarta telah membekukan SDI Sala tanggal 12 Agustus 1912, mereka dilarang menerima anggota baru dan mengadakan rapat. Penggeledahan di rumah-rumah anggota SDI kemudian diadakan, tetapi karena tidak terdapat tanda-tanda menentang pemerintah, maka pada tanggal 26 Agustus 1912 larangan tersebut dicabut.³⁵⁾

Mengenai kerusuhan anti Cina di Solo pada bulan Juli 1912 dapat dituturkan sebagai berikut. Kerusuhan dimulai dengan perkelahian yang terjadi di antara dua orang anggota pasukan Mangkunegaran dengan serombongan orang Cina. Pada hari berikutnya terjadi penyerangan oleh pasukan berkuda Mangkunegaran terhadap kampung orang Cina, sehingga selama beberapa minggu kota Solo dilanda perkelahian di antara golongan bangsa. Laporan resmi pemerintah mengatakan bahwa kanak-kanak juga terlibat. Juga tersiar kabar bahwa orang Belanda akan diusir ke luar Jawa untuk digantikan oleh orang Cina. Kemudian di beberapa perkebunan terjadi pemogokan. Di Desa Krapyak, anggota SI berani menentang tindakan asisten residen dan seorang wakil dari pe-

merintahan kasunanan yaitu Bupati Nayoko Joyonegoro. Penggeledahan yang kemudian dilakukan terhadap rumah para pemimpin SI dilakukan oleh asisten residen, komisaris polisi, bupati, polisi kliwon, panemu dan Asisten Wedana Lawean. Dari pengurus SI yang ikut digeledah adalah H. Samanhudi dan Sekretaris IS IR. Ng. Joyonegoro. Penggeledahan dilakukan pertamakali di rumah H Samanhudi sebagai ketua SI kemudian di Kantor SI di Purwosari, di rumah Sekretaris II SI, Harjosumarta, bendahara SI Kartowiharjo di Kampung Coyudan, di rumah beberapa anggota di Kampung Lawean, dan akhirnya di rumah Sekretaris IR. Ng. Joyonegoro. Dari penggeledahan itu tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa SI hendak melakukan pengacauan.

Kerusuhan di Solo kemudian meluas ke bagian utara daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di kota Semarang terjadi kerusuhan di Kampung Brondongan pada tanggal 24 Maret 1913, di mana terjadi perkelahian karena pencemaran langgar oleh orang Cina. Di kampung Brondongan anggota SI telah dapat mengumpulkan uang untuk membuka sebuah toko dan warung koperasi. Akibatnya, seorang Cina penjual tahu dan nasi yang bernama Liem No Sing (Bligo) di Kampung Brondongan tersebut kehilangan banyak langganan sehingga ia sangat marah terhadap orang SI, dan ia berusaha mengganggu orang-orang yang sedang sholat, memaki-maki orang SI, dan sebagainya. Menurut laporan Residen Semarang tanggal 7 April 1913, Liem Mo Sing telah melemparkan sepotong daging babi ke sebuah langgar di kampung tersebut. Selain itu juga beberapa orang Cina telah bertindak sangat propokatif, dengan memukul kaleng ketika sedang diadakan sembahyang di langgar tersebut. Dilaporkan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 1913 malam, seorang yang bernama Rus, setelah sholat Isa' melihat Liem Mo Sing sedang bersembunyi di bawah surau. Karena diketahui, Liem Mo Sing melarikan diri, tetapi kemudian dikejar oleh orang banyak yang berada di surau itu. Ketika ia ditangkap kemudian dipukuli, sehingga beberapa orang Cina yang berusaha melarikan diri karena takut ikut dipukuli penduduk, karena dikira akan membantu Liem Mo Sing. Di dalam perkelahian yang kemudian terjadi lima orang Cina luka, dan salah seorang di antaranya meninggal beberapa hari kemudian.

Kerusuhan juga meluas ke daerah Karesidenan Rembang. Di Tuban kerusuhan meletus ketika para pekerja menolak un-

tuk bekerja pada seorang Cina karena pembayaran terlalu rendah; kepala desa telah dipukul karena perlakuannya yang keras terhadap pekerja tersebut. Kemudian anggota SI di tempat itu bertindak untuk menyelesaikan kerusakan, yang sebetulnya menjadi urusan pemerintah. Suatu kerusakan lain terjadi karena dibunuhnya seekor kucing wasiat oleh seorang Cina yang telah berjanji untuk membayar ganti kerugian.

Tetapi serombongan besar orang dengan membawa senjata telah berkumpul di muka rumah orang Cina tersebut dan melakukan penyerangan. Pejabat pemerintah diancam jika mereka melindungi orang Cina tersebut.

Akhirnya pejabat pemerintah mengalah dengan memerintahkan orang Cina yang bernama Lie Hie Tjong pergi. Orang Cina tersebut akhirnya menganut agama Islam. ³⁶⁾

Sebelum terjadinya kerusakan anti Cina di kota Solo telah terjadi pertentangan antara Tirtoadisuryo dengan H. Samanhudi. Kemudian H. Samanhudi berusaha mencari seorang yang dapat dipercayainya untuk mengadakan reorganisasi SDI cabang Solo. Pilihannya jatuh pada H.O.S. Cokroaminoto, yang kemudian menjadi pimpinan SI yang paling terkenal. Cokroaminoto dilahirkan pada tanggal 16 Agustus 1882 di Desa Batur, Madiun, sebagai putera kedua dari Raden Mas Cokroaminoto, yang menjabat wedana di Kleco (Madiun). Seperti juga Tirtoadisuryo, Cokroaminoto pernah bersekolah di Osvia Magelang dan tamat dari sekolah tersebut pada tahun 1902. Kemudian ia menjadi pegawai pamongpraja sebagai jurutulis patih di Ngawi.

Akan tetapi seperti halnya dengan Tirtoadisuryo, ia tidak menyukai pekerjaan tersebut, sehingga ia keluar dari dinas pamongpraja pada tahun 1905, kemudian menggabungkan diri pada suatu pertunjukkan wayang orang (*wayang*). Akhirnya ia bekerja pada sebuah perusahaan (Firma Kooy & Co) di kota Surabaya sambil belajar di waktu petang hari di *Burgelijke, Avond School* (BAS) dari tahun 1907 – 1910. Setelah menamatkan pejalaran di BAS, ia bekerja sebagai *leerling machinist*, dan akhirnya sebagai ahli kimia di suatu pabrik gula dekat kota Surabaya. ³⁷⁾

Pada waktu itu, Cokroaminoto dihubungi oleh H. Samanhudi untuk mengorganisasi SDI Solo. Berkat jasanya, pada tanggal 10 September 1912 dikeluarkan pengumuman oleh Cokroaminoto di kota Surabaya, mengenai anggaran dasar baru

SDI Solo dengan nama yang baru "Sarekat Islam". Dalam organisasi baru ini Haji Samanhudi menjadi ketua pengurus besar dan Cokroaminoto menjadi komisaris. Anggaran dasar SI yang baru tersebut bertujuan: (a). memajukan semangat dagang bangsa Indonesia, (b). memberikan bantuan kepada anggota yang menderita kesukaran karena sebab yang bukan kesalahannya sendiri (c), memajukan perkembangan spiritual (jiwa) dan kepentingan kehidupan bangsa Indonesia sehingga dapat meninggikan tingkat hidup mereka, dan (d). menghilangkan paham-paham yang keliru (salah pengertian) tentang Agama Islam dan memajukan kehidupan keagamaan di antara rakyat Indonesia sesuai dengan hukum Agama Islam. Tujuan ini dicapai dengan cara yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesopanan masyarakat. Mengenai keanggotaan, terdapat anggota biasa dan anggota yang terhormat.

Pada tanggal 14 September 1912, Anggaran Dasar SI yang baru dikirimkan kepada pemerintah untuk mendapat pengesahan hukum. Tujuan politik tidak dicantumkan, karena pendirian partai politik pada waktu itu tidak diperbolehkan.³⁸⁾ Dengan demikian berdirilah perkumpulan "Sarekat Islam" di Solo yang di waktu kemudian memegang peranan yang sangat penting dalam sejarah kebangunan nasional bangsa Indonesia.

Anggota SI dalam waktu dekat meningkat menjadi 60.000 orang dan perkembangan seperti ini belum pernah dialami oleh partai-partai sebelumnya (BU atau *Indische Partij*). Inilah sebabnya SI sering dianggap sebagai perkumpulan bangsa Indonesia pertama yang dapat mencapai golongan rakyat kecil, terutama orang yang tinggal di desa.

Jumlah anggota SI di Jawa tahun 1912 – 1914 ialah:

April 1912 (Sarekat Dagang Islam)	: 45.000 orang
Agustus	: 66.000 orang
Desember 1912 (Sarekat Islam)	: 95.000 orang
April 1913	: 150.000 orang
April 1914	: 366.913 orang ³⁹⁾

Kongres SI pertama yang diadakan di Surabaya pada tanggal 26 Januari 1913 dipimpin oleh Cokroaminoto. Dalam kongres ini Cokroaminoto menerangkan bahwa SI bukan partai politik dan tidak melawan Pemerintah Belanda. Meskipun begitu, dengan Agama Islam sebagai lambang persatuan dan dengan penuh kemauan, akan mempertinggi derajat rakyat. Konggres mencapai

hasil yang besar dan cabang SI di seluruh Jawa berkembang "sebagai banjir yang hebat". Di Jakarta jumlah anggotanya mencapai kurang lebih 12.000 orang. Kongres kedua diadakan di Taman Sriwedari Solo pada bulan Maret 1913. Di dalam kongres ini diputuskan bahwa SI hanya terbuka bagi orang Indonesia bukan pegawai negeri sehingga tidak mengubah sifat SI sebagai organisasi rakyat. Dalam hal ini pemerintah kolonial tidak senang melihat kekuatan SI yang semakin besar. Orang Belanda yang tinggal di Indonesia dihindangi kekhawatiran dan kekuatan menghadapi pergerakan SI. Gubernur Jenderal A.W.F. Idenburg mulai bersikap ragu terhadap pergerakan baru itu dan mencurigai arah dan tujuannya. Kalangan pengusaha bangsa Belanda mengkhawatirkan terjadinya pembunuhan umum terhadap orang Eropa. Seorang residen mengirim kawat kepada Sri Ratu Belanda bahwa SI menghasut rakyat. Pers Belanda meramalkan terjadinya kerusuhan dan suatu direksi perkebunan memasang iklan yang meminta opsir Hindia Belanda yang cakap guna memberikan nasehat untuk penjagaan dan pertahanan pabrik. Ketua sindikat gula menghadap dan memperingatkan G.G. akan gentingnya keadaan. Nasehat aparat pemerintah simpang-siur dan saling bertentangan, demikian juga laporan para residen. Akhirnya permintaan SI untuk mendapatkan status hukum ditolak dengan suat keputusan G.G. tanggal 30 Juni 1913. Dalam keputusan itu antara lain dikemukakan alasan bahwa pengesahan akan bertentangan dengan kepentingan umum (*algemeen belang*), karena SI masih harus lebih diperkokoh (konsolidasi) dahulu, pengurusan keuangan harus tertib. Jaminan adanya pimpinan pusat yang cukup berwibawa untuk mengendalikan cabangnya yang terbesar dalam daerah yang sangat luas harus ada. Dalam surat penolakan itu dikatakan bahwa cabang-cabang SI di daerah-daerah (lokal) harus berdiri sendiri untuk dapat diakui sebagai badan hukum, meskipun pemerintah tidak berkeberatan bahwa cabang-cabang SI daerah akan bekerjasama dalam sebuah badan perwakilan pengurus pusat.

Pada tahun 1915 di Surabaya didirikan Central SI yang telah mempunyai 30 buah cabang. Maksud pembentukan itu adalah untuk memajukan dan membantu SI daerah guna mengadakan hubungan dan kerjasama. Dalam kongresnya yang ketiga di Bandung pada bulan Juni 1916 yang merupakan kongres Nasional SI, jumlah anggota mencapai 800.000 orang. Pada

tahun 1919 ketika SI sedang memperhebat propagandanya untuk menentang kapital asing, jumlah anggotanya meningkat sampai 2 juta.⁴⁰⁾

Perkembangan yang sangat cepat dari SI mungkin disebabkan oleh dua hal, yaitu *pertama* kenaikan jumlah orang Jawa yang melakukan ibadah haji ke Mekah sebagai kebangunan minat terhadap Agama Islam. Pada tahun 1890 terdapat seorang haji di setiap desa tetapi pada tahun 1905 menjadi dua orang setiap desa, dan kemudian menjadi 4 orang. Tahun 1911 adalah Tahun haji Akhbar yang berarti lebih banyak orang melakukan ibadah haji. Perkembangan ini ada hubungannya dengan perkembangan SI dan kebangunan Islam yang terjadi sejak tahun 1900, yang menyebabkan anggota SI bertambah. Dengan jalan propaganda Agama Islam, jumlah orang yang naik haji menjadi meningkat juga. Sebab yang kedua ialah orang desa tertarik untuk menjadi anggota SI terutama oleh karena terpengaruh akan kepercayaan mereka terhadap Ratu Adil atau Herucokro. Mereka menganggap bahwa pemimpin SI Cokroaminoto adalah Ratu Adil yang akan mendatangkan kebahagiaan dan keadilan kepada semua orang.

Cokroaminoto menyadari adanya pengaruh tersebut dan berusaha untuk menghilangkan segi anti asing dari kepercayaan Ratu Adil tersebut dengan mengatakan bahwa ia dan SI tidak bersikap anti Pemerintah Belanda, dan tidak bermaksud mengusir Belanda dari Indonesia. SI akan berjuang dengan cara yang tak bertentangan dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar SI. Haji Agus Salim yang telah menjadi anggota SI berusaha keras untuk menghilangkan pengaruh kepercayaan Ratu Adil dari pengikut SI.⁴¹⁾

b. Sarekat Islam Cabang Semarang dan Pergerakan Buruh

Pendiri SI cabang Semarang ialah Raden Muhammad Yusuf, seorang klerik di salah satu perusahaan trem, dan Raden Suyono, seorang sekretaris di kantor kabupaten. Kota Semarang dari 1912 – 1915 adalah suatu kota yang sedang berkembang pesat dan mengalami perubahan yang cepat dalam masalah urbanisasi dan pertambahan kaum buruh. Kondisi ini menyebabkan mudah timbulnya perasaan penentangan, dan menjadi daerah yang subur bagi kegiatan golongan revolusioner kiri.

Pada tahun 1914 dan 1915, penguasa Belanda melakukan penekanan agar orang Indonesia yang menjadi pegawai peme-

rintah jangan memasuki SI. Raden Sujono dan beberapa orang telah keluar dari SI, akan tetapi Raden Muhammad Yusuf tetap menjadi pemimpin SI cabang Semarang. Bahkan kemudian ia diangkat menjadi anggota pengurus pusat SI di Solo, mungkin untuk menenangkan golongan radikal yang mulai dapat menguasai SI cabang Semarang dan ingin memisahkan diri dari pusat SI. Raden Muhammad Yusuf juga kehilangan pengaruhnya di dalam SI cabang Semarang yang semakin dikuasai oleh golongan radikal dan serikat buruh. Kedudukannya di Semarang kemudian digantikan oleh Semaun, yang berhasil menguasai SI cabang Semarang dan yang kemudian juga diangkat menjadi anggota pengurus pusat SI, dan mengenai R. Muhammad Yusuf tidak diketahui selanjutnya. 42)

Semaun, yang pada tahun 1915 baru berumur 19 tahun bersama temannya Darsono, Tan Malaka, dan Alimin Prawirodirjo, telah mulai menggerakkan dan meluaskan pengaruh paham komunis di kalangan SI. Ia juga aktif bergerak di dalam serikat buruh kereta api di mana ayahnya bekerja. Serikat buruh kereta api yang bernama VSTP (*Vereeniging Van Spoor en Tramweg-personeel*), didirikan pada tahun 1908 di Semarang terbuka bagi pegawai Indonesia maupun Belanda dari semua perusahaan kereta api. VSTP mula-mula hanya meliputi buruh dan pegawai perusahaan kereta api swasta, ialah SCS (*Semarang Cheribon Stoomtram Maatschappij*) dan NIS (*Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij*). Tetapi setelah *Staatspoorbond* yang didirikan pada tahun 1905 bubar pada tahun 1912, maka VSTP kemudian juga menampung buruh dan pegawai kereta api negara (*Staatspoor*).

VSTP sejak tahun 1913 berada dalam pengaruh Sneevliet yang datang di Jawa pada tahun itu sebagai sekretaris suatu perkumpulan dagang di kota Semarang. Sneevliet bersama temannya mulai mempropagandakan paham komunis dan sosialis di kalangan orang Belanda dan Indonesia. Semaun yang menjadi muridnya segera dapat menguasai VSTP dan SI cabang Semarang pada tahun 1916.

Pada bulan Mei 1914 di Semarang, Sneevliet dan kawan-kawannya mendirikan ISDV (*Indische Social Demokratische Vereeniging*) yang bertujuan menyebarkan paham Marxis. Pada tahun 1912, Semaun mendirikan *Revolutionaire Vakcentrale* di mana VSTP menjadi intinya dan berpusat di Semarang. Pem-

bentukan *Revolutionaire Vakcentrale* adalah menyaingi PPKB (Persatuan Pergerakan Kaum Buruh) yang dibentuk pada bulan Desember 1919 di Yogyakarta dan yang dikuasai oleh lawan-lawan Semaun di dalam Pengurus Pusat SI, yaitu H.A. Salim Suryopranoto dan Abdul Muis. Organisasi yang berpengaruh dalam PPKB ialah PPPB atau Persatuan Pegawai Pegadaian Bumi-putera. *Revolutionaire Vakcentrale* yang dipimpin Semaun telah mencampuri pemogokan buruh pelabuhan Surabaya pada bulan Agustus 1921, di mana Semaun telah ditunjuk untuk berunding dengan kaum majikan agar pihak majikan jangan meneruskan niatnya untuk menurunkan upah buruh. 43)

c. Kegiatan SI di daerah-daerah Jawa Tengah

1. Karesidenan Semarang

Menurut Residen Semarang De Vogel, gerakan SI di Jawa Tengah yang terbesar terdapat di Semarang, dan setelah itu di Kudus. Di daerah lain pada umumnya anggotanya hanya beberapa ratus orang Untuk menjaga agar SI tidak membahayakan pemerintah, maka Residen Semarang berusaha agar jabatan pengurus SI dapat dipegang oleh pegawai pemerintah dan orang yang benar-benar cakap.

Pada tanggal 27 - 28 Pebruari 1919 dan 1 Maret 1919 diadakan rapat pengurus SI cabang Semarang di rumah Semaun, Marco dan Partohatmojo secara bergantian. Hadir dalam rapat tersebut wakil-wakil SI dari Semarang, Batavia, Bandung, Yogyakarta, Medan - Deli, Padang, Telukbetung, dan Fort de Kock (Bukittinggi), serta Sulawesi. Di antara pengurus SI yang hadir adalah Kasmin ketua SI Batavia, Abdul Muis ketua cabang Bandung, R.M. Soeryopranoto SI cabang Yogyakarta. Anggauta pengurus SI cabang Semarang yang hadir adalah Mas Marco, Kartodikromo, Supeno, Yusuf, Sanyoto, A.B. Sugito partohatmojo, Sugeng, dan Cokrodijoyo, Matkasan alias Dalmanap, sekretaris dari perkumpulan Kaum Buruh dan Tani (PK BT) yang dipimpin oleh Baars dan Sneevliet di Semarang. Dari CSI hadir H.O.S. Cokroaminoto dan beberapa orang yang terpandang dari golongan bumiputera dan Cina. Pembicaraan dalam rapat itu pada garis besarnya mengajak anggauta SI bersatu untuk membebaskan rakyat dari penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan partikelir Belanda. SI

akan mengajak rakyat menuntut kemerdekaan, sebab hanya dengan kemerdekaan nasib rakyat dapat diperbaiki. Menurut Co-kroaminoto, dalam menuntut kemerdekaan itu SI dan rakyat tidak perlu melawan undang-undang.

2. S.I. Kudus

Menurut asisten residen, pengurus SI Kudus sebagian adalah haji dari golongan menengah yang cukup, tokohnya yang terkemuka ialah Kyai Haji Asnawi. Kegiatannya terutama mengadakan pembinaan bagi anggotanya agar menjadi muslim yang saleh. Pengurus SI yang terbesar terdapat di daerah Kudus Kulon, bagian kota Kudus lama. Kemudian timbul kelompok radial yang melakukan oposisi terhadap pengurusnya yang dipimpin oleh Surejo dan Zain Muhammad. Kedua orang ini adalah anggota SI yang merangkap menjadi anggota *Perkumpulan Kaum Buruh dan Tani* (PBKT) yang berpusat di Semarang; sedangkan PBKT cabang Kudus tidak banyak anggotanya tetapi pengaruhnya tetap ada terutama, untuk mencegah agar tidak terjadi bentrokan dengan orang Cina dan mengawasi penggunaan uang SI yang diperoleh dari iuran anggota. Uang tersebut jangan sampai digunakan untuk kepentingan pribadi pengurusnya hasil iuran itu cukup besar, dimana tiap anggota diwajibkan membayar iuran F.1,.

Sementara itu organisasi PBKT mempunyai banyak pedagang di Kudus, karena sudah lama pedagang ini mempunyai benih pertentangan dengan pedagang Cina. Menurut Residen Kudus, PBKT di Kudus itulah yang menyebabkan terjadinya kerusuhan anti Cina di Kudus pada tanggal 31 Oktober 1918 malam.

Kerusuhan tanggal 31 Oktober 1918 tersebut terjadi di Kampung Cina di pusat kota sebagai ekor dari insiden yang terjadi tanggal 30 Oktober 1918 sore. Pada waktu itu ada gerobak yang mengangkut pasir untuk memperbaiki mesjid di pusat kota. Gerobak tersebut ketika sedang menuju ke mesjid lewat jalan yang sedang dilalui oleh pesta pawai orang Cina Kudus yang datang dari arah yang berlawanan, sehingga gerobak itu menjadi penghalang dan menyebabkan seorang peserta pawai yang naik kuda terjatuh. Karena itu, kusir gerobak dimaki-maki dan dipukuli oleh orang Cina yang jatuh tersebut. Kejadian itu menyebabkan masyarakat Kudus yang sedang menonton dan bekerja di mesjid membalas orang Cina tersebut, perkelahian terjadi tetapi se-

gera dapat dileraikan oleh polisi yang mengawal pawai itu. Pada tanggal 31 Oktober malam sekonyong-konyong terdengar bunyi kentongan susul-menyusul, dan tak lama kemudian datang berbondong-bondong orang menuju ke kampung Cina di pusat kota Kudus. Kerusuhan terjadi lagi, rumah dan toko-toko Cina dilempari batu, toko dibuka dengan paksa dan barangnya dilemparkan keluar. Tanpa diketahui asalnya terlihat api menyala dan membakar barang Cina yang berserakan di jalan dan kemudian menjalar beberapa rumah di tepi jalan.

Kekacauan dan kerusuhan itu akhirnya dapat dipadamkan setelah pemerintah mendapat bantuan dari polisi Semarang dan dari pejabat pemerintah di sekitar kota Kudus. Korban berjatuhan pada orang Cina maupun orang Indonesia. Pemerintah setempat segera mengambil tindakan pengamanan dan pada malam itu juga melakukan penangkapan terhadap orang-orang SI yang diduga menjadi biang keladi dari peristiwa tersebut.

3. SI Bojonegoro

Bupati Bojonegoro berpendapat bahwa anggota pengurus SI Bojonegoro yang diketuai oleh H. Mushadi, dengan anggota pengurus Harjodisastro, Atmosukarta, dan Mas Sunandar adalah orang-orang yang kurang baik reputasinya. Mereka adalah bekas pegawai negeri yang telah diberhentikan dengan tidak hormat, sedangkan pengetahuan mereka tentang soal agama boleh dikatakan tidak ada. Bupati mengusulkan kepada pemerintah agar pejabat pemerintah setempat diizinkan melakukan pengawasan secara langsung terhadap SI terutama terhadap keuangannya. Pengawasan ini dianggap perlu karena ada gejala yang menunjukkan bahwa mereka yang menjadi anggota pengurus SI hidupnya mewah.

4. SI Tuban

Pada tahun 1913 pengurus SI cabang Tuban adalah H. Abduljakar (ketua), Mas Hadiwijoyo (wakil ketua), Sastrodiharjo (Sekretaris) dan beberapa orang haji sebagai bendahara dan komisaris. Menurut Bupati Tuban, setelah SI berdiri terjadi perpecahan di antara penduduk yang menjadi anggota SI dan bukan anggota SI. Pada bulan Juli di antara anggota pengurus sendiri terjadi perpecahan karena soal administrasi. Perpecahan ini dapat diselesaikan berkat perantaraan Tondokusumo, utusan CSI Surabaya. Atas desakan pemerintah setempat, ang-

gota pengurus SI Tuban diganti dengan pengurus baru yang intinya terdiri dari pegawai negeri. Setelah pengurus diganti menurut Bupati Tuban, keadaannya lebih baik, dan perpecahan di kampung-kampung tidak ada lagi. Di Kampung Doromukti berdiri sebuah toko SI dengan modal f. 1.000.

5. SI Lasem

Pada bulan oktober 1915 anggota SI di Desa Joperejo, Gegersimo, Sedangagung, dan Ketangi mengadakan gerakan menolak membantu dan memberi keterangan kepada *mantri klasir* yang mendapat tugas mengadakan ulangan pengukuran tanah untuk kepentingan penetapan pajak tanah yang baru. Pemerintah setempat menuduh bahwa gerakan rakyat tersebut digerakkan oleh ketua SI Lasem, Said Abubakar, seorang keturunan Arab. Ia memang mempunyai pengaruh yang besar terhadap anggota SI yang menganggap ketua SI tersebut sebagai Maulana. Wedana Pamotan mengakui bahwa ia tidak dapat memerintah rakyatnya tanpa berkonsultasi lebih dahulu dengan ketua SI Lasem tersebut. Kepala desa Soditan juga mengalami kesukaran ketika menyuruh warga desanya memperbaiki saluran pengairan dan bendungan, karena kepala desa itu dimusuhi oleh orang SI. Kesulitan itu dialami pula oleh Wedana Binangun. Tetapi kantor Urusan Bumiputera memberi keterangan bahwa peristiwa yang terjadi di Desa Lasem tersebut bukan karena pengaruh SI.

Residen Mataram mengajukan pertimbangan bahwa SI di daerah Yogyakarta hanya suatu gerakan agama dan kelihatannya tidak menunjukkan kegiatan yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban. Maka residen tidak berkeberatan kalau permohonan SI Yogyakarta untuk diakui sebagai badan hukum dikabulkan. Untuk menjaga hal yang tidak diinginkan pemerintah di daerah Yogyakarta tetap menganggap perlu melakukan pengawasan terhadap SI. (Diambil dari Prof. Dr. Sartono Kartodirjo (ad 5), *Sarekat Islam Lokal*, Arsip Nasional RI. Penerbitan sumber sumber sejarah No. 7, Jakarta, 1975, hal. XIX – XXIII, XXXIII – XXXVI).

Pergerakan SI ditingkat lokal mencerminkan protes rakyat petani terhadap ketidakadilan dan perubahan sosial yang cepat, terhadap desorganisasi kehidupan pertanian dan berbagai tekanan keuangan serta tuntutan berat yang diminta oleh penguasa setempat. Gerakan SI lokal menunjukkan berbagai sifat, yang terpen-

ting ialah: (1) bersifat anti Cina, (2) bersikap menentang secara agresip terhadap pejabat pemerintah, (3) bersifat "menyendiri dan bermusuhan" dengan orang-orang luar yang tidak menjadi anggota SI dan (4) mempunyai sifat keagamaan yang revivalistis yang ingin memperbaiki keburukan di dalam kehidupan masyarakat, seperti pelacuran, pencurian, perjudian, dan sebagainya (lihatlah : *Sejarah Nasional Indonesia jilid IV: Indonesia dalam abad 18 dan 19*, halaman 311 dan seterusnya). Peristiwa itu terjadi karena ketidakpuasan penduduk terhadap kebijaksanaan pemerintah setempat, antara lain mengenai peternakan, sawah celengan, dan kas desa. Ketua SI hanyalah saluran untuk mengeluarkan ketidak puasan. Kantor Urusan Bumiputera rupanya seringkali mengeluarkan pendapat atau usul-usul yang memihak kepada pergerakan nasional bangsa Indonesia.

6. Karesidenan Surakarta

Setelah terjadi kerusuhan anti Cina, maka terjadi penggeledahan dan larangan residen Surakarta pada tanggal 10 Agustus 1913. Tetapi setelah penggeledahan tersebut ternyata tidak menunjukkan tanda-tanda yang memberatkan SI maka Residen Surakarta kemudian mengajukan pertimbangan bahwa tujuan SI lebih bersifat agama dari pada ekonomi. Larangan terhadap SI tidak ada gunanya, sebab nyatanya SI di dalam kota Solo yang berjumlah 35 orang telah mengajukan permohonan kepada patih Surakarta agar larangan terhadap SI dicabut. Berhubung dengan itu, menurut pendapat residen, permohonan untuk diakui sebagai badan hukum tidak perlu ditolak, dengan syarat agar SI memperbaiki administrasinya yang benar-benar dapat mengurus anggotanya, sehingga mereka tak akan mengganggu ketentraman dan ketertiban. Di samping itu pengurus SI memberi keterangan bahwa azas dan tujuan SI tidak bertentangan dengan Agama Islam. SI justru mendorong anggotanya untuk mentaati syariat Islam dan itu tidak bertentangan dengan undang-undang bahkan mewajibkan para anggota taat kepada pemerintah.

Adanya berita yang mengatakan bahwa H. Samanhudi yang hadir pada rapat umum di Surabaya pada bulan Januari 1913 adalah utusan Pangeran Hangabehi yang menjadi pelindung SI atas perintah Sunan, sehingga desas-desus yang mengatakan bahwa ketua SI yang sebenarnya adalah Sunan, tidak benar juga.

7. Karesidenan Yogyakarta

Rapat pembentukan SI cabang Yogyakarta diadakan pada tanggal 14 Maret 1913 yang dipimpin oleh R.M. Surahadikusumo yang ditunjuk sebagai utusan oleh pengurus pusat SI di Surakarta. Hadir dalam rapat itu residen-residen dan kontroler Mataram, bupati kota, Pangeran Notodirejo dari istana Pakualam, Patih Pakualam, dan beberapa ratus undangan serta peminat. Dalam rapat itu pimpinan menjelaskan maksud dan tujuan SI kemudian diadakan tanya-jawab antara pemimpin dan hadirin. Akhirnya pimpinan rapat mohon kepada residen agar SI diizinkan untuk berdiri sebagai badan hukum di daerah Yogyakarta. Pada waktu itu anggota SI untuk daerah Yogyakarta sudah berjumlah 657 orang. Pengurusnya juga sudah terbentuk dan perhatian SI cukup besar.

8. SI Demak

SI Demak berdiri pada tanggal 21 Juli 1918 dengan ketentuan seorang yang berasal dari Semarang, bernama Suharyo. Menurut keterangan Bupati Demak, setelah SI berdiri, rakyat menjadi berani terhadap pejabat pemerintah. Mereka berani menuntut dihapuskannya pajak kepala dan lumbung desa, dan kekayaannya dibagi-bagikan. Mereka menolak perintah menyekolahkan anaknya, menolak melakukan kewajiban ronda, menuntut agar tanah bengkok dikurangi dan sebagainya.

9. Karesiden Rembang

Bupati Rembang mengusulkan kepada residen, agar pemerintah ikut campur-tangan dalam segala urusan SI, khususnya dalam urusan keuangan. Campur tangan ini dimaksudkan agar SI benar-benar berjalan menurut tujuannya yang memang baik.

4. Gerakan Perburuhan

a. *Pemogokan Buruh Pabrik Gula dan Buruh pegadaian Tahun 1920 dan 1922*

Keadaan setelah Perang Dunia I memang sangat menyulitkan penghidupan kaum buruh, sehingga tidak mengherankan jika sering terjadi percobaan pemogokan. Keuntungan dari kaum modal semakin bertambah besar sebagai akibat dari kenaikan ekspor Indonesia ke Eropah, tetapi sebaliknya nilai dari upah buruh menurun sebagai akibat dari naiknya harga barang import dan harga barang dalam negeri, sedangkan upah

buruh tidak ikut dinaikkan atau kurang seimbang kenaikannya. Pihak pemerintah jajahan di bawah Gubernur Jenderal Fock (1921 - 1926) melakukan politik penghematan yang keras terhadap anggaran belanjanya, oleh karena pengeluaran pemerintah harus semakin dikurangi. Dalam hal ini pemerintah bermaksud untuk mencabut tunjangan kemahalan dan mengurangi gaji pegawai, dan mengurangi jumlah pegawai. Di tahun 1921, perkataan "malaise" menjadi buah bibir di mana-mana. Banyak onderneming dan kantor perdagangan yang mengurangi atau sementara menutup usahanya. Sebagai akibat dengan pengurangan jumlah pegawai, pengangguran semakin meningkat. Di dalam *Volksraad* terdengar kecaman terhadap bahaya pengangguran dan menyekalkan tindakan atau rencana pemerintah untuk menghentikan beberapa pekerjaan, seperti pengerukan pelabuhan, sehingga meningkatkan jumlah penganggur. Anggota Jayadiningrat berbicara di dalam *Volksraad* tentang besarnya malaise di kalangan bangsa Indonesia, sedangkan di pihak lain dirasakan adanya pengurangan oleh pemerintah terhadap pekerjaan yang justru tepat untuk memberi pekerjaan yang berharga, dengan menggunakan angka-angka yang dikeluarkan oleh pemerintah, untuk dinas pekerjaan umum, pelabuhan, dinas keruk, PTT dan kereta api pada tahun 1921.⁴⁴⁾

Percobaan pemogokan pertama dilakukan oleh anggota PFB (Personeel Fabriek Bond = Serikat Buruh Pabrik Gula). PFB didirikan pada tahun 1917 di Yogyakarta dengan tujuan untuk memberi pertolongan kepada keluarga buruh pabrik di daerah Yogyakarta, yang kemudian usahanya meluas ke seluruh Jawa. Ratusan pegawai dari hampir semua pabrik gula di Jawa Tengah dan Jawa Timur memasuki PFB. Pemimpin PFB ialah Suryopranoto, yang juga menjadi komisaris Central Sarikat Islam. Pada bulan Maret 1920, PFB meminta kepada pengusaha dan pengurus sindikat pabrik gula untuk mengakui PFB sebagai wakil dari kaum buruh pabrik gula serta menuntut kenaikan upah buruh. Oleh karena pengusaha kebun dan pabrik gula tidak memenuhi tuntutan tersebut, maka PFB pada tanggal 9 Agustus 1920 mengajukan ultimatum. Pemerintah menyadari kepentingan yang vital dari industri gula, telah berdiri di pihak pengusaha atau kaum modal gula. Pemerintah melarang pemogokan umum, meskipun menyadari bahwa "turunnya upah buruh merupakan perbedaan yang sangat ganjil terhadap keuntungan luar biasa yang didapat

oleh perusahaan gula pada waktu itu", perusahaan gula sebaiknya menambah upah buruhnya ⁴⁵⁾

Pegawai bumiputera pada jawatan pegadaian pemerintah pada tahun 1919 mendirikan PPPB (Persatuan Pegawai Pegadaian Bumiputera) di Yogyakarta, yang berada di bawah pengasuh SI dan menjadi inti dari PPPB yang berpusat di Yogyakarta. Pemimpin PPPB pada tahun 1919 ialah Sosrokardono yang juga menjadi pemimpin SI. Pada tanggal 11. Januari 1922 terjadi pemogokan di Rumah Gadai Ngupasan, Yogyakarta dan kemudian meluas pada jawatan pegadaian di seluruh Jawa yang diikuti oleh 1200 pegawai pegadaian sebanyak 76 rumah gadai mengadakan pemogokan dari jumlah 360 rumah gadai. Pemerintah mengambil tindakan dengan melepas pegawai yang mogok. Menurut Pringgodigdo, pemogokkan ini disebabkan bukan karena hal gaji, melainkan karena sikap kepala pegadaian peranakan yang merendahkan dan menghina pegawai bangsa Indonesia sebagai akibat dari kekuasaan besar yang diberikan kepada mereka. PPPB yang berada di bawah pengaruh SI dan VSTP yang dipengaruhi komunis memberi sokongan kepada pemogok, bahkan VSTP mengeluarkan pernyataan yang menganjurkan untuk memberi sokongan kepada pemogokan dan yang membantu aktif pemogokan tersebut. Pemerintah kemudian menangkap pemimpin komunis Tan Malaka dan Bergsma dan mengasingkan mereka keluar Hindia Belanda, sehingga pemogokan berakhir.

Di dalam buku Deliar Noer, diceritakan bahwa sebab dari pemogokan itu ialah adanya maksud pemerintah untuk menghapuskan jabatan "*tukang bende*" (tukang canang) di semua rumah gadai pemerintah, dan tugas tukang bende tersebut kemudian akan dirangkap oleh seorang pegawai yang paling rendah dari rumah gadai yang bersangkutan.

Dalam surat edaran yang diedarkan, pemerintah menyatakan bahwa penolakan dari pegawai yang bersangkutan untuk menjadi tukang bende akan berakibat dipecatnya pegawai tersebut secara otomatis. Di rumah gadai pemerintah di Yogyakarta ketika surat edaran tersebut dilaksanakan para pegawai menjawab dengan mengadakan pemogokan, yang diikuti di pegadaian lainnya. Pemerintah memecat beratus-ratus pegawai pegadaian. Abdul Muis yang pada waktu itu menjadi ketua PPPB, tidak menyetujui aksi pemogokan yang tidak dipersiapkan lebih dahulu, tetapi ia harus bertindak untuk mengkoordinasikan pemogokan

itu. Berlawanan dengan pendapat Abdul Muis dan H.A. Salim (yang menjadi ketua dan Sekretaris PPPB), maka konperensi darurat Pengurus PPPB di Semarang pada tanggal 11 Pebruari 1922 memutuskan untuk mendesak pemerintah dengan mengumumkan pemogokan umum pada tanggal 20 Pebruari 1922 pada semua rumah pegadaian negeri di seluruh Jawa dengan ancaman siapa yang tidak mengambil bagian di dalam pemogokan itu akan dipecat dari keanggotaan PPPB. Keputusan ini mengakibatkan perpecahan di dalam keanggotaan PPPB, terutama karena tak ada persiapan yang cukup untuk memberi bantuan keuangan bagi para pemogok. Pada waktu itu Abdul Muis ditangkap di Bandung karena melanggar larangan berbicara. Ketika ia dibebaskan, ia telah dipecat oleh kawan-kawannya dari kepengaruhannya PPPB. Bahkan pemimpin SI Cokroaminoto, pada Konperensi PPPB di Kedung jati tanggal 23 Juli 1922 mengancam Abdul Muis sebagai "orang yang bertanggung-jawab terjadinya perpecahan di dalam PPPB dan yang menyebabkan pemogokan". Konperensi Kedungjati ini memperkuat keputusan konperensi Semarang sebelumnya. Pada konperensi di Ambarawa tanggal 21 - 23 Agustus 1922, pengurus PPPB memutuskan tidak menyetujui pemogokan, tetapi Cokroaminoto kembali menyalahkan Abdul Muis sebagai "belum dewasa." Hal ini menyebabkan keretakan di antara Cokroaminoto dan Abdul Muis. Dan sejak kejadian itu Abdul Muis tidak lagi mengambil peranan aktif di dalam mengurus pusat SI dan hampir tak terdengar lagi namanya untuk waktu selanjutnya. Ia mengasingkan diri dengan tinggal di Garut sebagai petani dan penasehat SI cabang Garut.⁴⁶⁾

Untuk menolong korban pemogokan buruh pegadaian itu didirikan "Komite Hidup Merdeka" dengan ketuanya : Suryopränoto (kakak Suwardi Suryaningrat); sekretaris: Suwardi Suryaningrat, dan anggota-anggota: H.A. Salim dari SI dan Haji Fakhruddin dari Muhammadiyah. Tujuan komite itu antara lain ialah untuk mendidik manusia Indonesia yang sebagian masih hidup dalam keadaan menggantungkan nasibnya pada pemerintah kolonial menjadi manusia-manusia yang bebas merdeka. Kemudian mereka merencanakan pendirian tempat kerja kerajinan rumah tangga bagi isteri para pemogok, mengorganisasi pengajaran praktis, tempat kerja untuk perniagaan yang nantinya akan menjadi guru rakyat.⁴⁷⁾

b. *Pemogokan Buruh Kereta Api Tahun 1923*

Pada bulan Agustus 1920 perusahaan *Semarang – Cheribon Stoomtram Maatschappij* (SCS) timbul perselisihan perburuhan mengenai upah dan jam kerja. VSTP yang dikuasai Semaun mengirim ultimatum kepada direksi. Direksi menyanggupi untuk memberi syarat kerja yang sama dengan yang diberikan oleh SS (perusahaan kereta api pemerintah) kepada pegawainya. Syarat ini ditolak oleh VSTP dengan mengajukan lagi permintaan supaya gaji buruh dinaikkan dan waktu kerja hanya 8 jam sehari. Di luar campur tangan VSTP, timbul juga pemogokan diseluruh jalan kereta api Semarang – Cirebon tersebut, tetapi karena tindakan VSTP, pemogokan dapat berhenti. 48)

Sementara itu perselisihan di antara PPKB yang berpusat di Yogyakarta dan yang dipengaruhi SI dengan *Revolutionaire Vakcentrale* yang berpusat di Semarang dan berada di bawah pengaruh Semaun dapat dikurangi dengan dibentuknya suatu badan persatuan baru dari kedua serikat buruh itu dengan nama PVH (Persatuan Vakbonden Hindia), dalam konperensinya di Madiun pada tanggal 3 September 1922. Sasaran pertama dari aksi sarikat sekerja yang baru ini ialah menentang keinginan pemerintah untuk mencabut tunjangan kemahalan sebagai tambahan upah dan gaji yang telah berjalan beberapa tahun mulai 1 Januari 1923. Tindakan pemerintah ini diikuti oleh perusahaan kereta-api swasta yang juga akan melakukan pengurangan upah dan jumlah buruhnya mulai 1 Januari 1923. Semua pegawai dan buruh merasa gelisah akan tindakan pemerintah ini, di mana yang menjadi alasannya bukan penurunan ongkos hidup, tetapi penghematan belanja pemerintah. Karena itu VSTP memutuskan untuk mengadakan konggres ke-12 segera setelah tanggal 1 Januari 1923 untuk membahas masalah tersebut. Masalah pokok yang akan dibicarakan dalam kongres itu ialah usul dari VSTP cabang Cirebon untuk mempertimbangkan apakah tindakan rasionalisasi dari perusahaan kereta-api tersebut baik perusahaan pemerintah maupun swasta. Jika betul-betul dilaksanakan, akan ditentang dengan suatu pemogokan yang bersifat umum atau dengan pemogokan setempat. Pengurus VSTP menyatakan bahwa mereka tidak akan menyetujui aksi kenaikan upah yang dilakukan pada masa depresi. Jika perusahaan kereta api menginginkan untuk mengadakan rasionalisasi, kata pernyataan itu lebih lanjut, maka

mereka dapat melakukannya dengan menurunkan gaji yang paling tinggi dan mempertahankan gaji yang terendah pada tingkat gaji yang dapat diterima. Maka ketika VSTP mengadakan kongresnya pada bulan Pebruari 1923 (menurut Pringgodigdo tanggal 3 - 4 - Maret 1923), kongres itu memusatkan pembicaraan pada kemungkinan untuk mengadakan pemogokan.⁴⁹ Di dalam kongres VSTP tersebut, pemimpin VSTP mengadakan bahwa jika pemogokan betul diadakan, bukanlah disebabkan oleh pemerintah buruh yang melampaui batas, tetapi karena penolakan pihak pemerintah untuk menunda pelaksanaan rencana penghematannya dengan mengurangi gaji buruh rendahan bangsa Indonesia. Semaun menyetujui pemogokan umum tersebut, tetapi menasehatkan bahwa pemogokan supaya ditunda untuk memberi kesempatan mengadakan perundingan dengan pihak pemerintah dan perusahaan kereta api swasta. Ia juga menekankan bahwa pemogokan yang akan dilaksanakan harus berdisiplin dan dicegah pemogokan atau sabotase lokal yang tidak teratur dan kongres menyetujui pendapat Semaun untuk menunda pemogokan.⁵⁰

Sementara itu pemerintah tetap berkeras bahwa setiap buruh yang akan melakukan pemogokan akan dipecat, dan menolak untuk berunding dengan Semaun. Pengurus PVH menyampaikan kepada pemerintah bahwa Semaun adalah wakil PVH untuk duduk di dalam "Komisi Gaji" yang akan dibentuk pemerintah, tetapi usul ini ditolak oleh pemerintah. Dalam perundingan yang diadakan antara pengurus VSTP dengan pemerintah dan pengusaha swasta tanggal 9 dan 12 April 1923, usul VSTP ditolak, sehingga perundingan gagal. Dalam perundingan itu VSTP antara lain menuntut: 1) supaya tunjangan kemahalan jangan dicabut karena sudah rendah jika dibandingkan dengan jawatan lain, 2) hari kerja 8 jam, 3) di bentuk badan arbitrase jika timbul perselisihan perburuhan, 4) Upah minimum f,1,- sehari.

Karena penolakan tersebut, maka Semaun kemudian menyetujui usul mengadakan pemogokan, bersama Darsono yang baru kembali dari luar negeri. Dalam rapat pengurus pusat PVH di Surabaya tanggal 29 - 30 April 1923, dan rapat VSTP di Semarang tanggal 6 Mei 1923, Semaun menyatakan bahwa pemogokan harus dimulai pada saat ia dan pemimpin - pemimpin VSTP lainnya ditangkap. Pada tanggal 8 Mei 1923, dua hari setelah pernyataan-

nya tersebut, Semaun ditangkap karena tuduhan melanggar undang-undang larangan berbicara sebulan sebelumnya. Setelah mendengar berita penangkapan itu, maka meledaklah pemogokan besar dari pegawai dan buruh kereta-api.⁵¹⁾

Buruh kereta-api di Semarang mula-mula melancarkan pemogokan tersebut, yang kemudian diikuti oleh penjual di pasar, buruh mesin, sopir mobil dan truk. Dalam waktu beberapa hari pemogokan segera meluas dari Semarang ke Pekalongan, Tegal, Madiun, Surabaya, dan Cirebon, dan setasiun kereta-api lainnya di Pulau Jawa. Pemogokan diikuti oleh 13.000 buruh dari jumlah 20.000 buruh. Di dalam *Volksraad*, pemerintah menyatakan bahwa pemogokan VSTP itu adalah aksi revolusioner semata-mata, maka akan segera diambil tindakan keras oleh pemerintah. Salah satu tindakan pemerintah untuk menindas pemogokan ini ialah dengan menambah pasal baru (161 bis) di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menetapkan bahwa :

"Barang siapa yang bermaksud untuk mengganggu ketertiban umum atau mengganggu kehidupan perekonomian dari masyarakat, atau mengetahui, atau dalam kedudukan untuk mengetahui gangguan semacam itu, atau barang siapa menyebabkan atau turut membantu menyebabkan beberapa orang meninggalkan pekerjaannya atau menolak untuk meninggalkan pekerjaannya, akan dihukum dengan hukum penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 10 ribu rupiah."⁵²⁾

Pemerintah segera mencatat semua buruh yang melakukan pemogokan dan melakukan hukum militer pada semua jawatan kereta-api. Mereka juga melarang rapat atau pertemuan bagi semua anggota VSTP, dan membatasi rapat serta pertemuan bagi semua perkumpulan lainnya di daerah Karesidenan Semarang, Kediri, Madiun, Pekalongan, Priangan, dan Surabaya. Banyak pemimpin VSTP ditangkap, dan selama beberapa minggu keuangan VSTP mulai menipis, sehingga pekerja-pekerja mulai melakukan kegiatan dan menugaskan Sugono dan Kadarisman untuk mengadakan perundingan, tetapi pemerintah tetap bersikap keras, sedangkan perusahaan kereta-api swasta menolak untuk berunding dengan VSTP dan mulai melakukan penurunan gaji buruh yang mogok sampai bulan Juli 1923. Ketika pemerintah menyatakan akan mengusir Semaun dari Hindia Belanda, pemo-

gokan kemudian berhenti. ⁵³⁾

Terhadap pemogokan ini, Sarekat Islam tidak memberikan perhatian secara aktif. Dwijosewoyo, wakil Budi Utomo, di dalam *Volksraad* tidak membenarkan pemogokan di dalam perusahaan yang begitu penting seperti perusahaan kereta-api, tetapi menurut dia, pertama-tama yang salah ialah pemerintah sendiri. ⁵⁴⁾

Di dalam perkembangan selanjutnya, sebagai akibat dari pemberontakan tahun 1926, VST menjadi rusak semasekali. Kemudian didirikan penggantinya pada bulan Juli 1927 dengan nama PBST (Perhimpunan Beamte Spoor dan Tram) yang tidak mencampuri politik sehingga anggotanya menjadi 5000 orang. ⁵⁵⁾

Pada tanggal 21 Juli 1925 timbul lagi pemogokan di Semarang pada buruh percetakan, disebabkan ada pegawai yang diberhentikan secara tidak adil. Pada tanggal 1 Agustus 1925 terjadi pemogokan di rumah sakit umum negeri yang disebabkan karena perbuatan angkuh dan keras dari kepala bangsa Belanda. Juga terjadi pemogokan di *Semarangsche Stoombooten Prauwenvaar* (SSP) oleh 1000 orang buruh. Para pemimpinnya seperti Darsono, Ali Aliarkham, dan Marjohan, ditangkap dan diasingkan, sehingga pemogokan lalu berhenti. ⁵⁶⁾

c. *Pendirian Gedung Rakyat Indonesia di Semarang dan Sekolah-sekolah SI di Semarang*

Pada tahun 1919 - 1920 Semaun berhasil mengumpulkan uang dan barang dari rakyat seperti batubata untuk membangun "Gedung Rakyat Indonesia" di Semarang yang dibangun pada tahun 1919 dan selesai tahun 1920. Gedung ini dipergunakan untuk mengadakan rapat SI pada malam hari, dan sebagai sekolah pada malam hari. Pada tahun 1926 gedung ini ditutup, tetapi dipergunakan lagi untuk keperluan rapat pada tahun 1930 oleh panitia yang terdiri dari PBI, Partindo, dan PNI-Baru.

SI juga mendirikan sekolah bagi anak-anak anggota SI yang tidak dapat memasuki sekolah dasar pemerintah pada waktu itu. Sekolah SI di Semarang bernama "Sekolah Rakyat" dan didirikan oleh Ibrahim Gelar Datuk Tan Malaka pada tahun 1921. Rapat pendirian sekolah SI di Semarang tidak diizinkan oleh Residen Semarang, sehingga usaha untuk memperkenalkan sekolah itu dan mendapat dana dari masyarakat dilakukan dengan menyebarkan murid-muridnya keluar-masuk kampung. Murid sekolah SI tersebut berpakaian putih dan memakai selempang kain

merah bertuliskan *Rasa Kemerdekaan*. Sekolah tersebut bertujuan untuk menanamkan rasa kemerdekaan dan menunjukkan rasa kewajiban murid terhadap rakyat yang merupakan "iklim kejiwaan di sekolah SI yang lebih sehat dan lebih dekat dengan watak dan asal anak orang timur jika dibandingkan dengan jiwa di sekolah partikelir atau HIS pemerintah". Pelajaran untuk memelihara rasa kemerdekaan dan tanggung-jawab ialah dengan mengadakan dialog dan diskusi tentang berbagai soal, serta pengorganisasian belajar dalam kelompok. Murid yang sudah cukup matang diajak untuk menyaksikan rapat SI dan buruh agar dapat bergaul dengan rakyat kecil. Juga bekerja mencangkul dan bertukang menjadi bagian dari pelajaran. Pendidikan calon guru yang berjiwa kemerdekaan dan kerakyatan menjadi perhatian yang terutama dalam sekolah SI tersebut.

Setelah terjadi perpecahan di dalam SI di antara golongan Co-kroaminoti, H.A. Salim dengan golongan Semaun, maka pada bulan April 1924 sekolah SI tersebut menjadi Sekolah Rakyat. Karena tindakan Pemerintah Belanda, banyak sekolah rakyat yang ditutup atau diserahkan pada badan lain. Sekolah Rakyat di Bandung diserahkan kepada Ir. Sukarno, yang kemudian menyerahkannya kepada Taman Siswa.⁵⁷⁾

5) *Partai Komunis Indonesia*

Pada bulan Mei 1920, ISDV diubah menjadi PKI (Partai Komunis Indonesia) dengan ketua Semaun dan wakil ketua Darsono. Orang-orang Eropa anggota ISDV yang berhaluan sosialis yang tidak setuju dengan Sneeveliet, telah memisahkan diri dari ISDV dan membentuk perkumpulan sendiri dengan nama ISDP (*Indische Social Demokratische Partij*) dan salah seorang dari kaum sosialis moderat ini ialah D.M.G. Koch yang sangat erat hubungannya dengan golongan H.A. Salim dan Abdul Muis di dalam pengurus pusat SI pada bulan Desember 1920 PKI menggabungkan diri pada Komitern. Pada bulan Januari 1922 Semaun sebagai wakil dari Jawa mengunjungi kongres buruh Timur Jauh serta mengunjungi Shanghai dan Moskow. Di mana sebelumnya bulan Desember 1921, kongres pertama PKI diadakan di Semarang, di mana dipusatkan bahwa anggota bangsa Belanda akan mendekati serdadu Belanda yang ditugaskan kepada Sneeveliet. Sedangkan serdadu angkatan laut ditugaskan kepada Brandateder untuk menggarapnya dan anggota bangsa In-

donesia akan memasuki SI untuk dapat mendekati rakyat banyak. Setelah Semaun diasingkan ke luar negeri tahun 1923, pimpinan PKI jatuh ke tangan Darsono. Pengurus pusat PKI yang berkedudukan di Semarang, antara lain terdiri dari Semaun, Sneevliet, Darsono, Sugono, Kadarisman, Margono, Tan Malaka, Suradipa, dan Sugiri.⁵⁸⁾

Pengaruh Semaun dalam SI cabang Semarang telah menyebabkan timbulnya pertentangan dan perpecahan di dalam tubuh SI. Di dalam SI yang menentang pengaruh Semaun dan penyebaran paham Komunis ialah Abdul Muis dan Haji Agus Salim, sedangkan pemimpin SI Cokroaminoto berusaha keras untuk tetap dapat mempersatukan SI. Pengaruh ini terlihat dengan bergerakaknya SI ke arah yang lebih radikal seperti misalnya dalam konggres SI yang kedua bulan Oktober 1917 di Batavia yang mengambil keputusan untuk melawan kapitalisme asing. Keputusan lain di dalam konggres itu ialah tuntutan akan pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*) sebagai tujuan perjuangan terhadap politik penjajahan. Meskipun di kalangan SI semakin terdengar suara yang menentang kapitalisme yang "heran" yang disuarakan sebagai sosialisme Islam, namun hal itu menunjukkan bahwa aliran Semaun — Darsono makin berpengaruh SI. Di dalam konggres tersebut Semaun juga menuntut supaya SI tidak ikutserta di dalam *Comite Indie Weerbaar* (komite untuk Pertahanan Hindia Belanda). Di dalam *Volksraad* yang akan dibentuk, tetapi usul Semaun tidak diterima.⁵⁹⁾

Pembentukan SI lokal telah memudahkan golongan Semaun untuk menyebarkan pengaruhnya, di dalam SI sehingga banyak SI - lokal dikuasai oleh kaum Komunis. Dalam konggresnya di Surabaya Oktober 1918 diputuskan untuk mengorganisasi kaum buruh untuk menentang kapitalisme. Selain itu konggres mendudukkan Semaun dan Prawotosudibya dalam pengurus besar CSI dan Darsono sebagai propagandis. Tetapi konggres SI yang ke-6 di Surabaya pada tanggal 10 Oktober 1921 menerima usul Abdul Muis dan Haji Agus Salim untuk melaksanakan disiplin partai, meskipun ditentang oleh golongan Semaun. Pada konggres SI di Madiun pada tanggal 17-20 Februari 1923, keputusan tentang disiplin partai tersebut diperkuat (pada waktu itu hadir Cokroaminoto) sehingga golongan Semaun dan Darsono harus keluar dari SI. Konggres Madiun tersebut juga mengubah bentuk organisasi SI dari Central SI

dengan SI lokal yang dirasakan telah menghalangi pertumbuhan perkumpulan, dalam cabang-cabang yang dengan lemah terikat, orang dari aliran lain mudah mendapat pengaruh dengan suatu bentuk organisasi yang lebih bersatu, ialah "Partai Serikat Islam" yang terdiri dari para anggota yang aktif yang akan bekerja dalam SI setempat untuk kepentingan Partai.

Pada tahun 1929 PSI diubah lagi menjadi PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia), yang menunjukkan pengaruh paham persatuan Indonesia pada waktu itu. Keputusan lainnya ialah menerima sikap non-kooperasi meskipun diadakan kemungkinan untuk turut menjadi anggota Badan Perwakilan. Di dalam kongres itu Cokroaminoto dan H.A. Salim bekerjasama untuk mendesak agar kongres mengesahkan, meskipun ditentang oleh golongan Semaun dan komunis, perubahan CSI menjadi "Partai Sarekat Islam" dan pelaksanaan disiplin partai.⁶⁰⁾

6. *Pergerakan Muhammadiyah*

Di dalam perkembangan Agama Islam di Indonesia terjadilah berjenis corak akomodasi dengan pola kebudayaan dan agama setempat atau dengan keadaan yang baru. Pengislaman kota pelabuhan pada abad ke-16 dan 17 seperti Malaka dan Banten, kemudian pengislaman daerah pedalaman atau pinggiran kebudayaan keraton di Jawa Tengah. Setelah itu timbullah perkembangan baru yang berusaha mendekatkan masyarakat yang sudah mengakui dirinya sebagai penganut Islam kepada ajaran Islam yang utuh dan murni atau kepada ajaran *ahlus sunah wal jamaah* yang murni. Gerakan ini terjadi dalam beberapa bentuk, misalnya lewat pemurnian tarekat dengan menghilangkan tingkah laku yang dianggap *bid'ah*. Pergerakan ke arah pemurnian menekankan perlunya persesuaian di antara tindakan dan perbuatan dengan syariat, mulai terjadi terutama pada abad ke-19, ketika semakin banyak orang Islam Indonesia yang berkesempatan menempuh perjalanan jauh dan berbahaya untuk naik haji ke Mekah. Juga karena faktor lainnya, seperti dikuasainya pantai barat Sumatera dan Belanda, dan tersebarnya sekolah serta madrasah ke daerah pedalaman. Chifford Geertz menyebutkan tentang peralihan dari "gaya klasik" ketika Islam dalam masa penyebarannya di Indonesia menekankan aspek kebatinan yang kadang-kadang bersifat heterodox, ke "zaman kitab", ketika tekanan diberikan kepada kesesuaian syarat dan kehidupan. Keadaan di atas me-

nyebabkan timbulnya gerakan pembaharuan dari kaum Wahadi di Sumatera Barat pada permulaan abad ke-19 yang bereujud dalam pertentangan antara adat dengan penganut Wahadi yang bernama kaum paderi. Mereka telah bertindak dengan kekerasan untuk mengakhiri kekuasaan keibuan (matriarkhat) dan menggantinya dengan hukum keluarga yang bersifat Islam-Arab serta ingin menghapuskan bermacam-macam kebiasaan yang dianggap bertentangan dengan Islam. Belanda kemudian membantu para kepala adat dan berhasil mengalahkan kaum Paderi pada tahun 1837 sehingga dapat menguasai daerah Sumatera Barat.⁶¹⁾

Gerakan pemurnian Islam seperti gerakan Wahabi di Sumatera Barat tersebut di dalam Sejarah Islam dikenal dengan nama "Gerakan Salaf" yang bertujuan untuk mengembalikan agama Islam kepada dua sumbernya yang murni, ialah Al Qur'an dan Sunnah Nabi, serta meninggalkan pertengkaran mazad dan segala bid'ah dan Khurafat. Nama "Gerakan Salaf" atau "Gerakan Reformasi" yang ingin memperbaharui ajaran Islam-*ansich* atau pembaharuan yang menyangkut inti ajaran dan bentuk luarnya adalah untuk membedakannya dengan "gerakan pembaharuan atau gerakan modern yang bukan gerakan Salaf" yang hanya menghendaki pembaharuan bentuk luarnya saja.⁶²⁾ Meskipun dalam gerakan Wahadi tersebut, kaum Padri mengalami kekalahan dan daerah pengaruhnya lenyap digantikan dengan pendidikan menurut mazhab Syafi'ie, namun ajaran Salaf tersebut secara diam-diam terus berkembang, terutama dalam bentuk pengajian dan ceramah. Kemudian menemukan kepribadiannya kembali setelah kaum muda tampil ke depan memimpin revolusi berpikir di dalam umat Islam dalam apa yang disebut "Sumatera Thawalib". Sesudah itu, timbullah pemikiran baru, sekolah dengan metode baru, seperti metode yang dipergunakan orang di Mesir. Tahun 1909 merupakan tahun dimulainya pembaharuan metode pendidikan yang bersumberkan gerakan Salaf" di Sumatera Barat. Berdirilah sekolah yang berjiwa reform, seperti "*Ambiya School*" di Padang oleh Sjech Abdullah Ahmad pada tahun 1915 yang kemudian diubah namanya menjadi *H.I.S. Adabiyah* di mana juga diajarkan bahasa asing di samping pelajaran Bahasa Indonesia dan Arab. Kemudian dilakukan pembaharuan pendidikan di sekolah dasar, menengah, dan atas oleh putera Sumatera Barat yang telah mendapatkan pendidikan di Mesir dan Mekah,

seperti H. Thaib-Umar, Mahmud Yunus, Jalaludin Thaib, Ab-lah Hakim, Al Manafi, dan lain-lain.⁶³⁾

Gerakan pembaharuan Islam yang berkembang di Sumatera Barat pada permulaan abad ke-20 tersebut juga terjadi di Jawa. Penganut gerakan pembaharuan (modernisasi) Islam ini menginginkan sikap yang modern. Gerakan Reformasi Islam ini dipengaruhi oleh gerakan pembaharuan Islam di Mesir dari Muhammad Abdul dan muridnya Rasyid Ridda dengan melalui pelajar Indonesia yang belajar di perguruan Al Azhar di Kairo. Aliran pembaharuan itu juga mempengaruhi orang Arab yang berdiam di Indonesia, terutama dengan melalui majalah dan harian dari kaum pembaharu yang dapat dibaca di Indonesia. Sebetulnya gerakan pembaharuan Islam yang terjadi di India timbul lebih dahulu dari pada yang terjadi di Mesir, tetapi kebangunan Islam di India tersebut kemudian lebih dikenal oleh orang Islam di Indonesia daripada kebangunan di Mesir, oleh karena kebangunan Islam di India menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa penghubung.

Di Indonesia (Jawa) gerakan pembaharuan Islam dipelopori oleh orang Arab di Indonesia yang pada tahun 1905 mendirikan perkumpulan "*Al-Yami'iyat al Khairiyah*" (Yamiat Khair) di Jakarta yang bertujuan mendirikan perguruan Islam dengan menggunakan metode pengajaran modern serta memberikan mata pelajaran umum di samping mata pelajaran agama. Perkumpulan Yamiat Khair serta usaha pendidikannya terbuka bagi orang Arab maupun orang Indonesia beserta anak-anaknya. Beberapa orang Indonesia, seperti Kyai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta dan R. Hassan Jayadiningrat (adik dari Bupati Serang P.A.A. Jayadiningrat) pernah menjadi anggota Yamiat Khair sekitar tahun 1910. Perkumpulan ini mendatangkan seorang ahli Agama Islam bangsa Su dan dari Mekah yang bernama Ahmad bin Muhammad Surkati al Ansari yang meninggal tahun 1943. Ia mempunyai pendapat yang sangat radikal sehingga mengakibatkan pertentangan dengan golongan Sayid di dalam perkumpulan tersebut. Kemudian dengan bantuan orang Arab yang bukan Sayid, ia mendirikan perkumpulan sendiri yang disebut "*Al-Irsyad*" pada tahun 1913 dengan tujuan mendirikan sekolah untuk anak bangsa Arab dan Indonesia di berbagai daerah di Jawa.⁶⁴⁾

Gerakan pembaharuan tersebut juga mempengaruhi K.H.A. Dahlan yang kemudian menjadi pendiri perkumpulan Muham-

madiyah. Golongan terpelajar bangsa Indonesia lainnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan (nama sebelumnya Muhammad Darwis) dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1868, anak seorang ulama besar di Yogyakarta bernama Kyai Haji Abubakar bin Kyai Sulaiman yang menjadi khotib di Mesjid Besar Yogyakarta, serta keturunan ulama pengajar agama. Sejak kecil ia menunjukkan dirinya sebagai seorang yang cerdas serta gemar memperdalam Agama Islam. Ia melakukan duakali perjalanan haji ke Mekah, yang pertama pada tahun 1890 di mana ia tinggal di sana selama satu tahun, dan yang terakhir pada tahun 1902 sampai 1903 di mana ia tinggal selama dua tahun. Perjalanan itu tidak saja untuk ibadah haji, tetapi juga untuk memperdalam Agama Islam dengan membaca karangan-karangan dari Muhammad Abduh, Ibnu Fatimiyyah, tafsir Al Manar dari Rashid Ridda, majalah Ul Urwatul Wutsqa dari Jamaluddin Al Afghani.

Ia memulai gerakan pembaharuan dengan menginsyafkan beberapa orang keluarga dan teman sejawatnya yang terdekat di Yogyakarta (Kampung Kauman) dengan mengajak berpikir secara baru dalam pengajian agama dan ceramah. Sesudah ia berhasil menyebarkan benih secara berpikir *salaf* (pembaharuan), kemudian ia mendirikan perkumpulan "persyarikatan Muhammadiyah" di Yogyakarta pada tanggal 18 Nopember 1912. Pengurus pertama dari perkumpulan Muhammadiyah (yang berarti "umat Muhammad atau pengikut Muhammad") terdiri dari: H. A. Dahlan, Abdulah Sirad, H. Ahmad, H. Abdulrachman, R.H. Sarkawi, H. Muhammad, R.H. Jaelani, H. Anis, dan H.M. Fakhri. Pendirian Muhammadiyah oleh K.H.A. Dahlan tersebut adalah sebagai tanggapan atas saran yang diajukan oleh murid-muridnya dan oleh beberapa anggota Budi Utomo. Misalnya Mas Raji murid sekolah *Kweekschool* di Yogyakarta dan R. Sastrasuganda, guru sekolah *Kweekschool*, agar Dahlan mendirikan suatu perkumpulan yang bersifat tetap untuk memberi pengajaran tentang Agama Islam. K.H. Dahlan pada tahun 1909 menjadi anggota Budi Utomo dengan maksud agar dapat memberi pelajaran agama kepada para anggota Budi Utomo. ⁶⁵⁾

Muhammadiyah berpendapat bahwa yang menjadi dasar Agama Islam ialah Al Qur'an dan Hadis yang ditafsirkan secara mutakhir. K.H. Ahmad Dahlan menolak sikap takliq (tunduk secara membuta) kepada pernyataan dan tindakan orang lain, dengan tujuan untuk dapat mengajarkan Agama Islam diantara

para anggotanya. Dengan demikian, Muhammadiyah dapat dianggap sebagai perkumpulan modernisme Islam. ⁶⁶⁾ Muhammadiyah mendirikan sekolah yang berdasarkan keagamaan, rumah yatim-piatu, rumah fakir-miskin, balai pengobatan, dan rumah sakit. Perkumpulan ini berpusat di Yogyakarta, dan sampai tahun 1917 kegiatan Muhammadiyah masih terbatas di Kampung Kauman dan sekitarnya. Pada mulanya Dahlan sendiri menjalankan berbagai-bagai pekerjaan, seperti tabligh, mengajar di sekolah Muhammadiyah, memimpin pengajian, dan mengumpulkan pakaian untuk diberikan kepada orang miskin. Maka pada waktu permulaan berdirinya tersebut belum terdapat pembagian pekerjaan di dalam Muhammadiyah, tetapi justru dalam masa permulaan ini telah diletakkan sifat sosial dan pendidikan dari Muhammadiyah. ⁶⁷⁾

Pada tanggal 20 Desember 1912 K.H.A. Dahlan mengajukan surat permohonan badan hukum bagi Muhammadiyah kepada Gubernur Jenderal dan permintaan ini dikabulkan dengan surat ketetapan (*Gouvernement Besluit*) No. 81 tanggal 22 Agustus 1914 yang hanya memberi izin bagi Muhammadiyah untuk daerah Yogyakarta. ⁶⁸⁾

Setelah tahun 1917, daerah kegiatan Muhammadiyah mulai meluas keluar daerah Yogyakarta. Pada tahun 1917, Budi Utomo mengadakan kongresnya di Yogyakarta di mana rumah K.H.A. Dahlan dijadikan pusat dari Kongres Budi Utomo. Dalam kongres itu K.H.A. Dahlan mengadakan tablig pada para pengikut kongres, sehingga pengurus Muhammadiyah menerima permintaan dari beberapa tempat di Jawa untuk mendirikan cabangnya di daerah itu. Untuk dapat memenuhi maksud ini, maka anggaran dasar perkumpulan Muhammadiyah yang hanya membatasi kegiatan perkumpulan di daerah Yogyakarta, harus diubah. Hal ini dilakukan pada tahun 1920 ketika kegiatan Muhammadiyah diperluas ke seluruh Pulau Jawa, dan pada tahun 1921 ke seluruh daerah Indonesia. Pekerjaan K.H. Dahlan sebagai saudagar batik, yang sering berkelana, memudahkan ia mencari kawan dan menyebarkan pahamnya.

Perkumpulan lain yang juga berdasarkan pembaharuan (ajaran Salaf), misalnya perkumpulan "Nurul Islam" di Pekalongan yang didirikan oleh pedagang Minangkabau di daerah itu, telah diubah menjadi cabang dari Muhammadiyah. Di Surabaya, seorang pedagang Minangkabau yang bernama Pakih Hasyim

telah mengadakan tablig yang bersifat pembaharuan, sehingga cabang Muhammadiyah di Surabaya didirikan di antara pendengar tablig ini atas saran dari Haji Mas Mansur. Demikian juga dengan perkumpulan lain, seperti "*Al Munir*" dan "*Siratal Mustaqim*" di Makasar, "*Al Hidayah*" di Garut, "*Sidiq Amanat - Tabligh Fathonah*" di Solo, dan "*Sendi Aman Tiang Selamat*" yang didirikan oleh Haji Rasul di Sumatera Barat, semuanya meleburkan diri dan menjadi cabang dari Muhammadiyah. Karena perkembangan yang pesat, maka H.A. Dahlan mengajukan lagi permohonan izin kepada pemerintah untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta. Permohonan ini dikabulkan dengan surat keputusan Pemerintah No. 40 tanggal 16 Agustus 1920 kemudian pada tanggal 7 Mei 1921, Dahlan mengajukan permohonan lagi agar diberi izin mendirikan cabang Muhammadiyah di seluruh Hindia Belanda oleh karena pada kenyataannya berbagai cabang telah didirikan di seluruh Indonesia. Permohonan ini juga dikabulkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan *Gouvernement Besluit* No. 36 tanggal 2 September 1921.⁶⁹⁾ Tentang pendirian Muhammadiyah cabang Solodapat dituturkan sebagai berikut :

Pada tahun 1913 di Kampung Sewu, Kecamatan Jebres, Surakarta didirikan cabang Sarekat Islam, dengan pengurus harian : M. Ng. Darsasasmita (ketua), H. Kromosigro (R.L. Totosuhardjo-Penulis). M. Ng. Parikrangkungan (R.T. Prawiradinigrat - Bendahara). Cabang Solo mengadakan kursus Agama Islam dan di antara gurunya terdapat H. Misbakh, pemimpin SI. Oleh karena para gurunya (termasuk H. Misbakh) tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan pendengarnya tentang soal Agama Islam dan agama lain maka atas usul H. Misbakh akan diundang pemimpin Muhammadiyah dari Yogyakarta untuk memberikan ceramah tentang Agama Islam. Kemudian dibentuk suatu panitia penerima yang diketuai H. Misbakh (ketua), Darsasasmita (wakil ketua), M. Harsalumaksa (penulis), R. Ng. Parikrangkungan (penulis II), R. Sontohartono (bendahara), dan M. Sukarno dan M. Sudiono (pembantu). Panitia ini akan menyelenggarakan ceramah dari para pemimpin Muhammadiyah yang datang dari Yogyakarta di antara yang datang ialah K.H.A. Dahlan, H. Fakhruddin, H. Hajid, dan Bagus Hadikusumo.

Pada tahun 1917, setelah ceramah dan kursus berlangsung, di mana juga hadir Kyai Iman Bisri dan Kyai Idris, maka atas keputusan panitia penghimpunan mereka diubah menjadi cabang

dari Muhammadiyah. Tetapi oleh karena menurut beslit pemerintah, Muhammadiyah pada waktu itu hanya mendapat izin bekerja di Karesidenan Yogyakarta, maka cabang Solo tersebut belum dapat diakui sebagai cabang Muhammadiyah. Atas saran dari K.H.A. Dahlan maka cabang tersebut diberi nama : *Sidiq Amanat Fabligh Fatonah*, hanya dasar dan tujuannya disamakan dengan Muhammadiyah di Yogyakarta. Pada tahun 1919 - 1920, Sigiq Amanat Fabligh Fatonah memperbaharui susunan pengurusnya, sehingga menjadi sebagai berikut : Kyai Mukhtar Bukhari (ketua) R. Ng. Parikrangkungan (wakil ketua), M. Harsalumakso (penulis) R. Sontohartono (bendahara), R. Ng. Sastrosugondo (pembantu), R. Ng. Wignyadisastra (pembantu), R. Sastrosumarto (pembantu), R. Ng. Samsu Hadiwiyoto (pembantu), M. Abutoyib (pembantu). Pada tahun 1922, meskipun Muhammadiyah sudah boleh mendirikan cabangnya di luar kota Yogyakarta (diresmikan sebagai cabang tanggal 25 Januari 1922), namun nama Sidiq Amanat Fabligh Fatonah masih tetap dipakai. Baru tahun 1925, SATF dibubarkan dan didirikan pengurus yang baru dengan nama Muhammadiyah cabang Solo.⁷⁰⁾

Antara tahun 1920 - 1925 Muhammadiyah giat mendirikan sekolah karena memang bidang pendidikan dan pengajaran mendapatkan tempat yang istimewa di dalam Muhammadiyah. Pada tanggal 14 Juli 1923 didirikan suatu badan oleh Muhammadiyah yang diberi nama "Majelis Pimpinan Pengajaran Muhammadiyah" dengan diketuai oleh M. Ng. Joyosugito yang kemudian menjadi gerakan *Ahmadiyah Lahore*. Anak-anak terlantar dan yatim-piatu mendapat perhatian khusus demikian juga orang-orang miskin. Balai kesehatan didirikan, persatuan jururawat diadakan, juga pertolongan kepada korban bencana alam, badan pembantu urusan perkawinan, usaha untuk memperbaiki perjalanan haji.

Wanita mendapat saluran dalam perkumpulan Aisyiah yang kemudian menjadi bagian dari Muhammadiyah, dan gadis-gadis dalam "*Nasyiatul Aisyiah*". Gerakan kepanduan didirikan pada tahun 1918 dengan nama "Hizbul Wathan" yang berarti "Penjaga Tanah Air" dan pada tahun 1924 menjadi bagian khusus dari Muhammadiyah.⁷¹⁾

K.H.A. Dahlan mula-mula mendirikan sekolah rakyat di kampung Kauman, yang murid-muridnya terdiri dari laki-laki dan wanita. Kira-kira pada tahun 1912, bersamaan waktu dengan berdirinya Muhammadiyah. Setelah itu didirikan sekolah

rakyat di kampung Suronatan, yang kemudian terkenal dengan sebutan "Sekolah Standar". Pada waktu itu mulai diadakan pemisahan murid laki-laki yang bersekolah di *Standard school Suronatan*, sedang murid-murid wanita di Sekolah Rakyat Kauman. Sekolah Rakyat Kauman ini sampai sekarang terkenal dengan sebutan "*Pawiyatan Wanita Muhammadiyah Kauman*". Kemudian didirikan Sekolah Rakyat di Karangakajen, Bausasran, Ngadiwitanan, dan sebagainya. Sekolah Menengah yang mula-mula didirikan ialah perguruan *Al Qismul Argo*, yang didirikan oleh H.A. Dahlan sendiri sekitar tahun 1918. Sekolah ini mula-mula bertempat di rumah K.H.A. Dahlan di Kampung Kauman, yang dalam perkembangannya, telah limakali bertukar nama yaitu : *Al Qismul Argo*, *Pondok Muhammadiyah*, *Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah* dan *Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah*. Pada tahun 1924 ketika bernama *Kweekschool Muhammadiyah* mulai diadakan pemisahan murid putera dan puteri. Pada waktu masih bernama *Al Qismul Argo* pelajaran yang diberikan hanya agama, setelah bernama *Pondok Muhammadiyah* diberikan pelajaran umum. Sekolah lainnya yang kemudian didirikan ialah : *HIS met de Qur'an* pada tahun 1926 menyusul Mulo dan HIK Muhammadiyah. *HIS met de Qur'an* akhirnya bernama *HIS Muhammadiyah* saja, dan di samping itu juga didirikan *Schakel School Muhammadiyah*. Selain itu juga didirikan perguruan yang khusus memberikan pelajaran agama, seperti kursus *Mubalighin*, *Wustho Mu'allimien*, *Zuama* dan *Za'imat*. Pada umumnya dapat dilihat bahwa terdapat dua cara yang diikuti Muhammadiyah dalam mendirikan sekolah pertamanya, dengan mengikuti sistem sekolah pemerintah yang sudah ada dengan menambah roh dan agama, seperti misalnya *HIS met de Qur'an*, maka HIK dan *Schakel school Muhammadiyah*, dengan mutu, sifat, cara mengajar dan mempunyai corak sendiri. ⁷²⁾

Dalam hal susunan organisasi dapat disebutkan bahwa pimpinan Muhammadiyah yang kedudukan di Yogyakarta merupakan pusat kegiatan organisasi. Di dalam perkembangannya, pengurus pusat ini kemudian dibantu oleh badan yang dinamakan majelis yang diadakan menurut kebutuhan zaman. Kebijakanaan tertinggi terletak pada sidang Tanwir, yang terdiri dari konsul, yakni ketua wilayah, dan bawah wilayah ada, cabang, kemudian ranting. Majelis Tanwir sewaktu-waktu dapat dipanggil untuk bersidang apabila terjadi persoalan penting. Majelis Tanwir di-

bentuk pada konggres di Sumatera Barat tahun 1830. Seorang konsul adalah tokoh Muhammadiyah yang telah memperoleh kepercayaan penuh dari pusat pimpinan serta berpengaruh besar terhadap masyarakat di wilayahnya sendiri. Majelis mempunyai departemen dalam organisasi seperti Majelis Tarjih yang mengurus soal yang berhubungan dengan hukum agama; Majelis Pendidikan dan Pengajaran yang mengurus soal yang menyangkut pendidikan dan pengajaran pada umumnya dan pendidikan agama khususnya; Majelis Hikmah yang mengurus soal-soal yang berhubungan dengan politik dan kenegaraan; Majelis Tabligh, mengenai hal penyiaran, penerangan dan da'wah Islam tolong menolong, yatim piatu, kesehatan rakyat dan pengobatannya; Majelis Pemuda yang mengurus urusan Kepanduan. Majelis-majelis ini dapat ditambah atau dikurangi menurut kebutuhan zaman, dan semua anggota bekerja atas dasar keikhlasan tanpa mengharapkan pembalasan jasa. H.A. Dahlan menjadi ketua umum Muhammadiyah dari tahun 1912 - 1923 sampai ia meninggal di rumah kediamannya di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 23 Pebruari 1923. Kemudian ia diganti oleh sahabat dan iparnya, K.H. Ibrahim (1923 - 1923) di mana Muhammadiyah semakin pesat berkembang, terutama ke daerah luar Jawa. Pimpinan selanjutnya K.H. Hisyam (1932 - 1936) dan sesudah itu K.H. Mas Mansoer (1936 - 1945). Adapun anggota pengurus besar Muhammadiyah yang pertama pada tanggal 18 Nopember 1912, ialah K.H. A. Dahlan (ketua umum) Abdullah Sirat (sekretaris), Haji Akhmad, H. Abdurrahman, R. Haji Sarkawi, H. Muhammad, R.H. Jaelani, Haji Anies, dan H. Muhammad Hakih.⁷³ Sampai tahun 1925 (Konggres di Yogyakarta), Muhammadiyah telah mempunyai 29 cabang dengan 4000 anggota, sedang kegiatannya dalam bidang pendidikan telah dapat mendirikan 9 sekolah HIS (*Hollandsch Inlandsche School*) 1 Sekolah Guru (*Kweekschool*) di Yogyakarta, 32 sekolah rendah klas dua (5 tahun), 1 *Schakelschool* (sekolah penghubung), 14 Madrasah yang mempunyai 119 guru dan 4000 murid. Dalam lapangan kemasyarakatan, telah mempunyai 2 buah klinik (di Yogyakarta dan Surabaya) yang dapat melayani 12.000 orang penderita, 2 buah rumah yatimpiatu, dan 1 rumah pemeliharaan orang miskin di Yogyakarta. Pada tahun 1929 pengikut dari konggres Muhammadiyah datang dari pulau-pulau yang besar di seluruh Indonesia (kecuali Kalimantan) mempunyai anggota 19.000 orang, dan telah mengeluarkan kira-kira 700.000

buku dan brosur. Cabang Muhammadiyah di Solo telah membuka 1 klinik mata, dan 1 klinik umum berhasil dibuka di Magelang. Konggres tahun 1930 di Bukittinggi (yang pertama diadakan di luar Jawa), mencatat 112 cabang dan kelompok dengan 24.000 orang anggota. Keanggotaannya bertambah pada tahun 1935 menjadi 43.000 orang, dengan 710 cabang dan kelompok (316 di Jawa, 286 di Sumatra, 79 di Sulawesi, dan 29 di Kalimantan). Pada tahun 1938 jumlah cabang menjadi 852 dan 898 kelompok dengan 250.000 anggota, 834 mesjid dan langgar, 31 perpustakaan umum, dan 1774 sekolah, juga mempunyai 5.516 propagandis laki-laki dan 2114 propagandis wanita. Perkembangan Muhammadiyah semakin cepat, seperti terlihat dari catatan berikut. 1 Januari 1928 mempunyai 150 cabang dengan 10.320 anggota, 1 Januari 1929: 209 cabang dengan 17.550 anggota, 1 Januari 1931: 267 cabang dengan 24.383 anggota. Jumlah rumah sekolah yang telah didirikan di Yogyakarta pada tahun 1929 sebanyak 126, sedangkan poliklinik di Yogyakarta, Solo, Surabaya dan Malang pada tahun 1929 mengobati 81.000 orang sakit.⁷⁴⁾ Kejadian yang penting di dalam sejarah Muhammadiyah pada masa K.H.A. Dahlan sebagai ketua pengurus besar (1912 - 1923) ialah:

Tanggal 7 Januari 1922: K.H.A. Dahlan bersama Nyai Dahlan pergi membuka rapat di kota Banyuwangi (Jawa Timur),

Tanggal 25 Januari 1922: K.H.A. Dahlan pergi ke Solo untuk mengesahkan berdirinya Muhammadiyah cabang Solo, bersama-sama dengan Muhammad Kusnie dan R.M. Prawiroworo.

Tanggal 28 Januari 1922: K.H.A. Dahlan bersama-sama dengan H.Fakhruddin dan M. Abdullah pergi ke Betawi (Jakarta) untuk mengadakan propaganda bagi pendirian sebuah sekolah guru Agama Islam.

Tanggal 30 Januari 1922: K.H.A. Dahlan bersama dengan H. Fachruddin dan M. Abdullah pergi ke Probolinggo untuk menyerahkan ijazah kepada ulama-ulama di sana.

Tanggal 14 Juni 1922: K.H. A.Dahlan bersama dengan Nyai Dahlan dan St. Umamah pergi ke Nganjuk untuk menghadiri rapat ulama,

Tanggal 8 Juli 1922: K.H.A. Dahlan dan M. Abdullah melanjutkan pimpinan rumahtangga Muhammadiyah cabang Kepanjon.

Tanggal 6 Agustus 1922: K.H.A. Dahlan bersama dengan M.

Ng. Joyosugito dan Muh. Kusnie, membuka pengajaran Agama Islam di sekolah *Hogere Kweekschool voor Inlandsche Onderwijzers* (sekolah guru tinggi untuk Bumi putera) di Purworedjo.

Tanggal 7 Agustus 1922: K.H.A. Dahlan dan H. Sisyam membantu usaha pendirian sekolah Agama Islam di Kepajen.

Tanggal 9 September 1922: K.H.A. Dahlan bersama Nyai Dahlan pergi ke Pekalongan dan Pekadangan untuk menggiatkan pengajian Muhammadiyah di daerah tersebut.

Tanggal 12 September 1922: K.H.A. Dahlan melangsungkan Tabligh Akbar dalam rapat umum Sarekat Islam di Bangil.

Tanggal 21 September 1922: K.H.A. Dahlan dan R.M. Prawiroworo pergi mengurus pengajaran Agama Islam di HKS Purworedjo yang dihentikan oleh *Regent* (Bupati).

Tanggal 4 Nopember 1922: K.H.A. Dahlan bersama dengan Nyai Dahlan dan M. Tayib memimpin rapat akbar yang diselenggarakan oleh R.M. Dirjo (Penghulu Landraad) di Purwokerto. Selain K.A. Dahlan juga membuka pengajaran Agama Islam di OSVIA Magelang bersama dengan M. Ng. Joyosugito.

Tanggal 14 Nopember 1922: K.H.A. Dahlan bersama Nyai Dahlan memimpin rapat Muhammadiyah di Salam.

Tanggal 18 Nopember 1922: K.H.A. Dahlan dan M. Ng. Joyosugito menghadiri rapat ulang tahun ke-10 berdirinya Muhammadiyah di kota Solo.

Tanggal 23. Nopember 1922: K.H.A. Dahlan mengadakan rapat Agama Islam dalam perkumpulan Daerah Dalem di Surakarta.

Tanggal 29 Nopember 1922: K.H.A. Dahlan bersama Nyai Dahlan berusaha menanamkan benih Muhammadiyah di Tosari dan membantu pendirian sebuah mesjid di sana.

Adapun tanggal pendirian cabang Muhammadiyah yang terpenting di Jawa Tengah ialah : Blora (27 Nopember 1921), Surakarta (25 Januari 1922), Purwokerto (15 Nopember 1922), Pekalongan (15 Nopember 1922), Pekadangan (15 Nopember 1922), Kudus (1 Januari 1925).⁷⁵⁾

7. *Pergerakan Taman Siswa*

Pendiri "Perguruan Nasional Taman Siswa" (*Nationaal Onderwijs Instituut Taman Siswa*) pada tanggal 3 Juli 1922, ialah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Beliau seorang nasionalis radikal yang telah aktif bergerak di dalam pergerakan nasional sejak masa Budi Utomo pada tahun 1908, Sarekat Islam cabang Bandung, dan pendiri *Indische Partij*. Pada tahun 1913 dibuang ke Negeri Belanda karena kegiatannya di dalam "Comite Bumiputra" yang menentang perayaan peringatan 100 tahun kemerdekaan Negeri Belanda dari penjajahan Perancis. Ki Hajar Dewantara dilahirkan tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta, sebagai putera keempat Pangeran Suryaningrat (putera sulung Pakualam III). Pada masa mudanya, sebagai putera seorang bangsawan Jawa, ia hidup dalam suasana kebudayaan Jawa sehingga ia gemar akan cabang-cabang kesenian Jawa seperti seni gending, seni suara, dan seni sastra, serta cerita wayang. Ia mengenal Agama Islam, di samping kebudayaan Jawa yang bersifat Hinduistik, sehingga perpaduan antara rasa keindahan dan religi telah mempengaruhi pribadinya yang telah lebih mengutamakan hakekat dari pada syariat. Ia juga memuja tokoh pewayangan seperti Yudistira (lambang perdamaian dan cinta-kasih) dan Sri Kresna (Penjelmaan Wishnu yang menjadi penasihat Pendawa yang bijaksana).

Setelah menamatkan, pelajarannya di sekolah rendah Eropa (ELS), ia melanjutkan ke Sekolah Dokter Jawa (Stovia) pada tahun 1903 sampai tahun 1909. Kemudian ia terpaksa keluar dari Stovia karena biaya untuk meneruskan pelajaran tak mencukupi. Selama bersekolah di Stovia, ia telah memperlihatkan penentangan terhadap peraturan sekolah yang merendahkan bangsa Indonesia seperti larangan bagi orang Indonesia untuk memakai pakaian Eropa dan tidak boleh merayakan hari raya Idul Fitri. Ketika pembentukan Budi Utomo pada tahun 1908, ia bersama Dr. Cipto Mangunkusumo termasuk golongan radikal yang menentang politik golongan tua yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat serta pembatasan perkumpulan yang hanya diperuntukkan bagi orang Jawa. Tahun 1909, setelah keluar dari Stovia, ia bekerja sebagai analis pada pabrik gula di Bojong, Purbalingga, kemudian kembali ke Yogyakarta dan bekerja pada Apotik Rathkap di kota itu. Tetapi ia lebih tertarik pada la-

rangan jurnalistik sehingga ia menjadi pembantu dari surat-surat kabar "*Sedyatama*", "*Midden Jawa*", "*De Expres*", "*Oetoesan Hindia*" (dipimpin oleh H.O.S. Cokroaminoto). Kemudian ia diminta oleh Douwes Dekker untuk pindah ke Bandung dan bersama Dr. Cipto Mangunkusumo serta Douwes Dekker ia mendirikan *Indische Partij* pada tanggal 25 Desember 1912. Pada waktu yang bersamaan ia bersama Abdul Muis dan A. Wignyodisastro mendirikan SI cabang Bandung. Pada bulan Nopember 1913 ia menjadi sekretaris dari "Comite Bumiputera" yang diketuai Dr. Cipto Mangunkusumo, anggota Abdul Muis dan A. Wignyodisastro yang bertujuan menentang perayaan 100 tahun kemerdekaan negeri Belanda dari penjajahan Perancis. Sebagai akibat dari brosur yang ditulisnya yang berjudul "Seandainya saya seorang Belanda," ia bersama Douwes Dekker dan Dr. Cipto dibuang ke negeri Belanda pada bulan Agustus 1913.

Di negeri Belanda ketiga orang buangan tersebut memasuki perkumpulan mahasiswa Indonesia di negeri Belanda yang bernama "*Indische Vereeniging*" yang menyebabkan gerak langkah perkumpulan itu menjadi radikal dan menimbulkan keinsafan politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia lepas dari Nederland pada tahun 1922 perkumpulan tersebut menjadi "*Indonessche Vereeniging*" dan tahun 1924 menjadi "Perhimpunan Indonesia". Di negeri Belanda, K.H. Dewantara juga giat dalam bidang jurnalistik dengan menjadi redaktur majalah "*Indische Vereeniging*" yang bernama "Hindia Putra" dan kemudian juga menjadi ketua dari "*Indonesisch Persbureau*". Ia juga menyadari betapa pentingnya bidang pendidikan dan pengajaran bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, dengan mendidik pemuda Indonesia agar mempunyai jiwa dan semangat kebangsaan. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran K.H. Dewantara selalu memesan akte Eropa pada tahun 1916. Ia juga mempelajari aliran baru di dalam pendidikan, seperti metode pendidikan baru dari Dr. Maria Montessori dan ahli pendidik Belanda, Jan Lighthart. Bahkan ia ikut menyelenggarakan sekolah Montessori pada tahun 1914 serta mengambil bagian aktif dalam sekolah percobaan Jan Lighthart.⁷⁶⁾

Pada tanggal 17 Agustus 1917 pembuangan dicabut, sehingga K.H. Dewantara dapat kembali ke Indonesia, tetapi oleh karena terhalang Perang Dunia I, maka ia baru kembali ke Indonesia pada tanggal 6 September 1919. Ia segera aktif lagi di dalam

pergerakan politik dan jurnalistik bersama dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker, dan tiga serangkai itu kembali memimpin perkumpulan, "*Nationaal Indische Partij*" (NIP) yang merupakan kelanjutan dari *Indische Partij* dan *Insulinde*. Suwardi mula-mula menjadi sekretaris NIP, kemudian menjadi ketua NIP. Selain itu ia juga menjadi pembantu dari surat-surat kabar "*De'Express*", "*De Beweging*", dan "*Persatuan Hindia*". Karena karangan-karangannya yang tajam mengecam pemerintah, ia sering ditangkap dan dihukum karena melanggar persdelict. Tanggal 5 Juni - 24 Agustus 1920 ia dipenjarakan dan pada tanggal 11 Nopember 1920 dihadapkan di pengadilan dan dimasukkan penjara Mlaten Semarang, kemudian dipindah ke penjara Pekalongan. Setelah keluar dari penjara Suwardi (K.H. Dewantara) tidak menghentikan kegiatannya, dan tiga serangkai Suwardi - Cipto - Douwes Dekker diterima lagi sebagai anggota redaksi "*De Express*". Ketika terjadi pemogokan buruh pegadaian pada bulan Januari 1922, Suwardi memandang pemogokan itu sebagai peristiwa nasional dan mendirikan "Comite Hidup Merdeka" untuk membantu korban korban pemogokan tersebut. Karena kegiatan ini ia dicurigai oleh pemerintah. Rumah dijaga polisi, demikian juga kantor tempat ia bekerja seperti kantor redaksi "*Penggugah*", kantor sekolah Adhi Dharma di mana dia menjadi guru, dan kantor Comite Hidup Merdeka.⁷⁷⁾

Selain kegiatan tersebut di atas, Suwardi juga menjadi guru di sekolah Adhi Dharma di Yogyakarta yang didirikan oleh kakaknya Suryopranoto pada tahun 1915. Sekolah Adhi Dharma adalah sekolah swasta bangsa Indonesia pertama yang berbentuk HIS dan di sekolah ini, Suwardi mempraktekkan pengetahuan pendidikannya yang diperolehnya di negeri Belanda. Ia mengatakan bahwa metode pendidikan yang dipakainya ialah suatu "Metode Montessari - Togore yang telah diubah". Unsur dari metode Montessori yang diambilnya ialah "memelihara suasana kebebasan dan menghormati individualitet".

Pada tahun 1922 kegiatan Suwardi mulai mengalihkan kegiatannya kepada bidang pendidikan dan kebudayaan untuk mendidik tunas muda bangsa Indonesia dengan jiwa dan semangat kemerdekaan dan kebudayaan nasional. Perubahan haluan dan kegiatannya didasarkan pada keyakinan yang teguh bahwa keadaan yang berjiwa koloni itu tidak akan lenyap, jika hanya dilawan dengan pergerakan politik. Oleh karena itu janganlah

kita hanya melulu mementingkan perlawanan, tetapi harus juga mementingkan penyebaran benih hidup merdeka di kalangan rakyat Indonesia dengan jalan pengajaran, yang disertai pendidikan nasional. Di larangnya *Nationale Indische Partij* oleh pemerintah pada tahun 1922, mungkin juga mempengaruhi keputusan Suwardi untuk mendahulukan pendidikan kebangsaan dari pada perjuangan politik.⁷⁸⁾

Pembentukan Taman Siswa didahului dengan kelompok *sarasehan* (diskusi) yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yang bernama perkumpulan "*Selasa Kliwon-an*". Perkumpulan ini dibentuk oleh pemuda golongan politik revolusioner radikal dari Budi Utomo dan Sarekat Islam serta ahli kebatinan antara lain Ki Hajar Dewantara, Sutatmo Suryokusumo, Suryoputra, K.A. Suryomataram, Pronowidigdo, Prawirowiwo dan Sutopo Wonoboyo. Dalam perkumpulan itu dibahas soal politik dan kebatinan, misalnya gagalnya "*November Belofte*" pada waktu itu serta perjuangan politik bangsa yang belum mencapai hasil seperti yang diharapkan. Selain itu yang menjadi inti pembicaraan adalah usaha untuk "membahagiakan diri, membahagiakan bangsa, dan membahagiakan manusia." Untuk maksud ini diperlukan suatu perguruan dan pendidikan informal bagi orang-orang tua di luar sekolah. Maka ditetapkanlah pembagian tugas tugas yaitu Ki Hajar Dewantara dan kawan-kawan dalam pendidikan kanak-kanak, sedang K.A. Suryomataram di lapangan pendidikan bagi orang tua dengan gerakan "*Ngelmu Begyo*" (ilmu bahagia). Dengan didirikannya perguruan nasional Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922, oleh Ki Hajar Dewantara, maka perkumpulan *Selasa Kliwon-an* dibubarkan. Asas perguruan Taman Siswa ialah : kemerdekaan, berorientasi kepada kebudayaan bangsa sendiri (kebudayaan nasional), kerakyatan, kepercayaan kepada kekuatan sendiri untuk tumbuh, disertai rasa pengabdian tinggi, memahami kemajuan sebagai bahan perkembangan kodrati dalam suatu "*Sistim among*" (kemerdekaan diri, kebangsaan dan kemanusiaan). Rapat peresmian Taman Siswa diadakan di pendapa sekolah Adhi Dharma di mana Dewantara mengucapkan pidatonya yang bersejarah tentang dasar Taman Siswa yang secara singkat dapat dicakup dalam lima pokok.

Pertama: Kita mendidik generasi muda kita bukan saja untuk mengembangkan jiwa raga mereka, akan tetapi juga untuk me-

ngembangkan kebudayaan nasional. Oleh karena itu cita cita pendidikan mestilah didasarkan pada adat istiadat dan kebudayaan nasional. Pendidikan atau pengajaran adalah suatu cara untuk menerima warisan kebudayaan dari leluhur kepada generasi muda.

Kedua: Jenis pendidikan Barat di Indonesia hanya berguna bagi politik kolonial yang memerlukan pegawai rendah pemerintah serta pegawai untuk perusahaan Belanda, sehingga hanya menjadikan mereka sebagai buruh. Pendidikan semacam ini tidak bisa membantu memperoleh kebijaksanaan untuk mengembangkan jiwa raga anak anak.

Ketiga: Sistim Pendidikan Barat tersebut sangat sedikit pengaruhnya pada pembentukan solidaritas bangsa kita, kita harus mengembangkan sistim pendidikan sendiri di mana bangsa kita dapat belajar semangat kemerdekaan dan menghayati rasa solidaritas nasional.

Keempat: Dalam menjalankan sistim pendidikan nasional ini, kita harus mempertimbangkan kembali sistim pendidikan asrama dan pondok pesantren, di waktu bangsa kita masih menikmati kemerdekaannya.

Kelima: Sistim pendidikan nasional tersebut sama dengan aliran terakhir dalam lapangan pendidikan, seperti dari Montessori dan Tagore, yang menekankan kebebasan anak-anak. ⁷⁹⁾

Azas pendidikan Taman Siswa ditetapkan tahun 1922 yaitu :

- a. Hak atau dasar kemerdekaan bagi tiap orang untuk mengatur dirinya sendiri (*zelfbeschikkingsrecht*) dengan mengingat tertib damainya hidup bersama. Tidak ada tempat untuk paksaan, si anak harus tumbuh menurut kodrat dan karenanya sistim pendidikan Taman Siswa ialah sistim Among dan metode Among.
Si pendidik bersikap "*tut wuri andayani*" (mengikut dari belakang dan melakukan pengaruhnya).
- b. Taman Siswa mendidik anak menjadi merdeka batinnya, pikirannya, dan tenaganya, guru bertugas membimbing dan mendidik untuk mencari sendiri pengetahuan dan memakainya untuk umum.
- c. Taman Siswa menghindari sistim pendidikan Barat yang mengutamakan kecerdasan pikiran (intelektualistis) dan sebaliknya mencari cara pendidikan baru atau dasar kebu-

dayaan bangsa sendiri selaras dengan kodrat alam yang akan memberikan kedamaian.

- d. Dasar kerakyatan, ialah bahwa Taman Siswa lebih memperhatikan atau memajukan pengajaran untuk rakyat umum dari pada mempertinggi mutu pengajaran, jika usaha meningkatkan pengajaran ini akan mengurangi tersebarnya pengajaran.
- e. Bekerja menurut kekuatan sendiri, walaupun Taman Siswa tidak menolak bantuan dari pihak lain asalkan bantuan itu tidak mengurangi kemerdekaan lahir dan batin dan bantuan yang mengikat akan ditolak.
- f. Semua usaha harus dibiayai atau dibelanjai sendiri atas dasar "*Zelfbedruipingsysteem*".
- g. Taman Siswa mengabdikan kepada anak dengan segala hasrat kesucian pendidik dengan tidak menuntut hak harus mengorbankan kepentingannya untuk kebahagiaan anak didiknya. ⁸⁰⁾

Asas tersebut tetap menjadi dasar pendidikan Taman Siswa sampai pada saat ini. Oleh Sarmidi Mangunsarkoro, pernyataan asas tersebut ditafsirkan sebagai "perpaduan pengalaman dan pengetahuan perumusan Suwardi Suryaningrat, yang mencoba merangkaikan aliran pendidikan berdasarkan kebebasan Barat dan aliran kebatinan yang juga menganjurkan kebebasan, sedangkan perumusannya adalah "anak rokhani gerakan politik kiri, National Indische Partij." ⁸¹⁾

Pada masa permulaan berdirinya, Taman Siswa menimbulkan kritik yang tajam, suatu pihak mengecamnya sebagai non Islam atau sifatnya dipengaruhi unsur Jawa asli. Selain itu banyak orang pada mulanya tidak mempercayai kesanggupan bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik dan bernilai. Untuk menghadapi kritik itu, Ki Hajar Dewantara menganjurkan supaya Taman Siswa dalam "delapan tahun berdiam diri" dan memusatkan diri kepada pendidikan yang sederhana dan sungguh-sungguh. Pada tahun 1930 perguruan Taman Siswa mengadakan kongresnya yang pertama yang mencapai sukses. ⁸²⁾ Ki Hajar Dewantara dalam kongres itu mengatakan sebagai berikut :

"Pada tahun 1922 Taman Siswa memperkenalkan diri se-

bagai "perguruan nasional". Oleh karena rintangan yang hebat yang saya jumpai dari kalangan bangsaku sendiri, maka kami para pendiri termasuk saya sendiri memutuskan untuk selama windu pertama menjalankan apa yang disebut "*tapa meneng*", yaitu bertapa sambil berdiam diri. Sesudah sewindu yang penuh dengan perjuangan batin dan amat baik untuk mengambil pelajaran daripadanya dan begitu indah untuk latihan menguasai diri, tibalah waktunya untuk berkonperensi yakni pada tahun 1930"⁸³⁾

Pada permulaan berdirinya, sekolah dari cabang Taman Siswa berjumlah sembilan, dan 13 orang anggota telah diangkat sebagai wakil dari berbagai cabang seperti Bogor, Bandung, Tegal, Semarang, Surakarta, Wonokromo (dekat Surabaya), Surabaya, Malang dan Pasuruan. Wakil dari Bogor ialah Sutopo Wonoboyo yang menjadi anggota pengurus pusat Taman Siswa pada tahun 1923. Wakil dari Bandung adalah Sukarno, yang pada waktu itu masih menjadi mahasiswa Sekolah Teknik Tinggi dan yang menyerahkan kepada Taman Siswa sebuah sekolah yang oleh *Şarekat Rakyat* dipercayakan kepada Sukarno untuk mengurusnya. Wakil dari Semarang adalah Ki Cokrodirjo, meskipun tidak termasuk perkumpulan Selasa Kliwon. Ia berhubungan rapat dengan Suryokusumo, dan menjadi salah seorang pemuka Taman Siswa sampai meninggalnya pada bulan Maret 1971. Salah seorang wakil dari Surabaya adalah Ali Sastroamidjojo yang baru kembali dari negeri Belanda.

Setelah berdirinya Taman Siswa, banyak sekolah yang telah berdiri kemudian menyerahkan sekolahnya kepada Taman Siswa, seperti sekolah Rakyat di Bandung yang dipimpin oleh Sukarno, dan Sekolah Budi Utomo di Jatibaru (Jakarta). Sekolah yang mula mula didirikan oleh Suwardi di Yogyakarta ialah Taman Kanak kanak (Taman Indria) dan Taman Guru pada tahun 1924. Kemudian dibuka MULO *Kweekschool* yang lama pelajarannya 4 tahun setelah sekolah rendah, dalam tahun 1926, dibagi menjadi Taman Dewasa 3 tahun dan Taman Guru 1 tahun. Daftar pelajaran di sekolah Taman Siswa di Yogyakarta pada tahun 1924 ialah : Tatabahasa, bahasa Belanda, Ilmu Hayat, Hukum Nasional dan Kesenian, yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahasa Inggris, Ilmu Ukur, Ilmu Alam termasuk pelajaran pelajaran praktek di luar sekolah, diberikan oleh Suryoputra, bahasa Belanda dan Sejarah oleh Suwandi; Aljabar, Ilmu Bumi Alam,

dan Seni Rupa oleh Suryodiputra. Ilmu Pembukuan dan Musik Jawa tiap Jum'at petang oleh Kunto, bahasa Jawa dan Indonesia oleh Wiryodiharjo dan pembacaan sejarah serta Babad Tanah Jawi oleh Pronowidigdo. 84)

Sumber pemerintah Belanda mengatakan tentang sekolah yang didirikan oleh Taman Siswa meliputi 40 cabang, 3 di antaranya di Sumatra Timur dan 4 di Karesidenan Kalimantan Selatan dan Timur, dengan jumlah murid 5.140 orang. Ibu Pawiyan di Yogyakarta terdiri dari sebuah MULO dengan 238 murid, sekolah rendah dengan 363 murid, dan "Schakolaschcol" dengan 97 murid. Sejak tahun 1925, sekolah rendah untuk pertama kali meluluskan murid-muridnya, rata-rata 70% dari mereka telah lulus ujian pegawai negeri rendah dan ujian masuk MULO atau sekolah tehnik. Banyak dari mereka yang melanjutkan pelajaran ke MULO atau "Kweekschool" Taman Siswa, yang didirikan pada tahun 1924. Pada tahun 1928 MULO Taman Siswa untuk pertama kali berhasil meluluskan murid-muridnya yaitu 5 di antara 9 orang. Pada tahun 1929: 6 di antara 14 orang telah lulus ujian masuk ANS, yang berarti rata-rata lulus 45%. Sedangkan 24 orang lulus Taman Guru (MULO + 1 tahun teori dan 1 tahun pendidikan praktek). Mereka bekerja sebagai Guru pada sekolah Taman Siswa atau lembaga pendidikan partikelir lainnya. Pada tahun 1929 yang mencatatkan diri sebagai murid MULO Taman Siswa begitu besar, sehingga banyak yang terpaksa ditolak. Tentang Taman Siswa di Yogyakarta, para ahli telah memberikan penilaiannya yang baik. Sukses yang telah dicapai oleh Sekolah Taman Siswa di Kranggan, dan di Tumenggungan, ialah Taman Indriya dengan 7 Guru dan 420 murid, Sekolah Rendah di Pacarkeling dengan 1 guru dan 32 murid. Hasil pendidikan yang dicapai oleh Taman Siswa dari tahun ke tahun makin meningkat baik jumlah murid maupun jumlah yang lulus. Sejumlah sembilan murid Taman Siswa telah lulus ujian pegawai negeri rendah, empat murid lulus ujian Mulo; 10 murid lulus masuk *Burgeravondschool*. Di Batavia terdapat Taman Anak Anak (Taman Indriya) dengan 60 murid yang terdapat di Kemayoran dan Sekolah Rendah (semacam HIS) di Jatibaru dengan 200 murid. Kemudian didirikan Sekolah Rendah Taman Siswa yang kedua di Kebon Jeruk, dan sebuah asrama di Jatibaru. Di Tegal, Sekolah Taman Siswa mampu menyiapkan beberapa murid untuk ujian masuk HBS, sedangkan

Sekolah Taman Siswa di Malang juga telah menghasilkan calon untuk masuk MULO pemerintah. Semenjak tahun 1929 Taman Siswa makin berkembang dengan mendirikan Sekolah Pertanian; dan *Schakelschool* dan pada tahun 1930 yang dilaksanakan dengan sistim pondok.

Seorang Belanda yang bernama A. Jonkman yang telah mengunjungi Sekolah Menengah Tamah Siswa di Bandung mengatakan bahwa, "pada tahun 1927 Sekolah Taman Siswa dipimpin oleh Sosro kartono, kakak R.A. Kartini dan sebagai gurunya terdapat Ir. Sukarno dan Mr. Sunario. Sekolah itu kelihatan bercorak nasional Indonesia dalam arti bahwa ia merupakan hasil kerja sendiri. Selanjutnya nampak sekolah itu mengikuti MULO pemerintah, karena bahasa Belanda merupakan bahasa pengantar. Diduga Mr. Sunario, yang memberi pelajaran ilmu tata negara dan sejarah menitik beratkan kepada corak Indonesia. Direktur sekolah, itu, Sasrokartono, lebih menyukai suatu AMS dengan bahasa bahasa timur klasik dan memikirkan sebagai kelanjutan sebuah Fakultas Sastra Timur"⁸⁵)

Ki Hajar Dewantara mengatakan tentang didirikannya sekolah MULO oleh Taman Siswa pada tahun 1924 sebagai berikut:

Dalam pada itu kita bahkan memberanikan diri untuk mendirikan sebuah sekolah Taman Dewasa (MULO atau SMP), suatu perbuatan yang menyebabkan kita mendapat sebutan, "pemimpin gila." Pada tahun 1928 suatu titik tolak dalam sejarah Taman Siswa telah lulus tujuh dari dua belas murid pada ujian masuk AMS (SMA) jurusan alam pasti, sekarang kita boleh mulai berbicara. Sejak itu prosentase anak-anak kita yang lulus dalam ujian masuk ke sekolah yang lebih tinggi dalam segala jurusan selalu meningkat. Mengenai tenaga guru, maka kita agak kurang tergantung pada lain-lain pihak, sejak di Yogyakarta didirikan taman guru pusat dan di Malang, Surabaya, Semarang, Jakarta dan Medan sekolah-sekolah guru untuk sekolah-sekolah rendah. Cabang kita di Jakarta mendirikan sebuah Taman Dewasa Raya, sekolah menengah atas, yang lebih diberi dasar *maatschappelijk ekonomis* dari pada untuk melanjutkan pelajaran. Sekalipun begitu beberapa siswa tamatannya juga dari lain-lain perguruan kita bagian menengah dapat melanjutkan pelajarannya di India, Jepang dan Pilipina."⁸⁶)

Dengan demikian selama delapan tahun pertama, Taman

Siswa telah tumbuh menjadi suatu gerakan pendidikan kebangsaan yang penting di dalam menawarkan jiwa kebangsaan, persatuan dan kemerdekaan Indonesia di kalangan anak didik. Nasionalisme kebudayaan dalam Taman Siswa telah menjadi kepercayaan luhur suatu aliran jiwa yang bercorak religi. Ternyata pergerakan rakyat Indonesia juga tertarik kepada pendidikan Taman Siswa tersebut, sehingga di dalam kongres PPPKI di Surabaya pada tahun 1928, Ki Hajar Dewantara diminta untuk memberikan prasarannya. Prasaran yang berjudul: *"Pengajaran dan penghidupan rakyat, pengajaran dan kebangsaan"* telah diterima oleh kongres, dan kemudian Ki Hajar Dewantara duduk dalam komisi pengajaran PPPKI. Dengan demikian maka sekolah partikelir bangsa Indonesia mendapat landasan bertolak untuk meninggikan derajat rakyat melalui pengajaran sendiri dan mendidik bangsa sendiri dengan jiwa dan semangat kebangsaan dan kemerdekaan. Sejak itu timbul rumusan Ki Hajar Dewantara tentang hubungan gerakan politik kebangsaan dengan sekolah kebangsaan seperti Taman Siswa serta gerakan pendidikan dan sosial lainnya. Gerakan pendidikan yang diusahakan oleh bangsa Indonesia sendiri itu merupakan ladang atau sawah di mana orang memupuk apa yang perlu bagi keperluan hidupnya, sedangkan gerakan politik bangsa Indonesia merupakan pagar yang melindungi ladang atau sawah tersebut dari gangguan binatang buas yang akan memakan dan menginjak-injak tunas tanaman. Ini terbukti dengan perlawanan serentak bangsa Indonesia yang dapat dan mampu menyelenggarakan pendidikan yang selama ini hanya diselenggarakan oleh orang Belanda. Kongres itu diadakan sesudah Taman Siswa mendapat sambutan dari khalayak terbukti dengan sudah didirikannya 58 cabang Taman Siswa di seluruh Indonesia, yang semuanya didirikan atas inisiatif rakyat setempat sebagai tanda persetujuan dan dukungannya. Sedangkan bukti yang kedua dari keberhasilan Taman Siswa ialah bahwa pada tahun 1928 Taman Siswa yang sebelum tahun 1924 hanya menyelenggarakan Taman Indria dan Taman Muda (Taman Kanak Kanak dan Sekolah Dasar) dan pada tahun 1924 mulai mendirikan Taman Dewasa (MULO), dapat menunjukkan yang pertama dengan mengirimkan lulusan Taman Dewasa yang pertama ke AMS yang menyebabkan orang mulai tercengang dan dipihak Taman Siswa hilang perasaan kurang harga. 88)

Mengenai susunan organisasi Taman Siswa dapat disebut-

kan bahwa pimpinan yang bertanggung jawab adalah Majelis Luhur, semacam pengurus besar atau *Hoofdraad* yang merupakan pucuk yang anggota anggotanya dipilih oleh Kongres setiap empat tahun. Di atas badan ini ada seorang pemimpin umum yang dipilih untuk waktu yang tidak ditentukan dan mempunyai hak yang seperti kongres. Pemimpin umum Taman Siswa adalah Ki Hajar Dewantara. Terdapat juga Badan Pengetua" (*Badan Pinisepuh*).

Badan Pengetua, Pemimpin Umum, dan Majelis luhur bersama sama merupakan pimpinan tertinggi Taman Siswa. Sifat organisasi Taman Siswa ialah kekeluargaan dan atas dasar itu seluruh kehidupan dan perhubungan di lingkungan Taman Siswa diatur sebagai suatu "persatuan keluarga" atau "keluarga besar dan suci" di mana cinta kasih dan ketekunan pengabdian dan pengorbanan. Pendek kata segala sikap hidup yang baik untuk manusia, bukan lagi merupakan teori atau keharusan, melainkan menjadi kenyataan yang sama sama dihidupi dan dirasakan dalam arti yang semurni-murninya. ⁸⁹⁾

Beberapa keterangan statistik yang diambil dari laporan tahunan Taman Siswa tahun 1937 — 1938 dapat disebutkan di sini :

- a. Jumlah cabang: 190 dengan 225 sekolah, beberapa cabang dan sekolah masih kandidat, karena belum disahkan oleh pimpinan pusat, atau belum memenuhi nilai,
- b. Dari 190 cabang itu, 148 ada di Jawa dan Madura, 37 di Sumatra, 4 di Kalimantan, 1 di Sulawesi, dan 1 di Bali.
- c. Semua cabang mempunyai taman anak dan sekolah rendah dan sekolah perantara. Selanjutnya 20 sekolah menengah 6 taman guru dan 1 sekolah menengah atas. Beberapa cabang pun memelihara sekolah rakyat sekolah rakyat untuk perempuan, sekolah pertanian rendah, sekolah dagang, sekolah karya, dan lain-lain sebagai suatu percobaan.
- d. Jumlah tenaga pengajar sebagai 700, di antaranya 100 wanita, sedangkan murid berjumlah 17000 di antaranya 4000 perempuan. ⁹⁰⁾

8. *Organisasi Kepemudaan*

- a. Pergerakan Jong Java

Perkumpulan Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh murid murid Stovia di Jakarta, yang jaya dapat diang-

gap sebagai suatu perkumpulan pemuda. Tetapi kemudian yang dianggap sebagai perkumpulan pemuda pertama ialah perkumpulan *Tri Koro Dharmo* yang didirikan oleh pemuda Satiman, Kadirman, dan Sunardi serta beberapa pemuda lainnya, di gedung pertemuan Budi Utomo Jakarta, pada tanggal 7 Maret 1915.

Tujuan dari perkumpulan *Tri Koro Dharmo* yang berarti tiga tujuan mulia yaitu Sakti, Bhudi, Bhakti, ialah untuk mendidik atau sebagai tempat latihan bagi calon pemimpin nusa dan bangsa. Perkumpulan ini khusus bagi anak sekolah menengah di Jawa dan Madura, Sunda, Bali dan Lombok (Jawa - Raya). Dalam anggapan dasar antara lain disebutkan sebagai tujuan perkumpulan: "menimbulkan pertalian diantara murid murid bumiputera pada sekolah menengah dan kursus kursus perguruan kejuruan, menambah pengetahuan umum bagi anggota anggotanya, dan membangkitkan serta mempertajam perasaan buat segala bahasa dan kebudayaan." 91)

Yang dapat diterima sebagai anggota hanya murid sekolah menengah di Jawa dan Madura, tetapi Satiman (ketua *Tri Koro Dharmo*) dalam majalah *Tri Koro Dharmo* Nomor 31 Januari 1916, menyatakan bahwa sifat perkumpulan itu adalah sementara, artinya di kemudian hari *Tri Koro Dharmo* dapat diubah menjadi perkumpulan buat pemuda Indonesia pada umumnya. Di dalam kenyataannya, yang menjadi anggota terutama ialah murid sekolah menengah yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Murid murid Sunda dan Madura berpendapat bahwa perkumpulan itu terlalu bersifat Jawa khusus, seperti ternyata dari nama perkumpulan yang diambil dari bahasa Jawa. Untuk membuktikan bahwa anggapan tersebut hanyalah salah paham saja, maka dalam konggresnya pertama di Sala pada tanggal 12 Juni 1918, nama *Tri Koro Dharmo* diubah menjadi *Jong Java*, dengan harapan bahwa golongan lain yang berdasarkan kebudayaan Jawa Raya (Sunda, Madura, dan Bali) akan memasukinya. Sedangkan dalam konggres tersebut tujuan perkumpulan ditetapkan sebagai berikut: membangun suatu persatuan Jawa Raya yang akan dicapai antara lain dengan jalan mengadakan suatu ikatan yang baik diantara murid murid sekolah menengah bangsa Indonesia, berusaha menambah kepandaian anggota anggotanya, dan menimbulkan rasa cinta akan kebudayaan sendiri. 92)

Oleh karena murid Jawa merupakan golongan yang terbanyak, perkumpulan *Jong Java* tetap bersifat Jawa, seperti ternyata dari Konggres ke dua di Yogyakarta pada tahun 1919. Hal yang dibicarakan di dalam konggres antara lain adalah: soal milisi bagi bangsa Indonesia, mengubah bahasa Jawa menjadi demokratis, soal perguruan tinggi, kedudukan wanita Sunda, sejarah tanah Sunda, dan arti pendirian nasional Jawa dalam pergerakan rakyat. Jong Java menyatakan bahwa kegiatannya adalah dalam bidang sosial, kebudayaan, dan teori politik, dengan menghindarkan diri dari kegiatan politik praktis. Dalam konggresnya yang ke tiga di Solo pada tanggal 12 - 19 Juni 1920 diputuskan bahwa bahasa daerah boleh dipergunakan dalam *Jong Java* dengan catatan asal ada terjemahannya. Bahasa daerah yang dapat dipergunakan adalah bahasa Jawa, Sunda, Madura dan Bali. Di dalam Jong Java pada umumnya digunakan bahasa Belanda. Sedangkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan putusan konggres ditulis dalam bahasa Belanda.

Setelah konggres tersebut, pengaruh semangat persatuan Indonesia yang sudah terasa sejak *Jong Java* didirikan, seperti terlihat dari pernyataan Satiman tersebut di atas, ternyata semakin menggema di kalangan organisasi pemuda, termasuk *Jong Java*. Dalam *Jong Java* konggres yang ke empat, di Bandung tanggal 12 - 16 Juni 1921 diputuskan untuk mengadakan federasi dengan *Jong Sumatranen Bond* dan menterjemahkan surat surat Kartini yang dihimpun oleh Ny. Abendanon dalam bukunya "Door duisternis tot licht." Dalam konggres yang ke lima di Solo tanggal 21 - 27 Mei 1922 diputuskan untuk membe-rantas buta huruf dan melarang para anggota *Jong Java* untuk menjadi anggota partai politik dan menjalankan politik. *Jong Java* mengatakan tidak mencampuri urusan politik dan menjauhkan dirinya dari aksi dan propaganda politik. *Jong Java* diakui sebagai badan hukum oleh pemerintah setelah anggaran dasarnya diubah dan disesuaikan dengan permintaan pemerintah pada tahun 1923. 93)

Akan tetapi perkembangan pergerakan politik khususnya dari Sarekat Islam ternyata juga mempengaruhi perkembangan *Jong Java*. Dalam konggres Jong Java yang ke tujuh di Yogyakarta pada tanggal 27 - 31 Desember 1924 terlihat pengaruh dari SI untuk mengubah dasar *Jong Java* yang sebelumnya bersifat netral dalam soal agama dengan dasar agama Islam. Dalam kongg-

res tersebut, "Samsurijal" atau lebih kenal dengan sebutan Sam ketua *Jong Java* pada waktu itu mengusulkan agar keanggotaan *Jong Java* dibagi dua golongan yaitu anggota muda yang berumur di bawah 18 tahun yang tidak boleh mencampuri aksi politik, sedangkan anggota yang berumur 18 tahun ke atas, yang secara sendiri sendiri boleh ikut dalam gerakan politik. Usul ini disokong oleh H.A. Salim yang di dalam pidatonya di muka konggres yang berjudul "*Islam dan Jong Java*" mengatakan bahwa dasar *Jong Java* yang semata mata nasionalistis itu dapat menjauhkan pemuda terpelajar dari agama Islam. Tetapi gagasan Sam tersebut tidak mencapai hasil, sehingga ia dan golongannya kemudian keluar dari *Jong Java* dan mendirikan perkumpulan *Jong Islamieten Bond* (J.I.B.) pada akhir Desember 1925⁹⁴)

Di dalam perkembangan selanjutnya, ternyata paham persatuan Indonesia Raya semakin meresap di dalam tubuh *Jong Java*. Suara untuk mengubah *Jong Java* yang bersifat kedaerahan dan bergabung dengan perkumpulan perkumpulan lain yang menuju kepada asas persatuan dan kebangsaan Indonesia semakin kedengaran dalam organisasi itu. Dalam konggres *Jong Java* di Solo pada tanggal 27 - 31 Desember 1926 diterima dengan suara bulat keputusan untuk mengubah tujuan perkumpulan menjadi "berusaha memajukan rasa persatuan para anggota dengan semua golongan bangsa Indonesia, dan dengan bekerja bersama dengan perkumpulan pemuda Indonesia lainnya ikut serta dalam menyebarkan dan memperkuat paham Indonesia bersatu."

Sebelumnya, ketua *Jong Java* waktu itu, R.T. Jaksodipuro (kemudian bernama R.T. Wongsonegoro) juga menjadi anggota perkumpulan pelajar PPPI. Dia menjelaskan di muka konggres bahwa tujuan *Jong Java* tidak pernah membangunkan Jawa Raya saja, tetapi juga untuk Indonesia Merdeka, sedangkan memajukan kesenian Jawa dan sebagainya, hanya alat dan tidak merupakan tujuan yang tersendiri. Selanjutnya konggres memutuskan untuk membagi keanggotaan ke dalam anggota biasa (umur 18 tahun atau lebih), dan calon anggota (umur 18 tahun ke bawah), yang hanya boleh ikut dalam bagian olah raga, kesenian, dan kepanduan. Dengan jalan ini anggota *Jong Java* yang telah dewasa, dapat turut dalam politik. Dalam konggres itu, Mr. Singih menyatakan bahwa di negara merdeka dan maju seperti di Eropah, para pelajarnya berlomba dalam politik, dipakai di tanah jajahan. Keputusan lainnya adalah agar bahasa Melayu lebih ba-

nyak dipergunakan dalam *Jong Java*, serta mengganti kata "*Inlandsch*" (bumiputera) dengan kata "*Indonesische*" (Indonesia). Keputusan ini sangat penting, sebab merintis jalan kepada ikrar pemuda tahun 1928.⁹⁵⁾

Dari kejadian kejadian tersebut di atas ternyata bahwa semangat persatuan Indonesia telah tertanam dan diakui oleh *Jong Java*. Perkumpulan *Jong Java* adalah salah satu dari perkumpulan pemuda bangsa Indonesia di samping perkumpulan mahasiswa PPPI, Pemuda Indonesia, *Jong Sumatranen Bond*, dan *Jong Islamieten Bond* yang telah memegang perasaan penting di dalam usaha untuk mempersatukan perkumpulan pemuda menjadi perkumpulan pemuda yang menganut asas kebangsaan dan persatuan Indonesia. *Jong Java*, sebagai suatu perkumpulan pemuda yang terbesar dan terbaik organisasinya, telah turut menjadi pemrakarsa dan turut ambil bagian aktif dan di dalam penyelenggaraan konggres pemuda Indonesia I pada tahun 1926 dan Konggres Pemuda Indonesia II tahun 1928 yang mencetuskan ikrar atau Sumpah Pemuda. Kiranya tak mungkin kedua konggres pemuda tersebut berhasil, dan demikian juga dengan cita-cita persatuan perhimpunan pemuda ke dalam Indonesia Muda, tanpa peranan aktif dan kesediaan untuk meleburkan diri dari perkumpulan *Jong Java*. Rasa persatuan yang telah tertanam dengan mendalam itu telah menghadapkan *Jong Java* pada pilihan untuk menggabungkan diri dengan perkumpulan pemuda lainnya dalam bentuk Fusi. Bahkan dalam konggres pemuda Indonesia I pada 30 April - 2 Mei 1926 di Jakarta, Ketua pedoman (pengurus besar *Jong Java* waktu itu, mengusulkan untuk membentuk suatu perkumpulan pemuda bangsa Indonesia yang merupakan verkapping di atas berbagai perkumpulan pemuda yang ada pada waktu itu. Konggres *Jong Java* yang diadakan di Semarang pada bulan Desember 1927 ternyata belum dapat mengambil keputusan bulat tentang persatuan ke arah fusi seperti yang diusulkan oleh perkumpulan mahasiswa PPPI dan menunda masalah itu pada konggres berikutnya sambil memberi waktu kepada cabang untuk mempelajari usul PPPI tersebut. Akhirnya pada konggres *Jong Java* yang ke II di Yogyakarta tanggal 25 - 29 Desember 1928, pengurus besar *Jong Java* menyetujui idee fusi tersebut dengan menyatakan bahwa hendaknya ada waktu peralihan sebagai persiapan yang dapat diserahkan kepada suatu komisi persiapan. Panitia persiapan persiapan akan terdiri dari wakil wakil perkum-

pulan pemuda yang akan ikut bergabung (berfusi) dan bertugas untuk menyusun rencana organisasi dan fusi yang akan dinamakan "Indonesia Muda" (IM). Dalam kongres *Jong Java* yang terakhir di Semarang, 23 - 29 Desember 1929, *Jong Java* menyatakan membubarkan diri untuk meleburkan diri ke dalam perkumpulan "Indonesia Muda". Pada waktu dibubarkan perkumpulan *Jong Java* mempunyai bagian bagian dan cabang cabang, studiesfonds, kepanduan, 3 anggota kemuliaan, 1577 anggota biasa, 564 anggota luar biasa, 17 calon anggota, dan 41 penderma, semua ini diserahkan kepada komisi persiapan Indonesia Muda.⁹⁶

Ketua pengurus besar *Jong Java* sejak berdirinya ialah Satiman Wiryosanjoyo (1915 - 1917), Suhardi Ariotejo (1917 - 1918), Sukiman Wiryosanjoyo (1918 - 1919), Sutopo (1919 - 1920), Mukhtar Atmosuparjo (1921 - 1922), Sugandi Pringgo-atmojo (1922), Ma'amun (1923), Samsurijal (1923 - 1924), Sumarto Joyodiharjo (1925), Sunardi Jaksodipuro (1926), Gularso Sastrohadikusumo (1927), Sarwono Prawiroharjo (1928), Kuncoro Purbopranoto (1929). Panji Jong Java melukiskan sebilah keris, dilingkari pancaran sinar matahari, di sela selanya di sebelah kanan untaian bulir padi, dan di sebelah kiri kapas, keduanya dirangkaikan dengan dua bulir kembang melati. Di bagian atas panji bertuliskan "*Jong Java*", dan bagian bawah semboyan "Sakti - Budi - Bakti."

b. Kongres Indonesia I dan II (Sumpah Pemuda).

Semangat persatuan yang mulai ditanamkan dan disebar-kan oleh Perhimpunan Indonesia, *Studie Club*, P.N.I., dan perkumpulan mahasiswa PPPI, telah mempengaruhi hampir semua pemuda yang pada waktu itu banyak yang bersifat kedaerahan. Rasa persatuan itu telah menjiwai perkumpulan pemuda *Jong Java*, *Jong Sumatranen Bond*, *Jong Minahasa*, *Jong Ambon*, *Jong Batak*, dan lain lain. Perkumpulan pemuda yang memegang peranan besar di dalam usaha mempersatukan pergerakan berdasarkan semangat kebangsaan sehingga dapat mencetuskan Sumpah Pemuda bulan Oktober 1928 ialah : PPPI, Pemuda Indonesia (*Jong Indonesia*), *Jong Java*, *Jong Sumatranen Bond*, dan perkumpulan pemuda lainnya.

1). Kongres Pemuda Indonesia I.

Kongres Pemuda I dilangsungkan pada tanggal 30 April

– 2 Mei 1926 di Jakarta (Batavia), dengan dipimpin oleh Moh. Tabrani dari Jong Java, Tujuan Konggres adalah : a) membentuk badan sentral, b) memajukan paham persatuan kebangsaan, dan c) mempererat perhubungan di antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Konggres diadakan oleh semua perkumpulan pemuda (*Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Minahasa, Jong Bataks, dan Jong Islamieten Bond*). Mereka membentuk sebuah badan komite yang diketuai oleh Moh. Tabrani, dari *Jong Java* sebagai wakil ketua, Jamaluddin Adi Negoro dari *Jong Sumatranen Bond* sebagai sekretaris, dan Suwarso sebagai bendahara. Anggota panitia penyelenggara konggres yang lain ialah : Bahder Johan dari *Jong Sumatranen Bond*, Jan Toule Soulehuwuj, Paul Pinontoan, Hamami dari Sekar Rukun, Sanusi Pane dan Sarbini. Dalam buku *Verslag Van Het Eerste Indonesisch Jeugdcongres* yang diterbitkan oleh Panitia Konggres, Moh. Tabrani di dalam karangannya tentang Konggres Pemuda I itu, antara lain mengatakan: "Menggugah semangat kerja sama di antara bermacam macam organisasi pemuda Tanah Air kita, supaya dapat diwujudkan dasar pokok untuk lahirnya persatuan Indonesia, di tengah tengah bangsa bangsa di dunia".

Sedangkan di dalam pidato pembukaannya, ketua konggres Moh. Tabrani antara lain mengatakan:

"Bagaimana kita dapat memajukan pertumbuhan semangat persatuan Nasional dengan menghindari segala sesuatu yang dapat menceraikan beraikan kita, maka Panitia memilih acara yang mengandung unsur unsur pemersatu dan menjauhkan diri dari benih benih perpecahan".

Dalam pidato dimuka konggres Sumarto ketua *Jong Java*, antara lain mengatakan :

"Semangat persatuan Indonesia pada pokoknya bersumber kepada semangat kemerdekaan. Ia mengandung cita-cita untuk mencapai negara kesatuan Indonesia yang merdeka. Indonesia karenanya pengertian politik, berbeda dengan Indonesia dalam pengertian bukan politik. Secara *ethnologisch*, dan *geografisch*, Indonesia mengandung arti yang lebih luas".

Dalam konggres tersebut Mohammad Yamin dari *Jong Sumatranen Bond* memberi ceramah tentang bahasa Indonesia

sebagai bahasa persatuan, dengan mengatakan bahwa, tanpa mengurangi penghargaan terhadap bahasa daerah seperti bahasa Sunda, Aceh, Bugis, Madura, Minangkabau, Rotti, Batak, dan lain lain, maka menurut pendapatnya hanya dua bahasa yaitu Bahasa Jawa dan Bahasa Melaju yang mengandung harapan menjadi bahasa persatuan di masa depan. Namun menurut keyakinannya, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa persatuan atau bahasa pergaulan bagi rakyat Indonesia.

Tetapi pembicaraan tentang fusi dari semua perkumpulan pemuda, tidak mendatangkan keputusan di dalam konggres. Meskipun begitu, konggres telah memperkuat cita-cita Indonesia bersatu. Setelah konggres selesai, diadakan konperensi lanjutan pada tanggal 15 Agustus 1926 yang dihadiri oleh wakil wakil *Jong Java, Jong Islamieten Bond, Jong Sumatranen Bond, Jong Batak, Ambonsche Studerenden*. Konperensi mengambil keputusan supaya usaha yang dimulai oleh Konggres Pemuda Indonesia I tersebut dilanjutkan, di antaranya ialah dengan mengusahakan pembentukan badan fusi atau federasi. ⁹⁸⁾

2). Kongres Pemuda Indonesia II.

Perkumpulan pemuda yang memegang peranan aktif dalam penyelenggaraan Kongres Pemuda II ialah antara lain: Pemuda Indonesia dan PPPI sebagai pengambil inisiatif dan yang melaksanakan kongres adalah *Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond*, dan *Jong Ambon*, dan *Jong Batak*.

Pemuda Indonesia mulanya bernama *Jong Indonesia*, didirikan di Bandung pada tanggal 20 Pebruari 1927, oleh para mahasiswa yang tergabung dalam *Algemeene Studieclub* yang kelak mendirikan PNI pada tanggal 4 Juli 1927, dan mahasiswa mahasiswa anggota Perhimpunan Indonesia yang telah kembali dari negeri Belanda, antara lain: Sartono SH, Sunario SH, Ir. Sukarno, Ir. Anwari, Iskak SH, Budiarto SH, dan Wiryono SH. Seperti halnya dengan PNI, Pemuda Indonesia berpaham kebangsaan Indonesia yang radikal, menggelorakan semangat kebangsaan atau nasionalisme. Indonesia yang berasaskan persatuan dan unitarisme, serta bertujuan untuk memperluas dan menyebarkan idee persatuan Indonesia di kalangan perkumpulan pemuda. Dengan demikian Pemuda Indonesia adalah perkumpulan pemuda yang telah meninggalkan dasar kedaerahan. *Jong Islamieten Bond* adalah juga perkumpulan pemuda yang telah meninggalkan dasar kedaerahan

dan sudah kebangsaan Indonesia tetapi berdasarkan agama Islam. Dalam kongresnya yang kedua pada tanggal 24 – 28 Desember 1928 di Jakarta, Pemuda Indonesia menyetujui usul PPPI untuk mengadakan fusi dari seluruh pergerakan pergerakan pemuda yang masih berdasarkan kedaerahan. Pada waktu itu juga *Jong Java* yang sedang mengadakan konggres di Yogyakarta Desember 1928 dan menyetujui pembentukan badan fusi tersebut.⁹⁹⁾

PPPI (Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia) adalah perkumpulan dari para mahasiswa di Jakarta, terutama mahasiswa *Rechtshoogeschool* dan Stovia mulai tingkat II organisasi ini didirikan di Jakarta pada bulan September 1926 oleh beberapa mahasiswa *Rechtshoogeschool* dan Stovia seperti Sugondo, Suwiryono, Sigit, Suryono, dan Susalit. Perkumpulan ini beranggotakan para mahasiswa dari Jakarta dan Bandung (*Technische Hoogeschool*).

Asas PPPI sangat dipengaruhi oleh asas Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda, ialah kebangsaan Indonesia, antitesis kolonial diantara penjajah dan yang dijajah, dan non kooperasi di antara bangsa penjajah dengan yang dijajah, serta bertujuan untuk mendidik para anggotanya dalam memenuhi kewajibannya dalam masyarakat, yaitu berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan demikian PPPI sama dan dasarnya dengan Pemuda Indonesia, kedua-duanya merupakan perkumpulan pemuda yang telah melepaskan diri dari sifat kedaerahan. Maka tidak mengherankan jika peranan PPPI dan Pemuda Indonesia sangat besar di dalam memelopori cita-cita kesatuan kebangsaan Indonesia di dalam Kongres Pemuda II. Ketua PPPI pertama adalah Sigit (kemudian: Prof. A. Sigit) dan kemudian digantikan oleh Sugondo Joyopuspito yang mengetuai Kongres Pemuda II. PPPI adalah pengambil inisiatif Kongres Pemuda II dan mengusulkan pembentukan badan fusi dari semua perkumpulan pemuda, tetapi kemudian ternyata PPPI tidak ikut meleburkan diri ke dalam badan fusi, Indonesia Muda.¹⁰⁰⁾

Jong Islamieten Bond (JIB) dalam kongres Jong Java di Yogyakarta tanggal 27 – 31 Desember 1924 yang dipimpin Sam (Sam-surijal) mengajukan usul untuk mengubah dasar *Jong Java* yang bersikap netral terhadap agama, dengan dasar agama Islam. Sam mengusulkan agar anggota *Jong Java* dalam programnya menetapkan memajukan agama Islam, dan agar diadakan pengajaran agama Islam bagi anggota anggota *Jong Java* yang beragama

Islam. Di samping itu sebelumnya telah ada pengajaran dalam agama Katholik, Protestan, dan Teosofi bagi para anggota *Jong Java* yang menjadi penganut-penganutnya. Dalam buku Deliar Noer halaman 248 diceritakan bahwa pemungutan suara terhadap usul Sam tersebut oleh konggres *Jong Java* waktu itu adalah sama kuat bagi yang menerima atau menentanginya, demikian juga pada pemungutan suara yang kedua kalinya. Maka keputusan tergantung kepada Sam yang menjadi ketua *Jong Java* untuk menentukan suaranya. Sam berpendapat bahwa adanya keputusannya, *Jong Java* akan pecah, dan itulah ia dengan penyokongan kemudian keluar dari *Jong Java*. Ketika pulang dari konggres tersebut H.A. Salim menemui Sam dan membujuknya agar ia tidak menjadi kecewa dengan penolakan usulnya tersebut. Kemudian mereka memutuskan untuk mendirikan perkumpulan bagi pemuda pemuda Islam, dengan mendirikan perkumpulan *Jong Islamieten Bond* (JIB) pada tanggal 1 Januari 1925 dengan Sam sebagai ketuanya.

Konggres pertama JIB diadakan di Yogyakarta pada tanggal 25 Desember. Dalam konggres pertama itu Sam menjelaskan dasar JIB ialah agama Islam dan bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang Islam serta memupuk rasa sayang terhadap Islam dan para penganutnya di samping bersifat toleransi terhadap golongan yang bukan Islam, mempelajari agama Islam, hidup secara Islam dan persatuan dalam Islam. JIB terbuka buat semua orang Islam Indonesia bukan saja pelajar, tetapi juga bekas pelajar yang umurnya tidak lebih dari 30 tahun. JIB tidak mencampuri politik praktis, tetapi anggota sebagai perseorangan diperbolehkan ikut serta dalam gerakan politik dan berusaha agar anggotanya memahami politik. Dapat dikatakan bahwa jika *Jong Java* merupakan gambaran dari pemuda Budi Utomo, sedang JIB adalah gambaran dari Sarekat Islam, meskipun dalam konggresnya pada tahun 1929, JIB menerangkan bahwa perkumpulannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan PSII yang mempunyai perkumpulan pemuda sendiri yaitu Pemuda Muslimin Indonesia. Dalam kenyataannya masih banyak anggota *Jong Java* yang masih merangkap menjadi anggota JIB. Pada konggres yang pertama JIB telah mempunyai 7 cabang dan 100 orang anggota, sedang cabang Bandung dan Jakarta telah mempunyai bagian gadis. Dalam konggres tersebut Sam terpilih sebagai ketua JIB.

Kongres JIB kedua diadakan di Solo pada tanggal 24 – 26 Desember 1926. Dalam kongres itu diucapkan pidato tentang "*Islam dan pandangan dunia*", "*Perkembangan Islam di luar negeri*", "*Islam dan pikiran merdeka*", dan sebagainya.

Kongres ke tiga diadakan di Yogyakarta pada tanggal 23 – 27 Desember 1927, di mana dibicarakan persoalan mengenai agama, misalnya: "*Ethik Perang Dalam Islam*", "*Islam dan cita-cita Persatuan*", "*Perempuan dalam Islam*", "*Islam dan kebangsaan*", "*Islam dan Sosialisme*". Sikap terhadap masalah poligami ialah bahwa sebetulnya Islam menolong kaum wanita dengan melarang poligami yang tak teratur. Poligami yang sah berguna mengurangi kelesbianan perempuan, karena jika ada kelesbianan perempuan, poligami akan hilang dengan sendirinya. Dalam pidatonya dimuka kongres yang pertama Sam menyatakan bahwa di dalam Al Qur'an dan sejarah Islam terdapat dasar yang menentukan kedudukan wanita sebagai kaum yang terhormat, mempunyai hak dan derajat yang sama dengan kaum pria, yang harus diperlakukan sebagai teman, dan dalam perkawinan tetap terjamin kemerdekaan dan haknya. Tentang pengertian nasionalisme, JIB mengartikan sebagai mencintai tanah air dan bangsa, tetapi di samping itu juga mencintai orang-orang seagama Islam di luar negeri dan juga mencintai semua manusia. Sam pada kongres yang pertama menyatakan bahwa "JIB mengharapkan dapat menjadi tempat bagi organisasi nasionalistis lainnya yang berbeda-beda dan rekan-rekan kita pemuda-pemudi Indonesia, untuk bertemu dalam satu bidang, di mana kewajiban dan tujuan yang sama dapat mempersatukan kita semua". Pada waktu kongres yang ketiga JIB sudah mempunyai anggota sebanyak 2500 orang dan mempunyai perkumpulan kepanduan yang disebut "*National Islamietische Padvinderij*" disingkat "*Natipij*". Pada kongres tersebut, ketua JIB waktu itu, Wibowo, dalam pidato penutupannya menyatakan bahwa JIB tidak dapat membantu usul PPPI untuk berfusi dengan lain-perkumpulan pemuda oleh karena JIB tetap berdasarkan agama Islam. Tetapi walaupun begitu JIB turut memegang peranan penting dalam penyelenggaraannya Kongres Pemuda I dan II yang menghasilkan sumpah pemuda dan gagasan persatuan kebangsaan – bahasa – dan tanah air Indonesia. Gagasan persatuan bangsa dan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia telah pula meresapi pemuda yang tergabung di dalam JIB, meskipun kemudian JIB tidak

ikut memfusikan diri ke dalam "Indonesia Muda" oleh karena sebab yang dianggap prinsip. Panitia yang dibentuk berbagai perkumpulan pemuda untuk menyelenggarakan Konggres Pemuda II terdiri dari para wakil perkumpulan pemuda, yaitu:

Ketua	:	Sugondo Joyopuspito (dari PPPI).
Wakil Ketua	:	Joko Marsaid (dari <i>Jong Java</i>).
Sekretaris	:	Muhammad Yamin (dari <i>Jong Sumatranen Bond</i>).
Bendahara	:	Amir Syarifuddin (dari <i>Jong Bataks Bond</i>).
Pembantu I	:	Johan Muh. Cai (dari <i>Jong Islamieten Bond</i>).
Pembantu II	:	Kocosungkono (dari Pemuda Indonesia).
Pembantu III	:	Senduk (dari <i>Jong Celebes</i>).
Pembantu IV	:	J. Leimena (dari <i>Jong Ambon</i>).
Pembantu V	:	Rohyani (dari Pemuda Kaum Betawi).

Menurut Sugondo Joyopuspito, perbedaan Konggres Pemuda II dengan Konggres Pemuda I ialah bahwa panitia penyelenggara ialah pemuda, sedang dalam Konggres Pemuda I mereka yang duduk dalam panitia penyelenggara bukan mewakili perkumpulan pemuda, tetapi sebagai Hindia putra atau perseorangan. Untuk menyelenggarakan Konggres Pemuda II, panitia konggres mengadakan tiga kali rapat umum:

- Yang pertama, pada tanggal 27 Oktober 1928 malam di gedung *Katholieke Jongelingen – Bond* di Waterlooplein,
- Yang kedua, pada tanggal 28 Oktober 1928 pagi di gedung *Oost Java Bioscoop* di – Koningsplein Noord,
- Yang ketiga, pada tanggal 28 Oktober 1928 malam di gedung *Indonesische Clubhuis* Kramat 106 Jakarta, di mana di dalam rapatnya yang ketiga tersebut (rapat terakhir) telah berhasil disetujui (diterima secara referendum) usul resolusi yang dirancang dan disusun oleh Muhammad Yamin yang berisi ikrar atau Sumpah Pemuda satu bangsa, satu nusa, dan satu bahasa Indonesia. Yang menghadiri rapat itu kurang lebih 750 orang terdiri dari wakil-wakil perkumpulan pemuda. Acara yang dibicarakan di dalam konggres ialah :

— Rapat pertama, 27 Oktober 1928 malam :

1. Membuka kerapatan : oleh tuan Sugondo.
2. Menerima salam dan menyukai kerapatan.
3. Dari hal persatuan dan kebangsaan Indonesia, oleh

Muh. Yamin.

— Rapat kedua, hari Minggu 28 Oktober 1928 pagi :

1. Membicarakan perkara pendidikan, oleh :
 - a. Mej. Purnomowulan.
 - b. Tuan S. Mangunsarkoro.
 - c. Tuan Jokosarwono.
 - d. Tuan Ki Hajar Dewantoro.

— Rapat ketiga, 28 Oktober 1928, malam senin :

1. Arak arakan pandu (*Padvinderij*) yang tidak dapat dilangsungkan karena dilarang polisi.
2. Dari hal pergerakan Pandu, oleh Tuan Ramelan.
3. Pergerakan pemuda Indonesia dan pergerakan pemuda di tanah luaran, oleh Tuan Mr. Soenarto.
4. Mengambil keputusan
5. Menutup kerapatan

Pada malam penutupan konggres untuk pertama kalinya diperdengarkan lagu "Indonesia Raya" Oleh penggubahnya, W.R. Supratman, dengan melagukannya dengan biola karena jika dinyanyikan dengan kata-katanya kemungkinan akan dilarang oleh polisi. Sejak itu lagu Indonesia Raya diakui sebagai lagu kebangsaan oleh PNI, PPKI, Indonesia Muda, dan hampir semua perkumpulan pemuda.

Adapun naskah keputusan Sumpah Pemuda, lengkapnya berbunyi sebagai berikut (disesuaikan dengan EYD): Putusan Konggres.

Pemuda — pemuda Indonesia

Kerapatan pemuda — pemuda Indonesia diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan Indonesia yang berdasarkan kebangsaan, dengan namanya *Jong Java*, *Jong Sumatra* (Pemuda Sumatra), Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, *Jong Islamieten Bond*, *Jong Celebes*, Pemuda Kaum Betawi dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia.

Membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di negeri Jakarta.

Sesudahnya mendengar pidato pidato pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi.

Sesudah menimbang segala isi pidato dan pembicaraan ini.

Kerapatan lalu mengambil keputusan :

- Pertama : Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia.
- Kedua : Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia.
- Ketiga : Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Setelah mendengar putusan ini kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia.

Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya :

Kemauan,
Sejarah,
Bahasa,
Hukum Adat,
Pendidikan dan Kepanduan,

dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dibicarakan di muka rapat perkumpulan. ¹⁰¹⁾

3. Pembentukan Indonesia Muda

Pada waktu Kongres Pemuda II organisasi pemuda pendukung kongres belum dapat menyetujui diadakannya fusi di antara sebagai organisasi pemuda seperti yang diusulkan oleh PPPI, oleh karena belum tercapai kesatuan pendapat. Keputusan dari *Jong Java* sebagai suatu perkumpulan pemuda yang tertua dan terbesar, akan sangat besar pengaruhnya bagi perkumpulan pemuda lainnya. Dalam kongresnya yang ke II pada tanggal 25 – 29 Desember 1928 di Yogyakarta. *Jong Java* menyetujui gagasan fusi dengan mengusulkan hendaknya terdapat waktu peralihan sebagai persiapan yang diserahkan kepada suatu komisi persiapan Indonesia Muda yang akan mengadakan fusi. Keputusan *Jong Java* ini kemudian diikuti oleh Pemuda Indonesia dalam kongresnya pada bulan Desember 1928, dan *Jong Sumatranen Bond* dalam kongresnya pada permulaan tahun 1929. Pada tanggal 23 April 1929 atas undangan pedoman (pengurus) besar *Jong Java*, diadakan rapat yang dihadiri oleh wakil wakil dari *Jong Java*, Pemuda Indonesia, *Jong Sumatranen Bond*, di gedung *Indonesische Clubhuis* di Kramat 106 Jakarta, yang mengambil keputusan bahwa mereka menginginkan segera didi-

rikan perkumpulan baru yang sejalan dengan kemauan persatuan Indonesia, berdasarkan kebangsaan Indonesia, dan akan membentuk komisi persiapan yang akan dinamakan "Komisi Besar Indonesia Muda" (KBIM)

Susunan keanggotaan Komisi Besar tersebut ialah :

Ketua	: Kuncoro Purbopranoto (<i>Jong Java</i>).
Wakil Ketua	: Muh. Yamin (<i>Jong Sumatranen Bond</i>).
Penulis I	: Yusupadi (Pemuda Indonesia).
Penulis II	: Syahrial.
Bendahara I	: Assaat.
Bendahara II	: Suwaji Prawiroharjo (<i>Jong Java</i>).
Administrator I	: Adnan Gani (<i>Jong Sumatranen Bond</i>).
Administrator II	: Muh. Tamzil (Pemuda Indonesia).
Pembantu	: G.R. Pantouw (<i>Jong Celebes</i>).
Pembantu	: Suryadi.

Komisi Besar Indonesia Muda kemudian menyelenggarakan kongres untuk mendirikan badan fusi yang akan dinamai "Indonesia Muda" di gedung Habiproyo Solo pada tanggal 28 Desember 1930 – 2 Januari 1931. Dalam kongres itu secara resmi dibentuk perkumpulan pemuda yang baru dengan nama "Indonesia Muda" sebagai hasil fusi dari berbagai perkumpulan *Jong Java*, *Jong Sumatranen Bond*, Pemuda Indonesia Jong Celebes, dan Sekar Rukun. Pada waktu didirikan tanggal 31 Desember 1930 masuk 1 Januari 1931 jam 12.00 malam di kota Solo Indonesia Muda sudah mempunyai anggota sebanyak 2400 orang, 25 buah cabang di antaranya 17 cabang keputrian, 4 di Sumatra dan di Sulawesi. Dalam hal ini, *Jong Islamieten Bond* dan Pemuda Muslimin tidak menggabungkan diri ke dalam Indonesia Muda, oleh karena tidak dapat meninggalkan dasar Islam. Demikian juga perkumpulan Mahasiswa PPPI, yang sejak semula sangat giat mengusulkan pembentukan badan fusi dan telah memegang peranan penting dalam memelopori diterimanya gagasan persatuan dalam Kongres Pemuda II, juga tidak menggabungkan diri ke dalam Indonesia Muda disebabkan karena PPPI berhaluan politik radikal serta menjadi tempat berlatih bagi para pemimpin bangsa untuk perjuangan mencapai Indonesia Merdeka.

Tujuan perkumpulan "Indonesia Muda" adalah "memperkuat rasa persatuan di kalangan pelajar, membangunkan dan mempertahankan keinsafan bahwa mereka adalah anak satu bangsa yang

bertanah air satu, agar tercapailah Indonesia Raya. Dengan mengakui dan menghargai peradaban dan kebudayaan golongan bangsa Indonesia masing-masing, maka Indonesia Muda menuju dan memajukan peradaban Indonesia, dengan semboyan: satu tanah air, satu bahasa. Indonesia Muda mengakui lagu Indonesia Raya dan warna Merah Putih sebagai lagu dan warna perkumpulan. Menurut Pluvier, tujuan Indonesia Muda ialah lebih memperkuat rasa persatuan di kalangan Pemuda dan membangkitkan keinsyafan pada mereka, bahwa mereka adalah satu rakyat dari satu tanah air. Peleburan itu disambut hangat di dalam pers sebagai ungkapan yang jelas daripada "lenyapnya provinsialisme untuk memberikan tempat kepada Indonesianisme". Indonesia Muda tidak turut serta dalam segala aksi politik, dan para anggota dilarang pula melakukan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan politik, sedang majalahnya juga bernama "Indonesia Muda". Meskipun demikian, Indonesia Muda juga bekerja bagi kemerdekaan Indonesia, sehingga sering mendapat pengawasan yang keras dari pemerintah. Majalahnya bulan Mei 1936 dilarang karena memuat karangan yang dengan sengit mengecam pemerintah dan karangan itu diambil dari majalah PPPI. Pemerintah menahan beberapa pemimpinnya, sedang kongres bulan Juli 1936 yang akan diadakan di Jakarta dilarang oleh pemerintah. Dalam kongres Indonesia Muda yang ke enam di Surabaya ditegaskan bahwa IM adalah perkumpulan pemuda serta akan bertindak selaras dengan itu. Pada waktu itu IM mempunyai anggota 1.646 orang, 38 cabang (di antaranya 20 cabang keputrian), dan 7 calon cabang. Dalam kongresnya yang ke tujuh di Bandung bulan Desember 1937 diputuskan untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah supaya mencabut larangan menjadi anggota IM bagi murid beberapa sekolah menengah (IM dikenakan *Schoolverbod* oleh pemerintah). Kongres juga memutuskan untuk mengadakan komite persiapan Kongres Pemuda Nasional.¹⁰²⁾

9. Pergerakan Wanita

Sebagai realisasi dari cita-cita Kartini dalam memajukan pengajaran bagi anak perempuan, maka timbullah pergerakan wanita Indonesia yang pada mulanya masih merupakan usaha dari beberapa orang perempuan sendiri sendiri, dan belum di dalam suatu perkumpulan. Perkumpulan wanita yang didirikan

sebelum tahun 1920 pada dasarnya masih terbatas sifat dan tujuannya, yaitu menuju perbaikan kedudukan wanita dalam perkawinan dan hidup keluarga serta mempertinggi kecakapan sebagai ibu pemegang rumah tangga. Cara mencapainya ialah dengan jalan menambah pengajaran, memperbaiki pendidikan, dan mempertinggi kecakapan khusus untuk wanita. Tujuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dan kebangsaan masih belum dikemukakan.

Perkumpulan wanita yang didirikan sebelum tahun 1920 antara lain adalah "Putri Mardika" yang didirikan di Jakarta tahun 1912 dengan bantuan Budi Utomo dan bertujuan untuk memajukan pengajaran anak-anak perempuan dengan memberi penerangan dan sokongan uang, mempertinggi sikap yang merdeka dan tegak, dan melenyapkan tindak malu-malu yang melampaui batas. Perkumpulan "Keutamaan Istri" didirikan di berbagai tempat yang bertujuan untuk mengadakan rumah sekolah untuk anak perempuan pada tahun 1913 di Tasikmalaya, 1916 di Sumedang, 1916 di Cianjur, 1917 di Ciamis, dan tahun 1918 di Cicurug. Penganjur yang terkemuka dari "Keutamaan Istri" di tanah Pasundan ini adalah Raden Dewi Sartika. Keamanan di bentuk juga (yayasan) untuk mendirikan "Sekolah Kartini" pada tahun 1913 di Jakarta, 1914 di Madiun, 1916 di Malang, dan di Cirebon, 1917 di Peka-longan, 1918 di Indramayu, Surabaya Rembang, juga banyak didirikan perkumpulan kaum ibu untuk memajukan kecakapan wanita yang bersifat khusus, seperti memasak, menjahit, merenda, pemeliharaan orang beranak, pemeliharaan anak-anak dan sebagainya. Perkumpulan kaum ibu ini misalnya: "Pawiyatan Wanita" di Magelang pada tahun 1915 "Wanita Susilo" di Pemalang pada tahun 1918, "Wanita Hadi" di Jepara pada tahun 1915 dan sebagainya, sedangkan di Yogyakarta pada tahun 1912 didirikan perkumpulan wanita yang bersifat agama Islam dengan nama "Sapa Tresna" yang kemudian pada tahun 1914 menjadi bagian wanita dari Muhammadiyah dengan nama "Aisyiah". Di Minangkabau didirikan perkumpulan "Keutamaan Istri Minangkabau" dan "Kerajinan Amai Setia" yang berusaha memajukan persekolahan bagi anak-anak perempuan.

Pada tahun 1920 mulai timbul perkumpulan wanita yang bersifat kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang lebih luas daripada perkumpulan wanita sebelumnya, di samping jumlahnya juga bertambah banyak. Di Minahasa didirikan "*De Gorontalosche Mohammedaansche Vrouwenvereniging*", sedang di Yogyakarta

didirikan perkumpulan "Wanita Utomo" yang mulai memasukkan ke dalam kegiatannya dasar pekerjaan ke arah perbaikan kedudukan perempuan pada umumnya. Corak kebangsaan meskipun belum jelas sudah mulai masuk dan berpengaruh dalam pergerakan wanita setelah tahun 1920, sehingga dirasakan keperluan untuk mengadakan saling hubungan dan ikatan di antara perkumpulan wanita tersebut. Hal ini terutama disebabkan karena pengaruh propaganda kebangsaan dari PNI yang mendorong dilangsungkannya kongres perempuan Indonesia yang pertama di Yogyakarta pada tahun 1928. Perkumpulan wanita yang didirikan setelah tahun 1920 dapat dibagi dalam tiga golongan:

- *Pertama*, ialah perkumpulan yang menjadi bagian wanita dari partai politik atau perkumpulan pergerakan yang sudah ada, seperti misalnya: PKI, SI, Muhammadiyah, Sarekat Ambon. Bagian Wanita dari SI adalah "Wanudiyo Utomo", yang kemudian bernama "Sarekat Perempuan Islam Indonesia" (SPII), bagian wanita dari Sarekat Ambon bernama "Ina Tumi", dan dari Muhammadiyah bernama "Aisyiah".
- *Kedua*, ialah perkumpulan dari wanita terpelajar yang bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan dan kepandaian puteri yang khusus, misalnya "Wanita Utomo" di Yogyakarta "Wanita Mulya", "Wanita Katolik" (keduanya-didirikan di Yogyakarta pada tahun 1920), "Puteri Budi Sejati" di Surabaya, dan sebagainya.
- *Ketiga*, ialah organisasi pemuda terpelajar yang merupakan bagian dari perkumpulan pemuda yang sudah berdiri, misalnya "Puteri Indonesia" (bagian wanita dari Pemuda Indonesia), *Jong Islamieten Bond Dames – Afdeling*" atau JIB bagian wanita dari *Jong Islamieten Bond*, *Jong Java* bagian gadis atau *Meisjeskring*" dan "Taman Siswa bagian Wanita". Pahlawan kebangsaan dan persatuan Indonesia paling besar pengaruhnya pada perkumpulan wanita yang menjadi bagian wanita dari perkumpulan pemuda, meskipun perkumpulan wanita yang lain mulai tumbuh nasionalisme.

Kongres Perempuan Indonesia I diadakan atas inisiatif bersama wakil-wakil organisasi wanita ketiga golongan tersebut di atas, ialah: Ny. Sukanto dari Wanita Utama, Nyi Hajar Dewantara dari Taman Siswa bagian wanita, dan Nona Suyatin (Ny. S. Kartowiyono) dari pemuda Indonesia bagian keputrian. Perkumpulan

yang ikut dalam konggres antara lain adalah: Wanito Utomo, Putri Indonesia, Wanita Katholik, Wanita Mulya, Muhammadiyah dan SI bagian wanita, *Jong Islamieten Bond* dan *Jong Java* bagian wanita, dan wanita Taman Siswa yang diputuskan dalam konggres di Yogyakarta pada tanggal 22 – 25 Desember 1929. Tujuan konggres ialah untuk mempersatukan cita-cita dan usaha untuk memajukan wanita Indonesia, serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita tersebut. Dalam rapat terbuka antara lain dibicarakan soal nasib wanita dalam perkawinan dan keluarga, poligami, kolduksi, dan sebagainya. Di dalam konggres pada umumnya terdapat persatuan kemauan untuk memajukan kaum wanita dan masalah politik dibicarakan dengan menganut haluan koperasi terhadap pemerintah. Hasil konggres yang terpenting ialah: pembentukan gabungan (federasi) perkumpulan wanita dengan nama "Perikatan Perempuan Indonesia" (PPI) yang dipimpin oleh Ny. Sukanto. Tujuan perkumpulan antara lain: memberikan penerangan dan perantaraan kepada perkumpulan yang menjadi anggotanya, mendirikan dana belajar untuk anak perempuan yang pandai tetapi tidak mampu, berusaha mengadakan kursus kesehatan, menentang perkawinan anak-anak, dan memajukan kepanduan bagi anak perempuan.

Dalam kongresnya di Jakarta pada tanggal 28 – 31 Desember 1929 nama Perikatan Perempuan Indonesia diubah menjadi "Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia" (PPII) dengan tujuan agar lebih nampak jelas sifat federasi dari badan tersebut. Tujuan perikatan ditetapkan sebagai berikut: mengadakan perhubungan di antara perkumpulan wanita untuk memperbaiki nasib dan derajat wanita Indonesia, serta tidak akan mencampuri politik dan agama. Kemudian membentuk dana belajar yang bernama "Sri Derma", serta dimajukannya mosi kepada pemerintah untuk melarang penggundikan. Meskipun pada mulanya PPII masih bersifat kewanitaan dan terutama berusaha dalam hal pendidikan dan perbaikan kerumahtanggaan, namun corak sosial dan kebangsaan mulai berpengaruh juga dalam usaha perikatan. Atas prakarsa PPII dibentuk "Perkumpulan Pemberantas Perdagangan Perempuan dan Anak-anak" (PPPPA) yang diketuai Ny. Sunaryati Sukemi. Selain itu juga dibentuk sebuah komite untuk membela nasib buruh wanita bangsa Indonesia. Komite pernah mengadakan pertemuan protes untuk menuntut perbaikan kehidupan kaum *pengobeng* dalam perusahaan batik kepunyaan orang Cina di

Lasem (Pati). Dalam konggres PPII di Surabaya pada tahun 1930 ditetapkan bahwa asas perkumpulan itu ialah: kebangsaan, persamaan penghargaan dan hak di antara laki-laki dan perempuan, dan kesosialan. Dalam konggres PPII yang ketiga di Solo pada tahun 1931 yang dipimpin oleh Ny. Mustajab, semangat kebangsaan menjelma di dalam usaha untuk mengadakan fusi di antara perkumpulan anggota PPII yang bersamaan asas.

Dalam konggres PPII yang ke empat di Yogyakarta tahun 1932 yang dipimpin oleh Ny. Suwandi, enam perkumpulan anggota PPII telah mengadakan fusi dengan nama "Istri Indonesia" yang diketuai oleh Ny. Sh. Suparta. Istri Indonesia tetap menjadi anggota PPII dan menjadi salah satu perkumpulan wanita yang terpenting. Pada waktu dilancarkan aksi menentang ordonansi Sekolah Liar pada tahun 1932, dan ikut menyatakan sikap dan menganjurkan kepada anggota untuk menyokong aksi tersebut.

Sementara itu, pada tanggal 22 Maret 1929 di Bandung berdiri perkumpulan "Istri Sedar yang dipimpin oleh Nona Suwarni Jayaseputra (kemudian menjadi Ny. Suwarni Pringgodigdo). "Istri Sedar berasal dari para anggota "Puteri Indonesia" ialah bagian wanita dari "Pemuda Indonesia" yang tidak menyetujui fusi Pemuda Indonesia ke dalam perkumpulan Indonesia Muda. Istri Sedar bersifat radikal dan beraliran nasionalisme kiri serta berhaluan non koperasi seperti Pemuda Indonesia dan PNI sebagai tujuan ditetapkan: menuju kepada kesadaran wanita Indonesia dan derajat hidup Indonesia, untuk melepaskan dan menyempurnakan Indonesia Merdeka. Perkumpulan bersifat netral terhadap agama, serta terbuka baik bagi wanita terpelajar maupun wanita dari rakyat biasa, meskipun ditetapkan juga bahwa sebagai organisasi, tidak akan terjun secara langsung dalam lapangan politik. Nona Suwarni berpendapat bahwa wanita Indonesia jangan selalu terikat kepada pendidikan dan rumah tangga saja. Dalam konggresnya pada tahun 1931 ditetapkan bahwa perkumpulan sedapat-dapatnya ingin berada di luar politik, tetapi ia menganjurkan kepada para anggotanya untuk ikut serta dalam kehidupan politik. Karena aksinya yang radikal dan terlalu menggelora, maka terjadi pertentangan dengan PPII, dan begitu juga dengan perkumpulan wanita Islam berhubung dengan seragamnya yang keras tentang soal poligami.

Atas prakarsa Istri Sedar, PPII dan Istri Sedar pada bulan

Januari 1931 mengutus Nona Sunaryati Sukemi dan Ny. Rukmini Santoso untuk menghadiri "Konggres Perempuan Se Asia" di Lahore, sehingga untuk pertama kali pergerakan wanita Indonesia dapat berhubungan dengan pergerakan wanita Internasional. Dalam kongresnya pada tahun 1932, Istri Sedar menerima sebagai tujuan politiknya ialah persamaan dan penghargaan yang sama dari pada wanita Indonesia dan kaum pria Indonesia untuk mempercepat kemerdekaan nasional.

Konggres Perempuan Indonesia II diadakan atas inisiatif PPII di Jakarta pada tanggal 20 – 24 Juli 1935, dengan pimpinan oleh Ny. Sri Mangunsarkoro. Dalam kongres itu pergerakan wanita Indonesia mendapat perhatian dari pergerakan wanita Internasional, ialah dari komite perempuan sedunia untuk mencegah perang dan facisme. Komite itu berkedudukan di Paris, yang memperjuangkan untuk bersama-sama mencegah peperangan. Konggres membicarakan soal perburuan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Serta dasar kenasionalan, kesosialan dan kewanitaan dikuatkan kembali. Juga diputuskan sekali tiga tahun diadakan suatu "Konggres Perempuan Indonesia" (KPI). Dijelaskan bahwa semua pembicaraan dan pekerjaan dari konggres harus diarahkan kepada perbaikan masyarakat pada umumnya dan terpisah daripada agama dan politik. Setiap wanita Indonesia harus mempunyai kesadaran nasional yang mendalam dan yakin akan panggilan nasionalnya, serta ikut membantu terbentuknya suatu bangsa baru. Kemudian dibentuk juga badan persatuan aksi, seperti badan penyelidik nasib buruh perempuan dan badan pemberantasan buta huruf di kalangan wanita. Pada konperensinya di Yogyakarta pada tanggal 14 – 15 September 1935, PPII memutuskan untuk melebur dirinya ke dalam Konggres Perempuan Indonesia.

Pertentangan Istri Sedar dengan perkumpulan wanita Islam menjadi semakin sengit ketika dalam tahun 1937 pemerintah mengeluarkan Ordonansi Perkawinan Catat yang condong kepada monogami saja. Seluruh perkumpulan wanita Islam menolak Ordonansi tersebut, sedangkan Istri Sedar, Abuan Kaum Ibu Fort de Kock, Putri Budi Sedjati, dan perkumpulan Kawula Ngayogyakarta Puteri menyatakan persetujuannya, sedangkan perkumpulan Pasundan Istri meminta agar Ordonansi tersebut diubah menurut hukum Islam. Konggres Perempuan Indonesia tidak dapat menyatakan sikap karena terikat oleh anggaran dasarnya yang mengha-

ruskan tercapainya suara bulat dalam hal yang mengenai prinsip. Karena desakan wanita Islam, Ordonansi tersebut kemudian ditarik kembali oleh pemerintah, yang tentu saja mengecewakan perkumpulan wanita yang menyetujuinya. Atas inisiatif Ny. Sri Mangunsarkoro oleh *studieclub* perempuan Indonesia di Jakarta didirikan "Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak-anak Indonesia" pada bulan September 1937, yang kemudian diganti namanya menjadi "Badan Perlindungan Kaum Perempuan Indonesia Dalam Perkawinan" (BPPIP). Badan ini menuntut adanya hukum perkawinan untuk bangsa Indonesia yang berdasarkan asas persamaan hak dan kewajiban di antara laki-laki dan wanita. Dalam hubungan ini Ny. Mr. Maria Ulfah Santoso, ketua *Consultatie Bureau* perkawinan BPPIP banyak jasanya.

Pada tanggal 23 – 28 Juli 1938 dilangsungkan konggres Perempuan Indonesia III di Bandung dengan pimpinan oleh Ny. Emma Puradireja. Garis kebijaksanaan yang sudah ditetapkan pada konggres terdahulu diteruskan dan diperkuat. Konggres yang dihadiri oleh perkumpulan wanita Islam, terutama Permi menyetujui suatu rencana Undang Undang perkawinan yang modern yang disusun oleh Ny. Mr. Maria Ulfah Santoso. Konggres juga membicarakan soal politik, antara lain soal hak pilih dan dipilih bagi kaum wanita (*Vrouwen Kiesrecht*) untuk badan perwakilan. Pada bulan Januari 1838, *Volks raad* menerima hak pilih dan memilih pasif bagi kaum wanita untuk menjadi anggota badan perwakilan, sedangkan hak pilih aktif untuk memilih anggota badan perwakilan belum diberikan kepada kaum wanita, sehingga masih harus diperjuangkan. Berhubungan dengan adanya peraturan baru tersebut, maka beberapa wakil kaum wanita Indonesia mulai dapat menjadi anggota dewan dewan *gemeente*, misalnya : di Bandung Ny. Emma Purwadireja, di Semarang Ny. Sunarya Mangunpuspito, di Surabaya Ny. Sudirman, dan di Cirebon Ny. Umiyati. Selain itu juga konggres memutuskan tanggal 22 Desember menjadi Hari Ibu, dengan menyatakan bahwa peringatan "Hari Ibu" tiap tiap tahun diharapkan akan menambah kesadaran kaum wanita Indonesia akan kewajibannya sebagai "Ibu Bangsa".¹⁰³⁾

BAB. III

KEADAAN DI DAERAH JAWA TENGAH SEKITAR PERANG DUNIA I (1914 – 1918) DAN PENDIRIAN VOLKSRAAD

A. SIKAP PEMERINTAH BELANDA DAN PENDIRIAN VOLKSRAAD TAHUN 1918

Beberapa faktor turut mempengaruhi dibentuknya Dewan Rakyat (*Volksraad*) oleh pemerintah pada tahun 1918. Sejak tahun 1912 Indonesia (Hindia Belanda) diakui sebagai badan hukum sendiri, di mana segala harta milik kekayaan dan untung rugi dalam perdagangan menjadi terpisah dari Nederland. Juga kebebasan dalam urusan keuangan yang didapat oleh Hindia Belanda, pada tahun 1913 memberi kesempatan untuk membentuk suatu dewan rakyat bagi Hindia Belanda yang akan mempunyai kekuasaan untuk memperdebatkan urusan anggaran belanja (*budget*) bagi Hindia Belanda, sehingga oposisi di Hindia Belanda yang biasanya disuarakan oleh surat kabar akan dapat ditampung didalam dewan tersebut. Pada tahun 1909 Idenburg yang pada waktu itu menjadi menteri jajahan, kemudian menjadi Gubernur Jendral di Hindia Belanda 1913 – 1916 mengusulkan kepada pemerintahnya di negeri Belanda agar dewan rakyat itu juga diberi kekuasaan legislatif yang lebih luas, tidak hanya memperdebatkan urusan keuangan atau budget dan supaya orang Indonesia serta Timur Asing dapat menjadi anggota dewan itu.

Perang Dunia I juga telah memaksa Hindia Belanda untuk berdiri sendiri, dan memberi dorongan ke arah itu. Di samping itu, pergerakan nasional bangsa Indonesia semakin keras menuntut agar bangsa Indonesia diberi kekuasaan yang lebih luas dalam urusan pemerintahan di Hindia Belanda, yang menyebabkan pemerintah Belanda memandang perlu membentuk Dewan Rakyat.¹⁰⁴⁾

Pada tahun 1907 Menteri jajahan Dirk Fock mengusulkan perluasan Dewan Hindia. Kemudian pada tahun 1913 rencana pembentukan sebuah "Dewan Kolonial" (*Koloniaal Raad*) telah diumumkan oleh pengganti Fock yaitu de Waal Malefijt. Tetapi kenyataannya susunan "Dewan Jajahan" tersebut sangat menusuk

hati kaum nasionalis bangsa Indonesia dan nama *Kolonial Raad* tidak dapat diterima oleh kaum pergerakan, sehingga akhirnya nama Dewan Rakyat (*Volksraad*) diterima.

Menjelang sibuknya konggres nasional SI yang pertama di Bandung pada pertengahan bulan Juli 1916, kepala kantor urusan Bumiputera G.A.J. Hazeu, telah memberitahukan kepada ketua SI Cokroaminoto tentang kesediaan pemerintah untuk memberikan konsesi kepada tuntutan SI untuk mendapatkan pengaruh yang lebih besar di dalam urusan politik pemerintahan. Konsesi pemerintah yang diberitahukan tersebut ialah: pertama, bahwa orang yang bukan bangsa Eropa akan diperkenankan untuk memilih di dalam anggauta dewan-dewan Kotapraja yang telah didirikan sejak tahun 1903; kedua, pemerintah bersedia untuk menghapuskan pasal III R.R. tahun 1854 yang melarang didirikannya perkumpulan politik, dan ketiga, Hazeu memberitahukan rencana pemerintah untuk mendirikan "Dewan Koloni" atau "Dewan Rakyat" seperti tersebut di atas, di mana akan meliputi juga anggauta bangsa Indonesia. Pada tanggal 18 Juni 1916 Cokroaminoto dalam pidatonya di muka konggres SI telah memberitahukan tentang rencana pemerintah tersebut. Ia menyambut baik rencana tersebut untuk membentuk "Dewan Koloni", tetapi menyesalkan bahwa parlemen di negeri Belanda telah memperdebatkan Undang-Undang pembentukannya dalam waktu yang begitu lama.¹⁰⁸⁾

Volksraad atau dewan rakyat yang dibuka pada tahun 1918 mempunyai 39 orang anggauta, termasuk seorang ketua (orang Belanda) yang diangkat oleh pemerintah (Raja). Dari jumlah ini 19 orang diangkat, dan sisanya dipilih oleh dewan daerah (dewan kotapraja dan dewan karesidenan). Dari jumlah itu, 10 orang dari anggauta yang dipilih, dan 5 orang dari jumlah yang diangkat oleh Gubernur Jenderal akan mempunyai kekuasaan legislatif memberi advis (nasehat) kepada pemerintah, antara lain mengenai masalah keuangan. Kekuasaan *Volksraad* pada tahun 1918 antara lain memberi nasehat kepada Gubernur Jenderal terhadap segala hal yang ia inginkan. Gubernur Jenderal juga harus meminta pendapat dewan tentang urusan anggaran belanja Hindia Belanda, dan persamaan beban keuangan, serta pemberian dinas militer kepada orang pribumi. Dewan diberi kuasa untuk mewakili kepentingan daerah jajahan Hindia Belanda kepada Raja, parlemen Belanda, dan Gubernur Jenderal berupa hak petisi. Pada tahun 1920, jumlah anggota dewan ditambah menjadi 49 orang, di antaranya 24

dipilih dan 24 diangkat oleh Gubernur Jenderal termasuk 8 orang pribumi. Anggota Dewan Rakyat mempunyai kebebasan untuk mengemukakan aturan pemerintah. Setelah pecah Perang Dunia I, suasana menjadi lebih demokratis, bahasa Melayu boleh dipergunakan sebagai bahasa debat. Pidato anggota dalam sidang permulaan sangat bersemangat, bahkan sering revolusioner, anti kolonialisme, anti Belanda, dan anti kapitalisme.

Untuk mengadakan kampanye pemilihan bagi anggota Dewan Rakyat pada tahun 1918 perkumpulan bangsa Indonesia seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam membentuk sebuah "Komite Nasional" pada tahun 1917 untuk menunjuk secara bersama calon bagi pemilihan di dalam dewan kotapraja. Program Komite Nasional yang diusulkan oleh Budi Utomo disetujui oleh Dewan Rakyat Komite Nasional pada tanggal 17 - 7 - 1917, menuntut antara lain agar: mewujudkan pemerintahan parlementer berasas kebangsaan, peraturan pemilihan yang baik, persamaan hukum, perbaikan peraturan pengadilan bagi bangsa Indonesia, dan menghilangkan sebab yang menimbulkan perbedaan (diskriminasi) antara berbagai golongan rakyat. Komite Nasional yang terdiri dari SI dan BU serta beberapa perkumpulan bangsawan di Jawa Tengah, dan persatuan guru Hindia Belanda, mengadakan ceramah dan pertemuan untuk memberi penerangan kepada rakyat tentang sistem pemerintahan parlementer. Tetapi Komite ini kemudian mengalami perpecahan karena adanya kepentingan yang berbeda, dan karena anggota dewan kotapraja dan dewan karesidenan sebagian terdiri dari orang Eropa dan mereka yang disamakan haknya dengan orang Eropa, Pemimpin bangsa Indonesia yang tergolong radikal, seperti Cokroaminoto dari SI dan Dr. Cipto Mangunkusumo dari *Nationaal Indische Partij*, tak dapat terpilih. Tetapi kemudian kedua pemimpin ini diangkat oleh Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum menjadi anggota *Volksraad* untuk masa persidangan 1918 - 1921.

Sementara itu golongan bupati mengadakan konperensi di Solo pada bulan Agustus 1917 untuk memilih calon mereka sendiri bagi anggota *Volksraad*, di mana bupati Serang Achmad Jayadinigrat yang telah berpikiran maju memperingatkan rekan-rekannya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan demokrasi dan tidak hanya bertindak sebagai pelaksana perintah dari penguasa-penguasa kolonial, tetapi hendaknya dapat bertindak sebagai juru bicara dari keinginan rakyat banyak.¹⁰⁹⁾

Volksraad dibuka oleh Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum pada tanggal 18 Mei 1918, dan di antara anggota *Volksraad* masa persidangan 1918 – 1921 dan bangsa Indonesia dapat disebutkan antara lain:

1. Wakil dari golongan bupati: Kusumo Utoyo dan A. Jayadiningrat, dan dua orang yang mewakili kesunanan dan kasultanan.
2. Wakil dari Budi Utomo: Dr. Rajiman Wedyodipura, Dwijosewoyo, dan Sutatmo Suryokusumo.
3. Wakil dari Sarekat Islam: Abdul Muis sebagai anggota yang terpilih dan H.O.S. Cokroaminoto sebagai anggota yang diangkat.
4. Wakil dari Insulinde (Nationaal Indische Partij): Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai anggota yang diangkat dan Dr. Abdul Rivai sebagai anggaute yang dipilih.¹¹⁰⁾

Keadaan di negeri Belanda dan di Indonesia pada masa akhir Perang Dunia I segera terasa akibatnya. Ancaman revolusi golongan sosialis di negeri Belanda yang dipimpin oleh Troelstra dan ancaman kerusuhan di Indonesia yaitu aksi ISDV pada akhir tahun 1917 yang dapat mempengaruhi serdadu dan pelaut bangsa Belanda dengan demonstrasi yang menimbulkan perkelahian dengan Polisi. Sedangkan partai yang lebih moderat seperti BU Insulinde, SI dan SDAP mendapat penggantian *Volksraad* dengan parlemen pilihan rakyat Gubernur Jenderal van Limburg Stirum mengemukakan janji untuk mengadakan perubahan yang luas di dalam pemerintahan di Hindia Belanda. Janji Nopember ini diucapkan oleh juru bicara pemerintah, Tuan Falma, di muka *Volksraad* pada tanggal 18 Nopember 1918, dan berbunyi:

"Arah baru yang kejadian pada akhir-akhir ini telah terasa di negeri Belanda, menentukan arah daripada apa yang harus kita ikuti di sini (maksudnya) di Hindia Belanda. Memang di sini yang kurang berhubungan dengan perubahan dari arah itu, tetapi lebih pada percepatan dari laju perkembangan. Pemerintah demikian juga *Volksraad*, karena itu telah ditempatkan di dalam keadaan dari suatu perhubungan yang baru, yaitu pergeseran dari kekuasaan yang, meskipun sudah sangat berarti toh masih belum terlihat dengan nyata. Meskipun

begitu, adalah pasti bahwa tugas baik dari pemerintah maupun dari *Volksraad* menjadi jauh lebih berat, dan suatu kerja sama yang erat di antara kedua lembaga itu adalah karena itu sangat diinginkan.¹¹¹⁾

Perkembangan kemudian membuktikan bahwa janji Nopember tersebut telah dicabut oleh pemerintah ketika keadaan di negeri Belanda maupun di Hindia Belanda telah dapat dikuasai. Kaum pergerakan nasional juga melihat bahwa harapan mereka terhadap janji pemerintah tersebut telah kandas ketika kedua mosi yang diajukan di dalam *Volksraad* oleh Cokroaminoto dan A. Jayadiningrat tidak diperhatikan dan kemudian dibekukan oleh karena tidak tercapai persesuaian pendapat dengan pemerintah. Mosi Cokroaminoto menuntut suatu parlemen yang sungguh-sungguh dan dipilih oleh rakyat, serta pemerintah yang bertanggung jawab kepada parlemen tersebut. Sebelum berakhirnya masa persidangan pertama dari *Volksraad* pada tahun 1921, Jayadiningrat mengajukan mosi yang menuntut pembentukan sebuah dewan kerajaan atau *Rijksraad* yang terdiri dari bagian kerajaan Belanda yang berpemerintahan sendiri. *Volksraad* agar diganti dengan sebuah badan legislatif yang dipilih dengan sungguh-sungguh, dan penggantian kepala departemen pemerintahan dengan menteri yang bertanggung jawab kepada *Volksraad*. Menurut pendapat pemerintah, setiap usul yang berhubungan dengan perubahan dalam pemerintahan harus disalurkan melalui komisi perubahan yang dibentuk untuk meninjau kekuasaan dewan rakyat dan struktur pemerintahan di Hindia Belanda. Komisi perubahan ini lebih dikenal dengan nama: "*Herzieningscommissie—Carpentier Alting* yang diketuai oleh Prof. Mr. J.H. Carpentier Alting yang dibentuk pada tanggal 17 Desember 1918 di dalam rangka pelaksanaan janji Nopember. Meskipun di dalam komisi Carpentier Alting ini turut duduk tokoh dari *Radicale Concentratie*, seperti misalnya Hasan Jayadiningrat, Haji Agus Salim, Jan Ch. G. Kramer, tetapi komisi ini terdiri dari berbagai tokoh yang sangat bermacam-macam pendapat dari pikirannya, sehingga tidak dapat menghasilkan suatu laporan yang disetujui bersama. Banyak nota tersendiri yang dibuat oleh beberapa anggota dan dilampirkan kepada laporan induk, sehingga laporan komisi perubahan tersebut sering dianggap sebagai kumpulan dari laporan. Laporan komisi Alting ini selesai pada tahun 1920 dan dikirimkan ke negeri Belanda pada tanggal 30 Juni 1920.

Di negeri Belanda, janji Nopember tersebut juga tidak disetujui oleh pemerintah karena dianggap terlalu luas memberikan konsesi kepada pergerakan nasional. Menteri jajahan Indenburg yang menjadi menteri jajahan pada waktu janji itu diucapkan, menentang pemberian janji tersebut dan menganggap bahwa perluasan hak dari *Volksraad* adalah terlalu pagi. Juga pengganti Indenburg, Simon de Graaff berpendapat sama dengan Indenburg. de Graaff hanya mempunyai sedikit penghargaan terhadap pekerjaan dari Gubernur Jenderal van Limburg Stirum dan tidak menyukai pergerakan nasional Indonesia. Masa jabatan de Graaff sering dianggap sebagai permulaan dari berakhirnya politik etis yang mulai dijalankan pada tahun 1901. Bahkan ketua dari Majelis Rendah (*Tweede Kamer*) Belanda Dirk Fock, yang dahulu dianggap sebagai penganut dari politik etis telah berpihak kepada golongan reaksioner konservatif dengan mempergunakan jabatannya sebagai ketua Majelis Rendah untuk mengecam janji Nopember. Dalam masa jabatannya sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda (1921 — 1926), Fock berhasil menahan perkembangan ke arah yang lebih aktif dari golongan nasionalis di dalam pemerintahan di Hindia Belanda dengan menjalankan politik penindasan yang reaksioner. Ia membuat berbagai peraturan untuk menindas pemogokan buruh yang sering terjadi dan melaksanakan pemberangusan pers, serta melakukan penangkapan terhadap siapa saja yang dianggap membahayakan keamanan dan ketertiban.¹¹²⁾

Laporan *Herzieningscommissie* ternyata sebagian besar tidak dilaksanakan di dalam Undang Undang Dasar Hindia Belanda yang baru yaitu *Indische Staatsregeling* 1925. Meskipun istilah "daerah koloni" telah dihilangkan dari Undang Undang Dasar Belanda tahun 1922 dan diganti dengan istilah "daerah seberang lautan", tetapi kekuasaan tetap di tangan Mahkota dan Parlemen Belanda. Juga kedudukan dan kekuasaan *Volksraad* menurut IS tahun 1925 tidak banyak berubah, walaupun keanggotaan *Volksraad* telah ditambah menjadi 60 orang, 30 orang Belanda, 25 orang Indonesia, dan 5 orang Timur Asing (Cina dan Arab). Dari 25 orang Indonesia, diangkat oleh Gubernur Jenderal dan 20 orang dipilih oleh dewan kotapraja dan dewan propinsi. Untuk memilih 20 anggota pribumi pemerintah Hindia Belanda membagi 12 daerah pemilihan (*keiskringen*) yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah masing-masing mendapat jatah tiga orang, Jawa Timur 4 orang, daerah *Vorstenlanden* (Solo dan Yogyakarta) 1 orang, Sulawesi

2 orang, dan 7 daerah pemilihan lainnya masing-masing mendapat 1 orang wakil yang dipilih oleh dewan kotapraja dan propinsi. Anggauta dewan dari golongan Bumiputera, Belanda, dan Timur Asing, memilih wakil untuk golongannya sendiri. Bagi daerah *Vorstenlanden* cara memilih: dilakukan oleh rapat pemilihan yang terdiri dari Gubernur. Belanda yang tertua dari Solo atau Yogyakarta dan ke empat raja yaitu Sunan, Sultan, Mangkunegara dan Paku Alam. Salah satu syarat untuk dapat dipilih menjadi anggota *Volksraad* ialah berumur 25 tahun. Oleh karena cara pemilihan seperti itu, maka kumpulan pemilih di dalam imbangannya dengan jumlah penduduk, merupakan kumpulan pemilih yang kecil. Pada tahun 1924 hanya 453 orang Indonesia yang berhak memilih, sedangkan Belanda 594 orang. Pada tahun 1927 tercatat 750 orang Indonesia yang berhak memilih. Sedangkan orang Eropa 508 orang. Pada tahun 1935 tercatat 1529 pemilih orang Indonesia dan 550 pemilih orang Eropa, dan pada tahun 1939 tercatat 1452 pemilih orang Indonesia dan 343 pemilih orang Eropa.

Penggolongan anggota *Volksraad*, pada tahun 1927 bagi 30 orang Indonesia dan 25 orang Belanda karena usul "*Inlandsche meerderheid*" telah diterima oleh Majelis Rendah Belanda dan mulai berlaku pada pemilihan anggota *Volksraad* pada tahun 1931 di mana dari 30 orang Indonesia, 10 orang diangkat, dan 20 orang dipilih, meskipun ditentang oleh golongan orang Belanda di Indonesia.¹¹³⁾

Sampai tahun 1925 kekuasaan Dewan Rakyat hanya sebagai badan penasihat, tetapi setelah itu *Volksraad* diberi kuasa sebagai peserta legislatif dan ikut membuat ordonansi. Mulai saat ini anggota *Volksraad* mempunyai hak inisiatif, amandemen, petisi, dan interpelasi. Pemberian kekuasaan yang lebih besar ini tidak berarti *Volksraad* menjadi parlemen yang sesungguhnya yang mempunyai kekuasaan legislatif penuh dan pengawasan atau menerima tanggung jawab dari pemerintah. Di samping itu, pengaruh pemerintah masih tetap besar, berhubung adanya pembagian pekerjaan di dalam *Volksraad* menjadi *Volksraad* pleno dan *College van Gedelegeerden* (Badan Pekerja), yang terdiri dari ketua *Volksraad* dan 15 orang anggota yang dipilih dari anggota pleno. Ini mengakibatkan Pemerintah sering menghindarkan diri dari dewan yang lengkap yang tidak bersidang secara terus menerus dan beralih kepada suatu badan yang lebih kecil dan lebih penurut. Pluvier mengatakan sebagai berikut:

"Dengan demikian tidak ada parlemen yang sesungguhnya karena Dewan Rakyat tidak mempunyai kekuasaan yang kuat seperti halnya dengan suatu parlemen yang sesungguhnya, yaitu dapat mempengaruhi pembentukan suatu pemerintahan atau sewaktu-waktu dapat memaksa pemerintahan membubarkan diri.

B. SIKAP PERGERAKAN NASIONAL TERHADAP VOLKSRAAD DAN POLITIK PEMERINTAH BELANDA SETELAH TAHUN 1920

Ketidakpuasan golongan nasionalis terhadap *Volksraad* dapat dibuktikan dengan penolakan SI untuk mengambil bagian di dalam *Volksraad* pada tahun 1924. H.A. Salim menduduki jabatan keanggotaan *Volksraad* dalam masa persidangan yang kedua (1921 – 1924) dan ia mengetahui sendiri bahwa *Volksraad* hanya merupakan "komidi omong belaka". Dalam kongres SI di Surabaya (8 – 11 – Agustus 1924) dan di Yogyakarta (21 – 27 Agustus 1925) SI memutuskan untuk menjalankan politik non koperasi. Politik non koperasi dan antitesa kolonial juga telah dinyatakan oleh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda dan kemudian menjadi azas perjuangan PNI pada tahun 1927. Pada tahun 1927 itu juga Cokroaminoto menolak tawaran pemerintah untuk diangkat sebagai anggota *Volksraad*, setelah ia dibebaskan dari penahanan berhubung dengan tuduhan terlibat pemberontakan SI *afdeeling* B. Politik non koperasi SI terhadap *Volksraad* dijalankan juga oleh mereka terhadap dewan dewan lokal.¹¹⁵⁾

Politik pemerintah pada umumnya pada masa 1920 – 1930 adalah politik "legalisme yang reaksioner", dan politik yang semakin konservatif dan menindas ini disebabkan karena beberapa sebab: *pertama*, semakin giatnya dan radikalnya pergerakan nasional bangsa Indonesia selama tahun 1920 – 1930 seperti dibuktikan dengan semakin banyaknya pemogokan-pemogokan buruh, politik non koperasi dari pergerakan nasional dan pemberontakan tahun 1926 sehingga menimbulkan ketakutan yang besar pada orang Belanda di Indonesia, seperti Kaum modal, dan kaum konservatif di negeri Belanda. *Kedua*, semakin tajamnya pertentangan golongan bangsa, kelompok politik, dan ekonomi di dalam masyarakat Hindia Belanda. *Ketiga*, semakin kerasnya dilaksanakan diskriminasi pada sidang ras, pendidikan dan eko-

nomi terhadap bangsa Indonesia. Keadaan tersebut di atas menyebabkan berakhirnya cita-cita politik etis, sehingga *Volksraad* tahun 1931 tidak lagi merupakan *Volksraad* asosiasif melainkan mencerminkan adanya pertentangan yang tajam dari berbagai golongan. Orang Belanda lebih menyukai pembentukan partai atas dasar ras atau bangsa, seperti *Vaderlandse Club* yang konservatif dan reaksioner. Di pihak Indonesia timbul keyakinan yang semakin kuat bahwa persatuan dan kerjasama antara yang menjajah dan yang dijajah tidak mungkin. Periode 1920 – 1930 semakin jelas terlihat adanya antitesa di antara golongan orang Belanda dan rakyat Indonesia.¹¹⁶⁾

C. PERJUANGAN DI DAERAH TAHUN 1925 – 1928

1. Nahdatul Ulama (NU)

Latar belakang didirikannya perkumpulan "Nahdhatul Ulama" di Surabaya pada tanggal 21 Januari 1926 oleh para ulama yang berpaham tradisional yang terutama menganut mazhab Syafi'i, ialah ketidakpuasan golongan itu terhadap ulama yang berpaham reformis (aliran Salaf terutama Muhammadiyah dan Sarekat Islam yang menguasai "Komite Khalifah". Setelah Republik Turki menghapuskan jabatan Khalifah, maka terjadi kekaucuan di kalangan kaum Muslimin di dunia Islam tentang persoalan Khalifah tersebut. Pada waktu itu pemerintah Mesir merencanakan untuk mengadakan kongres Khalifah di Kairo pada bulan Maret 1924. Untuk maksud tersebut di Indonesia telah dibentuk "Komite Khalifah" di Surabaya pada tanggal 4 Oktober 1924 yang pada mulanya diketuai oleh Wondosudirjo yang kemudian terkenal dengan nama Wondoamiseno dari Sarekat Islam dan K.H.A. Wahab Hasbullah sebagai wakil ketua. Kongres Al-Islam ke tiga di Surabaya pada bulan Desember 1924 dikuasai oleh golongan reformis, memutuskan untuk mengirimkan delegasi umat Islam Indonesia ke Kongres Khalifah di Kairo. Delegasi terdiri dari Suryopranoto (SI), Haji Fakhruddin (Muhammadiyah) dan K.H.A. Wahab Hasbullah dari golongan ulama tradisional. Kongres di Kairo tersebut tidak jadi dilangsungkan, sedangkan pada waktu yang bersamaan, perhatian pergerakan Islam di Indonesia beralih ke Hijaz, di mana Raja Ibn Saud dari aliran reformis telah berhasil mengusir Sharif Husein dari Mekah pada tahun 1924. Setelah kemenangannya tersebut, raja Ibn Saud mulai melaksanakan pemurnian Islam di

Mekah sesuai dengan paham Wahabi, meskipun ia tidak melarang empat mazhab di Masjid Al-Haram. Hal ini telah menyebabkan ketidakpuasan dan kekhawatiran di antara kaum ulama yang berpaham tradisional di Indonesia. Undangan dari Raja Ibn Saud untuk menghadiri kongres Khilafat di Mekah telah dibicarakan dalam kongres Al Islam yang keempat di Yogyakarta pada tanggal 21 – 27 Agustus 1925 dan kongres Al Islam yang kelima di Bandung tanggal 6 Pebruari 1926, yang ternyata telah dikuasai oleh golongan reformis (SI dan Muhammadiyah). Konggres Al Islam di Bandung memperkuat keputusan konperensi golongan reformis di Cianjur sebelumnya (8 – 10 Januari 1926) untuk mengirimkan HOS Cokroaminoto dari SI dan Kyai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah untuk menghadiri kongres Khilafat di Mekah tersebut. Dalam kongres Al Islam di Bandung tersebut K.H.A. Wahab Hasbullah dari golongan tradisional mengajukan usul yang berisi tuntutan kepada Raja Ibn Saud agar menghormati praktek keagamaan yang tradisional seperti misalnya pendirian batu makam pembacaan beberapa doa tertentu, dan pengajaran dari keempat mazhab. Usul ini tidak mendapat sambutan yang selayaknya di dalam kongres, sehingga K.H.A. Wahab dan tiga orang pengikutnya kemudian mengundurkan diri dari komite Khilafat dan memprakarsai untuk mengadakan pertemuan dari ulama golongan tradisional dari Surabaya, Semarang, Pasuruan, Lasem dan Pati. Mereka kemudian mendirikan sebuah komite tandingan dengan nama "Komite Merembuk Hidjaz" ("Komite Hijaz). Komite Hijaz kemudian tumbuh menjadi perkumpulan "Nahdathul Ulama" yang diputuskan dalam pertemuannya di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Acara pokok adalah membicarakan soal yang berhubungan dengan kongres di Hijaz dan nama *Ja'riyah Nahdathul Ulama* diusulkan oleh K.H. Alwi Abdul Azis. Para ulama tradisional yang memegang peranan penting dalam "Komite Hijaz" dan pembentukan perkumpulan NU selain K.H.A. Wahab Hasbullah dari Surabaya, juga K.H. Hasyim Asyhari dari pesantren Tebuireng, K.H. Bisyr dari pesantren Denanyar Jombang, K.H. Riddhwan dari Semarang, K.H. Nawawi dari Pasuruan, K.H. Asnawi dari Kudus, K.H. Nakhrowi dari Malang, dan K.H. Kholil dari Bangkalan. Anggaran dasar NU disahkan oleh Gubernur Jenderal dengan *Besluit* No. 23 tanggal 6 Pebruari 1930. NU menyatakan sebagai pembela mazhab Syafi'i pada khususnya dan 4 mazhab pada umumnya, serta berpegang kepada mazhab

Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. NU berusaha untuk membela pelaksanaan ajaran maazahib (4 Mazhab) baik di Mekah maupun di Indonesia, dan tidak bermaksud untuk menghalang-halangi mereka yang tidak ingin mengikut mazhab Syafi'i. Sebelum NU didirikan, K.H.A. Wahab Hasbullah bersama K.H. Mas Mansur yang kemudian memasuki perkumpulan Muhammadiyah, telah membentuk perkumpulan diskusi "*Taswirul Afkar*" yang kemudian berkembang menjadi perguruan "*Nahdatul Wathan*" yang diakui sebagai badan hukum pada tahun 1916. Pimpinan perguruan "*Nahdhatul Wathan*" dipegang oleh K.H.M. Alwi Abdul Azis dari Malang, K.H. Abdul Halim, K.H. Ridwan dari Semarang, K.H.A. Wahab Hasbullah, K. Abdullah Ubaid, K.H. Nakhrowi, K.H. Abdul Kahar Alwan, K.H. Kholil Mayhuri dari Seditan Lasem, yang kemudian menjadi pendiri-pendiri dari NU.

Rapat pembentukan NU tanggal 31 Januari 1926, juga memutuskan untuk mengirimkan delegasi yang terdiri dari dua orang menghadap Raja Ibn Saud untuk menyampaikan pendirian NU tentang masalah empat mazhab dan meminta agar beliau menghormati hukum ibadah menurut empat mazhab serta memperbaiki keadaan para jemaah haji. Delegasi tersebut pada mulanya ialah K.H. Bisri dan K.H. Asnawi, tetapi kemudian diganti oleh K.H. Kholil dari Lasem dan K.H. Abdul Wahab Hasbullah dari Surabaya. Mereka tidak dapat berangkat karena keterlambatan kapal, sehingga gagal untuk berkunjung ke Hijaz, tetapi putusan konggres telah dikirimkan NU kepada Raja Saud dengan permintaan agar dicantumkan di dalam hukum di daerah Hijaz.

Karena gagal berangkat maka delegasi NU pada tanggal 27 Maret 1928 memutuskan untuk mencoba mengirimkan lagi delegasi mengharap Raja Saud. Delegasi terdiri dari K.H.A. Wahab Hasbullah, dan Ustadz Ghahaim Al Amir Al Misri. Kedua orang wakil NU ini berhasil menghadap Raja Ibn Saud pada tanggal 13 Juni 1928 dengan membawa keputusan NU mengenai ibadah dan pengajian, serta tuntutan agar pemerintah Saudi Arabia tidak meneruskan pengrusakan terhadap makam dari keluarga Nabi Muhammad dan makam Imam Empat di sekitar Ka'bah. Di dalam surat jawaban Raja Saud No. 2082 tanggal 13 Juni 1928 yang disampaikan kepada pengurus NU dinyatakan bahwa pemerintah wahabi di Saudi Arabia akan menjamin kebebasan umat Islam untuk menjalankan ibadatnya menurut mazhabnya masing-masing.

Dapatlah dikatakan, bahwa sebab yang utama tentang pem-

bentukan NU oleh para ulama yang berpaham tradisional ialah serangan yang ditujukan kepada mereka baik di Mekah oleh pemerintah baru di Arab Saudi yang berpaham wahabi, maupun golongan Islam reformis di Indonesia seperti Muhammadiyah dan SI. Di daerah Jawa Timur adalah juga dikarenakan adanya hubungan keluarga atau hubungan pribadi dari para ulama di berbagai pesantren dengan ulama pendiri NU seperti K.H.A. Hasyim Asy'ari, dan K.H.A. Wahab Hasbullah.

K.H.A. Hasyim Asy'ari dilahirkan pada tanggal 14 Februari 1871 di Demak, Jawa Tengah, ayahnya Kyai Asyhari yang menjadi menantu Kyai Usman dari pesantren Nggedang, sebelah utara Jombang. Hasyim mulai belajar pada ayahnya ketika ia berumur 6 tahun di desa Keras, sebelah selatan Jombang, di mana ayahnya pindah dari Demak pada tahun 1876. Sejak umur 15 tahun, ia mengunjungi banyak pesantren di Jawa Timur dan Madura. Pada tahun 1891 ia belajar di pesantren Kyai Jak'ub Sialan Panji dari Sidoredjo, di mana ia kawin dengan anak perempuan gurunya pada tahun 1892, dan naik haji ke Mekah pada tahun itu juga. Ketika istrinya meninggal setelah kawin 7 bulan, ia kembali ke Indonesia, dan pada tahun 1893 ia kembali lagi ke Mekah dan tinggal di sana selama 6 tahun.

Salah seorang gurunya ialah Syekh Akhmad Khatib yang berasal dari Minangkabau. Setelah pulang di Indonesia, ia mendirikan pesantren di Tebu Ireng, yang dimulai dengan 7 orang murid. Pesantren itu segera berkembang, sehingga pengaruhnya semakin tersebar di kalangan para ulama di Jawa Timur.

K.H. Abdul Wahab Hasbullah adalah saudara dari Kyai Hasyim Asy'ari, bersamaan neneknya, dilahirkan di Jombang pada bulan Maret 1888. Ia belajar di pesantren Tambak rejo dan Tebu Ireng dan kemudian menjadi guru madrasah *Tasyuirul Afkar* dan *Nahdhatul Wathan* yang terletak di kota Surabaya. Kemudian ia mendirikan pesantren sendiri di Tambak beras.

K.H. Bisri dilahirkan di Tayu, Pati, pada tahun 1887, dan berasal dari keluarga pedagang. Selama masa mudanya ia belajar di pelbagai pesantren di Jawa Timur seperti Sarang Bangkalan, dan Tebu Ireng. Ia bermukim di Mekah selama empat tahun untuk belajar (1911 – 1914), dan kemudian kawin dengan adik K.H.A. Wahab. Setelah kembali dari Mekah ia menggabungkan diri di pesantren Tambak beras selama dua tahun, dan kemudian mendirikan pesantren sendiri di Den Anyar, tak jauh dari Tambak beras.

Ia adalah mertua dari Kyai Wahid Hasyim, putra K.H. Hasyim Asy'ari, pemuka NU pada masa kemerdekaan.

Perkumpulan NU dengan cepat tersebar di seluruh Jawa, bahkan pada tahun 1930 sudah mempunyai cabang di Kalimantan Selatan (Banjar Martapura). Pengaruhnya yang terbesar terdapat di daerah Surabaya dan daerah yang berdekatan dengan Surabaya, seperti Kediri, Bojonegoro, Kudus dan sekitarnya. Konggres NU pada tahun 1932 diadakan di Bandung untuk lebih meluaskan pengaruhnya di daerah Jawa Barat. Dalam konggres tersebut diputuskan tidak menyetujui diadakan penyuntikan limpa mayat, untuk melihat apakah seseorang meninggal karena penyakit pes yang banyak berjangkit pada waktu itu di daerah Priangan Timur. Konggres ke-10 diadakan di Solo pada 13 – 18 April 1935, di mana diajukan mosi kepada pemerintah untuk mengadakan pengajaran dan ujian bagi para calon penghulu. Jumlah anggota NU pada waktu itu lebih kurang 67.000 dengan 68 cabang. Konggres tahun 1937 di Malang telah mencatat 71 buah cabang, dan pada tahun 1942 NU mempunyai 120 cabang yang terdapat di pelbagai tempat di Jawa dan Kalimantan Selatan.

Di dalam perkembangannya, ternyata perbedaan di antara golongan reformis (Muhammadiyah) dan tradisional (NU) lebih bersifat kompetitif daripada suatu perbedaan yang merugikan. Golongan Muhammadiyah, untuk menghindari sikap permusuhan dari pihak pemerintah, mulai menjalankan kegiatan yang tidak bertentangan dengan golongan ulama tradisional. Sebaliknya, dalam hal organisasi dan ibadah, NU mencontoh cara yang telah diajarkan oleh Muhammadiyah dengan berhasil, seperti mendirikan sekolah, rumah miskin dan cara penyebaran agama. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan NU dan Muhammadiyah saling berdekatan, sesudah tahun 1930, yaitu: 1. Perlunya kesatuan sikap menghadapi penjajah, dan 2. Perlunya kerjasama dalam menghadapi pengaruh partai politik SI (PSII) di dalam masalah agama dan golongan nasionalis sekuler yang berpendidikan Barat.¹¹⁸⁾

2. Pemberontakan tahun 1926/1927

Setelah terjadi perpecahan pada tahun 1923 dalam konggres SI di Madiun maka PKI kemudian menggerakkan SI. Merah untuk menandingi SI putih pimpinan Cokroaminoto. Konggres PKI bulan Maret 1923 di Bandung mengambil keputusan untuk mendirikan

SI Merah di daerah di mana ada SI putih SI merah kemudian diganti namanya menjadi Sarekat Rakyat pada bulan April 1924. Sesudah konggres bulan Juni 1924 PKI dengan giat membangun Sarekat Rakyat, di samping membentuk organisasi pemuda dengan nama Barisan Pemuda. PKI menjadi partai politik dengan jumlah anggota yang besar, tetapi jumlah anggota intinya kecil. Itulah sebabnya PKI kurang dapat melakukan kontrol dan disiplin terhadap pengikutnya. Pada akhir tahun 1924 beberapa cabang Sarekat Rakyat telah mengambil inisiatif sendiri dengan aksi teror sehingga mengakibatkan timbulnya gerakan anti komunis dari masyarakat Islam yang taat yang menyebabkan sering diambilnya tindakan keras oleh pemerintah kolonial.

Dalam konggres di Kota Gede (Yogyakarta) pada bulan Desember 1924 Sarekat Rakyat dilebur ke dalam PKI. Konggres yang dipimpin oleh Alimin dan dihadiri oleh Darsono dan Musso memutuskan untuk mempergiat propaganda di kalangan sarekat buruh perdagangan, industri dan pengangkutan. Pada waktu itu PKI mempunyai 38 seksi, 1.237 anggota, dan 46 cabang sarekat rakyat dengan jumlah anggota 33.478 orang. Setelah konggres, PKI berusaha untuk terus memperkuat diri terutama dalam gerakan sarikat buruh. Tahun 1925 merupakan tahun yang menunjukkan kegiatan yang besar dari serikat buruh yang dikuasai PKI, di mana dengan campur tangan PKI pemogokan terjadi di Semarang dan Surabaya. Di Semarang pemogokan buruh percetakan dimulai pada percetakan kepunyaan orang Cina yang dilakukan oleh buruh Cina Indonesia. Pada tanggal 21 Juli 1925 terjadi pemogokan buruh percetakan karena perselisihan di sebuah firma kepunyaan orang Cina. Pada tanggal 1 Agustus 1925 timbul pemogokan buruh rumah sakit negeri (CBZ) yang dipimpin oleh perkumpulan pegawai rumah sakit dan disebabkan oleh perbuatan yang angkuh dan keras dari kepala bangsa Belanda. Pada waktu yang bersamaan terjadi pemogokan buruh perusahaan kapal *Semarangse Stoombooten Prauwenveer*, yang diikuti oleh kurang lebih 1000 orang buruh yang dipimpin oleh pelabuhan dan persatuan pelaut dan baru berakhir pada bulan September 1925. Karena pemogokan ini, pemerintah pada tanggal 17 Nopember 1925, mengambil tindakan keras dengan membatasi hak bersidang bagi organisasi PKI, dan kemudian menangkap serta mengasingkan para pemimpin PKI seperti Darsono, Aliarkham dan Marjohan tetapi Alimin dapat meloloskan diri. Juga di Surabaya sejak 1 Sep-

tember 1925 terjadi pemogokan di perusahaan percetakan dan pabrik mesin sejak tanggal 5 Oktober 1925. Karena tindakan pemerintah, pemogokan-pemogokan tersebut dapat berhenti pada akhir Desember 1925.

Setelah menggerakkan pemogokan tersebut, pemimpin PKI kemudian merencanakan pemberontakan melawan pemerintah. Pemimpin yang menyetujui mengadakan pemberontakan tersebut adalah Sarjono, Budi Sucitro, Sugono, Dahlan, dan Sukra. Keputusan untuk mengadakan pemberontakan diambil dalam rapat rahasia pimpinan PKI di Prambanan (dekat Yogyakarta) pada pertengahan bulan Oktober 1925. Dalam hubungan ini, Alimin dan Musso menyokong keputusan rapat rahasia tersebut, sedangkan Semaun (yang berada di Rusia), Darsono (yang ditahan kemudian diasingkan ke Rusia), dan Tan Malaka (yang menjadi wakil Kominintern di timur jauh), menentang keputusan untuk mengadakan pemberontakan. Tan Malaka menganggap bahwa pemberontakan itu tidak mungkin berhasil karena massa belum siap, tetapi Alimin dan kawan-kawan tetap meneruskan persiapan pemberontakan. Menurut keputusan rapat rahasia tersebut pemberontakan akan dimulai dengan pemogokan pada serikat buruh yang akan diperluas menjadi suatu revolusi untuk menggulingkan pemerintah Belanda di Indonesia. Untuk mendapatkan sokongan atau persetujuan dari Moskow, akan diusahakan persetujuan dan dukungan dari Tan Malaka sebagai wakil Komiteren di Timur Jauh.

Tetapi ternyata pemberontakan tidak terjadi menurut rencana karena pemerintah rupanya telah mengetahui rencana PKI tersebut dengan terjadinya pemogokan yang semakin meningkat dan kerusuhan di beberapa tempat, sehingga pemerintah kemudian melarang hak berapat bagi PKI, Sarekat rakyat dan sarekat sekerjanya di seluruh Indonesia. Dengan demikian terputus hubungan antara pimpinan PKI dengan sarekat buruh dan Sarekat Rakyat. Pemberontakan akhirnya meletus juga pada tanggal 12 Nopember 1926 di Jakarta, disusul dengan tindakan kekerasan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (12 - 14 Nopember di Jakarta, Jatinegara, dan Tangerang, 12 Nopember - 5 Desember di karesidenan Banten, 12 - 18 Nopember di Priangan, 17 - 23 Nopember di daerah Sala, 12 Nopember - 15 Desember di daerah Kediri, dan rencana untuk mengadakan pemberontakan di Banyumas, Pekalongan, dan Kedu). Pemberontakan yang meletus di Banten yang dilakukan oleh petani adalah yang terhebat dengan me-

nyerang pos polisi, memutuskan kawat telepon, merusak bagian jalan kereta api dan beberapa jembatan, mengadakan rintangan jalan dengan pohon. Gerombolan petani yang bersenjata yang berjumlah sampai beratus-ratus menyerang dengan keris rumah-rumah pegawai pemerintah dan merusaknya, sehingga di Banten pemberontakan dapat berlangsung sampai satu bulan. Di Jakarta, para pemberontak menduduki kantor telepon, memutuskan hubungan telepon, berusaha membuka penjara dengan kekerasan, menduduki pos polisi, mendirikan barikade, serta menduduki jembatan. Tetapi dalam waktu sehari polisi dapat menumpasnya, dan sampai tanggal 14 Nopember telah ditahan 300 orang. Di Sala, pemberontakan baru timbul beberapa waktu setelah Jawa Barat (17 Nopember). Gerombolan bersenjata, di Sala memutus kawat telepon, dan membakar rumah serta gudang tembakau. Pemberontakan yang terpisah-pisah dan bersifat agraris ini dapat ditindas dalam waktu singkat, karena sarekat sekerja tidak ikut serta. Di daerah Banyumas, Pekalongan, Kedu dan Kediri, di mana persiapan pemberontakan terlambat, pemerintah dapat menangkap para pemimpin dan anggota gerakan tani sebelum mereka dapat memulai rencananya. Pemberontakan di Sumatra Barat baru terjadi pada bulan Januari 1927 sesudah pemberontakan di Jawa dapat ditindas. Pemberontakan di daerah ini juga berlangsung dalam waktu singkat, karena banyak pemimpinnya dapat ditangkap sebelum aksi pemberontakannya dapat meluas.

Sebagai akibat dari pemberontakan tersebut, di seluruh Indonesia 13.000 orang ditangkap, 4.500 orang dijatuhi hukuman penjara, 1.308 diinternir (dibuang di dalam negeri), dan 823 orang dibuang ke Digul (Tanah Merah), dan sisanya kemudian dibebaskan. Di antara yang diinternir, terdapat pemimpin nasionalis yang bukan komunis dan tidak ada hubungannya dengan pemberontakan itu, seperti Dr. Cipta Mangunkusumo yang dituduh terlibat, karena tuduhan bahwa dalam buku tamunya terdapat nama kepala pemberontakan. Beliau dibuang ke Banda sampai tahun 1941 dengan surat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 16 Desember 1927.¹¹⁹⁾

3. Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Perhimpunan Partai-partai Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)

a. P N I

Persiapan pendirian Partai Nasional Indonesia (PNI) dima-

tangkan di dalam *Algemene Studieclub* Bandung yang dipimpin oleh Ir. Sukarno. Pada bulan April 1927 dibentuk "Komite Perseediaan" yang terdiri dari Ir. Sukarno, Mr. Iskaq Cokrohadisuryo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Budiarto Martoatmojo, Mr. Sunaryo, Ir. Anwari, Mr. Sartono dan Dr. Samsi. Rapat pendirian diadakan pada tanggal 4 Juli 1927 dengan mendirikan "Perserikatan Nasional Indonesia". Dalam Konggres PNI yang pertama di Surabaya pada bulan Mei 1918 nama "perserikatan" diganti dengan "Partai", sehingga menjadi "Partai Nasional Indonesia". Walaupun PNI tak ada hubungan secara organisatoris dengan Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda, tetapi asas PNI sangat bersamaan dengan Perhimpunan Indonesia yaitu bertujuan Indonesia merdeka, menekankan antitesis kolonial di antara penjajah dengan yang dijajah, serta menganut asas perjuangan non-kooperasi. PNI mulai giat mengadakan propaganda dengan tujuan untuk mencapai Indonesia merdeka, serta pembebasan para tahanan di Digul. Caranya ialah dengan menimbulkan semangat kebangsaan menjadi kekuatan nasional dan pergerakan rakyat yang sadar. Untuk mencapai tujuan maka diperlukan teori nasionalisme yang radikal yang dapat melahirkan kemauan nasional dan dari kemauan nasional meningkat menjadi perbuatan nasional yang dinamakan trilogi *nationale geest, nationale wil, nationale daad* yaitu: jiwa nasional, kemauan nasional, perbuatan nasional. Di dalam anggaran dasar seperti yang dimuat dalam "Suluh Rakyat Indonesia" tanggal 30 Mei 1928, dinyatakan bahwa tujuan PNI ialah bekerja untuk kemerdekaan Indonesia, yang akan dicapai dengan asas "percaya diri sendiri" (*zelfhelp*), memperbaiki keadaan politik, ekonomi dan sosial dengan kekuatan sendiri, antara lain dengan mendirikan sekolah, poliklinik, bank nasional, perkumpulan koperasi, dan lain-lain. Itulah sebabnya PNI tidak mau duduk dalam dewan yang diadakan oleh pemerintah karena mempunyai asas non-kooperasi. Yang dapat menjadi anggota PNI ialah semua orang Indonesia yang sudah berusia 18 tahun, sedangkan orang Asia lainnya dapat juga menjadi anggota luar biasa. Tindakan penangkapan pemerintah di negeri Belanda terhadap pemimpin Perhimpunan Indonesia, telah dipergunakan oleh PNI untuk mengadakan rapat protes sambil mempropagandakan asas dan tujuan PNI kepada rakyat, misalnya proses *vergadering* di Bandung pada tanggal 14 Agustus 1927. Cita-cita persatuan yang selalu ditekankan dalam rapat umum PNI ternyata dalam waktu singkat dapat

diwujudkan dengan dibentuknya "Permupakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia" (PPPKI) di dalam rapat tanggal 17 – 18 Desember 1927 di Bandung yang terdiri dari PNI, PSII, BU Pasundan, *Sumatranenbond*, Kaum Betawi, *Indonesische Studieclub*, dan *Algemeene Studieclub*. Dalam rapat PNI di Bandung tanggal 24 – 26 Maret 1927 disusun program asas dan daftar usaha yang kemudian disahkan di dalam kongres PNI yang pertama di Surabaya tanggal 27 – 30 Mei 1928. Kongres ini telah memilih Ir. Sukarno sebagai ketua, Mr. Iskaq Cokrohadisuryo sebagai sekretaris, dan Mr. Sartono sebagai Bendahara.¹²⁰⁾

Meskipun terdengar peringatan yang keras dari pemerintah, seperti yang diucapkan oleh Gubernur Jenderal pada sidang pembukaan *Volksraad* tanggal 15 Mei 1929 yang memperingatkan rakyat terhadap paham nasionalisme yang ekstrem dan sikap non-koperasi yang memusuhi pemerintah, namun demikian cabang PNI giat didirikan di seluruh Indonesia. Pada tanggal 9 Juli 1929 dan 6 Agustus 1929 pemerintah sekali lagi mengeluarkan ancaman dan kecurigaannya terhadap PNI di muka *Volksraad* Ir. Sukarno giat mengadakan propaganda ke pelbagai tempat di Jawa untuk mengajak rakyat mengejar cita-cita Indonesia merdeka. Di mana ia disambut dengan hangat oleh rakyat yang menghadiri rapat umum, meskipun dihalang-halangi oleh PID, tetapi biji nasionalisme dan Indonesia merdeka telah tersebar ke mana-mana. Tujuh cabang PNI yang pertama didirikan ialah di Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Pekalongan, dan Palembang. Empat calon cabang telah pula didirikan yaitu di Air Itam (dekat Palembang), Cirebon, Garut, dan Semarang. Di samping itu terdapat beberapa ranting dengan anggota pengurus lengkap di Surakarta, Makasar, Buol, dan Banyuwangi. Sampai akhir tahun 1929 kandidat anggota PNI sudah berjumlah kira-kira 10.000 orang, di antaranya 6.000 orang di daerah Priangan.

Rapat propaganda yang diadakan, antara lain: Rapat propaganda di Gresik tanggal 30 Agustus 1928 di mana Ir. Sukarno membentangkan penjajahan Belanda secara historis materialis, lahirnya imperialisme hingga lahirnya penjajahan kolonial. Rapat di Semarang tanggal 14 Oktober 1928 setelah PNI cabang Semarang didirikan, di mana Ir. Sukarno mengobarkan semangat rakyat pendengarnya dengan mengemukakan keburukan dan penghisapan yang dilakukan oleh kolonial imperialisme. Ketika ia sedang mengucapkan pidatonya yang membongkar keburukan imperialisme

Belanda, ia dilarang berbicara terus oleh polisi Belanda yang hadir. Karena itu, Mr. Suyudi, ketua PNI cabang Yogyakarta, memprotes tindakan polisi tersebut, dan rapat kemudian oleh ketua dibubarkan. Tindakan polisi ini diprotes keras oleh pers nasional di antaranya surat kabar "Timbul" yang terbit di Sala dan dipimpin oleh Mr. Singgih dan Dr. Rajiman Wedyodipuro. Rapat propaganda dilanjutkan di Jawa Tengah, pada tanggal 21 Juli 1929 diadakan rapat umum di Pekalongan dengan dihadiri oleh 4.000 orang. Rapat ini juga disokong oleh PSII, Muhammadiyah, BU dan Persatuan Guru Indonesia. Ir. Sukarno mengemukakan tentang bahaya imperialisme dan kolonialisme, tetapi walaupun begitu PNI tidak menginginkan suatu masa aksi yang radikal. Kritik pedas telah dilontarkan oleh amtenar bangsa Belanda dan pemerintah kolonial Belanda.¹²¹⁾

Kongres PNI yang kedua diadakan di Jakarta bertempat di Gedung Permufakatan Nasional gang Kenari, pada tanggal 18 – 20 Mei 1929. Dalam pembukaan kongres dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ir. Sukarno dalam pidatonya menyatakan bahwa gerakan kebangsaan dilahirkan dari rakyat, dan sekarang di bawah naungan bendera merah putih berkepala banteng, dengan penuh semangat (merah) dan dengan hati yang suci (putih), dengan percaya pada kekuatan sendiri (banteng), kita harus berjuang terus menuju Indonesia Raya, Indonesia Merdeka. Di samping memilih kembali pengurus besar yang lama, kongres mengambil keputusan antara lain:

- 1). bidang ekonomi/sosial, dengan menyokong perkembangan Bank Nasional Indonesia, dan mendirikan koperasi, *studiefonds* dan *fondkurban* atau *partijfonds* untuk anggota yang kena tindakan pengamanan pemerintah, dan serikat sekerja mendirikan sekolah dan rumah sakit.
- 2) bidang politik, mengadakan hubungan dengan Perhimpunan Indonesia (PI) di negeri Belanda dan menunjuk PI sebagai wakil PPPKI di luar negeri.

Juga dalam kongres dibicarakan masalah transmigrasi untuk mengatasi kemelaratan rakyat terutama di daerah yang berpenduduk padat. Dalam pidatonya yang kedua, Ir. Sukarno mengatakan bahwa imigrasi ke luar daerah adalah perlu, agar dapat mengimbangi dan memberi penerangan perjuangan kebangsaan kita kepada kaum kuli kontrak di sana, di samping dapat menyiapkan

kan juga pembangunan kesatuan ekonomi kebangsaan. Dalam pidato penutup kongres Ir. Sukarno memperingatkan orang Indonesia yang berpihak pada "Sana" yang turut menghalang-halangi perjuangan kebangsaan kita, bahwa mereka akan menerima bagiaannya bila nanti Perang Pasifik terjadi.¹²²⁾

Disebabkan oleh propaganda dan pengaruh PNI yang semakin luas, maka pemerintah semakin menaruh kecurigaan kepada PNI, seperti ternyata dari ancaman yang diucapkan wakil pemerintah di muka *Volksraad* seperti tersebut di atas. Kecemasan pemerintah bertambah setelah mendapat laporan bahwa di kalangan tentara dan polisi terdapat pula pengaruh propaganda PNI. Pada akhir Oktober 1929 Gubernur Jawa Barat melarang pegawai dan polisi menjadi anggota PNI. Kira-kira 95% anggota PNI tinggal di daerah Jawa Barat, terutama di Priangan Tengah. Demikian pula Panglima Tentara Belanda (*Legercommandant*) mengeluarkan larangan serupa kepada semua anggota militer dan pegawai negeri yang berada di bawah wewenang "*Departement Van Oorlog*" (Departemen Pertahanan). Bahkan tentara juga dilarang membaca surat kabar yang bernada perjuangan kemerdekaan seperti "Bintang Timur" 24 Desember 1929. Menjelang akhir tahun 1929, tersiar desas-desus bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan. Karena desakan kaum reaksioner Belanda di samping pemerintah Belanda sendiri semakin bertambah khawatir akan pengaruh PNI, maka sesudah mengadakan persiapan yang luas dan teratur, pokrol Jenderal *Bij het Hoog Gerechtshof* memerintahkan mengadakan pengeledahan pada kantor dan rumah pemimpin PNI pada tanggal 24 Desember 1929. Sebanyak 400 pengeledahan telah dilakukan, di antaranya di Jakarta 50 kali, di Bandung 41 kali, di Cirebon 24 kali, di Pekalongan 42, di Sukabumi dan Cianjur 31, di Surakarta 11, di Medan 25, di Ujungpandang 18, di Padang 2, di Semarang 30, di Yogyakarta 35, dan di banyak tempat lainnya di Indonesia. Penangkapan yang terjadi pada Ir. Sukarno berlangsung sebagai berikut:

Pada tanggal 26 Desember 1929 Ir. Sukarno dan rombongannya dari Bandung yang terdiri dari Bu Inggit, Maskun, Mang Ayib dan Gatot Mangkupraja, berangkat ke Sala untuk menghadiri kongres PPPKI pada tanggal 27 Desember 1929. Dari Sala rombongan menuju ke Yogyakarta dan menginap di rumah Mr. Suyudi di jalan Tugu Kidul. Pada tanggal 28 Desember 1929 malam diadakan rapat umum oleh pengurus PNI cabang Yogyakarta di mana

berbicara Ir. Sukarno, Gatot, Maskun dan Ki Hajar Dewantoro. Pada tanggal 29 Desember 1929 jam 5 pagi rumah Mr. Suyudi didatangi polisi untuk menangkap Ir. Sukarno dan rombongan. Mereka kemudian dimasukkan di penjara Mergangsan (Wirogunan) Yogyakarta. Pada tanggal 30 Desember 1929 jam 5.30 pagi dipindahkan ke penjara Bantjeuy Bandung. Dari 8 orang pemimpin PNI yang semula ditahan, 4 orang dibebaskan lagi, sehingga tinggal 4 orang yaitu Ir. Sukarno - ketua PNI, Gatot Mangkupradja - sekretaris II PBPNI, Maskun Sumadiredja - sekretaris II pengurus PNI cabang Bandung dan Supriyadinata - anggota PNI cabang Bandung, yang akan ajukan ke muka pengadilan. Sidang pengadilan berlangsung tanggal 18 Agustus - 29 September 1930 di mana Ir. Sukarno dan kawan-kawan dibela oleh 3 orang pembela yaitu Mr. Sartono, Mr. Suyudi, dan Mr. Sastromulyono. Tuduhan didasarkan atas pasal 169 KUHP ("ikut serta dalam suatu perkumpulan yang bertujuan menjalankan kejahatan") dan pasal 153 bis ("mengajak atau menghasut mengacaukan ketertiban umum atau menggulingkan atau menyerang pemerintah di negeri Belanda atau di Hindia Belanda). Tanggal 22 Desember 1930 *Landraad* Bandung menjatuhkan hukuman kepada 4 orang pemimpin PNI tersebut yaitu Ir. Sukarno 4 tahun, Gatot Mangkupradja 2 tahun, Maskun 1 tahun 8 bulan, dan Surpiyadinata 1 tahun 3 bulan).

Prof. Mr. JMJ. Schepper, seorang guru besar dalam mata pelajaran hukum pidana, berpendapat bahwa tujuan utama perkara pengadilan pemimpin-pemimpin PNI tersebut ialah untuk memberi cap "terlarang" kepada PNI sedangkan di dalam vonis tidak satu fakta pun yang menunjukkan adanya suatu percobaan melakukan atau memancing pemberontakan bersenjata melawan pemerintah. Pluvier mengatakan, bahwa pertanyaan yang penting dalam hal ini ialah: pengadilan itu ditujukan kepada siapa, kepada Ir. Sukarno atau kepada PNI? Kenyataan selama proses pengadilan menunjukkan bahwa hal itu ditujukan kepada PNI. Ketika pengadilan sedang berjalan Gubernur Jenderal mengirim kawat kepada menteri jajahan bahwa pemimpin-pemimpin PNI dianggap bersalah berdasarkan pasal 153 bis dan 169 KUHP (dalam urutan seperti itu). Tetapi selama diadili ternyata titik beratnya telah dipindah keputusan itu terutama didasarkan atas pasal 169, sedang pasal 153 bis hanya sedikit mendapat perhatian. Keputusan hakim atas tuduhan itu berarti bahwa mereka adalah anggota dari suatu perhimpunan yang bertujuan untuk melakukan kejahatan yang

berarti bahwa PNI adalah partai yang jahat dan dilarang. Maka pengadilan pada hakekatnya adalah suatu perkara kepolisian yang ditujukan kepada PNI. Keputusan *Landraad* Bandung kemudian disahkan oleh *Raad Van Justitie* pada April 1931.¹²³⁾

Itulah sebabnya kemudian, setelah hukuman itu dijatuhkan, Mr. Sartono yang menggantikan Ir. Sukarno sebagai ketua PNI, berpendapat bahwa kedudukan PNI dalam keadaan sulit dan membahayakan bagi orang-orang yang menjadi anggotanya. Sesudah putusan itu disahkan oleh *Raad Van Justitie*, maka diputuskan untuk mengadakan suatu rapat darurat atau konperensi luar biasa pada tanggal 25 April 1931 di Jakarta. Konperensi ini memutuskan untuk membubarkan PNI dengan alasan bahwa keputusan *Landraad* yang sudah diperkuat oleh RVJ itu pada hakekatnya bermaksud mematikan setidaknya melumpuhkan PNI. Pernyataan Pembubaran PNI itu ditandatangani pada hari Sabtu tanggal 25 April 1931 di gedung Permufakatan Nasional di Gang Kenari Jakarta, dengan ditandatangani oleh para anggota pengurus besar dan wakil daerah yaitu Mr. Sartono, S. Angronsudirdja, Ir. Anwari, Suwiryo Sukemi, Munandi, Sungeb (Jakarta), Sukarta (Jakarta), Subrata (Jakarta), Kr. Lawi (Pekalongan), M. Yahya Ns. (Pekalongan), Nungcik (Palembang), Mr. Suyudi (Yogyakarta), Soetarja (Bandung), Moh. Thaib (Bandung), Wiyono (Magelang), Sudarma (Malang), Atmaji (Surabaya), Pranoto (Surabaya), Dwi-jopranoto (Semarang), Atmosantoso (Semarang), Mr. Ali Sastro-amijoyo (Madiun), dan Suyadi (Jakarta).¹²⁵⁾

Penangkapan pemimpin PNI oleh pemerintah dijelaskan oleh wakil pemerintah Kiewiet de Jonge di muka *Volksraad* pada tanggal 10 Januari 1930 yang menuduh bahwa aktivitas PNI ditujukan untuk menanam rasa kurang senang yang menimbulkan ketegangan yang semakin memuncak. Di pihak pergerakan mereka meragukan akan berita kerusakan itu, dan tidak ada satu kantor berita pun yang percaya bahwa PNI akan membuat kerusakan. Mereka melihat tindakan pemerintah disebabkan karena hasutan dari pers dan orang Belanda. Ditambah lagi bahwa penggeledahan sering dilakukan pada mereka yang tak ada hubungannya dengan PNI misalnya pada sekolah BU, sehingga perhimpunan yang lunak juga merasa kurang aman. Di dalam *Volksraad*, Kusumo Utoyo mengajukan mosi pada tanggal 3 Januari 1930 "tentang tidak aman hati di antara penduduk negeri", dengan mengatakan antara lain: "apakah aksi ini hanya ditujukan kepada PNI atau apakah

maksud pemerintah dan polisi akan melakukan sesuatu pengawasan juga kepada perhimpunan Bumiputera yang sangat sederhana haluannya?" Muhammad Husni Thamrin, ketua Fraksi Nasional di dalam *Volksraad*, mengancam keras tindakan pemerintah tersebut dalam pidatonya tanggal 27 Januari 1930. Protes yang sama juga dinyatakan oleh Dwijosewoyo pada persidangan tersebut. Rapat-rapat protes diadakan oleh PPPKI pada tanggal 12 Januari 1930 di Jakarta yang dihadiri oleh wakil-wakil dari BU, PSII, Pasundan, dan Sarekat Sumatra. Rapat ini menerima mosi yang mengecam tindakan pemerintah tersebut dan mengharapkan bahwa rakyat Indonesia meskipun menghadapi rintangan, akan meneruskan perjuangannya untuk kemerdekaan nasional sampai tujuan tercapai. "Bahkan di dalam *Staten Generaal* di negeri Belanda terlihat pengaruh dari tindakan penangkapan terhadap pemimpin PNI tersebut. Anggota SDAP Cramer mengajukan sebuah mosi yang meminta, dihapusnya semua ketentuan yang membatasi hak kebebasan berkumpul, berapat, dan mogok serta penahanan sementara atas orang yang ditangkap. Mosi ini tidak diterima oleh *Staten Generaal*."

Setelah keputusan *Landraad* Bandung, pada umumnya kaum pergerakan menjadi terdiam, tetapi PSII memprotes keputusan hukuman itu dalam rapatnya di Weltevreden. Tetapi setelah keputusan itu dikuatkan oleh RVJ (April 1931), terlihat kembali reaksi dari PBI di bawah Dr. Sutomo dengan mengadakan rapat protes di pelbagai tempat dan pada tanggal 3 Mei 1931, diikuti oleh perkumpulan Mahasiswa PPPI.¹²⁵⁾

— PNI Cabang Semarang

PNI cabang Semarang dibentuk pada tahun 1927, dengan pemimpinnya antara lain: Jatmika, Mokh. Sopiani, Sumardi, Kadarisman, Supardi, dan Atmosantoso. Rapat umum yang pertama dikunjungi oleh ribuan rakyat yang tidak takut menyerukan "Indonesia Merdeka" Bendera merah putih dengan simbol (lambang), Kepala Banteng, mulai berkibar di Semarang. Meskipun pihak kepolisian Belanda selalu mengintai dan mengejar pemimpin PNI cabang Semarang, anggotanya terus bertambah-tambah. Ketika terjadi penangkapan terhadap pemimpin PNI, PNI cabang Semarang juga mengalami pengeledahan dan penangkapan.¹²⁶⁾

b. PPPKI

Usaha ke arah persatuan dari semua gerakan kebangsaan agar dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan bersama ke arah Indonesia Raya dan Indonesia Merdeka, diusahakan oleh PNI pada tahun 1927 dan ternyata menunjukkan hasil yang memuaskan. Konggres SI di Pekalongan tanggal 28 September – 2 Oktober 1927 memutuskan untuk menyetujui usul Ir. Sukarno dari PNI untuk mengadakan suatu barisan persatuan bersama di antara partai politik bangsa Indonesia termasuk juga partai-partai Kristen agar dapat tercapai kesatuan aksi dari semua gerakan kebangsaan di Indonesia menurut garis yang sudah ditetapkan secara bersama. Konggres SI tersebut menunjuk Dr. Sukiman sebagai wakil SI untuk duduk dalam panitia perancang anggaran dasar bersama dengan Ir. Sukarno dari PNI. Komite persiapan yang terdiri dari wakil beberapa partai dan dipimpin oleh Sabirin dari PSII cabang Bandung telah menyetujui pembentukan "Perhimpunan Partai Politik Kebangsaan Indonesia" (PPPKI) pada tanggal 17 Desember 1927. Anggota PPPKI terdiri dari: PNI (diwakili Ir. Sukarno, Mr. Iskaq, Mr. Sartono, Mr. Budiarto, dan Dr. Samsi), PSI (Dr. Sukiman dan Syahbudin Latief), BU (Kusumo Utoyo dan Sutopo Wonoboyo), Pasundan (Otto Subrata, Bakri Suryaatmaja, dan S. Senjaya), Serikat Sumatra (Parada Harahap, Dahlan Abdullah), Kaum Betawi (Moh. Husin Thamrin), dan *Indonesische Studieclub* (Suyono, Gondokusumo, dan Sunjoto). Sarekat Ambon dan Pesantren Minahasa tidak memasuki PPPKI, tetapi kemudian keanggotaan ditambah dengan Sarekat Madura, Tirtayasa (Perkumpulan orang-orang Banten), dan Perserikatan Celebes. PKKI dipimpin oleh suatu "Majelis Pertimbangan" yang terdiri dari ketua, penulis, bendahara, dan wakil-wakil dari partai-partai yang menjadi anggotanya dan suatu pengurus harian yang terdiri dari 2 orang. Pada tahun 1929 – 1930: Dr. Sutomo dari *Indonesische Studieclub* dan Ir. Anwari dari PNI. Tujuan dari PPPKI ialah untuk mencapai, kesamaan arah, aksi kebangsaan, memperkuatnya dengan memperbaiki organisasi, dengan kerja bersama antara anggotanya, dan menghindarkan perselisihan sesama anggotanya yang hanya akan melemahkan aksi kebangsaan saja. Di dalam PPPKI tidak akan diperundingkan asas partai yang menjadi anggotanya dan mempunyai paham yang berlainan misalnya agama dan non kooperasi. Keputusan yang telah diambil dengan suara

bulat mengikat semua partai anggota. Jika sesuatu hal tidak tercapai mufakat yang bulat, maka keputusan hanya dapat dijalankan atas nama partai yang menyetujui keputusan itu saja.

Berbeda dengan konsentrasi nasional sebelumnya, maka PPPKI semata-mata hanya terdiri dari organisasi organisasi bangsa Indonesia yang bersifat kebangsaan dan tidak termasuk di dalamnya perkumpulan campuran seperti *Indiche Partij* atau ISDP, PPPKI didirikan untuk waktu yang lama dan bersifat tetap dan berlainan misalnya dengan *Radicale Concentratie* tahun 1918 yang didirikan berhubung dengan tuntutan perubahan dalam susunan pemerintahan dan perluasan hak dari *Volksraad*. Akan tetapi setelah terbentuk, terlihat adanya beberapa kelemahan yang sungguh-sungguh di dalam PPPKI tersebut sehingga ini menyebabkan keluarnya salah satu anggotanya yang terpenting yaitu PSII, di samping terjadi kelemahan dari gerakannya. Kelemahan yang pertama ialah bahwa federasi itu mencakup perkumpulan yang berhaluan non koperasi maupun koperasi, sedangkan tiap keputusan justru memerlukan kebulatan suara (asas mufakat), sehingga musyawarah yang sehat dan kerja yang akan ada hasilnya tidak akan dapat banyak dicapai, oleh karena partai yang membangkang dapat mensabot suatu keputusan. Kelemahan yang kedua, ialah bahwa federasi itu terdiri dari perkumpulan politik, sosial, dan kultural, sedangkan perkumpulan pendidikan kebangsaan yang berpengaruh, seperti Taman Siswa, Muhammadiyah dan *Ksatrian Instituut*, tidak masuk di dalamnya PPPKI merupakan suatu pengelompokan yang terlalu lepas, tidak sengaja, dan tanpa sesuatu sistem. Kelemahan ketiga ialah pasal dalam anggaran dasarnya yang berbunyi bahwa PPPKI hanya menerima perkumpulan yang anggotanya terdiri dari orang Indonesia saja. Pasal ini telah dipakai oleh PSII sebagai alasan untuk ke luar dari federasi itu pada tanggal 28 Desember 1930, dengan menyatakan bahwa PSII yang berdasar Islam menerima juga orang-orang bukan bangsa Indonesia seperti Arab, Cina sebagai anggotanya, asalkan mereka beragama Islam. Tentu saja alasan ini hanyalah alasan yang dicari, sebab alasan yang sebenarnya ialah perselisihan di antara PSII dengan perkumpulan kebangsaan terutama dengan *Indonesische Studieclub* Surabaya yang bersikap netral terhadap agama. Pada waktu itu PSII menuntut agar kata "Kebangsaan" diganti atau dihapuskan. Selain itu PSII mengecam PPPKI yang telah mengirim telegram ucapan selamat kepada konggres Muhammadiyah pada

bulan Pebruari 1928 di Sala padahal Muhammadiyah telah dikenakan disiplin-partai oleh PSII.¹²⁷⁾

Konggres pertama PPPKI diadakan di Surabaya pada tanggal 30 Agustus – 2 September 1928 yang menerima mosi "dari rakyat untuk rakyat" untuk memperkokoh persatuan pergerakan. Anggota PPPKI tidak boleh menyalahkkan asas atau tujuan anggota lainnya, serta tidak boleh mempergunakan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan dan merugikan anggota lainnya, dan segala perselisihan antara sesama anggota haruslah diselesaikan dengan jalan perundingan.

Dalam konperensi PPPKI di Yogyakarta tanggal 29 – 30 Maret 1929 diambil keputusan untuk melancarkan aksi umum menentang pasal 153 bis dan ter, dan pasal 161 bis dari KUHP (tentang hasutan yang bersifat revolusioner dan ajakan mengadakan propaganda) di kota-kota penting di Jawa. Juga diputuskan untuk mendirikan Fonsds Nasional untuk membiayai propaganda di Indonesia dan menyokong sekolah kebangsaan. Kemudian diputuskan pula untuk mengangkat "Perhimpunan Indonesia" sebagai wakil (pengawal) pergerakan kebangsaan Indonesia di Eropa. Selanjutnya juga diberikan mandat kepada PI tanggal 2 April 1929 untuk mengadakan propaganda menentang pasal-pasal 153 bis dan ter dan pasal 161 bis KUHP di forum internasional PI diangkat sebagai "*Voorpost*" (posterdepan dari PPPKI di Eropa dengan "*beperkte Volmacht*" (kekuasaan yang terbatas). Dalam kongres PPPKI yang kedua di Sala tanggal 25 – 27 Desember 1929 diterima empat mosi "dari rakyat untuk rakyat": 1. Mengadakan suatu panitia untuk menyelidiki pergerakan sekerja yang semestinya harus dipimpin oleh suatu pusat (*Vakcentrale*), 2. Buruknya penahanan yang terlalu lama oleh polisi yang dilakukannya terhadap para pemimpin politik, 3. Tidak sahnya larangan atas beberapa golongan pegawai negeri di Jawa Barat dan semua anggota militer untuk menjadi anggota daripada beberapa partai nasional, 4. Keharusan memandang tiap orang yang tidak menghormati persatuan Indonesia menjadi "musuh Indonesia". Dalam kongres di Sala inilah terlihat benih perpecahan di dalam tubuh PPPKI oleh karena terjadi pertentangan yang sengit di antara PSII yang menuntut nama/kata "Kebangsaan" dalam nama PPPKI dihilangkan dengan partai nasional yang tetap mempertahankan dengan berpendapat bahwa kata "kebangsaan" itu bukan berarti "Nasional", tetapi "nasional" yang berarti tiap-tiap partai yang

bercita-cita nasional ialah yang bertujuan Indonesia Merdeka tercakup di dalam kata "kebangsaan" tersebut. Tetapi penjelasan ini tak diterima oleh wakil PSII yang lalu meninggalkan konggres. Dalam konggres tersebut PNI diwakili oleh Ir. Sukarno, Ir. Sartono, Ir. Anwari, Gatot Mangkupraja, dan Mr. Ali Sastroamijoyo, PBI diwakili Dr. Sutomo, Kaum Betawi diwakili Moh. Husni Thamrin, Budi Utomo diwakili R.T. Kusumo Utoyo dan Mr. Singih, *Sumatranen Bond* diwakili Dahlan, PSII diwakili Dr. Sukiman Wiryosanjoyo dan Driyowongso.¹²⁸⁾

Pada tahun 1932 yaitu setelah konggres Indonesia Raya tanggal 1 – 3 Januari 1932 orang mulai mengadakan reorganisasi dari federasi itu yang sejak bulan Mei 1931 nama "Permufakatan" diubah menjadi "Persatuan" sehingga menjadi "Persatuan Perhimpunan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia", untuk menunjukkan bahwa PPPKI bukan suatu federasi, tetapi hanya suatu perikatan yang lebih longgar. Ir. Sukarno diserahi menyusun rencana perubahan anggaran dasar PPPKI yang baru yang kemudian rencana reorganisasi ini disetujui oleh konperensi PPPKI bulan Mei 1933. Reorganisasi itu menetapkan: pertama, nama PPPKI diubah menjadi "Persatuan Perhimpunan Politik Kemerdekaan Indonesia", nama "Kebangsaan dihapuskan untuk memungkinkan diterimanya menjadi anggota perkumpulan seperti PSII. Pada mulanya Ir. Sukarno mengusulkan nama "Permufakatan Politik Pengejar Kemerdekaan Indonesia"). Konggres Indonesia Raya akan diadakan paling sedikit setahun sekali di dalam mana pekumpulan yang bukan anggota PPPKI bisa ikut serta dengan hak suara memberi advis yang kadang-kadang menentukan. PPPKI ditugaskan melaksanakan keputusan konggres tersebut. Perkumpulan politik yang mengutamakan politik Nusa dan Bangsa bisa diterima menjadi anggota, dan keputusan akan diambil menurut suara terbanyak, setiap anggota mempunyai satu suara, tetapi jumlah suara itu kelak dapat ditentukan menurut jumlah anggota daripada partai atau perkumpulan-perkumpulan yang menjadi anggota. Hal ini adalah salah satu keberatan yang diajukan oleh PSII yang menuntut bahwa suara dari anggota PPPKI disesuaikan dengan jumlah anggota dari masing-masing perkumpulan yang menjadi anggota. Akan tetapi ternyata bahwa PPPKI yang baru ini tidak dapat bergerak dengan leluasa, bahkan oleh karena tindakan pemerintah yang mengenakan larangan berapat (*beperkt vergader verbod*). Pada tahun 1934 kepada partai yang berasas radikal,

seperti Partindo dan PNI Baru. Hal ini menyebabkan bahwa Partindo yang menjadi anggota PPPKI tidak dapat bergerak dan menghentikan kegiatannya pada tahun 1935. Pada waktu yang bersamaan, PPPKI yang tidak mau mengeluarkan Partindo dari keanggotaannya, juga mengalami nasib yang serupa.¹²⁹⁾

D. POLITIK PEMERINTAH KOLONIAL TERHADAP PERGERAKAN NASIONAL

Peristiwa penangkapan dan pengadilan terhadap para pemimpin PNI telah terjadi pada masa akhir pemerintahan GGACD de Graeff (1926 – 1931) yang dianggap menganut politik etis. Salah satu tindakan de Graeff yang terakhir telah memberikan keringanan hukuman bagi Ir. Sukarno dari 4 tahun menjadi 2 tahun pada tanggal 4 September 1931, sebelum ia digantikan oleh GGBC de Jonge (1931 – 1936) yang lebih reaksioner dan lebih keras sikapnya terhadap kaum pergerakan kebangsaan. Di bawah pemerintahan de Jonge, gerakan non kooperasi mendapat penindasan yang paling keras. Larangan berkumpul dan berapat (*vergader verbod*) dikenakan kepada partai non kooperasi, terutama Partindo dan PNI Baru. Juga dilakukan pembatasan terhadap kemerdekaan pers, dan semakin banyak dilakukan hak istimewa (*exorbitante rechten*) dari Gubernur Jenderal untuk menghentikan rapat jika terdapat kata-kata yang dipandang bertentangan dengan kepentingan umum serta untuk mengasingkan (*interneering*) atau membuang (*verbannen*) siapa saja yang dipandang membahayakan ketertiban umum. Bukanlah hal yang kebetulan bahwa pada masa de Graeff yang dibuang ke Digul hanya orang-orang komunis yang ikut dalam pemberontakan tahun 1926 – 1927, tetapi masa de Jonge tidak hanya orang komunis yang dibuang Digul, melainkan juga tokoh dari Partindo, Permi, dan PNI Baru. Selanjutnya Pluvier menyatakan bahwa politik menindas yang kejam dari Gubernur Jenderal de Jonge adalah salah satu sebab menjadi lemahnya perjuangan politik bangsa Indonesia dan merupakan sebab utama daripada proses peninjauan kembali sikap (haluan) di kalangan pergerakan rakyat. Perhimpunan yang berhaluan non kooperasi mulai meninggalkan cara perjuangan mereka yang oleh pemerintah dicap sebagai perjuangan kaum ekstremis, dan menggantinya dengan taktik kooperasi dengan pemerintah. Peninjauan kembali haluan per-

gerakan ke arah perjuangan yang moderat jatuh bersamaan dengan agak berkurangnya tindakan keras dari pemerintah setelah de Jonge digantikan oleh Gubernur Jenderal yang baru. Di dalam hubungan ini, Deliar Noer dalam bukunya, menolak pendapat seperti tersebut di atas, dengan mengatakan bahwa perubahan haluan itu hanya terjadi pada beberapa pemimpin saja, seperti H.A. Salim (dari Barisan Penyedar PSII) dan Dr. Sukiman (dari PII), sedangkan pergerakan nasional pada umumnya tidak mengubah haluan dari non ke koperasi. Bahkan sebaliknya, kata Deliar Noer selanjutnya, tidak hanya bahwa kedua sayap pergerakan itu (non dan ke) tetap terdapat setelah tahun 1935, tetapi malahan ternyata bahwa partai yang berhaluan koperasi sedikit demi sedikit semakin tidak mempercayai pemerintah, sehingga semakin menganut haluan yang lebih radikal seperti terlihat dari tuntutan mereka yang semakin keras di dalam *Volksraad* bagi adanya "perubahan Perubahan Politik" yang tidak ditetapkan di dalam *Indische Staatsregeling*. Juga aksi GAPI yang dipimpin oleh Abikusno Cokrosuyoso (PSII yang berhaluan non-koperasi) dengan jelas menunjukkan semakin lebarnya jurang di antara pihak pergerakan dan pemerintah, sehingga sebagai akibatnya GAPI semakin bergerak ke arah non-koperasi daripada koperasi. ¹³⁰⁾

B A B IV

KEADAAN DI DAERAH DARI TAHUN 1928 – 1942

A. PENGARUH POLITIK PEMERINTAH HINDIA BELANDA ± 1930

1. Politik keras terhadap gerakan non-kooperasi

Cita-cita Indonesia Merdeka berkobar terus di kalangan pelajar Indonesia di luar negeri maupun di dalam negeri. Kaum pelajar di luar negeri yang tergabung dalam organisasi Perhimpunan Indonesia berjuang melalui majalahnya yang diberi nama "Indonesia Merdeka". Di kalangan pelajar di dalam negeri pun tidak mau ketinggalan, mereka membentuk *Studieclub* seperti *Indonesische studieclub* di Surabaya dan *Algemene studieclub* di Bandung. Di kota lainnya seperti Solo, Yogyakarta, Semarang, Jakarta dan Bogor juga berdiri *studieclub* sekalipun dalam bentuk kecil.

Peranan pelajar ini besar sekali dalam perjuangan politik Indonesia yang bertujuan Indonesia Merdeka bebas dari pengaruh penjajahan. Hal ini dapat dilihat dalam peranan Dr. Soetomo sebagai pendiri *Indonesische studieclub*, sebagai tokoh dalam Budi Utomo dan kelak sebagai pendiri Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Ir. Sukarno sebagai pendiri *Algemene Studieclub* yang kelak mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI). Begitu pula Moh. Hatta, St. Syahrir dan lain-lain pemuka pelajar Indonesia mulai sadar akan pentingnya persatuan bangsa Indonesia untuk menghadapi penjajah dan kesabaran untuk berjuang memajukan bangsa Indonesia baik di lapangan ekonomi, sosial dan kebudayaan. Kemiskinan dan kebodohan bangsa Indonesia sebagai akibat penjajahan Belanda harus dilenyapkan. Sementara itu di kalangan rakyat timbul perasaan tidak puas terhadap pemerintah Belanda, pemogokan dan pemberontakan terjadi di mana-mana. Kaum petani yang dirugikan oleh penguasa perkebunan asing memberontak, seperti di daerah Banyumas, Pekalongan, Kedu dan Boyolali.

Gubernur Jenderal de Graeff bersikap keras, pemberontakan dipadamkan, kemudian PKI dinyatakan sebagai partai terlarang, dan pemimpin PKI banyak yang melarikan diri ke luar negeri. Kurang lebih 4500 orang ditangkap dan di antaranya 823 orang di-

dibuang ke Digul di daerah Irian Jaya. Penangkapan berjalan terus menerus, tidak hanya golongan komunis saja, melainkan pemimpin nasional yang lainnya pun yang dianggap berbahaya bagi pemerintah dibuang juga ke Digul. Setelah peristiwa itu muncul partai politik baru, yaitu partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927, yang dipimpin oleh Ir. Sukarno dan kawan-kawan. Perbedaan kepentingan antara penjajah dan rakyat terjajah yang tak mungkin dipertemukan itu menyebabkan PNI tersikap non kooperasi terhadap pemerintah Hindia Belanda. Partai politik yang baru muncul itu merupakan suatu pertanda munculnya Nasionalisme yang rasional serta tuntutan atas pemerintahan sendiri bagi bangsa Indonesia lepas dari kekuasaan Belanda berdasarkan *selfhelp*. Sudah dengan sendirinya partai baru yang bersifat revolusioner ini cepat mendapatkan banyak pengikut. Masyarakat Belanda yang bertempat tinggal di Indonesia mulai khawatir terhadap perkembangan baru ini dan menuduh PNI sebagai partai yang ekstrim. Mereka mendirikan perkumpulan yang diberi nama *Vaderlandscheclub* untuk menghadapi kebangkitan rakyat Indonesia, dan perkumpulan ini bertujuan mempertahankan kekuasaan Belanda di Indonesia. Pemerintahan Belanda yang bertindak sebagai penjajah itu hakekatnya merupakan negara polisi (*politie staat*) di mana kebebasan dan kehidupan demokrasi rakyat dirusak dan dihalang-halangi. Barang siapa yang dianggap membahayakan pemerintah kolonial diancam dengan hukuman berat. *Exorbitante rechten* merupakan hak darurat istimewa atau wewenang istimewa untuk menangkap, menahan dan mengasingkan seseorang sekali pun ia tidak bersalah. Begitu juga PID. (*Politieke Inlichtingen Dienst*) atau polisi rahasia selalu mengawasi dan mengikuti jejak pemimpin pergerakan nasional. Namun demikian politik kekerasan ini tidak akan menghalang-halangi perjuangan rakyat, bahkan kesadaran akan cita-cita kemerdekaan lebih meningkat. Pemimpin rakyat pergi ke daerah-daerah untuk mengobarkan semangat perjuangan. Juga di kalangan pemuda Indonesia rela mengorbankan kepentingan daerahnya demi persatuan nasional. Kongres pemuda diadakan untuk pertama kali pada tahun 1926 dan yang kedua tahun 1928 yang terkenal dengan Sumpah Pemuda. Sementara itu keadaan Indonesia bertambah buruk sehubungan dengan adanya krisis ekonomi pada tahun 1930. Perekonomian Indonesia merosot sekali, banyak perusahaan

yang gulung tikar, jumlah penganggur meningkat yang semuanya ini menimbulkan beban bagi kehidupan bangsa Indonesia. Dalam bulan September 1931 Gubernur Jenderal de Graeff, yang terkenal menjalankan politik kerasnya digantikan oleh de Jonge. Sama dengan de Graeff, ia juga menjalankan politik keras, berkali-kali undang undang *exorbitant* dipergunakan untuk menangkap para pemimpin Indonesia. Sementara itu ada desas desus yang mengatakan bahwa rakyat akan memberontak dan karena itu Ir. Sukarno ditangkap pada tahun 1930 dan pada tahun 1934 dibuang ke Flores kemudian dipindahkan ke Bengkulu. Moh. Hatta dan St. Syahrif dibuang ke Digul kemudian dipindahkan ke Banda. Belanda memang khawatir kalau pemimpin pergerakan akan mempergunakan kesempatan dan menghasut rakyat, dan itulah sebabnya pemerintah mulai menindas partai-partai dan pemimpin rakyat. Pemerintah mengeluarkan aturan larangan bagi pegawai negeri menjadi anggota partai. Bila diperhatikan di kalangan partai politik terdapat perbedaan cara perjuangan yang ditempuh oleh gerakan non-koperasi seperti PNI, Partindo dan PNI-Baru, dengan gerakan koperasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam dan Parindra. Gerakan koperasi memilih cara perjuangan melalui *Volksraad*, sekalipun demikian gerakan koperasi ini hanya bersifat insidental.

2. *Undang-undang sekolah swasta.*

Pemimpin rakyat mulai sadar bahwa nasib bangsa Indonesia baru berubah kalau ada usaha untuk menghilangkan kemiskinan dan kebodohan, dan keadaan ini akan dapat diatasi melalui pendidikan

Sebenarnya di kalangan penduduk sudah mulai mengenal pendidikan, namun masih bersifat sederhana, yang diutamakan hanya pendidikan moral agama. Perhatian pemerintah Belanda untuk pendidikan hampir tidak ada, dan baru tahun 1848 didirikan sekolah desa, yang pertama di Jepara dan Pasuruan. Tahun 1893 sudah berdiri sebanyak 504 sekolah desa, karena tiap tahun selalu bertambah walaupun pertambahan sekolah ini lambat sekali bila dibanding dengan jumlah penduduk. Dalam tahun 1917 sudah berdiri sebanyak 4185 sekolah desa di Jawa - Madura, sedang di luar Jawa sebanyak 945 sekolah desa untuk rakyat yang berjumlah $\pm$ 50 juta. Politik pendidikan disesuaikan dengan politik penjajah, yang diutamakan bukan ilmu pengetahuan

saja melainkan juga mendidik orang untuk dapat bekerja bagi kepentingan Belanda. Di samping itu ada pula usaha pemerintah Belanda untuk menyebarkan bahasa dan kebudayaan Belanda melalui sekolah yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Tahun 1918 sudah berdiri 118 HIS, 14 MULO di antaranya 10 di Jawa dan 4 di luar Jawa, 1 sekolah kekhususan di Bogor, 1 sekolah Hakim (*Rechtschool*) OSVIA yang kemudian diganti menjadi MOSVIA untuk mendidik pegawai didirikan sebanyak enam buah, yaitu 3 di Jawa dan 3 di luar Jawa. Sekolah menengah Pertanian di Bogor, sekolah Kedokteran di Jakarta dan Surabaya, Sekolah Menengah Guru di Purworejo dan sekolah Guru juga didirikan. Ada juga usaha dari misi agama Katolik yang menyelenggarakan pendidikan seperti pastor van Lith di Muntilan mendirikan *Kweekschool* guna perluasan ajaran agama Katolik. Pada waktu itu mulai ada usaha dari kalangan pemimpin nasional untuk mendirikan sekolah swasta dengan menggunakan sistem Eropa. Tanggal 3 Juli 1922 Perguruan Taman Siswa didirikan oleh R.M. Suwardi Suryoningrat atau yang kemudian lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara yang berpusat di Yogyakarta. Waktu itu mulai disadari bahwa mendidik anak dengan jiwa kebangsaan Indonesia merupakan bagian penting dari pergerakan Indonesia. Pendidikan mulai dianggap sebagai dasar perjuangan untuk memperbaiki kehidupan rakyat, perkumpulan maupun partai politik mulai memasukkan pendidikan dalam programnya. Di Semarang didirikan sekolah Sarekat Islam oleh Tan Malaka, seorang tokoh Sarekat Islam yang kemudian dipecat dari partai dan kemudian dibuang oleh pemerintah ke negeri Belanda. Douwes Dekker mendirikan sekolah Ksatria yang berpusat di Bandung. Perguruan Rakyat juga didirikan oleh perkumpulan yang bergerak di lapangan pendidikan yang dipimpin oleh Mr. Sunarto dan A. Mononutu Welson pada tanggal 11 Desember 1928 di Jakarta dan di Semarang juga dibuka cabangnya. Berdirinya sekolah sekolah swasta ini merupakan suatu usaha ke arah pendidikan nasional sebagai reaksi terhadap usaha Belanda yang akan memasakan bahasa dan kebudayaan Belanda. Di samping itu sekolah swasta juga merupakan tempat pendidikan kader untuk melanjutkan perjuangan menuju cita-cita Indonesia merdeka. Pemerintah menganggap berdirinya sekolah swasta yang mendapat dukungan partai politik akan mengganggu ketenteraman. Oleh karena itu pemerintah pada tahun 1922

mengeluarkan peraturan untuk mengawasi sekolah swasta. Siapa yang akan mendirikan sekolah harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemerintah. Pada waktu hangatnya perjuangan politik dan krisis ekonomi, Gubernur Jenderal de Jonge mengeluarkan undang-undang sekolah liar *Wilde Scholen Ordonnantie*) tanggal 1 Oktober 1932. Isinya menyatakan bahwa ijin untuk mengajar di sekolah swasta dapat ditolak apabila atas dasar dugaan pemerintah pengajaran yang akan diberikan itu, akan membahayakan. Tindakan ini merupakan tindakan preventif untuk mencegah perkembangan nasionalisme melalui pendidikan. *Volksraad* sebenarnya telah menolak rancangan undang-undang ini, namun dikeluarkan juga oleh Gubernur Jenderal sebagai undang-undang. Oleh sebab itu banyak pemimpin rakyat menganggap bahwa undang-undang itu bersifat diktatoris. Anehnya sekalipun rancangan undang-undang tersebut telah ditolak oleh *Volksraad*, namun tidak ada seorang pun dari anggotanya yang menentang undang-undang tersebut. Taman Siswa merasa bahwa undang-undang ini ditujukan untuk menahan perkembangan Taman Siswa, dan itulah sebabnya Ki Hajar Dewantara menentang undang-undang sekolah liar. Ia mengirimkan kawat protes kepada Gubernur Jenderal menolak undang-undang tersebut dan mengancam akan melakukan pembangkangan. Persatuan Taman Siswa segera mengadakan rapat di Tosari pada tanggal 15 - 16 Oktober 1932 dan pada 29 - 30 Oktober di Yogyakarta untuk menolak undang-undang sekolah liar dan menentukan sikap bersama. Rapat memutuskan mendukung sepenuhnya kebijaksanaan Ki Hajar Dewantara, dan pembangkangan dilaksanakan oleh para pamong Taman Siswa secara tertib. Reaksi rakyat besar sekali, banyak yang mendukung perjuangan Ki Hajar Dewantara, dan juga kaum utama ikut membantu. Di Minangkabau Haji Abdulkarim pemimpin kaum ulama, menuduh pemerintah bahwa undang-undang sekolah liar merupakan usaha pemerintah untuk merintangi kepentingan agama Islam demi untuk agama Kristen. Keadaan bertambah gawat sehingga akhirnya pemerintah mengadakan pertemuan antara Kiwiwet de Jonge sebagai wakil pemerintah dengan Ki Hajar Dewantara. Pertemuan ini tidak membawa hasil karena Ki Hajar Dewantara tetap pada pendiriannya. Untuk mengembalikan ketenteraman akhirnya pemerintah membekukan undang-undang sekolah liar dan 8 bulan kemudian undang-undang tersebut dicabut.

Dengan dicabutnya undang-undang ini merupakan suatu kemenangan rakyat dalam perjuangan ke arah pendidikan nasional.

B. DEPRESI EKONOMI DI DAERAH

Sejak tahun 1929 - 1933 hampir semua negara di dunia mengalami krisis yang disebabkan oleh depresi ekonomi. Krisis ini ditandai dengan produksi yang berlebihan sedangkan banyak negara mengalami kehancuran dan kemiskinan sebagai akibat Perang Dunia I. Banyak perusahaan mengalami bangkrut yang mengakibatkan bertambahnya pengangguran. Indonesia yang merupakan daerah jajahan Belanda juga tidak luput dari pengaruh ini apalagi sebelumnya perekonomian Indonesia sangat tergantung kepada Belanda. Sistem monopoli telah lama dilepaskan dan diganti dengan sistem terbuka. Tanah yang subur dan penduduk yang dapat merupakan sumber tenaga yang murah dan menarik perhatian kaum modal swasta untuk ikut berusaha di Indonesia. Terhadap perekonomian Indonesia pemerintah terlalu mengutamakan produksi pertanian untuk pasar dunia, sedangkan industri dan lain-lain yang diperlukan untuk melengkapi kebutuhan ekonomi sesuatu negara tidak mendapat cukup perhatian. Indonesia tidak mendapat kesempatan usaha dalam lapangan pertanian untuk pasar dunia, sekalipun peranan sebagian penduduk Indonesia dalam produksi itu besar juga. Bangsa Indonesia hanya mengerjakan pertanian pangan untuk perdagangan pasar dan kerajinan kecil-kecilan. Semua lapangan perekonomian yang penting berada di tangan pengusaha asing. Keadaan perekonomian menggambarkan tidak adanya keseimbangan, di mana produksi pertanian terlalu diutamakan, sedangkan industri kurang mendapat perhatian dan hal itu akan mudah terpengaruh oleh harga pasaran dunia. Pasaran hasil bumi dan hasil tambang yang diekspor oleh Indonesia ialah ke Eropa, yang sesudah Perang Dunia I pasaran Eropa sangat lesu. Keadaan ini berpengaruh sekali terhadap barang ekspor Indonesia, yang menyebabkan ekspor menurun. Pemerintah berusaha untuk mengadakan keseimbangan antara ekspor dan impor dengan menaikkan produksi ekspor. Perkebunan diperluas namun usaha ini mengalami kegagalan, karena menambah biaya eksploitasi apalagi semenjak harga barang ekspor dan

impor jatuh, sehingga harga barang ekspor mengalami kemerosotan yang lebih parah lagi. Padahal kepentingan untuk hidup rakyat sangat tergantung dari barang impor. Banyak perusahaan perkebunan tidak dapat lagi bertahan menghadapi kemerosotan ini, dan banyak pula perusahaan yang tutup, atau mengurangi produksi, pengurangan tenaga buruh, penekanan upah dan lain-lain. Usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pemerintah Hindia Belanda berusaha mengadakan penghematan agar selalu ada keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan uang. Jalan yang ditempuh adalah usaha yang paling mudah tanpa memperhatikan penderitaan rakyat. Seperti mengurangi gaji pegawai, mengurangi biaya pendidikan dan kesehatan

Sudah barang tentu rakyat Indonesia lah yang mengalami akibat langsung dari tindakan pemerintah ini. Banyak pegawai Indonesia yang diberhentikan atau dikurangi gajinya. Penghematan biaya pendidikan mengakibatkan kerugian bagi anak-anak didik Indonesia karena banyak pula guru yang diberhentikan. Perusahaan yang ditutup ataupun yang menciutkan usahanya, memberhentikan buruh-buruhnya, sehingga menambah pengangguran. Pemecatan secara besar-besaran buruh Indonesia dari berbagai perusahaan dan perkebunan menambah beban rakyat, karena buruh-buruh yang dipecat itu kembali ke desanya masing-masing mengikuti sanak saudaranya. Rasionalisasi perusahaan secara besar-besaran tahun 1930, sebagian besar dari buruh yang dipecat berasal dari daerah Jawa Tengah. Dapat dibayangkan keadaan ekonomi di desa-desa mengalami kegoncangan dan kekurangan makanan terjadi di mana-mana. Perluasan pengusahaan tanah sawah yang subur tidak memungkinkan karena sudah dikuasai perusahaan perkebunan. Keadaan kehidupan yang begitu sulit sudah barang tentu mendorong meningkatkannya kerusuhan dan kejahatan. Rakyat sukar mencari uang sedangkan kewajiban membayar pajak masih tetap. Mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan upah yang rendah untuk mempertahankan hidupnya. Sudah barang tentu keadaan seperti ini menyuburkan sistem ijon, dan rumah gadai menjadi ramai. Dengan sendirinya bagi mereka yang tidak dapat bertahan mudah terjerumus ke dalam perbuatan kriminal. Bahaya kelaparan terjadi di mana-mana, seperti di daerah Wonosari dan Bojonegoro. Kerusuhan terjadi di desa-desa pedalaman di dae-

rah Merapi, Merbabu, Sundoro, dan Sumbing. Juga di pedalaman karesidenan Pekalongan, petani desa Pangkah (Tegal) memberontak pada tahun 1934. Sikap gerakan politik dalam menghadapi krisis makin keras terhadap pemerintah, begitu pula di kalangan organisasi buruh dan pegawai baik yang swasta maupun yang pemerintah. Persatuan *Vakbonden* Pegawai Negeri (PVPN) yang merupakan gabungan organisasi pegawai negeri di bawah pimpinan R.P. Suroso menentang politik penghematan dan yang sangat ditentang ialah peraturan mengenai potongan gaji pegawai. Mereka kemudian juga mengumpulkan sumbangan (*fonds*) untuk membantu meringankan beban hidup para penganggur. Dalam konggresnya di Semarang pada tahun 1936 PVPN. Menentang gaji kedaerahan yang dipandangnya kurang adil. Begitu juga dalam konggresnya di Sala pada tahun 1937 PVPN. menentang peraturan gaji BBL 1938 sebagai pengganti peraturan gaji 1934 yang hakekatnya membedakan gaji untuk kulit berwarna dan perbedaan gaji pokok untuk pegawai daerah.

Demikian juga para guru yang tergabung dalam *Volkssonderwijzersbond* atau Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) mengadakan aksinya menentang pemerintah. PGHB juga menentang pengusutan anggaran pendidikan, karena akibat peraturan itu banyak guru terutama guru bantu yang menjadi korban pemecatan pada tahun 1931. Aksi ini mendapat dukungan dari Budi Utomo, Pasundan, Sarekat Sumatra, Sarekat Ambon, Kaum Betawi dan persatuan Celebes. PGHB berjuang terus sambil menyempurnakan organisasinya. Tahun 1933 (PGHB menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) yang merupakan perkumpulan dari organisasi yang terdiri dari PGB (*Persatuan Guru Bantu*), PGAS (*Persatuan Guru Ambachtschool*) VOB (*Volksonderwijzers Bond*). OKSB (*Oud Kweek Scholieren Bond*), 'PNS (*Persatuan Normaal School*) dan HKSB (*Hogere Kweek Scholieren Bond*) Tahun 1936 Persatuan Guru Indonesia menentang usaha pemerintah Belanda yang akan memindahkan urusan pengajaran dari pusat ke daerah daerah. Usaha ini dianggap sebagai kemunduran dalam pendidikan mengingat kurangnya keuangan daerah. PPPH atau Persatuan Pegawai Pegadaian Hindia menentang pemberhentian 800 pegawai. Organisasi serdadu laut yang bekerja dalam kapal *De Zeven Provinciën* tahun 1932 memberontak menentang tindakan pemerintah yang ti-

dak adil dan pemecatan terhadap buruh kapal. Di samping itu organisasi buruh partikelir yang dibina oleh partai politik ikut membantu menentang pemerintah. CPBI (Central Perkumpulan Buruh Indonesia) yang dibina PNI dan CSDI. (Central Sarekat Sekerja Indonesia) yang dibina PBI berusaha membantu meringankan beban hidup rakyat dengan mendirikan koperasi dan memberi dana bantuan kepada para penganggur. Partai Sarekat Islam dalam menghadapi krisis mengadakan gerakan swadesi dan menentang pemerintah. Menghadapi situasi genting ini pemerintah bersikap lebih diktatoris dengan mengeluarkan larangan mogok, larangan bagi pegawai negeri menjadi anggota partai politik, dan kepada pegawai negeri yang akan menjadi pemimpin organisasi pegawai negeri harus dengan persetujuan pemerintah. Terhadap partai politik, pemerintah mengadakan pengawasan keras. Partai politik yang dianggap membahayakan dikenakan undang-undang Eksorbitan (*Exorbitanterechten*) dan PID dikerahkan untuk mengawasi gerakan politik. Saat itu partai politik giat mengadakan gerakan menentang pemerintah dengan mengadakan rapat propaganda yang diselenggarakan di Purworejo, Magelang, Cilacap, Kebumen, Ambarawa, Semarang, Karanganyar dan Kutoarjo yang selalu mendapat gangguan PID. Pemerintah benar-benar khawatir kalau rakyat dapat dihasut untuk memberontak, dan oleh karena itu pemerintah mengadakan pengeledahan terhadap pemimpin nasional dan banyak dari mereka itu yang ditangkap seperti: Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Sutan Syahrif dan lain-lain. Tahun 1936 keadaan mulai berubah karena pemerintah mulai dapat menguasai krisis ekonomi. Keadaan ini disebabkan karena produksi pertanian Indonesia mulai dibutuhkan bagi dalam pasaran Eropa yang mulai memerlukan bahan mentah guna menghadapi situasi Eropa yang mulai tegang dengan munculnya ancaman Nazi Jerman. Negara Eropa mulai mempersiapkan perang dan suasana ini sangat menguntungkan produksi Indonesia di pasaran dunia Tahun 1936 pemerintah mengadakan devaluasi rupiah sehingga biaya penghidupan naik kira-kira 20%. Pegawai negeri mulai diperhatikan, gajinya dinaikkan, namun nasib buruh tetap menyedihkan karena gajinya belum diatur menurut peraturan dan belum ada jaminan sosial yang memadai. Gaji buruh masih tetap rendah, sedangkan pengusaha tetap mendapat keuntungan yang cukup banyak. Demikianlah depresi

ekonomi yang menyebabkan krisis ini menyebabkan bertambahnya penderitaan rakyat Indonesia yang sudah miskin akibat penjajahan, sedangkan negeri Belanda tetap mendapat keuntungan karena kekayaan bumi Indonesia mengalir terus ke negeri Belanda.

C. INTERAKSI TERHADAP KEPARTAIAN/ORGANISASI

1. PNI – Baru

Pada tanggal 4 Juli 1927 atas inisiatif *Algemeene Studie Club* didirikan Partai Nasional Indonesia, dengan pemimpinnya antara lain Ir. Sukarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Iskaz Cokrohadisuryo, Mr. Budiarto dan Mr. Sunario. PNI sebagai partai politik baru, berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dengan didasarkan atas azas *selfhelp* atau percaya pada kekuatan diri sendiri, yang berarti semua perjuangan untuk memperbaiki kehidupan politik, ekonomi dan sosial dilaksanakan dengan kekuatan diri sendiri dan melalui persatuan nasional cita-cita perjuangan dapat dicapai. Karena adanya perbedaan kepentingan antara penjajah dan rakyat terjajah, maka PNI mengambil sikap non kooperasi. Oleh karena itu PNI tidak mau ikut dalam *Volksraad* yang diadakan oleh pemerintah. Dalam waktu yang singkat PNI mendapat pengikut yang cukup banyak. Cita-cita perjuangan dan ajaran nasionalisme disebar-luaskan melalui pendidikan kader pemimpin yang diadakan baik di pusat maupun di daerah-daerah, mendirikan sekolah, mendirikan kooperasi untuk membantu kaum tani, pedagang kecil buruh dan pegawai rendahan. Cita-cita persatuan nasional dilaksanakan dengan membentuk "Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia" disingkat PPPKI pada bulan Desember 1927 dengan anggotanya PNI, PSII, Budi Utomo, Pasundan, *Sumatranen Bond*, Kaum Betawi, dan *studieclub*. Gerakan propaganda digiatkan baik secara lisan maupun tulisan. Rapat propaganda diadakan di daerah-daerah dan selalu mendapat sambutan hangat dari rakyat. PNI juga menerbitkan surat kabar "Banteng Priangan" di Bandung dan "Persatuan Indonesia" di Jakarta. Di daerah-daerah juga didirikan cabang-cabangnya. Di Semarang PNI dipimpin oleh Jatmika, Moh. Suprani, Sumardi, Kadusman, Supardi dan Atmosantoso. Rapat umum diadakan di Semarang yang dihadiri oleh rakyat yang banyak sekali jum-

lahnya sambil menyerukan "Indonesia Merdeka", juga dikibarkan bendera merah putih. Di Pekalongan PNI dipimpin oleh Kromolawi dimana ia menerbitkan surat kabar diberi nama "Berjoang Oentoek Merdeka" yang disingkat BOM. Sudah dengan sendirinya Gubernur Jenderal Cemas dan khawatir melihat perkembangan PNI dengan pesat itu. Di dalam pidatonya dihadapkan anggota *Volksraad*, Gubernur Jenderal mengingatkan secara halus terhadap bahaya nasionalisme yang ekstrim dan sikap non koperasi yang bersifat memusuhi pemerintah. PID atau polisi bagian politik yang merupakan polisi rahasia disebar ke mana-mana untuk mengawasi pemimpin nasional dan rapat propaganda. Di kalangan masyarakat belanda juga didirikan organisasi *Vaderlandsche Club* (VC) yang merupakan organisasi tandingan terhadap gerakan nasional. *Vaderlandsche Club* mendesak pemerintah agar bertindak tegas terhadap PNI. Pemerintah mengeluarkan larangan bagi pegawai pemerintah, polisi, dan anggota militer KNIL untuk menjadi anggota partai. Sementara itu tersebar desas-desus bahwa PNI akan memberontak pada tahun 1930. Kemudian pemerintah memerintahkan penangkapan dan penggeledahan terhadap pemimpin nasional. Ir. Sukarno ditangkap di Yogyakarta lalu dibawa ke Bandung begitu pula kawan-kawannya, seperti R. Gatotmangukupraja, Maskun Sumadireja dan Supriadinata. Mereka diajukan ke pengadilan Bandung dan pada tanggal 22 Desember 1930 dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan kolonial. Tanggal 25 April 1931 dalam konggres luar biasa yang diadakan di Jakarta, Mr. Sartono membubarkan PNI karena menganggap keadaan memaksa. Sesudah pembubaran PNI terjadi perpecahan di kalangan anggotanya, banyak di antaranya mereka mencela tindakan Mr. Sartono mendirikan partai baru pada bulan Desember 1931 di Yogyakarta dengan nama Pendidikan Nasional Indonesia atau lebih dikenal PNI - Baru. Pemimpin-pemimpinnya antara lain Moh. Hatta dan St. Syahrir. Tujuan partai baru ini ialah Indonesia Merdeka berasaskan kedaulatan rakyat, demokrasi dalam politik dan ekonomi, mengajukan kesejahteraan rakyat, pendidikan dan lain-lain, dan sikapnya terhadap pemerintah ialah non koperasi. Rapat propaganda yang akan diselenggarakan digagalkan oleh polisi rahasia Belanda. Tahun 1934 3 orang pemimpin PNI baru ditangkap, kemudian semua kegiatan dialihkan ke Semarang. Pemimpin-pemimpinnya Kas-

bun, Sumardi, Dawud, Sa'an, Harjasumarta, Marpandi, Yahya, Amat Yasin Pasmodikarno dan Surowinoto. Di kalangan pemuda dibentuk "Suluh Pemuda" yang dipimpin oleh: Subanu, Panut, Sutarman dan lain-lain. Pada tahun 1935 juga dibentuk pengurus-pengurus besar PNI Baru namun tidak lama kemudian mereka pun ditangkap oleh polisi kolonial. Mengingat adanya larangan berkumpul, majalah dan surat kabar menjadi penting artinya, begitu juga kursus kader. Sekalipun banyak pemimpin yang ditangkap, namun banyak pula anggotanya yang melanjutkan perjuangan partai dengan cara apa saja yang dapat ditempuh, karena tidak mungkin lagi beraksi dan setiap saat siap sedia menjalankan aksi-aksi baru.

2. *Partai Indonesia (Partindo).*

Partai Indonesia didirikan oleh Mr. Sartono, tujuannya ialah Indonesia Merdeka, demokrasi dan kemakmuran rakyat. Perjuangannya bersandar atas kekuatan sendiri (*selfhelp*). Pengikutnya masih cukup banyak terutama dari anggota PNI lama. Ketika Ir. Sukarno di bebaskan dari penjara tahun 1932 ia menjumpai partainya pecah menjadi dua, yaitu PNI - Baru dan Partindo. Ir. Sukarno memilih Partindo, dan kemudian ia diangkat menjadi ketua Partindo. Tidak lama kemudian Ir. Sukarno ditangkap lagi dan diasingkan pada awal tahun 1934 ke Flores. Sejak itu Partindo mengalami hambatan lagi dalam perjuangan sehingga akhirnya dalam pertengahan Nopember 1936 Partindo dibubarkan oleh Mr. Sartono, sekalipun tidak mendapat persetujuan anggota seluruhnya. Sebagian besar anggotanya di Jawa Tengah terutama di Yogyakarta dan Semarang merasa tidak puas atas tindakan Mr. Sartono. Partindo Semarang dengan pimpinannya antara lain: S. Cipto, Atmosantoso, Wara Reksokusumo dan lain-lain, berusaha mempertahankan partainya dengan membentuk Komite Pertahanan Partai Indonesia, dengan maksud mempertahankan kelangsungan hidup partindo, tetapi tidak berhasil. Kemudian di Semarang dibentuk Perpersingkatan Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia dengan pimpinan: Cipto Laso, Sutomo Jauhar Arifin, Siti Mulyono dan lain-lain, yang merupakan simpatisan Partindo.

3. *Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)*

Sejak berdirinya Sarekat Dagang Islam pada tahun 1911

oleh Haji Samanhudi sampai berdirinya Sarekat Islam pada tanggal 12 September 1912 yang dipimpin oleh H. Oemar Said Cokroaminoto hanya bergerak atas dasar pertimbangan ekonomi dan keagamaan saja. Namun sejak konggresnya yang pertama pada bulan Juni 1916, Sarekat Islam telah menunjukkan corak aliran politik religius nasional. Semula Sarekat Islam sebagai kesatuan organisasi belum mendapat pengakuan badan hukum oleh pemerintah. Hanya cabang-cabangnya yang diakui sebagai badan hukum, tetapi sejak tanggal 18 Maret 1916 pemerintah telah memberi pengakuan kepada pusat Sarekat Islam sebagai badan hukum, sehingga terbentuklah Central Sarekat Islam dengan pemimpinnya Umar Said Cokroaminoto, Agus Salim, Abdul Muis, Haji Gunawan Wondoamiseno, Sosrokardono, Suryopranoto, Alimin Prawirodirejo, dan Haji Samanhudi diangkat sebagai ketua kehormatan. Ketika *Volksraad* dibuka oleh Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum pada tanggal 18 Mei 1918, Cokroaminoto dan Abdul Muis diterima sebagai anggota *Volksraad*. Dengan demikian SI bekerja sama dengan pemerintah atau bersikap nasionalis kooperatif. Sekalipun demikian SI sebagai organisasi politik dari kalangan rakyat tetap memperjuangkan kepentingan rakyat baik melalui *Volksraad* ataupun di luar *Volksraad* SI yang mendapat pengikut banyak itu tidak luput dari pengaruh luar, terutama pengaruh golongan sosialis, sehingga SI pecah menjadi dua kelompok. Kelompok Cokroaminoto dan H. Agus Salim yang berhaluan sosialisme Islam berkedudukan di Yogyakarta dan sekelompok Semaun yang berhaluan Komunis berkedudukan di Semarang. Pada tahun 1923 SI berhasil mengadakan pembersihan dari pengaruh komunis, dan kelompok Semaun dikeluarkan dari SI dan sejak itu pula SI mengubah namanya menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia.

Partai Sarekat Islam Indonesia ini tidak luput dari pengaruh perubahan jaman "berupa penyesuaian sikap terhadap perkembangan iklim politik yang meliputi tanah air. Tahun 1927 PSII menjadi anggota PPPKI, bersama-sama dengan anggota lainnya seperti PNI, Pesundan, *Studieclub*, Sarekat Sumatra, Sarekat Madura, Kaum Betawi. Saat itu pula PSII mengubah sikapnya terhadap pemerintah menjadi non koperasi, tetapi juga memberi kebebasan kepada anggota-anggota PSII untuk tetap menjadi anggota *Volksraad*. Di dalam menghadapi krisis ekonomi,

PSII memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan menentang usaha pemerintah untuk mengurangi gaji, menentang pemberhentian buruh dan pegawai. Kepada penduduk dianjurkan memakai barang-barang kerajinan sendiri dan usaha mendirikan koperasi. Tahun 1932 PSII ikut menentang undang-undang sekolah liar. Seperti halnya Partai lainnya, PSII juga dikenakan aturan pembatasan rapat dan pegawai negeri dilarang menjadi anggota partai politik. Akibat perbedaan pandangan politik antara Cokroaminoto dan Agus Salim dengan Dr. Sukiman dan Suryopranoto mengenai sikap partai terhadap pemerintah, Dr. Sukiman memisahkan diri dari PSII dan mendirikan partai baru yang dinamai Partai Islam Indonesia (PARII) berkedudukan di Yogyakarta. Tahun 1937 partai itu bersatu lagi dengan PSII dan pemimpinnya seperti Dr. Sukiman, Wali Al Fatah dan lain-lain masuk kembali menjadi anggota PSII. Tetapi sekalipun demikian perpecahan masih tetap ada, lebih-lebih pemimpin dari PII tidak lagi mendapat tempat dan akhirnya mereka itu mendirikan partai baru lagi di Solo yaitu PII singkatan dari Partai Islam Indonesia dengan pimpinan Dr. Sukiman, Wiwoho, K. B. Hadikusumo, Wali Al Fatah dan lain-lain. Di samping itu Agus Salim yang terkena disiplin partai mendirikan Barisan Penyedar PSII yang bertujuan hendak menyadarkan pimpinan PSII atas perubahan jaman, sehingga saat itu PSII pecah menjadi tiga yaitu PSII, PII dan Barisan Penyedar. Sementara keadaan persiapan menjelang Perang Dunia II, menahan kemajuan gerakan politik yang lebih lanjut.

4. *Parindra atau Partai Indonesia Raya.*

Budi Utomo yang merupakan organisasi pertama di Indonesia yang disusun secara modern masih sanggup bergerak terus dalam usahanya mencapai cita-citanya. Sekalipun semula hanya bergerak di lapangan ekonomi dan sosial, tahun 1927 Budi Utomo dapat menyesuaikan dengan perjuangan partai lainnya dan sejak itulah Budi Utomo mulai terjun menjadi partai politik, dengan menganut aliran koperasi; Yogyakarta dan Solo menjadi pusat kegiatan Budi Utomo.

Tahun 1935 dibentuk badan persatuan yang merupakan fusi antara Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) menjadi Partai Indonesia Raya disingkat Parindra. PBI sendiri ber-

sejak tahun 1931 di Surabaya, dari *stucieclub* di Surabaya yang mengubah namanya menjadi Persatuan Bangsa Indonesia, pemimpinnya ialah Dr. Soetomo, seorang pemimpin yang mendirikan Budi Utomo. Parindra bertujuan: memperkokoh persatuan, aksi politik untuk mencapai pemerintahan yang didasarkan atas demokrasi dan nasionalisme dan memajukan kemakmuran serta pendidikan rakyat, yang dirumuskan dalam semboyan "Mencapai Indonesia Mulia". Sikap Parindra terhadap pemerintah ialah kooperasi atas dasar kebutuhan partai yang berarti tidak selamanya harus mengikuti politik lunak terhadap pemerintah, namun hal-hal yang sangat merugikan rakyat mendapat perhatian sepenuhnya dari Parindra.

Banyak perkumpulan lain yang meleburkan diri ke dalam Parindra antara lain; Sarekat Sumatra dan Sarekat Selebes.

Setelah Dr. Sutomo meninggal tahun 1938, pimpinan dipegang oleh KRMH Wiryaningrat, yang meningkatkan usahanya dilapangan sosial antara lain:

- a. memperkecil jumlah penganggur.
- b. menuntut diadakannya undang-undang sosial.
- c. transmigrasi.
- d. perbaikan justisi.

Parindra juga berjuang di dalam *Volksraad* untuk kepentingan rakyat. Di Semarang Parindra menunjukkan juga kegiatannya dalam masyarakat, terutama menolong perbaikan ekonomi rakyat dengan mendirikan koperasi. Pemimpinnya ialah: Sudewo, Notowijaya, Ruslani dan Gitosiryono.

5. *Petisi Sutarjo.*

Sutarjo Kartohadikusumo, ketua dari persatuan pegawai Bestuur Bumiputera, yang juga menjadi anggota *Volksraad*, sebagai wakil PPBB mengajukan usul petisi kepada pemerintah Belanda dan petisi ini diusulkan oleh Sutarjo di luar dari PPBB, oleh karena itu dikenal Petisi Sutarjo sesuai dengan nama yang mengusulkannya. Usul ini didukung oleh Ratulangi, Kasimo, Datuk Tumenggung, Ko Kwat Tiong, dan Alatas. Kemudian usul dikirim kepada pemerintah, Ratu dan Parlemen (*Staten Generaal*) di negeri Belanda pada tanggal 15 Juli 1936. Isi Petisi ini didasarkan atas pasal 1 UUD kerajaan Belanda, antara lain sebagai berikut:

- a. permohonan diadakan permusyawaratan antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda.
- b. memberi pemerintahan yang berdiri sendiri kepada Indonesia dalam batas-batas pasal 1 KUD kerajaan Belanda.
- c. pemberian dilaksanakannya dalam waktu 10 tahun atau dalam waktu yang akan ditetapkan sendiri oleh sidang permusyawaratan.

Usul, Petisi Sutarjo ini mendapat sambutan luas di kalangan masyarakat, baik dari kalangan Indonesia maupun kalangan Belanda sendiri. Dalam garis besarnya Sutarjo tidak mengusulkan pemisahan pemerintahan antara Indonesia dan Kerajaan Belanda, karena kedudukan kedua negara diatur dalam pasal 1 UUD, kerajaan Belanda. Tanggal 17 September 1936 mulai dibicarakan dalam sidang *Volksraad* dan setelah melalui perdebatan diadakan pemungutan suara yang menunjukkan perbandingan 26 menerima dan 20 menolak, sehingga dengan demikian petisi diterima oleh *Volksraad* tanggal 29 September 1936, kemudian petisi dikirim oleh ketua *Voksraad* kepada Ratu Belanda. Sementara itu Petisi Sutarjo menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat Mereka yang setuju mendirikan Central Comite Petisi Sutarjo (CCPS) untuk memperjuangkan Petisi Sutarjo, sedangkan di daerah-daerah didirikan Comite Petisi Sutarjo. Supaya mendapat sokongan dari beberapa partai, CCPS mengadakan rapat dengan mengundang wakil Parindra, Gerindo, Pasundan, Persatuan Arab Indonesia, Persatuan Minahasa, Perkumpulan Politik Katolik di Indonesia, PSII dan organisasi lainnya serta pemimpin yang menyokong petisi. PSII, Gerindo, Parindra dan PNI (Baru) menolak petisi, karena beranggapan pada dasarnya Petisi Sutarjo bertentangan dengan cita-cita bangsa Indonesia ialah Indonesia Merdeka. Sukarjo Wiryopranoto anggota *Volksraad* dari Fraksi nasional menolak petisi dan memperingatkan bahwa janji-janji pemerintah Belanda seperti *November Belofte* dan *Indische Staatregeling* tidak pernah dilaksanakan sebagai mana mestihya. Ia menganggap bahwa Petisi Sutarjo hanya akan melemahkan bahkan mematikan cita-cita Indonesia Merdeka. Akhirnya tanggal 16 Nopember 1938 Petisi Sutarjo yang telah diajukan oleh *Volksraad* di tolak oleh Ratu Belanda dengan alasan bahwa bangsa Indonesia belum matang untuk memikul tanggungjawab pemerintahan sendiri. Dengan ditolakny Petisi Sutarjo maka Central Comite Petisi, Sutarjo menyesali atas peno-

lakan petisi, kemudian mengajak para pemimpin nasional untuk menentukan sikap bersama. "Perasaan kecewa serta tidak puas terhadap pemerintah Belanda meluas di kalangan masyarakat. Pada tanggal 21 Mei 1939 diadakan rapat panitia persiapan pembentukan badan konsentrasi di gedung permufakatan di Jakarta dihadiri oleh antara lain: Thamrin, Sukarjo Wiryopranoto (Parindra), Atik Suardi, S. Suradireja, Ukar Bratakusuma (Pasundan) Senduk, Ratulangi (Persatuan Minahasa), Abikusumo Cokrosuroso, Syahbudin Latif, Moh. Safii (PSII) Ak Gani, Amir Syarifudin, Sanusi Pane, Wilopo (Gerindo), Kyai Mansur, Wiwoho (PII). Dalam rapat itu lahirlah konsentrasi nasional yang bernama Gabungan Politik Indonesia yang disingkat GAPI, dengan tujuan:

- a. menganjurkan kerjasama politik kepada semua partai politik terutama tuntutan dalam hak menentukan nasib sendiri, persatuan bangsa Indonesia atas dasar demokrasi dalam politik, memperbaiki kehidupan ekonomi dan sosial.
- b. menyelenggarakan konggres Indonesia untuk membina persatuan bangsa.

6. Aksi Indonesia Berparlemen.

Penolakan petisi Sutarjo menimbulkan kekecewaan di kalangan rakyat terhadap pemerintah Belanda. *Volksraad* dianggap sebagai alat pemerintah Belanda yang tidak mewakili kepentingan rakyat. Rakyat menuntut pembentukan parlemen yang wajar yang mewakili suara rakyat dan tuntutan ini dilancarkan oleh GAPI, yang dikenal dengan "Aksi Indonesia Berparlemen" menurut ketetapan hasil rapatnya tanggal 4 Juli 1939. Untuk memperjuangkan agar tuntutan Indonesia berparlemen ini berhasil, maka di daerah-daerah didirikan Komite Parlemen Indonesia. Kemudian GAPI memprakarsai Konggres Rakyat Indonesia tanggal 23 – 25 Desember 1939, yang berlangsung di jalan Kenari Jakarta dengan tujuan untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan bangsa demi suksesnya tuntutan "Indonesia Berparlemen". Konggres mengeluarkan suatu manifest yang berisi tuntutan Indonesia Berparlemen dan juga ditetapkan pula bendera Merah Putih, bahasa Indonesia dan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Untuk menampung hal-hal yang berhubungan dengan perjuangan dalam aksi Indonesia Berparlemen, maka dibentuklah sekretariat GAPI yang saat itu diwakili oleh Husni Thamrin (Parin-

dra), Amir Syarifudin (Gerindo) Abikusno (PSII), Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) yang juga menjadi anggota GAPI, menganjurkan agar diadakan sikap tegas terhadap pemerintah dengan menarik diri dari *Volksraad* sekiranya manifest ditolak. Adanya sikap yang keras dari PPI ini menimbulkan perbedaan cara perjuangan antara GAPI yang bersikap lunak dan PPI yang bersikap keras.

Tanggal 16 Oktober 1939 surat permohonan pembentukan parlemen dikirim lewat pos udara ke *Staten Generaal* di Nederland. Di samping itu secara diam-diam atas prakarsa Muh. Yamin melalui Gabungan Nasional Indonesia juga diajukan manifest yang isinya senada. Sebagai mana diketahui Moh. Yamin yang telah diskors dari Gerindo dan menjadi anggota *Volksraad* dari wakil daerah Minangkabau berhasil membentuk Gabungan Nasional Indonesia di dalam *Volksraad* dengan pimpinannya antara lain Yamin, Abdul Rasyid dan Tajudin Noor. Dengan terbentuknya Gabungan Nasional Indonesia ada dua kelompok wakil nasional *Volksraad*, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan Husni Thamrin dan Gabungan Nasional Indonesia di bawah pimpinan Moh. Yamin. Pemerintah tidak memperhatikan tuntutan rakyat secara sungguh-sungguh. Pemerintah menuduh GAPI memeras pemerintah Belanda dalam keadaan genting dimana peperangan telah mengancam Eropa dan Belanda sedang menghadapi serangan Nazi Jerman. PID dikerahkan untuk mengawasi para pemimpin rakyat, begitu juga larangan rapat diperkeras. Tanggal 16 Oktober 1939 pemerintah Belanda menolak manifest Indonesia. Berparlemen. Golongan nasionalis yang bersikap non koperasi menolak aksi Indonesia Berparlemen, karena sudah menduga sebelumnya bahwa aksi Indonesia Berparlemen akan ditolak pemerintah Belanda. PNI-Baru menuduh gerakan GAPI sebagai tindak mengemismengemis, dan PNI tidak setuju karena gerakan ini menyimpang dari cita-cita bangsa Indonesia yaitu Indonesia merdeka.

BAB V

KEADAAN DI DAERAH JAWA TENGAH MENJELANG KERUNTUHAN PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA DAN KEDATANGAN TENTARA JEPANG

A. SIKAP PEMERINTAH HINDIA BELANDA

Hakekat dari kolonialisme dan imperialisme ialah "pemerasan" oleh bangsa penjajah atas bangsa yang dijajah. Apa pun dalih yang dipergunakan oleh pembela sistem ini namun hakekatnya "pemerasan" yang berlaku. Demikian juga sikap pemerintah Hindia Belanda terhadap bangsa Indonesia. Hal ini dapat diperhatikan pada ciri-ciri sikap pemerintah Hindia Belanda sebagai berikut:

1. Pengawasan politik oleh yang berkuasa, Pemerasan yang sempurna tak akan dapat dilakukan sekiranya kekuasaan politik itu tidak dipegang erat-erat. Supaya hal ini tidak terjadi maka diadakanlah pengawasan yang cermat, supaya tidak ada kemungkinan di lapangan ini dipegang oleh bangsa Indonesia. Di dalam UUD Negeri Belanda bila ditinjau secara teoritis, pemerintah Hindia Belanda diakui sejajar dengan pemerintah Belanda di Eropa, namun dalam prakteknya tidaklah demikian di dalam pemerintah Hindia Belanda. Gubernur Jendral bertanggung jawab kepada Menteri Jajahan dalam kabinet Belanda. Gubernur Jendral, anggota anggota *Volksraad* dan lain-lain pegawai tinggi diangkat, diberhentikan atau dipecat pemerintahan kerajaan Belanda. Anggaran belanja yang dibikin oleh pemerintah Hindia Belanda dan *Volksraad* harus ditetapkan oleh pemerintah kerajaan Belanda. Begitu pula pemerintah kerajaan Belanda berhak membatalkan, menunda, mencabut atau menolak peraturan yang dibikin pemerintah Hindia Belanda dan *Volksraad*.

2. Subordinasi Ekonomi, Sistem perekonomian disusun untuk kepentingan penjajah. Peraturan dibuat sedemikian rupa, sehingga segala keperluan hidup penduduk tanah jajahan tergantung daripada pemerintah Belanda. Perekonomian Indonesia diatur sedemikian rupa untuk menunjang industri Belanda. Terhadap perekonomian daerah jajahan hanya mengutamakan

kan hasil pertanian untuk pasar dunia. Industri dan lain-lain yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi suatu negara kurang mendapat perhatian. Produksi tani untuk pasar dunia dikuasai oleh pengusaha Belanda sedangkan penduduk hanya mengerjakan produksi pangan dan kerajinan kecil. Perdagangan pasar dan lapangan lain ada di tangan bangsa Asing lainnya yang kebanyakan dikuasai oleh pedagang Cina dan sebagai akibatnya kehidupan bangsa Indonesia sebagai bangsa terjajah menunjukkan sikap kerendahan dan pengabdian kepada golongan lain, hanya merupakan buruh tani dan kuli perkebunan untuk melayani kepentingan orang asing.

3. Segregasi sosial atau pemisahan sosial terhadap penduduk dipisah-pisahkan menurut tingkatan. Sudah barang tentu tingkat yang paling atas adalah bangsa Belanda, kemudian orang Timur Asing dan yang rendah bangsa Indonesia. Pemerintah Belanda tidak menghargai bangsa Indonesia sebagai bangsa melainkan sebagai bangsa Bumiputera yang dijajah. Karena dalam kehidupan ekonominya terdesak oleh kepentingan orang Belanda dan Timur Asing lainnya, bangsa Indonesia tidak memiliki keutamaan, kurang memiliki tekad dan semangat. Di lapangan pendidikan juga diadakan pemisahan antara bangsa Eropa dan Bumiputera, kemudian diadakan pula sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantar. Saat itu bahasa Belanda dipergunakan untuk bahasa resmi di kantor. Banyak orang Indonesia belajar bahasa Belanda untuk kepentingan-kepentingan: a). mencari pekerjaan pada kantor pemerintah atau lainnya, b). Untuk meningkatkan martabatnya. Dengan bahasa Belanda orang akan mendapat persamaan derajat dengan orang Belanda, c). Untuk kepentingan mencari pengetahuan. Di samping usaha pemerintah di lapangan pendidikan, maka golongan nasional pun tidak mau ketinggalan. Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan nasional Taman Siswa di Yogyakarta yang mengutamakan pendidikan mental atau kepribadian nasional, di samping itu kebudayaan dan bahasa Belanda pun dipelajari untuk menambah pengetahuan.

Di Semarang didirikan sekolah Sarekat Islam, yang merupakan tempat pendidikan nasional yang berlandaskan agama. Golongan pergerakan politik lainnya juga giat untuk mengadakan pendidikan kader. Dengan kemajuan di lapangan pendidikan ini muncul golongan pelajar atau mahasiswa yang mampu meng-

ubah pandangan hidup bangsa Indonesia. Mereka itu menggugah bangsa yang diibaratkan sedang tidur menjadi pemimpin pergerakan nasional, mendidik kader membangkitkan semangat berjuang untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka.

B. SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PEMERINTAH HINDIA BELANDA.

Keadaan keamanan dunia menjadi tegang karena Perang Dunia II sudah di ambang pintu. Keadaan negeri Belanda genting karena ancaman serangan Nazi Jerman sedangkan Hindia Belanda genting karena ancaman serangan Jepang, lebih-lebih setelah gagalnya perundingan antara Hindia Belanda dan Jepang. Menghadapi Perang Dunia II pemerintah merencanakan mobilitasi, karena Hindia Belanda tidak dapat dipertahankan oleh pasukan Belanda. Pemerintah juga menyadari bahwa peperangan akan menyebabkan putusnya hubungan dengan negeri Belanda. Oleh karena itu pemerintah merencanakan akan membentuk milisi Bumiputera. Jumlah milisi yang dikehendaki sekitar 5.000 sampai 6.000 orang. Pergerakan nasional menolak rencana milisi, sebagai reaksi atas penolakan Petisi Sutarjo oleh pemerintah Belanda. Sejak itu memang pemerintah Hindia Belanda tidak lagi mendapat kepercayaan dari golongan nasionalis. Parindra menolak rencana milisi yang disampaikan oleh Sukarjo Wiryopranoto dalam sidang *Volksraad*. Partai Islam Indonesia, Paguyuban Pasundan dan Gerindo juga menolak rencana milisi. Pemerintah Hindia Belanda membawa rencana milisi ke sidang *Volksraad*, dan dalam perdebatan golongan nasionalis tetap menolak karena beranggapan bahwa *Volksraad* tidak berwenang karena yang berhak ialah parlemen yang wajar. Sekalipun rencana ini sudah diperdebatkan akhirnya rencana milisi diterima juga. Golongan nasionalis merasa tidak puas dan tidak percaya lagi kepada *Volksraad* yang dikatakannya sebagai komidi omong. Atas inisiatif GAPI yang tidak setuju adanya ordonansi milisi, maka Majelis Rakyat Indonesia yang dianggap sebagai *Volksraad* tandingan, Pelopornya adalah GAPI, MIA I dan PPBB. Anggota Majelis Rakyat Indonesia ialah semua organisasi rakyat yang bertujuan memajukan rakyat. Majelis Rakyat Indonesia didirikan di Yogyakarta tanggal 14 September 1941. Propaganda Majelis Rakyat Indonesia ialah "Indonesia Berparlemen". Parindra menuntut perubahan ketatanegaraan

yang dianggap sebagai jembatan untuk menuju Indonesia Merdeka. Majelis Rakyat Indonesia bergerak di luar *Volksraad* dan dianggap oleh penduduk sebagai parlemen. Pemerintah Belanda menyesali tindakan golongan nasionalis, tetapi tetap pada pendirian politik kolonialnya. Kadang-kadang pemerintah menjanjikan kebebasan seluas-luasnya terhadap tuntutan rakyat dalam perubahan ketatanegaraan namun masih dalam ikatan negeri Belanda. Golongan nasionalis tetap pada pendiriannya dan tidak mau memperhatikan janji pemerintah. Pengalaman lama dalam menghadapi Perang Dunia I dan sesudahnya masih diingat. Suasana diserang dan diduduki oleh Nazi Jerman. Di dalam saat itu pemerintah Belanda masih sempat memberikan janji "perubahan ketatanegaraan bagi Indonesia. Tanggal 10 Mei 1940 negeri Belanda diduduki Jerman. Pemerintah Belanda diungsikan ke Inggris. Anehnya dalam situasi yang segawat itu GAPI mengeluarkan manifes kesetiaan kepada pemerintah Hindia Belanda. Tindakan menimbulkan anggapan penduduk, bahwa GAPI merupakan organisasi yang lemah dan kurang revolusioner, dan sementara itu di Asia Jepang sudah mulai Perang Asia Timur Raya. Dalam menghadapi Perang Dunia II rakyat tetap tidak mau membantu Belanda. Kebanggaan pemerintah Belanda untuk mempertahankan Hindia Belanda lenyap karena tanggal 9 Desember 1941 kapal perang Inggris yang memperkuat pertahanan Inggris di Asia Tenggara yaitu *Prince of Wales* dan *Repulse* ditenggelamkan Jepang. Tanggal 10 Januari 1942 Indonesia mulai mendapat giliran diserang Jepang dan tanggal 8 Maret 1942 pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat. Kapitulasi penyerahannya ditanda-tangani di Kalijati oleh Tjarda van Starkenborgh Stachouwer.

C. KEDATANGAN PASUKAN PENDUDUKAN JEPANG

1. *Propaganda Jepang terasa di daerah*

Menjelang peperangan, Jepang mengirimkan misi dagangnya dan sekaligus merangkap tugas mata-mata. Di kota-kota besar Jawa Tengah didirikan toko yang menjual barang sangat murah serta memberi pelayanan yang memikat pembeli. Di Rembang, di daerah-daerah yang penduduknya mengalami kesukaran mendapatkan air tawar, orang Jepang menjual pompa air sekaligus memasangnya. Pompa air ini dihadapkan ke daerah

yang strategis sebagai penunjuk jalan misalnya ke Cepu dan daerah lainnya yang strategis. Hal ini sangat memudahkan bagi pasukan pendarat Jepang dalam operasinya ke daerah penting. Di samping itu propagandanya Jepang sebagai pemimpin yang akan membawa kemakmuran bangsa Asia sungguh memikat hati rakyat. Keadaan seperti ini sangat membantu serangan Jepang. Tanggal 7 Desember 1941 Pearl Harbour diserang Jepang, segera disusul pengumuman perang. Saat itu pecahlah Perang Asia Timur Raya.

2. *Waktu kedatangan Pasukan Jepang.*

Perang berjalan sangat cepatnya; 9 Desember 1941 Kota Baru Malaya diduduki, tanggal 11 Desember 1941 kapal perang *Prince of Wales* dan *Repulse* ditenggelamkan. Dengan tenggelamnya dua kapal kebanggaan Sekutu ini pertahanan Belanda menjadi kacau. Tanggal 10 Januari 1942 Indonesia mulai mendapat giliran serangan Jepang.

Tanggal 24 Pebruari 1942 Palembang diserang, kemudian di Jawa Tengah pasukan Jepang mendarat di Rembang dengan kekuatan sekitar 3 sampai 4 divisi. Kemudian Cepu diduduki, dan pasukan Jepang memasuki kota-kota di Jawa Tengah tanpa pertempuran yang berarti. Belanda memusatkan kekuatannya di Cilacap, dan pelabuhan dipakai sebagai tempat penampungan untuk melarikan diri ke Australia. Pasukan yang memasuki Cilacap melalui desa Abal (Kebumen). Dengan jatuhnya pelabuhan Cilacap ketangan Jepang maka putuslah hubungan keluar pemerintah Belanda dengan negara-negara lainnya, terutama Australia.

Tanggal 5 Maret 1942. Banten diduduki dan dengan demikian maka terbukalah jalan menuju Jakarta. Tanggal 8 Maret 1942 tamatlah riwayat pemerintah Hindia Belanda, Gubernur Jendral Tjarda van Starkenborgh Stacheuwer menandatangani kapitulasi penyerahan kekuasaan tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati.

3. *Sikap Jepang terhadap aparaturnya Pemerintah Hindia Belanda.*

Rakyat menyambut kedatangan pasukan Jepang dengan sangat gembira. Propaganda manis dan sikap ramah pedagang

Jepang yang datang mendahului perang dapat diterima penduduk yang percaya bahwa Jepang yang akan membantu bangsa Indonesia membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Rakyat menyambut pasukan pendudukan Jepang dengan lambaian tangan, mengibarkan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sementara itu Jepang sangat ramah menerima rakyat Indonesia. Semboyan "Jepang - Indonesia Sama-sama" dapat diterima rakyat. Di daerah pedalaman di karesidenan Pekalongan rakyat menggunakan saat itu untuk membalas dendam kepada para pangreh praja, terutama Camat dan Wedana. Rakyat pedesaan menganggap pangreh praja itu sebagai alat pemerasan bagi pemerintah kolonial Belanda. Tuntutan persamaan hak hidup mulai berkembang, berarti hak-hak istimewa bagi para bangsawan atau priyayi harus dihapuskan. Gelar *ndoro (bendara)* atau kaum priyayi dihapus diganti dengan sebutan kekeluargaan yaitu bapak, ibu, adik dan sebagainya. Sekolah yang dulunya dibedakan sekarang disamakan. HIS dan ELS dan sekolah desa dihapus dan diganti semua menjadi Sekolah Rakyat. MULO menjadi SMP dan AMS, HBS menjadi SMT. Semua sekolah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Semua buku pelajaran yang menggunakan bahasa Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pada jaman Jepang bahasa Indonesia berkembang cepat sekali, bahasa Belanda dilupakan dan kadang-kadang mereka yang masih menggunakan bahasa Belanda dibenci atau dituduh memihak musuh. Pemerintahan balatentara Jepang didasarkan atas Undang-undang Bala tentara Dai Nippon yang tercantum dalam *Osaemu Seirei* No. 1.

Semua badan pemerintah dan kekuasaan Belanda, baik hukum maupun Undang-undang Pemerintahannya tetap diakui sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah Militer Jepang. Susunan pemerintah Jepang secara vertikal adalah sebagai berikut:

Gubernur Jenderal	—	<i>Seiko sikikan</i>
Gubernur	—	<i>Gunseikan</i>
Residen	—	<i>Sico</i>
Bupati	—	<i>Kenco</i>
Wedana	—	<i>Gunco</i>
Camat	—	<i>Sonco</i>
Lurah	—	<i>Kuco</i>

Pengibaran bendera merah putih mulai dilarang diganti dengan *Hino Maru* bendera Jepang dan lagu kebangsaan Indonesia Raya mulai diganti dengan *Kimigayo*. Rakyat mulai menyadari akan propaganda palsu Jepang. Daerah kelurahan masih dibagi lagi menjadi beberapa wilayah rukun tetangga disebut *tonari gumi* dan dikepalai oleh *tonari gumico*.

Pada hakekatnya sistem pemerintah Jepang masih sama dengan Belanda semua jabatan yang diduduki orang Belanda diganti oleh orang Jepang.

4. Sikap Jepang terhadap Bangsa Indonesia

Mengingat suasana perang maka seluruh kehidupan ditujukan untuk persiapan perang. Semua tenaga rakyat dikerahkan untuk kepentingan perang, dari anak-anak sekolah sampai kepada yang tua dilatih ilmu kemiliteran. Tenaga buruh ditampung dalam pasukan buruh atau disebut *Romusya*. Mereka dikerahkan untuk melakukan pekerjaan demi kepentingan pertahanan militer. Beribu-ribu rakyat dari Jawa Tengah tertarik akan propaganda *romusya*, mereka dikirim ke daerah-daerah obyek militer. Sebagian dikirim ke luar Jawa, bahkan banyak yang dikirim ke Birma, Siam, Singapura, Indocina dan di tempat-tempat medan perang. Kaum wanita diwajibkan menjadi anggota *Fujin Kai*, mereka diwajibkan bekerja demi kepentingan pertahanan. Di kalangan pemuda yang tidak masuk *Romusya* ditampung dalam organisasi yang disebut *Seinendan*. Mereka adalah pemuda berumur 18 - 25 tahun. Kemudian di kampung-kampung dibentuk barisan *keibodan* yang bertugas sebagai pembantu polisi untuk menjaga keamanan desa. Mereka ini sebenarnya merupakan cadangan militer yang sewaktu-waktu dapat dikerahkan untuk memperkuat pertahanan Jepang. Semangat gotong-royong ditingkatkan dalam bentuk *Kinrohosi* yang sebenarnya merupakan kerja paksa yang harus dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat.

Penduduk mendapat latihan militer. *Kusukeiho* merupakan latihan menghadapi bahaya serangan udara. *Kyoren*, latihan perang-perangan dan baris-berbaris dengan menyanyikan lagu-lagu mars Jepang benar-benar menambah semangat militer dalam suasana perang. Akibatnya penduduk harus rela segala-galanya untuk kepentingan perang. Produksi pangan berupa padi, beras dan harta benda emas intan dan berlian harus

disumbangkan untuk biaya perang, bahkan ternak pun harus diserahkan kepada pemerintah Jepang dengan ganti rugi yang sangat rendah. Rakyat takut menolak perintah Jepang, sebab menolak dianggapnya sebagai menentang hukum militer, dianggap musuh. Siapa saja yang menolak ataupun menentang perintah diseret ke *Kempeitai*, yaitu polisi militer Jepang yang bertingkah sangat kejam. Banyak orang yang ditangkap *Kempeitai* mendapat siksaan berat, bahkan ada di antaranya yang tidak kembali karena mati dan yang kembali menjadi cacat badan. Keadaan ekonomi menjadi buruk sekali. Bahaya kelaparan terjadi di mana-mana. Rakyat mengalami kekurangan makanan sampai batang pisang dan bekicot pun di makan. Begitu pula bahan pakaian mengalami kekurangan, sehingga banyak juga yang memakai pakaian goni (bekas karung) dan karet.

5. Sikap Bangsa Indonesia terhadap Jepang

Sikap pemimpin nasionalis menanggapi keadaan seperti itu hampir tidak bisa berbuat apa-apa, karena sikap keras pemerintah Jepang dalam mengawasi gerakan kebangsaan. Hampir semua aktivitas pergerakan sosial ditangani oleh pemerintah Jepang. Di samping itu sebagian besar pemimpin nasionalis bekerja sama dengan Jepang dengan maksud bahwa situasi tersebut dapat dipergunakan untuk mempersiapkan tenaga nasional merebut kemerdekaannya, hanya di kalangan angkatan muda menolak sikap yang demikian itu. Mereka melawan Jepang secara diam-diam melalui gerakan di bawah tanah. Untuk menghimpun tenaga rakyat, maka terbentuklah PUTERA atau Pusat Tenaga Rakyat dibawah pimpinan 4 serangkai yaitu Sukarno, Hatta, K.H. Mas Mansur dan Ki Hajar Dewantara. Kemudian oleh pemerintah Jepang PUTERA dilebur menjadi *Jawa Hokokai*. Di Semarang, putera dipimpin oleh: Dr. Buntaran, Suyudi, Winarno, Parada Harahap dan lain-lain. Kemudian tanggal 5 September 1943 di pusat dibentuk *Cuo Sangi In* atau Dewan Rakyat Pusat, sedang di daerah-daerah *Cuo Sangi Kai* atau dewan rakyat daerah yang kedua-duanya bertujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Keadaan perang saat itu memang gawat sekali, hampir semua serangan Jepang dapat ditahan Sekutu, bahkan Sekutu sudah mampu menghancurkan pertahanan Jepang di Pasifik. Tanggal 1 September 1943 atas usul Gatot Mangkupraja dibentuk PETA atau Pembela Tanah

Air yang merupakan pasukan sukarela. Usul ini diterima oleh pemerintah Jepang, lalu dikeluarkanlah Maklumat *Osamu Sei-rei* No. 44. tentang pembentukan PETA. Tempat latihan perwira ditentukan di kota Bogor dan yang dilatih ialah: Calon *Daidanco* atau komandan batalyon, calon *Cudanco* atau komandan kompi atau calon *Sudanco* atau komandan peleton. Wilayah *daidan* di Jawa Tengah dibagi seperti berikut:

Karesidenan Banyumas.

<i>Daici Daidan</i>	di Cilacap
<i>Daini Daidan</i>	di Sumping
<i>Daisan Daidan</i>	di Kroya
<i>Daiyon Daidan</i>	di Banyumas.

Karesidenan Pekalongan.

<i>Daici Daidan</i>	di Pekalongan
<i>Daini Daidan</i>	di Tegal.

Karesidenan Semarang.

<i>Daici Daidan</i>	di Semarang
<i>Daini Daidan</i>	di Weleri.

Karesidenan Kedu.

<i>Daici Daidan</i>	di Gombong
<i>Daini Daidan</i>	di Prembun.
<i>Daisan Daidan</i>	di Magelang
<i>Daiyon Daidan</i>	di Purworejo.

Karesidenan Pati.

<i>Daici Daidan</i>	di Pati
<i>Daini Daidan</i>	di Rembang
<i>Daisan Daidan</i>	di Jepara.

Karesidenan Surakarta.

<i>Daici Daidan</i>	Di Sala.
<i>Daini Daidan</i>	di Wonogiri.

Yogyakarta.

<i>Daici Daidan</i>	Di Wates
<i>Daini Daidan</i>	di Yogya
<i>Daisan Daidan</i>	di Wonosari.

Jumlah Bataliyon PETA di Jawa Tengah cukup untuk se-

tiap waktu berjuang merebut kekuasaan dan senjata dari Jepang demi berhasilnya cita-cita bangsa menuju kemerdekaan. Di samping PETA, Jepang juga membentuk *Heiho* yaitu pasukan pembantu balatentara Jepang yang orang-orangnya terdiri dari pemuda Indonesia. Gerakan rakyat Jawa Tengah melawan Jepang banyak anggota PETA yang memberontak sekitar tanggal 29 Pebruari 1945 menggelorakan semangat keberanian dan tekad rakyat untuk merdeka. Perlawanan itu merupakan ledakan rasa kebencian dan dendam rakyat terhadap kelaliman tentara pendudukan Jepang. Pemberontakan itu ada yang bersifat ilegal ada pula yang legal berupa pertempuran fisik melawan pasukan Jepang. Peristiwa peristiwa itu terjadi antara lain di Wonogiri. IPTAS atau Ikatan Putera Tanah Air sejati di bawah pimpinan Sutarto dan Kusmanto mengadakan gerakan ilegal melawan Jepang. Di Semarang aksi ilegal pemuda Semarang ini berpusat di kantor *Sendenbu*. Di Kroya pemberontakan melawan Jepang di bawah pimpinan *Sodanco*. Kuseiri dimana ia mampu menggerakkan rakyat Sani di daerah Gumilir dan pertempuran terjadi di daerah Selarong.

BAB VI PENUTUP

Di muka sudah diceritakan tentang perkembangan pergerakan nasional bangsa Indonesia selama setengah abad, dari tahun 1908 sampai akhir penjajahan Belanda pada tahun 1941, khususnya yang terjadi di dalam interaksinya di daerah Jawa Tengah. Juga telah diuraikan perkembangan pemerintahan, politik kolonial, masyarakat, dan ekonomi selama masa periode tersebut. Sebagai penutup dari uraian ini perlu diutarakan beberapa kesimpulan dari hal-hal yang sudah dibicarakan di muka.

1. Pada tahun 1903, dengan mulai berlakunya Undang-undang Desentralisasi, maka pemerintah di Hindia Belanda yang sebelumnya, (pada akhir abad ke-19) bersifat otonokratis dan sentralistis, menjadi pemerintahan yang memberikan hak otonomi kepada beberapa karesidenan dan kota dan kemudian kepada kabupaten-kabupaten. Politik disentralisasi ini, meskipun dilaksanakan sesuai dengan cita-cita dari para penganjur politik etis juga disesuaikan dengan tuntutan golongan masyarakat Eropa - Belanda yang berdiam di Hindia Belanda yang menghendaki untuk turut mengurus sendiri pemerintahan di daerah-daerah. Pada masyarakat Indonesia, otonomi dan disentralisasi ini memberikan kesempatan yang terbatas pada golongan masyarakat bangsa Indonesia yang terkemuka dan terpelajar untuk mengambil bagian di dalam dewan-dewan lokal. Di daerah Jawa Tengah, perkembangan ini mengakibatkan di bentuknya beberapa karesidenan, kota, dan kabupaten otonom yang memberikan pemerintahan modern di samping pemerintahan tradisional yang masih ada.
2. Benih pergerakan nasional, khususnya di daerah Jawa Tengah, sudah mulai terlihat pada golongan priyayi yang pertama kali mengalami pendidikan Barat, misalnya golongan para bupati yang mulai berpikiran maju dan menginsafi kepentingan dari pendidikan Barat bagi golongan atau anak-anak mereka. Dengan makin tersebarinya dan

meluasnya pendidikan, seperti misalnya pada pendirian Sekolah Dokter Jawa (Stovia) di Jakarta, Sekolah Guru (*Kaweekscholen*) di Surakarta, Yogyakarta, Magelang dan Purworejo, sekolah Pamongpraja (osvia) di Magelang dan sekolah menengah seperti ELS, HBS, HIS dan AMS, maka semakin banyak golongan terpelajar bangsa Indonesia yang kemudian menginsafi kedudukan mereka yang masih terbelakang dan dijajah. Merekalah yang kemudian menjadi pemimpin pergerakan nasional.

Mereka pada umumnya berasal dari golongan priyayi rendah yang mendapat pendidikan di sekolah yang telah didirikan itu. Dapat disebut misalnya: Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan golongan mahasiswa. Sekolah Stovia di Jakarta (Dr. Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryoningrat, H.O.S. Cokroaminoto dan Tirtoadisuryo. (pemimpin-pemimpin S.I.) yang mengalami pendidikan di sekolah osvia di Magelang dan beberapa anggota pengurus BU yang pertama setelah konggresnya di Yogyakarta pada bulan Oktober 1908 adalah guru dari sekolah guru di Yogyakarta.

Juga dapat disebutkan bahwa cabang BU yang pertama telah didirikan di sekolah-sekolah guru di Jawa Tengah dan sekolah Osvia di Magelang.

Di dalam pergerakan modernisme Islam, maka Sarekat Islam (SI) telah didirikan di kota Sala oleh Ulama pedagang batik H. Samanhudi, sebelum kepemimpinan diserahkan kepada Cokroaminoto. Gerakan modernisme Islam yang lebih bersifat murni agama ialah perkumpulan Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta oleh K.H. Ahmad Dahlan yang telah mendapat pengaruh dari pikiran-pikiran Moh. Abdul di Mesir.

Di dalam perkembangannya, Muhammadiyah kemudian meluaskan usahanya keluar daerah Yogyakarta, sedangkan SI menjadi suatu partai politik yang terbesar sampai tahun 1921, ketika partai itu mengalami kemunduran karena terjadinya perpecahan di dalam tubuhnya di antara golongan Abdul Muis. H.A. Salim dengan golongan Semaun yang beraliran komunis. Pada tingkat lokal, ialah di daerah-daerah pergerakan SI pada umumnya dipimpin oleh para Kyai (ulama) dan menunjukkan pe-

rasaan anti Cina yang kuat serta penetapan terhadap pejabat pemerintah sebagai saluran ketidakpuasan rakyat setempat terhadap tindakan beberapa pejabat pemerintah tersebut.

4. Taman siswa sebagai gerakan pendidikan nasional yang ingin menanamkan jiwa atau semangat kemerdekaan kepada murid-muridnya serta menekankan kepada kebudayaan bangsa sendiri sebagai nilai yang harus menjiwai pendidikannya, juga didirikan di Yogyakarta, dan berkembang terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, bahkan sampai keluar Jawa.
5. Perkembangan ke arah radikalisme dimulai pada tahun sesudah Perang Dunia I oleh karena pengaruh yang semakin besar dari golongan Semaun — Darsono yang berpaham komunis/sosialis. Pada mulanya mereka bergerak di dalam tubuh SI sebelum mereka dikeluarkan atau dikenakan disiplin partai pada tahun 1921, dan kemudian mendirikan PKI pada tahun 1923. Pemogokan yang terjadi pada tahun sesudah PDI, tersebut terutama terjadi di kota-kota di Jawa Tengah (Semarang, Pekalongan, Yogyakarta, Sala) dan menunjukkan kesulitan penghidupan kaum buruh karena politik penghematan yang keras dari pihak pemerintah pada waktu itu. Pengaruh yang semakin besar dari golongan komunis ini mencapai puncaknya pada pemberontakan PKI tahun 1926 yang gagal terhadap pemerintahan jajahan.
6. Tahun 1927 — 1931 dikuasai oleh kegiatan PNI dan PPPKI yang berhaluan radikal dan non koperasi. Pada tahun itu juga idee politik asosiasi mulai mengalami kegagalan seperti terlihat dari pertentangan yang semakin tajam di antara golongan-golongan penduduk di dalam masyarakat dan jurang yang semakin lebar di antara pemerintah jajahan dengan pergerakan kebangsaan. Secara hukum golongan di dalam masyarakat jajahan dapat dibedakan dalam tiga golongan yaitu: Eropa, Timur Asing, dan Bumi-putera.
7. Perkembangan pergerakan setelah tahun 1931 menunjukkan kemunduran bersamaan dengan terjadinya krisis ekonomi. Ini terutama disebabkan karena tindakan poli-

sional yang kejam dari Gubernur Jenderal de Jonge.

Ketika pergerakan itu mulai sembuh kembali pada tahun 1936, bersamaan waktunya dengan penggantian Gubernur Jenderal yang baru yaitu Tjarda. Keadaan ekonomi mulai membaik, maka pergerakan nasional mengambil haluan baru ke arah politik koperasi dengan pemerintah jajahan, sehingga partai kebangsaan dapat bergerak kembali meskipun di dalam suasana dan politik pemerintah yang keras. Hal ini terlihat dari pembentukan Parindra dan aksi Indonesia - Berparlemen dari GAPI.

8. Di dalam hal haluan pergerakan kebangsaan, dapat dibedakan di antara golongan yang menghendaki dan menerima kerja sama dengan pemerintah di dalam dewan pusat dan lokal (golongan koperator) dan golongan yang menolak kerjasama semacam itu (golongan non koperasi). Sering dikatakan bahwa perbedaan ini sejalan dengan perbedaan ke dalam golongan atau aliran yang moderat dengan golongan atau, aliran yang progresif atau radikal kiri. Partai-partai seperti BU, PBI, Parindra, PSII dan GAPI, dapat dimasukkan ke dalam golongan koperator. Sedangkan *Indische Partij*, PNI, PKI, PPKI, PNI - Baru, dan Partindo adalah termasuk golongan non koperator. Perbedaan ini sebetulnya lebih terasa sebagai perbedaan taktik daripada perbedaan tujuan, oleh karena kedua golongan sama-sama menghendaki kemerdekaan Indonesia sebagai tujuan terakhir perjuangannya.
9. Perjuangan di dalam dewan dimulai dengan dibentuknya *Volksraad* pada tahun 1918. Meskipun di dalam teorinya, Hindia Belanda (Indonesia) telah mempunyai alat pemerintahan sendiri (pemerintah dan *Volksraad*) dan keuangan sendiri, sebagai badan hukum yang mempunyai kebedaan sendiri, dan dalam Undang-undang dasar negeri Belanda, Hindia Belanda (Indonesia), diakui sejajar kedudukannya dengan bagian yang di Eropa, Suriname, dan Curagao, tetapi di dalam prakteknya pemerintah Belanda di Eropa masih mempunyai kekuasaan sepenuhnya di Hindia Belanda. Tidak mungkin Indonesia mendapat pemerintahan sendiri, apalagi kemerdekaan. Meskipun *Volksraad* telah diberi kuasa turut serta dalam pemerin-

tahan, akan tetapi kalau terjadi perselisihan di antara Gubernur Jenderal dengan *Volksraad*, pemerintah dan parlemen di negeri Belanda lah yang memutuskannya. Wakil-wakil bangsa Indonesia yang duduk sebagai anggota *Volksraad* selalu menuntut kepada pemerintah jajahan untuk melaksanakan perubahan dalam ketatanegaraan di Hindia Belanda (Indonesia) yang pada akhirnya menuju kepada tuntutan pemerintahan sendiri dari kemerdekaan penuh bagi Indonesia.

Tuntutan bangsa Indonesia tersebut pada dasarnya ialah untuk menjadikan *Volksraad* suatu parlemen yang sesungguhnya, dimana pemerintah di Hindia Belanda (Gubernur Jenderal dan kepala departemen) harus terdiri dari orang-orang Indonesia dan bertanggung jawab kepada dewan rakyat tersebut. Tuntutan ke arah pemerintahan sendiri dalam waktu tertentu, yang pada akhirnya akan menuju kepada pemerintahan yang merdeka dan penempatan orang Indonesia dalam jabatan pemerintah, dan penggantian istilah *Nederlands Indie* dan *Inlanders* dengan *Indonesia* dan orang *Orang Indonesia* (mosi Cokroaminoto dan mosi Jayadiningrat tahun 1918, perjuangan Fraksi nasional di dalam *Volksraad* yang dipimpin Muhammadi Husni Thamrin pada tahun 1930 an, Petisi Sutarjo tahun 1936, Mosi Thamrin dan Mosi Wiwoho tahun 1939 – 1940, serta aksi Indonesia Berparlemen dari GAPI).

10. Idee persatuan bangsa Indonesia telah pula menjiwai para pemuda, sehingga dengan dipelopori oleh *Jong Java*, Pemuda Indonesia, PPPI, *Jong Sumatranen Bond*, *Yong Islamieten Bond* dan sebagainya, dapat dicetuskan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan pembentukan perkumpulan, "Indonesia Muda" di Sala pada tahun 1931. Di samping itu, perkembangan persatuan dan pembentukan konsentrasi nasional pada partai kebangsaan, telah terlihat dengan dibentuknya *Radicale Concentratie* pada tahun 1918, PPPKI yang dipelopori PNI pada tahun 1927 dan GAPI serta Majelis Rakyat Indonesia pada tahun 1939 – 1940.

Akan tetapi juga terjadi pertentangan dan perpecahan di dalam barisan pergerakan kebangsaan, seperti misalnya pertentangan di antara golongan Cokroaminoto – Abdul

Muis – H. Salim dengan golongan Semaun – Darsono di dalam S.I. pertentangan di antara golongan Sukarno – Sartono dengan golongan Moh. Hatta – St. Syahrir di dalam PNI, pertentangan yang terjadi di antara golongan nasionalis yang berpaham netral dalam agama (PNI, PBI, BU) dengan golongan Islam (PSSI) di dalam PPKI, dan pertentangan yang terjadi di dalam PSII setelah tahun 1930 di antara golongan Abikusno yang tetap mempertahankan politik hijrah atau non kooperasi terhadap pemerintah dengan golongan H.A. Salim yang menghendaki haluan koperasi (golongan H.A. Salim kemudian membentuk barisan Penyadar PSII pada tahun 1936 dan di antara golongan Abikusno dengan golongan Sukiman – Wiwoho yang menghendaki ditinggalkannya politik hijrah dan diakhirinya partai disiplin terhadap anggota-anggota PSII yang menjadi anggota Muhammadiyah (golongan Sukiman – Wiwoho – K.H.M. Mansur kemudian mendirikan partai sendiri di Sala pada bulan Desember 1938 dengan nama Partai Islam Indonesia atau PII).

11. Dalam bidang perekonomian, pada umumnya kita melihat mengutamakan pertanian produksi ekspor untuk pasaran dunia, di mana industri kerajinan, dan pertanian lainnya yang perlu untuk memperlengkapi ekonomi suatu negeri serta yang pada umumnya dipegang oleh orang Indonesia, tidak mendapat perhatian yang cukup dan mengalami diskriminasi dalam hal pajak dan sebagainya. Di dalam pertanian untuk pasar dunia tersebut bangsa Indonesia tak mendapat kesempatan untuk turut serta. Keuntungan dari surplus-export hanya dinikmati oleh perusahaan besar bangsa Eropa.

Akibat dari politik pemerintah yang mementingkan kepentingan golongan modal Eropa tersebut, terlihat pada pelaksanaan politik penghematan yang merugikan bangsa Indonesia pada tahun 1920 – 1924 sehingga menimbulkan banyak pemogokan, dan kesengsaraan yang diderita rakyat akibat krisis ekonomi tahun 1930. Pada tahun terakhir penjajahan Belanda, sikap pergerakan nasional semakin menjauhi dan tidak mempercayai pemerintah Belanda, yang telah menolak Petisi Sutarjo dan Mosi Thamrin dan Wiwoho dengan dalih dan janji bahwa peru-

bahan dalam lapangan ketatanegaraan harus diadakan setelah perang selesai. Ini menunjukkan bahwa pemerintah jajahan adalah pemerintah yang selalu tidak menghiraukan tuntutan dan keinginan bangsa Indonesia, bagaimanapun lunak atau moderat keinginan-keinginan itu.

Keadaan ini telah mempercepat keruntuhan pemerintah Belanda di Indonesia di bawah ancaman penyerbuan pasukan-pasukan Jepang.

CATATAN BAB II DAN BAB III

1. D.G.E. Hall, *A History of South East Asia*, Macmillan & Co, London, 1960, hal. 653.
J.S. Furnivall, *Netherlands India: A Study of Plural Economy*, Cambridge University Press, Cambridge, 1939 (Reprinted 1967), hal. 228 – 229.
Sartono Kartodirdjo, *Kolonialisme dan Nationalisme di Indonesia pada abad 19 dan abad 20*, Lembaran Sejarah No.8, Juni 1972, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 20 – 21, 71.
2. J.S. Furnival, *Op. cit*, hal. 230.
Rober van Niel, *The Emergence Of The Modern Indonesian Elite*, W. van Hoeve, Ltd, Bandung, 1960, hal. 33, 34, – 36.
3. J.S. Furnival, *Op. cit*, hal. 264.
4. R.A. Sosrokusumo, *Desentralisasi dan Hak Otonomi*, Perpustakaan Nasional "Adji", Surabaya, 1951, hal. 13, 16.
J.S. Furnival, *Op.cit*, hal. 271.
5. R.A. Sosrokusumo, *Op.cit*, hal. 14 – 18.
6. W.F. Wertheim (eds), *The Indonesian Town: Studies in Urban Sociology*, Les Editions A. Manteux S.A.W. van Hoeve Ltd, Brauxelles – The Hague, 1958, hal. XIV.
7. D.G.E. Hall, *Op. cit*, hal. 634.
J.S. Furnivall, *Op. cit*, hal. 268 – 269.
R.A. Sosrokusumo, *Op. cit*, hal. 22 – 23.
8. Mr. Amrah Muslimin, *Ikhtisar Perkembangan Otonomi daerah 1903, 1958*, penerbit Jambatan, Jakarta, 1960, hal. 13 – 14.
9. Sukino, et. al. *Semarang*, Jawatan Penerangan Kota Besar Semarang, Semarang, 1956, hal. 54.
Amen Budiman, "Lahirnya kota praja Semarang", dalam harian *Suara Merdeka*, Th. XXVII, No. 196, Jumat 1 Oktober 1976, hal. IV.
10. Bernhard Dahm, *History of Indonesia in the Twentieth*

Century. Frederich, A. Praeger, London, 1971, hal. 15-17

Sutedjo Bradjanegara, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Yogyakarta, 1956, hal. 58 – 59.

Pendidikan di Indonesia 1900 – 1974, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan Kebudayaan, Jakarta, 1976, hal. 37 – 40.

11. Bernhard Dahm, *op. cit*, hal. 18 – 20.
Soetedjo Bradjanegara, *op. cit*, hal. 61 – 62.
Pendidikan di Indonesia 1900 – 1974, hal. 38 – 41.
12. Bernhard Dahm, *op. cit*, hal. 18.
Robert van Niel, *op. cit*, hal. 2, 27 – 29, 50 – 51, 61 – 62, 1971.
13. Bernhard Dahm, *op. cit*, hal. 22 – 24.
Ny. Darsiti Suratman, *Politik Pendidikan Belanda dan Masyarakat di Jawa pada Akhir abad 19*, Seminar Sejarah Nasional II, 26 – 29 Agustus 1970, di Yogyakarta, hal. 35.
14. Hurustiati Subandrio, *Kartini Wanita Indonesia*, Penerbit, Jambatan, Jakarta, 1955, hal. 1, 39.
Bernhard Dahm, *op. cit*, hal. 21.
Ensiklopedi umum (di bawah redaksi: Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo dan Hassan Shadily, M.A.), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1973, hal. 631 – 632.
15. Prof. Dr. D.H. Burger dan Prof. Dr. Mr. Prayudi Atmosudirdja, *Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia*, jilid II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1970, hal. 220 – 222.
16. Tentang pembentukan B.U. lihatlah karangan Pitoyo Darmosugito B. Sc.: "Siapa perintisnya Perintis? Sutomo atau Wahidin?" dalam *Pusara* No. 8, Th. 40, Agustus 1970, hal. 293 – 295, dan "Sekali lagi: Siapa perintisnya Perintis? Sutomo atau Wahidin? dalam *Pusara*, No. 9 th. 40, September 1970, hal. 344 – 347. Karangan ini memuat kesaksian kesaksian dari Prof. Dr. Sarjito, Dr. Angka, Dr. Kodiyat, dan Dr. Suraji Tirtonegoro, serta tanggapan dari Dr. Moleyo-taruno. Juga karangan dari Suroto: "Stovia dan Budi Utomo", dalam harian *Merdeka*, Rabu 30 Mei 1973, hal. 2 – 6, lihat juga: Prof. Dr. Slametmulyono, *Nasionalisme sebagai modal*

- Perjuangan Bangsa Indonesia*, jilid I, PN. Balai Pustaka, Jakarta 1968, hal. 109 – 110. Tentang hari pendirian B.U. Drs. Abdurachman Suryomihardjo dalam tinjauannya terhadap buku Akira Nagazumi (*The Dawn of Ondinesia Nationalism The Early Years of the Budi Utomo 1908-1918*), menyatakan bahwa hari rapat pendirian BU. tersebut ialah hari Rabu, 20 Mei 1908, bukan hari, "Minggu (Majalah *Masyarakat Indonesia*, No. 2 Th. I, 1974, hal. 194).
17. Margono Djojohadikusumo, *Kenang-kenangan dari tiga Zaman*, PT. Indera, Jakarta, 1969, hal. 25.
Robert van Niel, *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*, W. van Hoeve, Ltd, Bandung, 1960, hal. 58 – 59.
 18. Robert van Niel, *op. cit.*, hal. 59 – 60.
 19. Bernhard Dahm, *History of Indonesia in the Twentieth Century*, Frederick A. Praeger, London, 1971, hal. 27 – 28.
 20. *Ensiklopedi Umum* (di bawah redaksi: Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo dan Hassan Shadily, M.A.), Penerbit Kanisius, Yogyakarta 1973, hal. 220.
Lihat juga: L.M. Sitorus, *Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Pustaka Rakyat N.V. Jakarta, 1951, hal. 9.
 21. Yayasan Idayu, *Kilasan petikan sejarah Budi Utomo*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1975, hal. 57.
 22. *Ibid*, hal. 64 – 65.
 23. Bernhard Dahm, *op. cit.*, hal. 29 – 32.
Lihat juga: Robert van Niel, *op. cit.*, hal. 62.
 24. Robert van Niel, *op. cit.*, hal. 62 – 63.
Abdurrachman Suryomihardjo, dalam majalah *Masyarakat Indonesia*, *op. cit.*, hal. 192. Prof. Dr. Slametmulyono, *op. cit.* hal. 116 – 121, 136.
 25. Sartono Kartodirdjo, Mawarti Djoened Poesponegoro, dan Nugroho – Notosusanto (eds), *Sejarah Nasional Indonesia, jilid V Zaman Kebangkitan Nasional dan Massa Akhir Hindia Belanda* (editor, Yusmar Basri), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1975, hal. 184.
 26. Robert van Niel, *op. cit.*, hal. 62 – 63.
 27. Amelz, H.O.S. *Tjokroaminoto Hidup dan Perjuangannya*,

- jilid I, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1952, hal. 30 – 31.
Lihat juga: Drs. Abdurrachman Suryomihardjo, suatu analisa cita-cita dan tindak perbuatan nasional revolusioner Suwardi Suryaningrat, dalam *Medan Ilmu Pengetahuan* No. 2, th. III, April 1962 hal. 491.
28. Bernhard Dahm, *op. cit.*, hal. 25 – 26.
M. Balfas, *Dr. Tjipto Mangunkusumo: Demokrat sejati*, penerbit Jambatan, Jakarta, 1957, hal. 26 – 27.
 29. *Sejarah Nasional Indonesia, jilid V* "Zaman kebangkitan Nasional dan masa akhir Hindia Belanda" (Editor: Yusmar Basri) hal. 190.
 30. Bernhard Dahm, *op. cit.*, hal. 34 – 35.
 31. *Sejarah Nasional Indonesia, jilid V*. "Zaman Kebangkitan Nasional dan masa akhir Hindia Belanda" (Editor: Yusmar Basri), Hal. 191.
Frs. Abdurrachman Suryomihardjo, *op. cit.*, dalam *Medan Ilmu Pengetahuan*, No. 2 th. III, April 1962, hal. 491 – 492.
 32. Robert van Niel, *op. cit.*, hal. 86 – 87.
Lihat juga: J.S. Furnivall, *Netherlands India: A Study of Plural Economy*, Cambridge University Press, London, 1939, hal. 240 – 241.
 33. Robert van Niel, *op. cit.*, hal. 89 – 90.
Lihat juga: Bernhard Dahm, *op. cit.*, hal. 38 – 39.
 34. Mr. A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rayat Indonesia*, cetakan III, Pustaka rakyat N.V. Jakarta, 1950, hal. 14.
Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900 – 1947*, Oxford University Press, Singapore, 1973, hal. 103. Deliar berpendapat bahwa sudah sejak semula nama "Sarekat Islam" dipergunakan oleh Tritoadisuryo. Amelz, *Op. cit.*, I. hal. 95 – 96.
 35. Mr. A.K. Pringgodigdo, *op. cit.*, hal. 15.
Robert van Niel, *op. cit.*, hal. 91.
 36. Sartono Kartodirdjo, *Protest Movements in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries*, Oxford University Press P.T. Indira, Singapore Jakarta, 1973, hal. 163, dts.
Tentang geger Brondongan, lihat: Amen Budiman, "Geger

- Brondongan dalam harian Suara Merdeka, Jum'at, 29 Oktober 1976, Th. XXVII No. 220, hal. 6.
- Prof. Sartono Kartodirdjo (eds), *Sarekat Islam Lokal*, Arsip Nasional RI. Penerbitan sumber-sumber Sejarah No.7, Jakarta, 1975 hal. XIX, XXXIV.
- Lihat juga: *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV*, "Indonesia Dalam Abad 18 dan 19", hal. 315 – 317.
37. Amelz, *op. cit*, I, hal. 48 – 51.
Lihat juga: Deliar Noer, *op. cit*, hal. 107 – 108.
 38. Robert Niel, *op. cit*, hal. 92 – 93.
 39. Bernhard Dahm, *op. cit*, hal. 40.
 40. Mr. A.K. Pringgodigdo, *op. cit*, hal. 16 – 18.
Eksiklopedi umum. hal. 1167.
Dalam buku Deliar Noer, *op. cit*, hal. 185 – 188 disebutkan, bahwa meskipun kepala kantor Penasehat urusan pribadi, D. Rinkes, bersikap simpati terhadap SI, namun ternyata G.G. mengikuti nasehat yang diberikan oleh kepala sekretariatnya agar G.G. menolak pengakuan terhadap SI, tetapi dapat memberikan pengakuan kepada SI – SI lokal sebagai badan hukum dan kepada suatu Control Komite SI.
 41. Bernhard Dahm, *op. cit*, hal. 41 – 43.
Robert van Niel, *op. cit*, hal. 119.
 42. Robert van Niel, *op. cit*, hal. 109.
 43. Mr. A.K. Pringgodigdo, *op. cit*, hal. 27 – 29, 100.
Ensiklopedi umum. op. cit, hal. 1389.
Sukirno, *et al*, *Semarang*, Jawatan penerangan kota besar Semarang, Semarang, 1956, hal. 41 – 43.
 44. Mr. A.K. Pringgodigdo, *op. cit*, hal. 98.
Sandra. *Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia*, Penerbit P.T. Pustaka Rakyat, Jakarta, 1961, hal. 26 – 27.
Lihat juga: *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V: Zaman Kebangkitan Nasional dan masa akhir Hindia Belanda* (Editor: Yusmar Basri) hal. 82 – 83.
 45. Mr. A.K. Pringgodigdo, *op. cit*, hal. 98.
Sandra, *op. cit*, hal. 131.
 46. Mr. A.K. Pringgodigdo, *op. cit*, hal. 100.

- Deliar Noer, *op. cit*, hal. 132 – 133.
47. Abdurrachman Suryomihardjo, "Cita-cita Demokrasi Dalam Pendidikan Bangsa: sebuah tinjauan Historis" *Prisma*, No. 2. th. VI Pebruari 1977, hal. 80.
 48. Mr. A.K. Pringgodigdo, *op. cit*, hal. 99.
Sukirno, *op. cit*, hal. 52.
 49. Mr. A.K. Pringgodigdo, *op. cit*, hal. 101.
Ruth T.Mc, Vey, *The Rise of Indonesian Communism*, Cornell University Press, Ithaca – New York, 1965, hal. 147.
 50. Ruth T. Mc. Vey, *op. cit*, hal. 147 – 148.
 51. Ibid, hal. 148 – 150.
Mr. A.K. Pringgodigdo, *op. cit*, hal. 101.
Sukirno, *op. cit*, hal. 52.
Ensiklopedi Umum, *op. cit*, hal. 1389.
 52. Ruth T. Mc. Vey, *op. cit*, hal. 150 – 151.
Ensiklopedi Umum, *op. cit*, hal. 1390.
 53. Ruth T. Mc. Vey, *op. cit*,
Mr. A.K. Pringgodigdo, *op. cit*, hal. 101. Menurut Pringgodigdo pemogokan berlangsung 3 minggu dan berakhir pada akhir bulan Mei 1923.
 54. Ensiklopedi Umum, *op. cit*, hal. 1390.
 55. Sukirno, *op.cit*.hal 53
Mr. A.K. Pringgodigdo, *op. cit*, hal. 103.
Ensiklopedi Umum, *op. cit*, hal. 1390.
 56. Mr. A.K. Pringgodigdo, *op. cit*, hal. 102.
Sukirno, *op. cit*, hal. 52 – 53.
 57. Sukirno, *op. cit*, hal. 47.
Abdurrachman Suryomihardjo, *op.cit*, dalam *Prisma*, No. 2, Th. VI. Pebruari 1977, hal. 78 – 79.
 58. Ibid, hal. 46 – 47.
Bernhard Dahm, *op. cit*, hal. 54.
 59. Mr. A.K. Pringgodigdo, *op. cit*, hal. 17 – 18.
Bernhard Dahm, *op. cit*, hal. 52.
 60. Mr. A.K. Pringgodigdo, *op. cit*, hal. 47 – 48.
Ensiklopedi Umum, *op. cit*, hal. 1168 – 1169.

- Amelz, *op. cit.*, I, I, hal. 131 – 133.
 Ruth T. Mc. Vey, *op. cit.*, hal. 144 – 145.
61. Taufik Abdullah (ed), *Islam di Indonesia (sepintas lalu tentang beberapa segi)* Buku Obor, Jakarta, 1974, hal. 5, 30.
 62. Lothrop Stoddard, *Dunia Baru Islam (The New World of Islam)*, Panitia Penerbit Terjemahan, Jakarta, 1966, hal. 298.
 63. *Ibid*, hal. 304.
 64. P.A. Hoesin Djajadiningrat, Islam di Indonesia, dalam Kenneth W Morgan (ed) *Islam jalan Mutlak: Islam ditafsirkan oleh kaum Muslimin*, P.T. Pembangunan, Jakarta, 1963, hal. 137 – 138.
 Lihat juga: Deliar Noer, *op. cit.*, hal. 56 – 68.
 65. Deliar Noer, *op. cit.*, hal. 73 – 75.
 Lihat juga: Lothrop Stoddard, *op. cit.*, hal. 307 – 308.
 66. Taufik Abdullah "Tinjauan buku Deliar Noer: The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900 – 1942", majalah: *Masyarakat Indonesia*.
 67. Deliar Noer, *op. cit.*, hal. 75.
 68. Drs. Mardanas, "K. H. Achmad Dahlan", dalam: Drs. Mardanas, *et. al.* (ed), *Biografi Pahlawan Nasional* (Seri: Pahlawan Nasional Jilid I, Lembaga Sejarah dan Antropologi, Jakarta, 1972, hal. 66.
 69. Deliar Noer, *op. cit.*, hal. 76 – 77.
 Lothrop Stoddard, *op. cit.*, hal. 308
 Drs. Mardanas, *op. cit.*, hal. 67.
 70. *Dokumentasi Muhammadiyah Setengah Abad: 18 Nopember 1912 – 1957*, Jilid I, diterbitkan Muhammadiyah bagian Tabligh cabang Solo, 1957, hal. 55 – 59.
 71. Lothrop Stoddard, *op. cit.*, hal. 312 – 313.
 Deliar noer, *op. cit.*, hal. 78 – 79.
 72. Amir Hamzah Wiryosukarto, *Pembaharuan Pendidikan Dan Pengajaran Islam Yang Diselenggarakan oleh Pergerakan Muhammadiyah* dari kota Yogyakarta, Penyelenggaraan Publicasi, Pembaharuan Pendidikan/Pengajaran Islam, Yogyakarta, 1962, hal. 71 – 72.

73. Lothrop Stoddard, *op. cit*, hal. 313 – 314.
Solichin Salam, *Muhammadiyah dan Kebangunan Islam di Indonesia*, N.V. Mega Jakarta, 1965, hal. 55 – 69.
74. Deliar Noer, *op. cit*, hal. 83.
Mr. A.K. Pringgogidgo, *op. cit*, hal. 107 – 109.
75. Solichin, *op. cit*, hal. 61 – 63.
76. Drs. Abdurrachman Suryomihardjo, "Suatu Analisa Cita-cita dan tindak perbuatan nasional – revolusioner Suwardi Suryoningrat (1913 – 1922) majalah *Medan Ilmu Pengetahuan*, No. 2 Th. III, April 1962, hal. 489 – 491, 476.
77. *Ibid*, hal. 498, 500.
78. *Ibid*, Hal. 482, 500 – 501.
Abdurrachman Suryomihardjo, "Cita-cita Demokrasi dalam pendidikan Bangsa: Sebuah tinjauan Historis", majalah *Prisma*, No. 2, Th. VI, Pebruari 1977, hal. 79.
79. Kenji Tsuchiya "Gerakan Taman Siswa: Delapan tahun pertama dan latar belakang Jawa Taman Siswa", dalam: S. Ichimura dan Koentjaraningrat (eds), *Indonesia: Masalah dan peristiwa Bunga Rampai*, penerbit Gramedia, Jakarta 1976, hal. 37 – 38.
Abdurrachman Suryomihardjo, *op. cit*, *Prisma*, No. 2, Th. VI Pebruari 1977, hal. 80.
Majelis Luhur Taman Siswa, "Empat puluh tahun Perjuangan Taman Siswa", *Harian Nasional* (Yogyakarta), Senen, 2 Juli 1962, No. 144, Th. XVII.
Moch. Tauchid, "Taman Siswa Berjuang Terus", harian *Kedaulatan Rakyat*, (Yogyakarta), Rabu 27 Juni 1962, 220 Th. XVII.
80. Prof. Soegarda Poerbakawatja dan Drs. Sudarno (eds), *Ensiklopedi Pendidikan*, Gunung Agung, Jakarta, 1976, hal. 296.
Sutedja Bradjanagara, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Yogyakarta 1956, hal. 72 – 75. Ki Hajar Dewantara, *azas-azas dan dasar Taman Siswa*, Majelis Luhur Taman Siswa, Yogyakarta, 1961, hal.7 – 10.
81. Abdurrachman Suryomihardjo, *op. cit*, dalam *Prisma*, No. 2. Th. VI Pebruari 1977, hal. 80.
Abdurrachman Suryomihardjo, *Taman Siswa di dalam arsip-*

arsip Hindia Belanda, Lembaga Reserach Kebudayaan Nasional, Terbitan Tak Berkala, LIPI, Jakarta, Serie No. I/8. 1971, hal. 20.

82. Kenji Tsuchiya, *op. cit*, hal. 38.
83. *Karya Ki Hajar Dewantara, Bagian Pertama: PENDIDIKAN*, Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Yogyakarta, 1962, hal. 86.
84. Kenji Tsuchiya, *op. cit*, hal. 40 – 41.
85. *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda* (editor: Yusmar Basri) hal. 254 – 255.
86. *Karya Ki Hajar Dewantara, bagian Pertama: Pendidikan*, hal. 87.
87. *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid V: Zaman Kebangkitan Nasional Masa Akhir Hindia Belanda* (editor: Yusmar Basri), hal. 256 – 257.
88. Kepaniteraaan – Umum, *Majelis Luhur Taman Siswa, 38 Tahun: Taman Siswa: 3 Jilid 1922 – 1960*, Kepaniteraaan Umum – Majelis Luhur Taman Siswa, Yogyakarta, 1960, hal. 7 – 8.
89. *Karya Ki Hajar Dewantara, Bagian Pertama: Pendidikan*, hal. 63 – 64. Prof. Sugarda Poerbakawatja dan Drs. Sudarno, *Ensiklopedi Pendidikan*, hal. 296.
90. *Karya Ki Hajar Dewantara, Bagian Pertama: Pendidikan*, hal. 65.
91. *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda* (editor: Yusmar Basri), hal. 194 – 195.
Ensiklopedi Umum, op.cit, hal.601.
Mr. A.K. Pringgodigdo, *op. cit*, hal. 32.
92. Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta, *45 tahun Sum-pah Pemuda* Jakarta, 1974, hal. 31 – 32.
Mr. A.K. Pringgodigdo, *op. cit*, hal. 32 – 33.
93. Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta, *45 Tahun Sum-pah Pemuda* hal. 33.
Mr. A.K. Pringgodigdo, *op.cit*, hal. 33, 116.

94. Mr. A.K. Pringgodigdo, *op. cit*, hal. 117.
 45 Tahun Sumpah Pemuda, hal. 34.
 Ensiklopedi Umum, op. cit, hal. 601.
95. Mr. A.K. Pringgodigdo, *op. cit*, hal. 117 – 118.
 Ensiklopedi Umum, op. cit, hal. 601.
 45 Tahun Sumpah Pemuda, hal. 34.
96. *45 Tahun Sumpah Pemuda*, hal. 75, 77 – 78.
 Mr. A. K. Pringgodigdo, *op. cit*, hal. 118 – 119.
97. *Ensiklopedi Umum, op. cit*, hal. 601, 602.
98. *45 Tahun Sumpah Pemuda*, hal. 40, 41 – 309, 315
 Mr. A.K. Pringgodigdo, *op. cit*, hal. 120 – 121.
99. *45 Tahun Sumpah Pemuda*, hal. 43 – 44.
 Mr. A.K. Pringgodigdo, *op. cit*, hal. 119.
100. *45 Tahun Sumpah Pemuda*, hal. 41 – 43, 211.
 Lihat juga: Sugondo Djojopuspito, "Koreksi Atas Ceramah Sdr. Abu Hanifah", *Pusara*, No. 11 – 12, Nopember – Desember 1971, Th. 40, hal. 462 – 463.
 Mr. A.K. Pringgodigdo, *op.cit*, hal. 119 – 120.
101. *45 Tahun Sumpah Pemuda*, hal. 59 – 69, 209 – 214, 222 – 225.
 Sugondo Djoyopuspito "Koreksi atas ceramah Sdr. Abu Hanifah", *Pusara*, No. 11 – 12, Nopember 1971, Th. 40, hal. 460 – 461, 464.
 "Wawancara dengan Sugondo Djoyopuspito, orang yang Memimpin Kongres Pemuda th. 1928", *Pusara*, No. 10, Th. 40, Oktober 1971, hal. 367 – 401.
 Mr. A.K. Pringgodigdo, *op. cit*, hal. 121.
102. *45 Tahun Sumpah Pemuda*, hal. 77 – 84.
 Mr. A.K. Pringgodigdo, *op. cit*, hal. 198 – 202.
 J. M. Pluvier, *Ikhtisar Perkembangan Pergerakan Kebangsaan di Indonesia*, Th. 1930 – 1942, (terjemahan), hal. 171.
 Sj. H. Udaya, "Riwayat Pergerakan Pemuda Indonesia", dalam: *Almanak Perguruan – 1942*, diterbitkan oleh Perpustakaan Taman Siswa Yogyakarta, 1941, hal. 72 – 83.
103. Mr. A.K. Pringgodigdo, *op.cit*, hal. 30 – 32, 112 – 116, 118 – 195.

- Nyi Sri Mangunsarkoro, "Djalan Kemajuan Pergerakan Perempuan Indonesia", dalam: *Almanak Perguruan – 1942*, diterbitkan oleh Perpustakaan Taman Siswa, Yogyakarta, 1941, hal. 62 – 71.
- J.M. Pluvier, *op. cit*, hal. 167 – 169.
104. Bernhard Dahm, *op. cit*, hal. 46.
J.M. Pluvier, *op. cit*, hal. 30.
Prof. Dr. Slamet Mulyoni, *op. cit*, Jilid I, hal. 441.
105. Prof. Dr. Slamet Mulyono, *op. cit*, Jilid I, hal. 141 – 142.
Sejarah Nasional Indonesia, Jilid V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (editor: Yusmar Basri).
106. Drs. Abdurrachman Suryomihardjo, *op. cit, Dalam Medan Ilmu Pengetahuan*, No.2, Th. III, April 1962, hal. 493.
107. *Ibid*, hal. 506.
108. Bernhard Dahm, *op. cit*, hal. 45.
Deliar Noer, *op.cit*, hal. 190.
109. Bernhard Dahm, *op. cit*, hal. 47.
Sejarah Nasional Indonesia, Jilid V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (editor: Yusmar Basri), hal. 51.
Ensiklopedi Umum, op. cit, hal. 220
110. Bernhard Dahm, *op. cit*, hal. 48.
Prof. Dr. Slamet Mulyono, *op. cit*, Jilid, I, hal. 142.
111. Deliar Noer, *op. cit*, hal. 190.
112. Deliar Noer, *op. cit*, hal. 192 – 194.
Bernhard Dahm, *op. cit*, hal. 49 – 51.
Amelz, *op. cit*, Jilid I, hal. 109 – 110.
113. *Ensikolpedi Umum, op. cit*, hal. 1397.
J. M. Pluvier, *op. cit*, hal. 36.
Bernhard H.M. Vlekke, *Nusantara: A. History of Indonesia*, reved Les Editions A. Manteau S.A. Brucelles, 1961, hal. 363 – 364.
114. J.M. Pluvier, *op. cit*, hal. 36 – 37.
Prof. Dr. Slamet Mulyoni, *op. cit*, hal. 145.
Lihat juga: Dr. O. Damste dan B. Jilderda, *Nederland – In-*

- donesia Dalam Abad Kedua Puluh*, Noordhoff – Kolff N.V. Batavia, 1949, hal. 35.
- Sartono Kartodirdjo "Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia pada Abad 19 dan Abad 20", *Lembaran Sejarah* No. 8 Juni 1972, hal. 35 – 36.
- Sejarah Nasional Indonesia, Jilid V, Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda*, hal. 82 – 83.
115. Amelz, *op. cit*, Jilid I, hal. III.
Deliar Noer, *op. cit*, hal. 143.
116. J.M. Van der Kroef, *Indonesia in the Modern World*, Part I, Masa Baru, Bandung, 1954, hal. 12.
J.M. Pluvier, *op. cit*, hal. 47 – 48.
Sartono Kartodirdjo, "Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia pada Abad 19 dan Abad 20", *Lembaran Sejarah* No. 8, Juni 1971, Fak. Sastra, Univ. Gajah Mada, Yogyakarta, 1972, hal. 40 – 41.
117. Deliar Noer *op. cit*, hal. 222 – 232.
Lothrop Stoddard, *op. cit*, hal. 323 – 326.
Mr. A.K. Pringgodigdo, *op. cit*, hal. 111 – 112, 185 – 197.
118. Herry J. Benda, *The Crescent and the Rising Sun: Indonesia Islam Under The Japanese Occupation 1942 – 1945*. W. van. Hoeve Ltd. The Hague Bandung, 1958, hal. 51 – 52.
119. *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda* (editor: Yusmar Basri), hal. 211 – 213.
Mr. A.K. Pringgodigdo, *op. cit*, hal. 43 – 44.
Ir. S.J. Rutgers, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, cetakan ke dua, C.V. Hayam Wuruk, Surabaya, 1951, hal. 29 – 35
George Mc Turman Kahin, *Nationalisme and Revolution in Indonesia* Cornell University Press, Ithaca – New York, 1955, hal. 80 – 86.
120. *Ensiklopedi Umum*, *op. cit*, hal. 950.
Sejarah Nasional Indonesia, Jilid V.: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (editor: Yusmar Basri) hal. 214 – 216.
Mr. A.K. Pringgodigdo, *op. cit*, hal. 71 – 72.
121. *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid V: Zaman Kebangkitan*

Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda, hal. 218.

H.A. Notosutardjo, *Bung Karno Dihadapan Pengadilan Kolonial*, Penerbitan Bersama "Lembaga Penggali dan Penghimpun Sejarah Revolusi Indonesia Endang dan Pemuda, Jakarta, 1963, hal. XLII, XLIV 28 – 29.

122. H.A. Notosutardjo, *op. cit*, hal. XLIII.

Sejarah Nasional Indonesia, Jilid V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda, hal. 218.

123. J.M. Pluvier, *op. cit*, hal. 59.

H.A. Notosutardjo, *op. cit*, hal. XLVIII – XLIX.

Sejarah Nasional Indonesia, Jilid V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda, hal. 220 – 221.
Ensiklopedi Umum, hal. 951.

124. Ali Sastroamidjoyo, *Tonggak-tonggak di Perjalanananku*, PT. Kinta Jakarta, 1974. hal. 106 – 107.

125. J.M. Pluvier, *op. cit*, hal. 58 – 60.

H.A. Notosutardjo, *op. cit*, hal. 433, 443, dst, 456, dst.

126. Sukirno, *et al*, *op. cit*, hal. 48 – 49.

127. Mr. A.K. Pringgodigdo, *op. cit*, hal. 88 – 89.

J.M. Pluvier, *op. cit*, hal. 78 – 80.

Prof. Dr. Slamet Mulyono, *op. cit*, hal. 211 - 216

128. Mr. A.K. Pringgodigdo, *op. cit*, hal. 90 – 93.

Ali Sastroamidjojo, *op. cit*, hal. 92 – 96.

129. J.M. Pluvier, *op. cit*, hal. 80 – 83.

130. J.M. Pluvier, *op. cit*, hal. 52 – 56.

Delier Noer, *op. cit*, hal. 211 – 212.

DAFTAR BIBLIOGRAFI

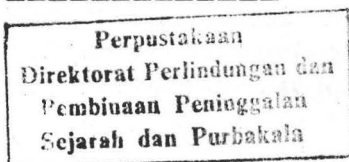
1. Abdullah, Taufik, *Islam di Indonesia (Sepintas lalu Tentang beberapa segi)*, Buku Obor, Jakarta, 1974.
2. —————, "Tinjauan Buku Deliar Noer, The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900 – 1942," dalam *Masyarakat Indonesia*, No. 1 Th. I, 1974.
3. *Almanak Pergoeroean - 1942*, diterbitkan oleh Perpustakaan Taman Siswa, Yogyakarta, 1941.
4. Amelz, H.O.S. *Tjokroaminoto, Hidup dan Perjuangannya, Jilid I*, Penerbit Bula Bintang, Jakarta, 1952.
5. Balfas, M. Dr. *Tjipo Mangunkusumo: Demokrat Sejati*, Penerbit Jambatan, Jakarta, 1957.
6. Benda, Harry, J. *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam Under the Japanese Occupation 1942 – 1945*, W. van Hoeve, Ltd. The Hagus – Bandung, 1958.
7. Bradjanegara, Soetedja *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Yogyakarta, 1956.
8. Budiman, Amen, "Geger Brondongan", *Harian Suara Merdeka*, Jum'at 29 Oktober 1976, Th.XXVII, No. 220.
9. —————, "Lahirnya Kotapraja Semarang, *Harian Suara Merdeka*, Jum'at 1 Oktober 1976, Th. XXVII, No. 196, hal. IV.
10. Burger, D.H. Prof. Dr. dan Prof. Dr. Mr. Pr Prayudi Atmosu-
dirdja *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Jilid II, Prad-
nya Paramita, Jakarta, 1970.
11. Dahm, Bernhard, *History of Indonesia in the Twentieth Century* Frederick A. Praeger, London, 1971.
12. Damste, Dr. O, dan b. Jilderda, *Nederland Indonesia Dalam Abad kedua puluh*, Noordhoff – Kolff, N.V. Batavia, 1949.
13. Darmosugito, Pitoyo, B.Sc, "Siapa Perintisnya Perintis? Sutomo atau Wahidin?" *Pusara*, No. 8, Th. 40, Agustus, 1070.
14. —————, *Sekali lagi: Siapa Perintisnya Perintis? Sutomo atau Wahidin?*, *Pusara*, No. 9. Th. 40, September 1970.

15. Dewantara, Ki Hajar, *Azas-azas, dan Dasar Dasar Taman Siswa*, Majelis Luhur Taman Siswa, Yogyakarta, 1961
16. Djojopuspito, Sugondo, "Koreksi Atas Ceramah Sdr. Abu Hanifah *Pusara*, No. 11 – 12, Th. 40, Nopember – Desember 1971.
17. Dewantara, Ki Hajar, *Karya Ki Hadjar Dewantara, Bagian Pertama, Pendidikan*, Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Yogyakarta, 1962.
18. *Dokumentasi Muhammadiyah Setengah Abad: 18 Nopember 1912 – 1957* Jilid I, Diterbitkan oleh Muhammadiyah Bagian Tabligh Cabang Sala, 1957.
19. Furnivall, J.S. *Netherlands India: A Study of Plural Economy* Cambridge University Press, 1939 (Reprinted 1967).
20. Hall, D.G.E. *A History of South East Asia*, Nac Millan & Co Ltd, London, 1060.
21. Inchimura, S. dan Koentjaraningrat (eds), *Indonesia: Masalah dan Peristiwa Bunga Rampai*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1976.
22. Hakim, George Mc. Turman, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca – New York, 1955.
23. Kartodirdjo, Sartono, Prof. Dr. "Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia pada Abad 19 dan Abad 20," *Lembaran Sejarah* No. 8, Juni 1972, Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1972.
24. ———, *Protest Movements in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries*, Oxford University Press/P.T. Indira, Singapore - Jakarta, 1973.
25. ———, (eds), *Sarekat Islam Lokal*, Arsip Nasional RI Penerbitan Sumber-sumber Sejarah, No. 7 Jakarta, 1975.
26. ———, Santono Kartodirdjo, Marwati Djoened Pusponegoro, dan Noegroho Noto Susanto (eds), *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid V* Jaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (editor: Yusman Basri), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 1975.

27. -----, (eds), *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid IV, "Indonesia dalam Abad 18 dan 19"* (editor): F.A. Soetjipto Departemen P. dan K., Jakarta, 1975.
28. Kepaniteraan Umum Majelis Luhur Taman Siswa, *38 Tahun Taman Siswa 3 Juli 1922 – 1960*, Kepaniteraan Umum Majelis Luhur Taman Siswa, Yogyakarta, 1960.
29. Majelis Luhur Taman Siswa, "Empat Puluh tahun Perjuangan Taman Siswa", dalam harian *Nasional* (Yogyakarta), Senin, 2 Juli 1962, No. 144, Tj. XVII.
30. Mardanas, Drs. et. al. (eds), *Biografi Pahlawan Nasional*, (seri Pahlawan Nasional), Jilid I, Lembaga Sejarah dan Antropologi, Jakarta, 1972.
31. Margono Djoyohadikoesoemo, *Kenang-kenangan dari tiga Zaman*, P.T. Indera, Jakarta, 1969.
32. Mc. Vey, Ruth T. *The Rise of Indonesian Communism*, Cornel University Press, Ithaca – New York, 1965.
33. Marono, Kenneth W, *Islam Jalan Mutlak: Islam Ditafsirkan oleh Kaum Muslimin*, P.T. Pembangunan, Jakarta, 1963.
34. Muslimin Amrah, Mr. *Ikhtisar Perkembangan Otonomi Daerah 1903 – 1958* Penbit Jambatan, Jakarta, 1060.
35. Noer, Deliar, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900 – 1942* Oxford University Press, Singapore, 1973.
36. Notoesoetardja, H.A. *Bung Karno Dihadapan Pengadilan Kolonial*, Penerbitan Bersama Lembaga Pengadilan dan Penghimpun Sejarah Revolusi Indonesia, Endang dan Pemuda, Jakarta, 1963.
37. *Pendidikan di Indonesia 1900 – 1974*, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1976.
38. Pluvier, J.M. *Ikhtisar Perkembangan Pergerakan Kebangsaan di Indonesia Th. 1930 – 1942* (Terjemahan).
39. Pringgodigdo. Mr. A.K. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Cetakan III, Pustaka Rakyat N.V. Jakarta, 1950.
40. Pringgodigdo, A.G. Prof. Mr. dan Hassan Shadily, M.A. (eds) *Ensiklopedi Umum*, Penerbit Kanisisus, Yogyakarta, 1973.

41. Rutgers, Ir. S.Y. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, cetakan kedua, C.V. Hayam Wuruk, Surabaya, 1951.
42. Sandra, *Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia*, Penerbit, P.T. Pustaka Rakyat, Jakarta, 1961.
43. Salam, Solichin, *Muhammadiyah dan Kebangunan Islam*, di Indonesia N.V. Mega, Jakarta, 1965.
44. Sastroamidjaja, Ali, *Tonggak-tonggak di Perjalananku*, P.T. Kinta Jakarta, 1974.
45. Seogarda Purbakawatja, Prof. dan Drs. Sudarna (eds), *Ensiklopedi Pendidikan*, Gunung Agung, Jakarta, 1976.
46. Soeroto, "Stovia dan Budi Utomo", dalam *Harian Merdeka*, Rabu Mei 1973.
47. Sitorus, L.M. *Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Pustaka Rakyat N.V. Jakarta, 1951.
48. Sosrokusumo, R.A. *Desentralisasi dan Hak Otonomi*, Perpustakaan Nasional "Adji", Surabaya, 1951.
49. Slamet Mulyono, Prof. Dr. *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia*, Jilid I, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1968.
50. Stoddard, Lothrop, *Dunia Baru Islam (The New World of Islam)* Panitia Penerbit Terjemahan, Jakarta, 1966.
51. Sukirno, et al, *Semarang*, Jawatan Penerangan Kota Besar Semarang 1956.
52. Suratman Ny. Darsiti, *Politik Pendidikan Belanda dan Masyarakat di Jawa Pada Akhir Abad 19*, Seminar Sejarah Nasional II, 26 – 29 Agustus 1970, di Yogyakarta.
53. Subandrio, Hurustiati, *Kartini Wanita Indoensia*, Penerbit Jambatan Jakarta, 1965.
54. Suryomihardjo, Abdurrachman "Tinjauan buku Akira Nagazumi" *The Dawn of Indonesian Nationalism: The Early Years of the Budi Utomo 1908 – 1918*", dalam *Masyarakat Indonesia*, No. 2 Th. I, 1974.
55. —————, "Suatu Analisa Cita-cita dan tindak Perbuatan Nasional Revolusioner, Suwardi Suryaningrat 1913 – 1922", dalam *Medan Ilmu Pengetahuan*, No.2. Th. III, April 1962.

56. -----, "Cita-cita Demokrasi dalam Pendidikan Bangsa: sebuah Tinjauan Historis", dalam *Prisma*, No. 2 Th. VI, Pebruari 1977.
57. -----, *Taman Siswa di dalam Arsip arsip Hindia Belanda*, Lembaga Research Kebudayaan Nasional, Terbitan Tak Berkala, LIPI Jakarta, Serie No. I/8, 1971.
58. Tauchid, Moch, "Taman Siswa Berjuang Terus", dalam harian *Kedaulatan Rakyat* (Yogyakarta), Rabu 27 Juni 1962, No. 220 Th. XVII.
59. Van der Kroef, J.M. *Indonesia in the Modern World*, Part I, Masa Baru, Bandung, 1954.
60. Van Niel, Rebert, *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*. W. van Hoeve, Ltd. Bandung, 1960.
61. Vleke, Bernard, H.M. *Nusantara: A History of Indonesia*, Les Edition A Manteau S.A. Bruxelles, 1961.
62. Wawancara dengan Sugondo Djojopuspito, orang yang Memimpin Konggres Pemuda Th. 1928, *Pusara*, No. 10. Th. 40, Oktober 1971.
63. Wertheim, W.F. (eds). *The Indonesia Town: Studies in Urban Sociology*. Les Editions A Manteau S.A. W van Hoeve Ltd. Bruxelles-The Hague, 1958.
64. Wiryosukarto, Amir Hamzah, *Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam yang diselenggarakan oleh Pergerakan Muhammadiyah dari kota Yogyakarta*, Penyelenggara Publikasi Pembaharuan Pendidikan/Pengajaran Islam, Yogyakarta, 1962.
65. Yayasan Idayu, *Kilasan Petikan Sejarah Budi Utomo*, Yayasan Idayu Jakarta, 1975.
66. Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta, *45 Tahun Sumpah Pemuda Jakarta*, 1974.





PN BALAI PUSTAKA — JAKARTA